WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 111);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

22. Kinerja ...

22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
24. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

BAB II
RPJMD TAHUN 2025–2029

Pasal 2

(1) Wali Kota menetapkan RPJMD Tahun 2025–2029.
(2) RPJMD Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
(3) RPJMD Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
    a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
    b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) RPJMD Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat gambaran umum Daerah;
    c. bab III memuat Visi, Misi, dan Program prioritas pembangunan Daerah;
    d. bab IV memuat Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    e. Bab V memuat penutup.
(2) RPJMD Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029.

(2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
    a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJMD Tahun 2025–2029;

b. konsistensi ...

b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJMN, RPJPD, dan RTRW Daerah;
c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
d. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

(3) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

(4) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2025–2029

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD Tahun 2025–2029 dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025–2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya :
a. bencana alam;
b. goncangan politik;
c. krisis ekonomi;
d. konflik sosial budaya;
e. gangguan keamanan;
f. pemekaran Daerah; atau
g. perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 8, 31) / (TAHUN 2025)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari proses perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap kondisi dan potensi Kota Serang.

RPJMD ini disusun sebagai pedoman strategis untuk mencapai visi "Menjadikan Kota Serang Madani yang Maju Kotanya, Bahagia dan Sejahtera Warganya." Untuk mewujudkan visi tersebut, Kota Serang dituntut untuk terus berinovasi dan beradaptasi guna menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam menghadapi dinamika global dan tantangan lokal, dokumen ini tidak hanya memuat arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan, tetapi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai pelaksanaan tahap pertama RPJPD Kota Serang, RPJMD ini menekankan pada pengembangan ekonomi yang berbasis inovasi dan kreativitas, sambil tetap menjaga prinsip keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Visi ini tidak hanya mencerminkan harapan kita untuk masa depan, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan Kota Serang yang berdaya saing, inklusif, dan sejahtera.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Dukungan dan partisipasi dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat Kota Serang sangatlah berharga dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan relevan. Kami juga berharap agar RPJMD ini dapat menjadi panduan bagi semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Semoga dokumen RPJMD ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan Kota Serang yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing global, sesuai dengan visi kita bersama. Dengan semangat kerja sama dan sinergi,

mari kita wujudkan Kota Serang Madani yang Maju Kotanya, Bahagia dan Sejahtera Warganya.

Serang, 20 Agustus 2025

Wali Kota Serang

Budi Rustandi

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR		**i**
	DAFTAR ISI		**iii**
	DAFTAR GAMBAR		**iv**
	DAFTAR TABEL		**v**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I**	**1**
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum	I	4
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I	7
	1.4 Maksud dan Tujuan	I	11
	1.5 Sistematika Penulisan	I	12
BAB II	**GAMBARAN UMUM DAERAH**	**II**	**1**
	2.1 Gambaran Umum Daerah	II	1
	2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II	1
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	32
	2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II	57
	2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II	75
	2.1.5 Standar Pelayanan Minimal	II	123
	2.1.6 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda	II	128
	2.2 Gambaran Keuangan Daerah	II	129
	2.2.1 Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024	II	129
	2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020-2024	II	146
	2.2.3 Kerangka Keuangan Tahun 2026-2030	II	151
	2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II	161
	2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II	161
BAB III	**VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	**III**	**1**
	3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III	1
	3.1.1 Visi dan Misi	III	1
	3.1.2 Tujuan dan Sasaran	III	5
	3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III	12
	3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan	III	13
	3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah	III	81
BAB IV	**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**	**IV**	**1**
	4.1 Program Perangkat Daerah	IV	1
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV	58
	4.2.1 Penetapan Indikator Kinerja	IV	58
BAB V	**PENUTUP**	**V**	**1**
	5.1 Pedoman Transisi	V	1
	5.2 Kaidah Pelaksanaan	V	2

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
Gambar II.1	Peta Batas Administrasi Kota Serang	II-2
Gambar II.2	Peta Topografi Kota Serang	II-4
Gambar II.3	Prevalence of Undernourishment	II-18
Gambar II.4	Capaian Rumah Tangga Bersanitasi Kota Serang Tahun 2020-2025	II-21
Gambar II.5	Indeks Resiko Bencana Kota Serang Tahun 2020-2024	II-25
Gambar II.6	Piramida Penduduk Kota Serang Tahun 2024	II-30
Gambar II.7	Grafik Perkembangan LPE Kota Serang Tahun 2020–2024	II-33
Gambar II.8	Grafik PDRB Per Kapita Kota Serang Tahun 2020–2024 *(Juta Rupiah)*	II-36
Gambar II.9	Grafik Persentase Penduduk Miskin Kota Serang Tahun 2020-2024	II-37
Gambar II.10	Grafik Perkembangan Penduduk Miskin Kota Serang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)	II-38
Gambar II.11	Grafik Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan Kota Serang Tahun 2020–2024 (Dalam Ribu Rupiah)	II-38
Gambar II.12	Indeks Gini Kota Serang Tahun 2020-2024	II-39
Gambar II.13	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Serang Tahun 2020-2024	II-41
Gambar II.14	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang Tahun 2020–2024	II-42
Gambar II.15	Gambaran Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Serang Tahun 2020 - 2025	II-72
Gambar II.16	Capaian Rumah Layak Huni Kota Serang Tahun 2020-2024	II-73
Gambar II.17	Garfik Capaian MCP Tahun 2020-2024	II-78
Gambar II.18	Rata-rata Proporsi Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2020-2024	II-134
Gambar II.19	Rata-rata Komponen Proporsi Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2020-2024	II-137
Gambar II.20	Proporsi Aset Kota Serang Tahun 2020-2024	II-143
Gambar II.21	Proporsi Kewajiban Kota Serang Tahun 2020-2024	II-144
Gambar III.1	Penyelarasan Visi RPJMN, Visi RPJMD Provinsi Banten, Dan Visi RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2045	III-2
Gambar III.2	Histori Perubahan Misi RPJMD	III-3
Gambar III.3	Keterkaitan Misi Kota Serang dengan Asta Cita dan RPJMD Provinsi Banten	III-4

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Karakteristik Lokasi dan Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Kota Serang Tahun 2024	II-1
Tabel II.2	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Serang Tahun 2024	II-2
Tabel II.3	Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari Kota Serang Tahun 2024	II-5
Tabel II.4	Suhu Udara Kota Serang Tahun 2024	II-6
Tabel II.5	Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kota Serang Tahun 2024	II-6
Tabel II.6	Data Pemanfaatan Luas Hutan, Perairan Dan Pertanian Di Kota Serang Tahun 2020 - 2024	II-7
Tabel II.7	Data Potensi Pariwisata Di Kota Serang Tahun 2020 – 2024	II-8
Tabel II.8	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2020 -2024	II-11
Tabel II.9	Daya Listrik Terpasang Kota Serang tahun 2020-2024	II-12
Tabel II.10	Daya Terpasang Listrik (KWh) Menurut Golongan Tarif di Kota Serang Tahun 2024	II-12
Tabel II.11	Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Serang Tahun 2020-2024	II-13
Tabel II.12	Perkembangan Indikator Pangan Kota Serang Tahun 2020–2024	II-15
Tabel II.13	Capaian Pembangunan Jalan Usaha Tani Kota Serang Tahun 2022 – 2024	II-19
Tabel II.14	Perkembangan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang	II-20
Tabel II.15	Capaian pengelolaan sampah di wilayah Kota Serang Tahun 2020-2024	II-23
Tabel II.16	Daftar Pemetaan Lokasi Rawan Bencana Kota Serang	II-25
Tabel II.17	Kelas Risiko Bencana Kota Serang Per Kecamatan	II-26
Tabel II.18	Nilai Indeks Ketahanan daerah Kota Serang Tahun 2020-2024	II-27
Tabel II.19	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	II-27
Tabel II.20	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Serang Tahun 2020 –2024	II-28
Tabel II.21	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2020–2024	II-29
Tabel II.22	Distribusi Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2020–2024	II-29
Tabel II.23	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Serang Tahun 2024 (Jiwa)	II-29
Tabel II.24	Jumlah Penduduk Kota Serang Menurut Pendidikan Tahun 2020-2024	II-31
Tabel II.25	Jumlah Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2020–2024	II-31

Tabel II.26	Perkembangan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II-33
Tabel II.27	Perkembangan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II-35
Tabel II.28	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang Tahun 2020 –2024	II-42
Tabel II.29	Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Tahun 2020-2024	II-43
Tabel II.30	Capaian Kinerja Pendidikan Kota Serang Tahun 2020–2024..	II-45
Tabel II.31	Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) Kota Serang Tahun 2024 – 2025	II-46
Tabel II.32	Perkembangan Indikator Sosial Kota Serang Tahun 2024 – 2025	II-48
Tabel II.33	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kota Serang 2020-2024	II-50
Tabel II.34	Perkembangan Indikator Kinerja Kesenian Tahun 2020-2024	II-51
Tabel II.35	Pokok Pikiran Kebuadayaan Daerah	II-52
Tabel II.36	Perkembangan Indikator Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020–2024	II-54
Tabel II.37	Perkembangan Layanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020–2024	II-56
Tabel II.38	Tingkat Ketergantungan Di Kota Serang Tahun 2020-2024	II-58
Tabel II.39	Kualitas Tenaga Kerja Di Kota Serang Tahun 2020-2024	II-59
Tabel II.40	Produktivitas Ekonomi Kota Serang Tahun 2020-2024	II-60
	Angka Konsumsi RT Per Kapita Kota Serang Tahun 2023–2024	II-61
Tabel II.41	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Serang Tahun 2024	II-61
Tabel II.42	Capaian Indeks Inovasi Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan PDRB ADHB Tahun 2020-2024	II-62
Tabel II.43	Kelautan dan Perikanan Kota Serang tahun 2020-2024	II-65
Tabel II.44	Distribusi PDRB Atas Dasar Lapangan Usaha Kota Serang Tahun 2020-2024	II-66
Tabel II.45	Transformasi Digital Kota Serang 2020-2024	II-68
Tabel II.46	Capaian Indikator Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Tahun 2020-2024	II-69
Tabel II.47	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Serang Tahun 2020-2024	II-70
Tabel II.48	Layanan Infrastruktur Kota Serang Tahun 2020-2024	II-71
Tabel II.49	Komponen Pembentukan IKLI Tahun 2020-2024	II-71
Tabel II.50	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dan Tingkat Inflasi Kota Serang Tahun 2020-2024	II-74
Tabel II.51	IRH, IRB, Indeks Pelayanan Public, SPBE, MCP KPK dan Indeks Integritas Nasional Kota Serang Tahun 2020-2024	II-76

Tabel II.52	Angka Kriminalitas di Kota Serang Tahun 2020–2024	II-78
Tabel II.53	Hasil Penilaian Peduli HAM dan Penegakan Perda Kota Serang Tahun 2020-2024	II-79
Tabel II.54	Perkembangan Indeks Daya Saing Kota Serang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-80
Tabel II.55	Perkembangan Indikator Layanan Pendidikan Tahun 2020-2024	II-82
Tabel II.56	Jumlah Sarana Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2024	II-83
Tabel II.57	Perkembangan Indikator Layanan Kesehatan Tahun 2020-2024	II-84
Tabel II.58	Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis Kota Serang Tahun 2024	II-87
Tabel II.59	Perkembangan Indikator Layanan Pekerjaan Umum Tahun 2020–2024	II-88
Tabel II.60	Perkembangan Indikator Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024	II-91
Tabel II.61	Capaian Perumahan Yang Telah Meyerahkan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Kota Serang Tahun 2020-2024	II-93
Tabel II.62	Perkembangan Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Serang Tahun 2020–2024	II-94
Tabel II.63	Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kota Serang Tahun 2020–2024	II-96
Tabel II.64	Perkembangan Capaian Indikator Pertanahan Kota Serang Tahun 2020-2024	II-98
Tabel II.65	Perkembangan Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2020–2024	II-100
Tabel II.66	Perkembangan Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang Tahun 2020-2024	II-101
Tabel II.67	Perkembangan Layanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Tahun 2020-2024	II-103
Tabel II.68	Perkembangan Layanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024	II-105
Tabel II.69	Perkembangan Layanan Perhubungan Tahun 2020-2024	II-107
Tabel II.70	Perkembangan Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2020-2024	II-108
Tabel II.71	Perkembangan Layanan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024	II-110
Tabel II.72	Jumlah Investor di Kota Serang Tahun 2020-2024	II-113
Tabel II.73	Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kota Serang Tahun 2020-2024	II-113
Tabel II.74	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Serang Tahun 2020-2024	II-114
Tabel II.75	Perkembangan Indikator Layanan Statistik Tahun 2020-2024	II-115
Tabel II.76	Perkembangan Indikator Kebudayaan di Kota Serang	

	Tahun 2020-2024	II-116
Tabel II.77	Perkembangan Urusan Perpustakaan Kota Serang Tahun 2020-2024	II-118
Tabel II.78	Perkembangan Indikator Layanan Kearsipan Tahun 2020-2024	II-120
Tabel II.79	Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2020-2024	II-121
Tabel II.80	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Serang Tahun 2020-2024	II-123
Tabel II.81	Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah Kota Serang	II-128
Tabel II.82	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2020-2024	II-131
Tabel II.83	Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2020-2024	II-133
Tabel II.84	Realisasi dan Capaian Belanja Daerah Tahun 2020-2024	II-136
Tabel II.85	Neraca Daerah Kota Serang Tahun 2020-2024	II-141
Tabel II.86	Analisis Rasio Keuangan Daerah Kota Serang	II-144
Tabel II.87	Proporsi rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan terhadap Anggaran Pendapatan Kota Serang Tahun 2020-2024	II-147
Tabel II.88	Proporsi rata-rata Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Serang Tahun 2020-2024	II-148
Tabel II.89	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Serang Tahun 2025-2030	II-152
Tabel II.90	Nilai Indeks Pembangunan Pemuda Daerah Kota Serang Tahun 2024	II-165
Tabel II.91	Simpulan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024	II-170
Tabel III.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Serang Tahun 2025-2030	III-8
Tabel III.2	Penahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029	III-22
Tabel III.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	III-25
Tabel III.4	Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Antara Provinsi Banten dan Kota Serang Tahun 2025-2029	III-31
Tabel III.5	Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kota Serang Tahun 2025-2029	III-78
Tabel III.6	Program Prioritas RPJMD Kota Serang Tahun 2024-2029	III-82
Tabel III.7	Program Prioritas pada Program Unggulan Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2025-2029	III-126
Tabel III.8	Program Prioritas pada Program Pembangunan Tematik Kota Serang Tahun 2025-2029	III-142
Tabel III.9	Program Prioritas pada Program Strategis Kota Serang Tahun 2025-2029	III-166

Tabel IV.1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kota Serang	IV-2
Tabel IV.2	Indikator Kinerja Utama Kota Serang Tahun 2025-2030	IV-59
Tabel IV.3	Indikator Kinerja Daerah Kota Serang Tahun 2025-2030	IV-62
Tabel IV.4	Indikator Kinerja Kunci Kota Serang Tahun 2025-2030	IV-67
Tabel IV.5	Indikator Kinerja Kunci Kota Serang Tahun 2025-2030	IV-79

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Serang, sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten, menawarkan perpaduan harmonis antara tradisi lokal dan perkembangan modern. Pengaruh budaya Sunda Banten dan Jawa Serang masih terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mencerminkan kekayaan budaya yang dimiliki kota ini. Posisi strategisnya sebagai penghubung utama antara Jakarta dan Sumatera menjadikan Serang pusat penting dalam kegiatan ekonomi, perdagangan, dan transportasi. Selain itu, perkembangan pesat wilayah perkotaan disertai pembaruan fasilitas umum menunjukkan upaya untuk mendukung pertumbuhan populasi yang terus meningkat.

Dalam bidang pariwisata, Kota Serang memiliki sejumlah destinasi menarik seperti Keraton Kaibon, Masjid Agung Banten, dan Pantai Karangantu, serta Pulau Burung yang tidak hanya menawarkan keindahan tetapi juga nilai sejarah yang kaya. Di sektor industri, keberadaan kawasan industri modern menjadi daya tarik bagi investor dari berbagai bidang. Selain itu, kualitas pendidikan di Kota Serang terus berkembang melalui kehadiran institusi pendidikan yang mampu mencetak generasi muda yang kompetitif, memberikan kontribusi besar bagi masa depan kota ini.

Keunikan Kota Serang terletak pada warisan budaya yang masih kuat, didukung oleh keindahan alam yang khas dan seni tradisional seperti tarian daerah yang mencerminkan identitas masyarakat Banten. Kompleks Kesultanan Banten menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin memahami sejarah peradaban Islam di Nusantara. Kuliner khas seperti sate bandeng dan rabeg serta keramahan penduduk semakin memperkuat daya tarik Kota Serang sebagai destinasi wisata yang unik dan memikat.

Berdasarkan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan Tahap Pertama RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045 yang telah selaras dengan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 serta bertujuan untuk memastikan setiap perangkat daerah berkontribusi optimal terhadap prioritas pembangunan, mendukung sinergi antar sektor, serta menjaga keberlanjutan pembangunan Kota Serang dalam menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Serang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 secara simultan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 sebagai dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam proses penyusunan tersebut, dilakukan peninjauan terhadap target-target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Serang Tahun 2024-2026 yang masih relevan dan mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang telah dilantik pada 20 Februari 2025 dengan masa jabatan lima tahun ke depan. Target-target tersebut kemudian dikonversi atau disesuaikan ke dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan.

RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memegang peranan vital dalam mengarahkan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dokumen ini menjadi panduan utama dalam “Menjadikan Kota Serang Madani yang Maju Kotanya, Bahagia dan Sejahtera Warganya" melalui berbagai program dan kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Nilai strategisnya terletak pada integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), memastikan setiap aspek pembangunan memperhatikan keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial masyarakat.

Dokumen ini secara cermat merespon dinamika pembangunan nasional dan regional dengan menyelaraskan diri dengan RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Banten, serta berbagai kebijakan strategis nasional dan provinsi. RPJMD ini juga dirancang untuk meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunannya yang partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat umum, mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel. Sebagai fondasi perencanaan jangka menengah, RPJMD ini menjadi dasar penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan penganggaran APBD, sekaligus wujud nyata kontrak sosial antara pemerintah dengan warga Kota Serang untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam upaya pembangunan berkelanjutan, perencanaan yang matang menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan mulai dari jangka panjang, jangka menengah hingga tahunan yang saling terintegrasi. RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 dirancang sebagai pedoman utama untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan visi pembangunan daerah.

Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka dalam penyusunan RPJMD dilakukan beberapa pendekatan yaitu:

1) *Teknokratik,* dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2) *Partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
3) *Politis,* dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD dengan memperhatikan masukan dan kesepakatan dengan DPRD; dan
4) *Atas-bawah dan bawah-atas*, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan *bottom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan dari para pemangku kepentingan dan *stakeholder*.
5) *Holistik-tematik*, Penyusunan dokumen RPJMD Kota Serang mengadopsi pendekatan holistik-tematik sebagai upaya memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan saling berkesinambungan antar sektor.
6) *Integratif,* Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang menerapkan pendekatan integratif yang menghubungkan seluruh aspek perencanaan pembangunan secara menyeluruh, lintas sektor, dan lintas pelaku pembangunan.

7) *Spasial,* Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Serang pendekatan spasial memiliki peranan penting untuk memastikan arah kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan nyata di setiap wilayah kecamatan, serta memperhatikan karakteristik dan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Pendekatan spasial memungkinkan perencanaan pembangunan dilakukan secara lebih merata, berbasis kawasan, dan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 memiliki beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan Rancangan Akhir dan (6) Penetapan. Dengan ini, dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman utama bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dengan rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD menjadi landasan bagi perangkat daerah untuk merumuskan program, dan target kinerja yang selaras dengan visi pembangunan daerah kedalam dokumen Renstra PD. Dengan menjadikan RPJMD sebagai acuan, setiap perangkat daerah di Kota Serang diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam pencapaian prioritas pembangunan, memastikan sinergi antarsektor, stakeholder akan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam rangka menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kota Serang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

g. Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

l. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

m. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

s. Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Di Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

t. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);

u. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pambangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);

v. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 8); dan

w. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 6).

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJMD Kota Serang, sebagai rencana strategis lima tahunan, memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yaitu RPJMD Kota Serang menjabarkan dan memedomani RPJPD Kota Serang sesuai periodisasinya, selaras dengan RPJMD Provinsi Banten, mengacu pada RTRW Kota Serang sebagai landasan spasial, mengintegrasikan rekomendasi KLHS RPJMD. Kemudian Penyusunan RPJMD harus memedomani/melanjutkan dokumen Rantek RPJMD yang telah disusun, memanfaatkan dan memedomani arahan Rencana Induk dan Peta Jalan Iptek Daerah (RIPJPID) dalam pengembangan IPTEK, dan mempertimbangkan Evaluasi Capaian Pembangunan sebelumnya, mensinergikan dokumen perencanaan sektoral lainnya, serta mengadopsi Manajemen Risiko Pembangunan untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan kota secara efektif dan efisien. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan dan dijabarkan sebagai berikut:

Gambar I.1.
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

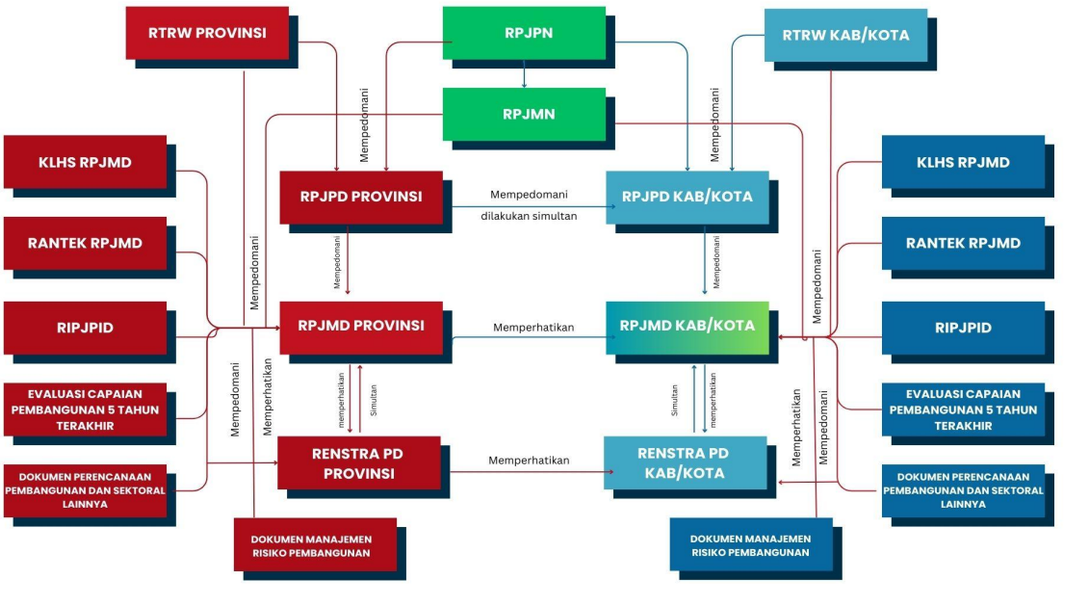

Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Berdasarkan penjelasan dan gambar diatas, maka berikut penjabaran hubungan antar dokumen perencanaan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 terletak pada sinergi antara tujuan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional. RPJMD sebagai dokumen strategis lima tahunan di tingkat daerah harus sejalan dengan arah kebijakan RPJMN, khususnya dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional memiliki agenda prioritas yang terangkum dalam Asta Cita, yang mencakup penguatan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan. RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap agenda nasional. Sinergi ini memastikan bahwa program pembangunan daerah tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga mendukung visi nasional dalam menciptakan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

2. Hubungan RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 terletak pada keterpaduan dan sinergi kebijakan pembangunan di tingkat Kota dengan arah pembangunan Provinsi. RPJMD Kota Serang sebagai panduan pembangunan daerah lima tahunan harus mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten. Hal ini melibatkan penyesuaian program prioritas di Kota Serang agar sesuai dengan kerangka pembangunan yang dirumuskan di tingkat provinsi. RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 juga perlu memastikan keterpaduan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan utama dalam pembangunan Banten. Dengan menyelaraskan kebijakan, antara Kota Serang dan Provinsi Banten diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang lebih harmonis, efektif, dan inklusif, sehingga dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat di tingkat lokal maupun regional.

3. Hubungan RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2025-2045 bersifat strategis dan berkesinambungan. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, merupakan tahap implementasi dari arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD, terutama pada periode tahap I dalam arah kebijakan RPJPD. Dengan memastikan keselarasan ini, RPJMD dapat berfungsi sebagai langkah konkret yang strategis dalam membawa Kota Serang menuju visi besar yang telah ditetapkan dalam RPJPD.

4. Hubungan RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kota Serang

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah pada harus memiliki keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan tata ruang wilayah. RTRW sebagai dokumen perencanaan tata ruang jangka panjang menjadi acuan utama dalam mengatur pemanfaatan ruang di Kota Serang agar pembangunan yang dirancang dalam RPJMD dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan. RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 harus merujuk pada arahan RTRW dalam menetapkan lokasi dan prioritas pembangunan, baik untuk pengembangan sektor unggulan maupun untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Selain itu, RTRW juga berfungsi untuk mengintegrasikan aspek tata ruang dengan program pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD, seperti pengembangan kawasan, desa, dan infrastruktur transportasi. Dengan menyelaraskan RPJMD dengan RTRW, Kota Serang dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan tidak hanya berjalan secara terencana tetapi juga sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

5. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah Kota Serang.

6. Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 harus mengimplementasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam penyusunan RPJMD Kota Serang harus mampu mengintegrasikan rekomendasi KLHS-RPJMD. Sehingga penyusunan RPJMD harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian rekomendasi dari KLHS dapat diakomodir dalam program pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeaadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

7. Hubungan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Iptek Daerah (RIPJPID)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Iptek Daerah (RIPJPID). RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh untuk periode lima tahun, menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan di berbagai sektor, termasuk potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai salah satu pilar kemajuan daerah.

RIPJPID adalah sebuah dokumen teknokratis, yang dihasilkan dari sebuah proses objektif melalui pendekatan ilmiah. RIPJPID memberikan masukan terhadap isi RPJMD, terutama terkait dengan isu strategis pembangunan daerah lima tahun ke depan, di antaranya tentang permasalahan-permasalahan utama daerah serta potensi produk-produk unggulan daerah. RIPJPID juga mengidentifikasi potensi dan tantangan daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan inovasi, serta menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang strategis untuk mendorong inovasi, adopsi teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk di bidang IPTEK melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah. Dengan demikian, RIPJPID merupakan salah satu dokumen acuan dalam penyusunan operasional yang lebih detail dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD berbasis IPTEK.

8. Hubungan RPJMD dengan Dokumen perencanaan sektoral

RPJMD harus mampu menindaklanjuti dan mengakamodir dokumen rencana sectoral pembangunan. Sehingga rekomendasi/masukan kebijakan pada berbagai bidang urusan yang memiliki dokumen perencanaan harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Dengan ini diharapkan kebijakan/perencanaan sektoral dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan RPJMD.

9. Dokumen Evaluasi Capaian Pembangunan sebelumnya

Hasil Evaluasi Capaian Pembangunan Sebelumnya menjadi masukan penting dalam penyusunan RPJMD. Evaluasi ini mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan pembangunan pada periode sebelumnya, sehingga RPJMD dapat dirumuskan dengan lebih realistis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

10. Dokumen Manajemen Risiko Pembangunan

Dokumen manajemen risiko pembangunan membantu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan RPJMD dan merumuskan langkah-langkah mitigasinya. Integrasi manajemen risiko ke dalam RPJMD meningkatkan kepastian tercapainya target pembangunan.

1.4 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2025-2029 bertujuan sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan. RPJMD ini dirancang untuk memastikan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Kota Serang, sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal serta memperhatikan sinergi dengan kebijakan nasional dan provinsi.

b. Tujuan

1. Merumuskan prioritas pembangunan Kota Serang yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, sehingga mampu menjadi dasar perencanaan pembangunan dalam lima tahun mendatang.
2. Menyusun strategi pembangunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang 20 tahun.
3. Menjadi acuan dalam pengalokasian sumber daya, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
4. Memastikan keselarasan program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, sekaligus mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.
5. Menentukan indikator kinerja utama yang dapat digunakan untuk

mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus sebagai alat evaluasi dalam pengendalian pembangunan.

6. Merumuskan solusi terhadap permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kota Serang.
7. Memfokuskan pembangunan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, melalui pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan RPJMD, Dasar hukum, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi Kota Serang secara menyeluruh yang menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Beberapa aspek yang dijabarkan antara lain yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum. Selain itu, dalam bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah dan permasalahan dan isu strategis.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini merinci program-program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini memberikan arahan untuk menjaga kesinambungan pembangunan selama masa transisi. Selain itu, panduan/kaidah pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 agar dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara administratif, Kota Serang dibagi dalam 6 Kecamatan. Luas wilayah Kota Serang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 adalah 266,18 km^2. Wilayah terluas adalah Kecamatan Kasemen yang mempunyai luas sekitar 68,85 km^2 atau sekitar 25,87 persen dari luas wilayah Kota Serang. Sedangkan Kecamatan Serang merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu hanya sekitar 26,55 km^2 atau 9,9 persen dari luas wilayah Kota Serang. Tabel II.1 memberikan gambaran tentang karakteristik lokasi dan wilayah dari masing-masing kecamatan.

Tabel II.1
Karakteristik Lokasi dan Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km^2)	%
1	Curug	10	38,96	14,64
2	Walantaka	14	36,56	13,73
3	Cipocok Jaya	8	34,10	12,81
4	Serang	12	26,55	9,97
5	Taktakan	13	61,16	22,98
6	Kasemen	10	68,85	25,87
Kota Serang		**67**	**266,18**	**100,00**

Sumber: Perda RTRW Kota Serang Tahun 2020

Berdasarkan hasil inventarisasi, luas wilayah 6 (enam) kecamatan tersebut adalah 266,18 km^2 atau sekitar 2,75 persen dari luas wilayah Provinsi Banten. Secara administratif, Kota Serang memiliki batas–batas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Banten,
2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringinkurung, dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang,
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang,
4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, dan Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

Gambar II.1
Peta Batas Administrasi Kota Serang

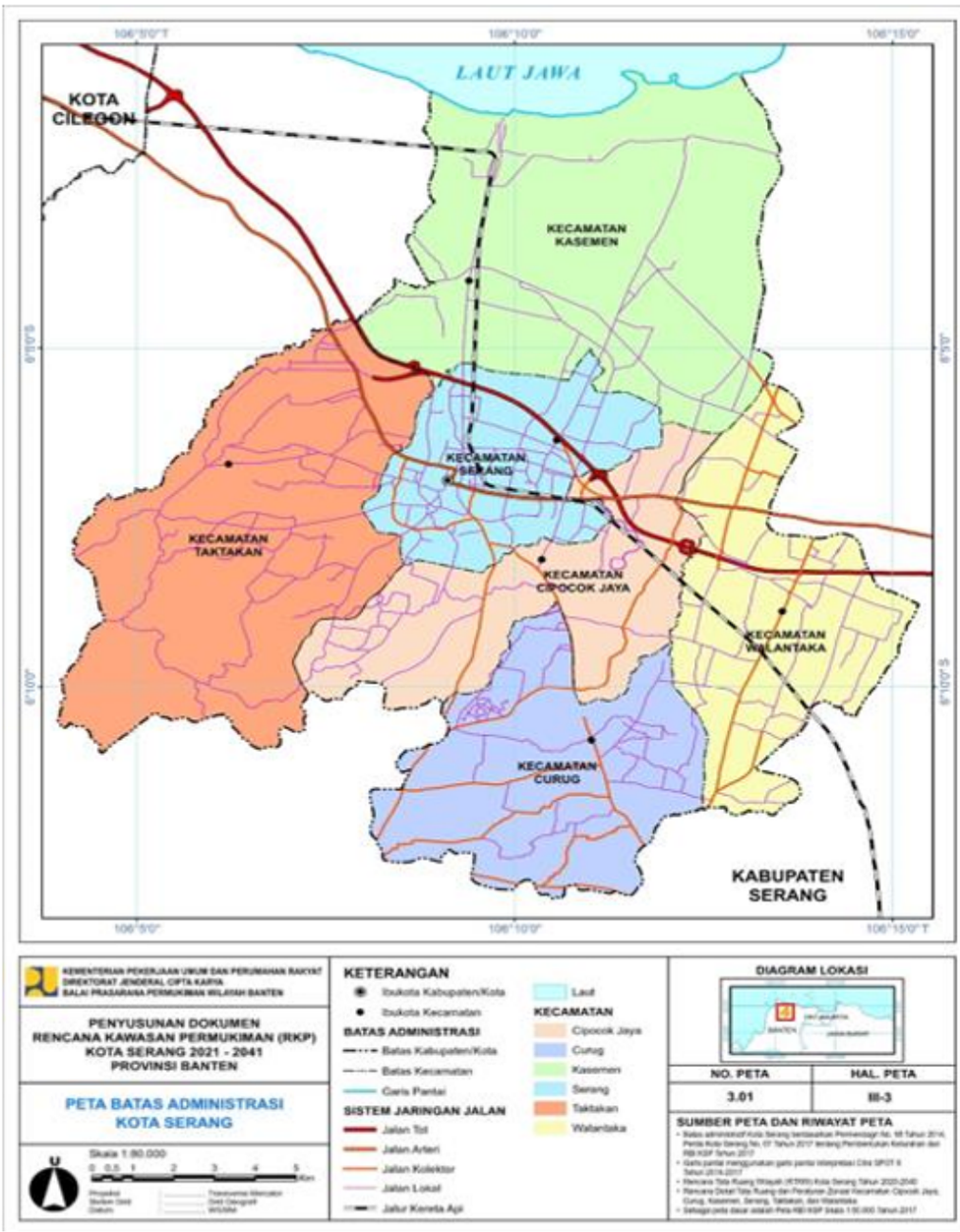

Sumber: Dokumen Rencana Kawasan Permukiman
Kota Serang Tahun 2021-2041

Jumlah Kelurahan di Kota Serang sebanyak 67 kelurahan dengan rincian yang diperlihatkan pada Tabel II.2.

Tabel II.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Serang Tahun 2024

No	Kecamatan/Kelurahan	No	Kecamatan/Kelurahan
I	**KECAMATAN CIPOCOKJAYA**	**II**	**KECAMATAN CURUG**
1	Kelurahan Banjaragung	1	Kelurahan Cilaku
2	Kelurahan Banjarsari	2	Kelurahan Cipete
3	Kelurahan Cipocok Jaya	3	Kelurahan Curug
4	Kelurahan Dalung	4	Kelurahan Curugmanis
5	Kelurahan Gelam	5	Kelurahan Kemanisan
6	Kelurahan Karundang	6	Kelurahan Pancalaksana
7	Kelurahan Penancangan	7	Kelurahan Sukajaya
8	Kelurahan Tembong	8	Kelurahan Sukalaksana
		9	Kelurahan Sukawana

No	Kecamatan/Kelurahan	No	Kecamatan/Kelurahan
		10	Kelurahan Tinggar
III	**KECAMATAN SERANG**	**IV**	**KECAMATAN TAKTAKAN**
1	Kelurahan Cimuncang	1	Kelurahan Taman Baru
2	Kelurahan Cipare	2	Kelurahan Umbul Tengah
3	Kelurahan Kagungan	3	Kelurahan Cilowong
4	Kelurahan Kaligandu	4	Kelurahan Drangong
5	Kelurahan Kota Baru	5	Kelurahan Kalang Anyar
6	Kelurahan Lontar Baru	6	Kelurahan Kuranji
7	Kelurahan Lopang	7	Kelurahan Lialang
8	Kelurahan Serang	8	Kelurahan Pancur
9	Kelurahan Sukawana	9	Kelurahan Panggung Jati
10	Kelurahan Sumur Pecung	10	Kelurahan Sayar
11	Kelurahan Trondol	11	Kelurahan Sepang
12	Kelurahan Unyur	12	Kelurahan Taktakan
		13	Kelurahan Cibendung
V	**KECAMATAN KASEMEN**	**VI**	**KECAMATAN WALANTAKA**
1	Kelurahan Banten	1	Kelurahan Nyapah
2	Kelurahan Bendung	2	Kelurahan Pabuaran
3	Kelurahan Kasemen	3	Kelurahan Pengampelan
4	Kelurahan Kasunyatan	4	Kelurahan Cigoong
5	Kelurahan Kilasah	5	Kelurahan Kepuren
6	Kelurahan Margaluyu	6	Kelurahan Kiara
7	Kelurahan Mesjid Priyayi	7	Kelurahan Kalodran
8	Kelurahan Sawah Luhur	8	Kelurahan Lebakwangi
9	Kelurahan Terumbu	9	Kelurahan Pageragung
10	Kelurahan Warung Jaud	10	Kelurahan Pasuluhan
		11	Kelurahan Pipitan
		12	Kelurahan Tegalsari
		13	Kelurahan Teritih
		14	Kelurahan Walantaka

Sumber: Bappeda Kota Serang, 2025.

1. **Kondisi Topografi**

Kondisi topografi di Kota Serang sebagian besar merupakan dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut (mdpl), dan menunjukkan permukaan tanah yang relatif datar, dengan kemiringan lahan berkisar antara 0-40 persen. Kemiringan lahan yang tersebar pada setiap kecamatan sebesar 3-8 persen dengan luas sebesar 15.459,6 Ha. Kemiringan paling banyak terdapat pada 8-15 persen dengan luas sebesar 5.873,31 Ha. Kemiringan lahan tersebut paling banyak berada di Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Curug. Kemiringan paling banyak kedua yaitu dengan kemiringan sebesar 0-3% dan luas sebesar 3.020,72 Ha. Kemiringan tersebut paling banyak tersebar di Kecamatan Kasemen. Kemudian untuk kemiringan lahan yang curam dengan kemiringan >45 persen memiliki luasan sebesar 134,75 Ha. Kemiringan lahan ini hanya ada di Kecamatan Taktakan yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Serang.

Gambar II.2
Peta Topografi Kota Serang

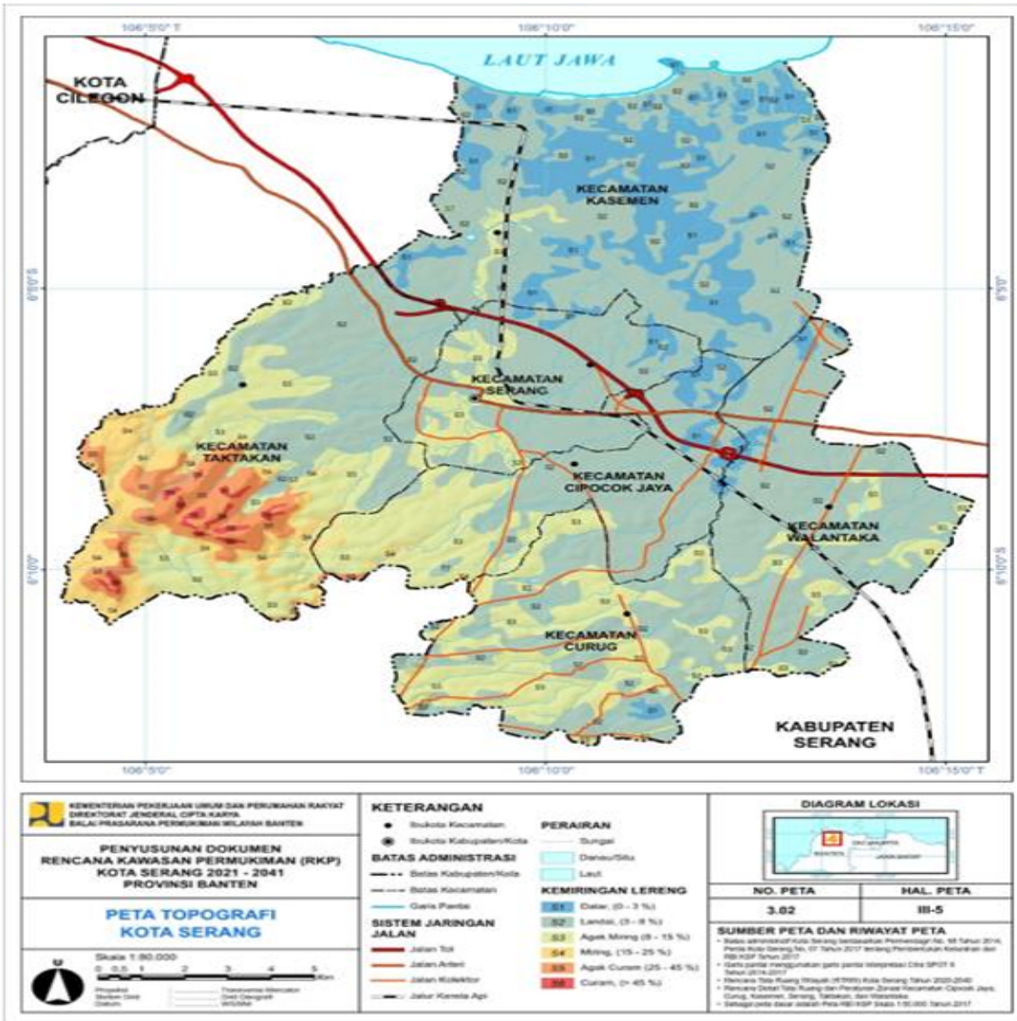

Sumber: Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2021-2041

2. **Kondisi Geologi dan Hidrologi**

Secara geologis wilayah Kota Serang terdiri dari 3 (tiga) jenis batuan api dengan endapan permukaan yang sebagian besar berada di pantai. Bagian terbesar adalah jenis batuan *pre tertiary sediments* dan batuan *alluvium*. Selain itu, terdapat batuan *young quaternary volcanic products* di beberapa daerah. Jenis tanah yang ada di Kota Serang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis. Pertama, tanah aluvial, merupakan jenis tanah yang terbentuk karena endapan. Jenis tanah ini paling banyak berada di wilayah Serang Utara dan memiliki manfaat untuk bidang pertanian. Kemudian yang paling banyak tersebar di wilayah Serang Barat yaitu tanah regosol yang merupakan tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api. Terakhir tanah padsolik, merupakan tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi

dan bersuhu rendah. Tanah padsolik berada di seluruh wilayah Kota Serang dengan mayoritas berada di wilayah Serang Selatan.

Kondisi hidrologi di wilayah Kota Serang meliputi sistem air bawah tanah dan air pemukaan. Potensi sumber air bawah tanah di Kota Serang dikelompokkan berdasarkan kelompok akuifer. Wilayah Kota Serang umumnya termasuk akuifer produktif dengan debit air 5-10 liter/detik. Potensi air permukaan di wilayah Kota Serang bersumber dari sungai yang mengalir di wilayah Kota Serang seperti sungai Cibanten. Kondisi Hidrologi di Kota Serang ditandai dengan terdapatnya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dalam pengelolaan sungai dikenal sebagai bagian dari Satuan Wilayah Sungai (SWS). Sungai-sungai yang terdapat di kota Serang memiliki lebar yang relatif kecil dan pendek. Salah satu DAS yang terdapat di Kota Serang yaitu DAS Cibanten yang merupakan bagian dari SWS Ciujung - Ciliman. Di samping keberadaan sungai, di Kota Serang terdapat pula jenis air permukaan berupa rawa, situ, dan waduk. Secara umum, baik air bawah tanah maupun air permukaan tersedia cukup memadai. Hal ini disebabkan oleh letak wilayah Kota Serang yang berada di dataran rendah dan cukup berdekatan dengan pantai serta memiliki curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahunnya.

3. **Kondisi Klimatologi**

Wilayah Kota Serang sebagian besar adalah dataran rendah dengan iklim tropis yang khas sebagaimana umumnya karakteristik daerah yang terletak di sekitar wilayah pesisir Pantai Utara Laut Jawa. Dengan tipologi iklim tropis dataran rendah tersebut, curah hujan di Kota Serang terbilang cukup tinggi.

Tabel II.3
Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari Kota Serang Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (jam)
Januari	368,00	25	3,5
Februari	197,30	22	4,8
Maret	310,50	25	4,5
April	163,70	21	5,3
Mei	305,20	19	5,0
Juni	129,50	14	6,3
Juli	58,20	28	6,2
Agustus	4,90	31	6,7
September	72,20	30	6,4
Oktober	92,40	31	6,3
November	168,70	30	4,5
Desember	332,80	31	2,8

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Suhu minimum sepanjang tahun 2024 adalah 21,00°C yang tercatat di bulan Juli. Sedangkan suhu maksimum tercatat pada bulan Oktober sebesar 36,90°C. Suhu rata-rata harian tertinggi tercatat pada bulan Oktober yaitu 28,90°C dan suhu rata-rata harian terendah pada bulan Juli sebesar 27,11°C.

Tabel II.4
Suhu Udara Kota Serang Tahun 2024

Bulan	Suhu Udara Maksimum, Minimum dan Rata-rata di Kota Serang (°C)		
	Maksimum	Minimum	Rata-rata
Januari	34,30	23,10	27,40
Februari	35,30	23,60	28,09
Maret	34,60	24,10	27,98
April	36,10	23,80	28,61
Mei	35,20	23,00	28,43
Juni	34,50	23,20	28,05
Juli	34,20	21,00	27,11
Agustus	35,00	22,20	27,98
September	35,50	21,70	28,30
Oktober	36,90	21,30	28,90
November	35,70	23,70	28,22
Desember	34,00	23,90	27,77

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

4. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Serang pada tahun 2024 terbagi menjadi wilayah hutan, industri/pergudangan, perairan, tanah jasa, tanah perumahan, tanah perusahaan, dan pertanian. Hasil identifikasi menunjukkan penggunaan lahan terbesar adalah untuk pertanian yaitu seluas 17.277,73 Ha. Penggunaan lahan terbesar kedua berikutnya yaitu tanah perumahan seluas 5.869,79 Ha, sedangkan penggunaan lahan terkecil yaitu lahan hutan dengan luas 177,32 Ha.

Tabel II.5
Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kota Serang Tahun 2024

No	Penggunaan Lahan	Tahun 2024 (Ha)
1	Hutan	177,32
2	Industri/Pergudangan	290,88
3	Perairan	1.012,29
4	Tanah Jasa	520,49
5	Tanah Perumahan	5.869,79
6	Tanah Perusahaan	1.307,51
7	Pertanian	17.277,73
Kota Serang		**26.456,01**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kota Serang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan guna mendukung ekosistem pengembangan wilayah. Pengembangan potensi wilayah Kota Serang tak dapat dipisahkan sebagai bagian integral Provinsi Banten, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta sosial ekonomi masyarakat yang menekankan pada pengembangan pembangunan pada bidang pertanian, industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Kota Serang mempunyai kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai modal dasar untuk membangun wilayah secara optimal guna mencapai kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Tabel II.6
Data Pemanfaatan Luas Hutan, Perairan Dan Pertanian
Di Kota Serang Tahun 2020 - 2024

No	Penggunaan Lahan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Hutan (Ha)	177,38	177,38	177,38	177,38	177,32
2	Luas Perairan (Ha)	946,79	1.012,29	1.012,29	1.012,29	1.012,29
3	Luas Lahan Pertanian (Ha)	18.452,28	18.452,28	18.452,28	18.452,28	17.277,73

Sumber: DKP3 Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Berdasarkan data penggunaan lahan Kota Serang tahun 2020–2024, pemanfaatan sumber daya alam cenderung mengalami perubahan. Luas hutan berada pada angka 177,38 Ha pada tahun 2020 hingga tahun 2023 dan berkurang pada tahun 2024 menjadi 177,32 Ha yang menunjukkan pengurangan tutupan hijau yang berperan penting dalam keseimbangan ekologi. Luas perairan mengalami peningkatan dari tahun 2020 di angka 946,79 Ha menjadi 1.012,29 Ha hingga tahun 2024 yang mencerminkan potensi pengelolaan sumber daya air terkelola dengan baik. Sementara itu, luas lahan pertanian mengalami pengurangan yaitu pada tahun 2020-2023 sebesar 18.452,28 Ha menjadi 17.277,73 Ha pada tahun 2024 yang mengindikasikan adanya konversi lahan yang perlu menjadi perhatian untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

Dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040, disebutkan bahwa Kecamatan Kasemen dan Walantaka memiliki peran strategis sebagai kawasan peruntukan pertanian dan peruntukan industri. Pemerintah Kota Serang menetapkan dua Kecamatan tersebut sebagai zona wilayah penyangga ketahanan pangan sekaligus pengembangan kawasan ekonomi produktif. Kecamatan Kasemen diarahkan sebagai kawasan pertanian produktif dengan dominasi lahan sawah dan lahan kering yang masih luas dan subur. Wilayah ini memiliki potensi tinggi untuk pengembangan pertanian

tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan rakyat. Arah kebijakan RTRW mendorong optimalisasi lahan pertanian melalui pendekatan pertanian berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Selain itu, dengan dukungan jaringan irigasi dan akses jalan kolektor, Kasemen menjadi tumpuan dalam menjaga kestabilan pasokan bahan pangan lokal.

Sementara itu, Kecamatan Walantaka memiliki potensi ganda, yaitu sebagai kawasan pertanian produktif sekaligus pengembangan zona industri khusus. Dalam RTRW, sebagian wilayah Walantaka telah ditetapkan sebagai zona industri skala menengah hingga besar dengan peruntukan industri pengolahan, pergudangan, dan logistik. Aksesibilitas yang baik terhadap jalur transportasi dan kedekatan dengan pusat kota menjadikan Walantaka sebagai lokasi strategis untuk investasi industri yang tetap ramah lingkungan. Di bagian lain wilayah Walantaka, pertanian masih dijaga eksistensinya untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku industri olahan. Keseimbangan antara pelestarian lahan pertanian dan pengembangan kawasan industri di dua kecamatan ini menjadi landasan penting dalam penguatan struktur ruang Kota Serang yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Selama periode 2020 hingga 2024, sektor pariwisata di Kota Serang menunjukkan perkembangan yang dinamis dan kompleks. Meskipun terdampak pandemi COVID-19 pada awal periode, tren pemulihan dan pertumbuhan mulai terlihat di tahun-tahun berikutnya, meskipun tidak seluruh indikator mengalami peningkatan yang konsisten.

Tabel II.7
Data Potensi Pariwisata Di Kota Serang Tahun 2020 - 2024

No	Potensi Pariwisata	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan (orang)	144	14	484	1.122	554
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota (%)	49,37	94,42	61,35	29,29	0,73
3	Tingkat hunian akomodasi (%)	38,11	35,96	31,04	31,48	21,13
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	6,06	5,99	5,99	6,09	6,10
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	5,53	6,30	8,22	22,65	24,20

Sumber: Disparpora, 2025.

Dapat dilihat pada Tabel II.6 Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan. Indikator ini menunjukkan tren yang fluktuatif. Secara keseluruhan menunjukkan adanya pemulihan dan ketertarikan wisatawan asing terhadap destinasi wisata di Kota Serang walaupun masih san. Pada Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara, jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) juga menunjukkan dinamika

yang mencerminkan situasi nasional. Dari 49,37 persen di tahun 2020, tumbuh menjadi 94,42 persen di tahun 2021, kemudian mengalami penurunan menjadi 61,35 persen pada tahun 2022, sebesar 29,29 persen pada tahun 2023, dan turun drastis menjadi 0,73 persen di tahun 2024. Penurunan wisatawan pada th 2024 bisa jadi disebabkan karna kurangnya kegiatan yg bersekala nasional atau kurangnya dayatarik untuk mendatangkan wisatawan, hal ini menjadi evaluasi bagi pemerintahan Kota Serang dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata lebih baik lagi. Tingkat hunian akomodasi mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat capaian sebesar 38,11 persen dan menjadi 21,13 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap daya tarik dan konektivitas destinasi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akomodasi untuk meningkatkan masa tinggal wisatawan.

Capaian kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan signifikan dari Rp 25,97 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 26,56 miliar di tahun 2021. Lebih penting lagi, kontribusinya terhadap total PAD menunjukkan tren positif secara persentase yaitu dari 8,22 persen pada tahun 2022 menjadi 22,65 persen pada tahun 2023, dan 24,20 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun kunjungan wisatawan menurun, sektor ini tetap menjadi sumber penting pendapatan daerah, kemungkinan dari pajak hiburan, hotel, dan restoran.

Secara keseluruhan, capaian sektor pariwisata Kota Serang dalam periode 2020–2024 mencerminkan pemulihan pasca pandemi yang kuat pada awalnya, namun menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan pertumbuhan wisatawan dan tingkat hunian. Di sisi lain, kontribusi terhadap PAD justru meningkat, menandakan efektivitas pengelolaan sektor ini sebagai sumber pendapatan meskipun belum sepenuhnya tercermin dalam volume kunjungan.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah dua konsep penting dalam pengelolaan lingkungan yang digunakan untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia dan kemampuan alam untuk menampung serta memulihkan diri. Daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi indikator penting dalam menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup manusia. Bila dua hal ini dilampaui, maka akan muncul berbagai masalah lingkungan yang berdampak pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya khususnya di Kota Serang.

Pemerintah Kota serang terus berupaya dalam menjaga lingkungannya terkait kualitas lingkungan hidup selama periode 2020–2024. Capaian kondisi kualitas mutu udara pada tahun 2022 sebesar 74,65 poin mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 65,97 poin, namun kembali mengalami kenaikan pada 2024 menjadi 66,67 poin. Kualitas mutu air cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar 43,33 poin menjadi 57,50 poin pada 2024. Kualitas mutu tutupan lahan menunjukkan angka yang fluktuatif, pada tahun 2020 sebesar 39,71 poin dan terus mengalami penurunan menjadi 25,43 poin pada tahun 2024. Pemerintah Kota Serang perlu memperkuat arah kebijakan pembangunan dan sinkronisasi lintas sektor, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dan dunia usaha agar kondisi lingkungan hidup semakin baik dan berkelanjutan.

Capaian penanganan sampah mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 61,60 persen menjadi 52,30 persen pada tahun 2021. Namun mengalami peningkatan kembali menjadi 55,72 persen di tahun 2022. Upaya pemerintah terus dilakukan sehingga di tahun 2023 capaian kembali mengalami nilai yang positif menjadi 68,15 persen, hanya saja upaya tersebut masih belum maksimal sehingga terjadi capaian kurang positif pada tahun 2024 menjadi 60,59 persen. Persentase jumlah sampah yang berhasil dikurangi melalui pendekatan 3R terus meningkat dari 6,10 persen pada 2020 menjadi 9,62 persen pada 2024, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan efektivitas pengurangan sampah di masyarakat. Kebijakan pembentukan bank sampah di lingkup RW dan sekolah menjadi salah satu upaya mengurangi jumlah sampah melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, Kota Serang menunjukkan perbaikan pada beberapa aspek kualitas lingkungan, meskipun masih terdapat tantangan, terutama dalam pengelolaan tutupan lahan dan konsistensi penanganan sampah. Hal ini perlu upaya penanganan secara maksimal oleh semua unsur terutama dalam integrasi kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan kampanye publik berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

Tabel II.8
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Kota Serang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Capaian kualitas mutu udara	Poin	72,46	74,13	74,65	65,97	66,67
2	Capaian kualitas mutu air	Poin	43,33	53,07	50,00	50,00	57,50
3	Capaian kualitas mutu tutupan lahan	Poin	39,71	23,14	24,38	23,26	25,43
4	Capaian penanganan sampah	Persen	61,60	52,30	55,72	68,15	60,59
5	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	54,34	55,05	54,37	50,61	54,19
6	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	6,10	14,00	6,44	9,48	9,62
7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	NA	NA	NA	NA	49,2

Sumber: DLH Kota Serang, 2025

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

a. Daya Dukung dan Daya Tampung Energi

Dalam upaya merencanakan kebutuhan energi di masa depan, pemahaman menyeluruh terhadap berbagai faktor yang memengaruhi permintaan energi dan ketersediaan sumber daya listrik sangat penting. Pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi berdampak signifikan pada kebutuhan listrik. Proyeksi harus mempertimbangkan pergeseran pola konsumsi energi seiring dengan proses urbanisasi, peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan aktivitas ekonomi di suatu wilayah.

Dengan perkembangan teknologi, sektor-sektor seperti transportasi, industri, dan teknologi informasi semakin mengadopsi elektrifikasi. Proyeksi kebutuhan listrik perlu memperhitungkan dampak dari elektrifikasi sektor-sektor baru ini. Pertumbuhan teknologi memiliki peran kunci dalam proyeksi kebutuhan listrik. Inovasi dalam efisiensi energi dan perkembangan teknologi penyimpanan energi dapat memengaruhi cara kebutuhan listrik diproyeksikan di masa mendatang. Langkah-langkah konservasi dan peningkatan efisiensi energi merupakan strategi krusial dalam manajemen kebutuhan listrik. Inovasi teknologi yang mendukung penggunaan energi yang lebih efisien dapat membantu mengimbangi pertumbuhan permintaan. Kondisi infrastruktur energi juga memainkan peran penting dalam memenuhi

kebutuhan listrik. Proyeksi perlu mempertimbangkan investasi dalam pengembangan pembangkit, jaringan distribusi, dan teknologi penyimpanan energi untuk memastikan pasokan yang andal, sebagaimana gambaran kondisi energi listrik di bawah ini.

Tabel II.9
Daya Listrik Terpasang Kota Serang Tahun 2020-2024

Uraian	Daya Listrik Terpasang (KWh)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Daya terpasang Rumah Tangga (KWh)	227.180.100	227.180.100	255.458.900	272.377.050	290.148.351
Pemakaian (KWh)	619.667.128	634.364.947	647.753.455	699.684.653	791.338.383
Konsumsi Listrik per Kapita (KWh)	895,34	900,30	899,21	951,11	1.041,33

Sumber: PLN, 2025

Pada periode lima tahun terakhir, tingkat pemakaian listrik di Kota Serang mencapai 619.667.128 KWh. Angka ini terus tumbuh seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi hingga kebutuhan listrik mencapai 791.338.383 KWh di tahun 2024. Konsumsi listrik per kapita meningkat dari 895,34 KWh per orang pada tahun 2020 menjadi 1.041,33 KWh pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa setiap individu di Kota Serang menggunakan energi listrik secara lebih intensif, yang dapat dikaitkan dengan meningkatnya standar hidup, kemajuan teknologi, serta peningkatan akses terhadap fasilitas dan peralatan elektronik.

Secara umum, tren ini mengindikasikan pertumbuhan positif dalam infrastruktur dan layanan energi di Kota Serang, namun juga menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan efisiensi energi dan pengembangan energi terbarukan di masa mendatang.

Tabel II.10
Daya Terpasang Listrik (KWh) Menurut Golongan Tarif di Kota Serang Tahun 2024

No	Daya Listrik Terpasang (KWh)			
	Kecamatan	Sosial	Rumah Tangga	Usaha
1	Curug	1.884.611	22.509.784	6.327.225
2	Walantaka	2.488.884	29.727.218	8.355.957
3	Cipocok Jaya	4.523.626	54.030.176	15.187.221
4	Serang	9.392.949	112.189.350	31.535.053
5	Taktakan	3.751.532	44.808.286	12.595.061

No	Daya Listrik Terpasang (KWh)			
	Kecamatan	Sosial	Rumah Tangga	Usaha
6	Kasemen	2.250.799	26.883.537	7.556.633
	Kota Serang	24.292.401	290.148.351	81.557.150

Sumber: BPS,2025

Berdasarkan tabel di atas, golongan rumah tangga menyumbang lebih dari 73% dari total daya terpasang. Golongan usaha hanya sekitar 20% dari total daya terpasang serta Konsumsi listrik sektor sosial sekitar 6%. Kota Serang saat ini menunjukkan pola konsumsi listrik yang masih sangat bergantung pada sektor rumah tangga, dengan potensi besar di sektor usaha yang belum tergarap optimal. Pemerintah Kota dapat mengarahkan program pembangunan ke arah penguatan ekonomi produktif dan pemerataan infrastruktur listrik.

b. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Daya dukung air mengacu pada kemampuan lingkungan perairan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Sementara daya tampung air berkaitan dengan kemampuan lingkungan perairan untuk menyerap dan menetralkan komponen yang dibuang ke dalamnya. Pengelolaan yang baik terhadap daya dukung dan daya tampung air sangat penting untuk menjaga kualitas air, keberlanjutan ekosistem perairan, dan ketersediaan air bagi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perhitungan daya dukung air mempertimbangkan ketersediaan air dan kebutuhan air bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah.

Tabel II.11
Daya Dukung dan Daya Tampung Air
Kota Serang Tahun 2020-2024

PARAMETER	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan Air		3.689.553	3.689.553	3.689.553	3.689.553	3.689.553
- SBS	m^3/tahun	412.031	412.031	412.031	NA	NA
- Dalung	m^3/tahun	780.362	780.362	780.362	780.362	777.600
- Teritih	m^3/tahun	1.248.580	1.248.580	1.248.580	1.248.580	1.248.580
- IPA Banten	m^3/tahun	1.248.580	1.248.580	1.248.580	1.248.580	1.248.580
Jumlah Penduduk	Jiwa	692.101	704.618	720.362	735.651	759,929
Koefisien	m^3/jiwa/tahun	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90
Kebutuhan air	m^3/tahun	15.157.012	15.431.134	15.775.928	16.110.757	16.642.445
D3TLH		**0,24**	**0,24**	**0,23**	**0,23**	**0,22**

Sumber: KLHS RPJMD, 2024

Berdasarkan perhitungan daya dukung dan daya tampung air domestik Kota Serang yang disajikan pada tabel II.10 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kota Serang diprediksi tidak mampu memenuhi

kebutuhan air domestiknya jika jumlah penduduknya melebihi jumlah penduduk maksimum selama periode 2020-2024.

Kondisi ini berpotensi akan semakin memburuk mengingat isu strategis daya dukung daya tampung air domestik menyebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Curah hujan, merupakan sumber air utama untuk kota. Semakin tinggi curah hujan, semakin besar ketersediaan air untuk kota, dan Kota Serang mengalami penurunan jumlah hujan per tahunnya;
2. Pola iklim, seperti musim kemarau dan musim hujan, juga mempengaruhi ketersediaan air. Musim kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan dan kelangkaan air, fenomena El Nino yang dialami Kota Serang menyebabkan suhu permukaan laut meningkat, arah angin pasat melemah, curah hujan meningkat di wilayah tropis bagian barat dan selatan, namun menurun di wilayah tropis bagian timur, dan mengakibatkan kekeringan di wilayah tropis bagian timur, serta banjir di wilayah tropis bagian barat;
3. Topografi, dimana kemiringan lahan dan ketinggian lahan mempengaruhi ketersediaan air. Lahan yang datar dan memiliki ketinggian yang rendah akan lebih mudah untuk memperoleh air, dan Kota Serang berada di posisi topografi yang landai;
4. Kualitas air, juga mempengaruhi ketersediaan air. Air permukaan (DAS Cibanten dan Ciwaka) yang tercemar tidak dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, setidaknya untuk dapat dipergunakan, membutuhkan biaya pengolahan yang tidak murah;
5. Jumlah penduduk, jika semakin bertambah maka akan semakin meningkatkan kebutuhan air;
6. Pola konsumsi air yang boros akan meningkatkan kebutuhan air yang berlebih dan mengurangi ketersediaan air; dan
7. Pemanfaatan air untuk keperluan industri, pertanian, dan pariwisata juga akan meningkatkan kebutuhan air, semakin banyak aktivitas yang harus dipenuhi, semakin mengurangi ketersediaan air.

Jika tren ini berlanjut tanpa intervensi, Kota Serang berisiko menghadapi krisis berketahanan air akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan. Maka, diperlukan kebijakan air terpadu dan berbasis data untuk menjaga keberlanjutan air bagi seluruh warga Kota Serang.

c. Kemandirian Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau, dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, beragam, dan bergizi. Namun juga dalam bentuk peningkatan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Gambaran tentang kinerja sepanjang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.12
Perkembangan Indikator Pangan Kota Serang Tahun 2020–2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Persentase penguatan cadangan pangan	29,07	34,88	34,88	40,00	53,93	6,22
2	Persentase daerah rentan rawan pangan yang tertangani	15,00	20,00	20,00	45,00	45,00	7,50
3	Skor pola pangan harapan	87,70	88,65	88,65	88,80	90,9	0,95
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	15,00	68,00	68,00	71,00	94,44	19,86
5	Ketersediaan energi dan protein per kapita (kkal/%)	2.598; 154,08	2.649; 155,62	2.289; 66,3	2.729; 113,58	2.729: 103,58	32,75; -12,63
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	85,00	69,00	84,60	75,00	94,44	2,36
7	Indeks ketahanan pangan	61,22	61,24	59,88	71,42	71,95	2,68
8	Capaian ketersediaan pangan utama	57,73	36,97	84,29	93,91	203,73	36,50
9	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	612,96	487,43	514,46	519,94	510,33	-3.93

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
10	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	8,33	101,54	28,24	251,19	-90	2,4

Sumber**:** Kementerian Pertanian, 2018 dan Badan Pangan Nasional, 2025

Persentase cadangan pangan masyarakat pada tahun 2020 yaitu 29,07 persen dan pada tahun 2024 sebesar 53,93 persen dengan persentase cadangan pangan masyarakat menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,22 persen per tahun, mencerminkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menyimpan dan menyediakan cadangan pangan secara mandiri. Persentase daerah rentan rawan pangan mengalami pertumbuhan sebesar 7,50 persen menandakan adanya peningkatan identifikasi dan penanganan wilayah rawan pangan secara lebih intensif.

Skor pola pangan harapan meningkat secara perlahan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 87,70 persen hingga tahun 2024 sebesar 91,50 persen atau dengan capaian rata-rata 0,95 persen, mengindikasikan perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat menuju komposisi yang lebih seimbang dan beragam. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi mutu dan keamanan pangan tumbuh signifikan sebesar 15,00 persen pada tahun 2020 hingga 94,44 persen di tahun 2024 dengan rata-rata peningkatan sebesar 19,86 persen yang mencerminkan peningkatan kesadaran dan pengawasan terhadap kualitas pangan.

Ketersediaan energi (kkal) mengalami peningkatan tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan 32,75 persen, menunjukkan kemajuan dalam penyediaan pangan bergizi dan berenergi cukup bagi masyarakat. Protein per kapita (g) justru menurun rata-rata -12,63 persen, yang menjadi catatan penting untuk evaluasi kebijakan konsumsi protein masyarakat. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tumbuh positif sebesar 2,36 persen, mengindikasikan penguatan fungsi pengawasan oleh instansi terkait dalam menjamin keamanan pangan.

Indeks ketahanan pangan mengalami pertumbuhan 2,68 persen, menggambarkan penguatan sistem pangan dari sisi ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Capaian ketersediaan pangan utama pada lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan positif dengan capaian

pada tahun 2020 sebesar 57,73 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 36,97 persen. Capaian ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan yang pesat dari tahun 2023 sebesar 93,91 perse tahun 2024 menjadi 203,73 persen dengan rata-rata pertumbuhan 36,50 persen, mencerminkan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok secara berkelanjutan. Selain itu pula dalam rangka mendukung asta cita pada RPJMN 2025-2030 Pemerintah kota Serang melalui Dinas Ketahanan Pabangan dan Pertanian Perikanan, (DKP3) mengadakan cadangan Pangan Daerah selain beras (CPPD non-beras) berupa telur ayam dan daging ayam.

Selama periode 2020–2024 produktivitas pertanian di Kota Serang berfluktuasi namun cenderung stabil pada kisaran di atas 500 kuintal/ha per tahun setelah 2021. Di tahun 2020, capaian tertinggi tercatat sebesar 612,96 kuintal/ha, namun menurun pada tahun 2021 menjadi 487,43 kuintal/ha akibat pengaruh cuaca ekstrem dan gangguan distribusi input pertanian. Tahun berikutnya menunjukkan perbaikan secara bertahap pada tahun 2022 sebesar 514,46 kuintal/ha, tahun 2023 naik menjadi 519,94 kuintal/ha dan pada 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 510,33 kuintal/ha.

Berdasarkan data jumlah kasus pada periode tahun 2020–2024, tren perkembangan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 jumlah kasus tercatat sebanyak 65, kemudian meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 131 kasus atau naik sekitar 101,54 persen. Kenaikan berlanjut di tahun 2022 dengan 168 kasus atau naik 28,24 persen dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 590 kasus atau meningkat 251,19 persen. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi hanya 59 kasus atau turun sekitar 90 persen dibanding tahun sebelumnya.

Jika dihitung secara rata-rata aritmatika, tingkat pertumbuhan kasus selama periode 2020–2024 mencapai sekitar 72,24 persen per tahun. Namun, apabila dihitung menggunakan pendekatan pertumbuhan majemuk (CAGR), secara keseluruhan tren justru mengalami penurunan rata-rata sekitar 2,4 persen per tahun, yang menggambarkan adanya lonjakan kasus pada pertengahan periode tetapi kembali menurun drastis di akhir periode.

Secara umum, indikator-indikator ini menunjukkan tren positif dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kota Serang selama

periode 2020–2024, meskipun terdapat beberapa aspek seperti konsumsi protein yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Sementara itu kondisi hasil *POU (Prevalence of Undernourishment)* atau Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kota Serang tergambar di bawah ini:

Gambar II.3
***Prevalence of Undernourishment* Kota Serang Tahun 2020 – 2024**

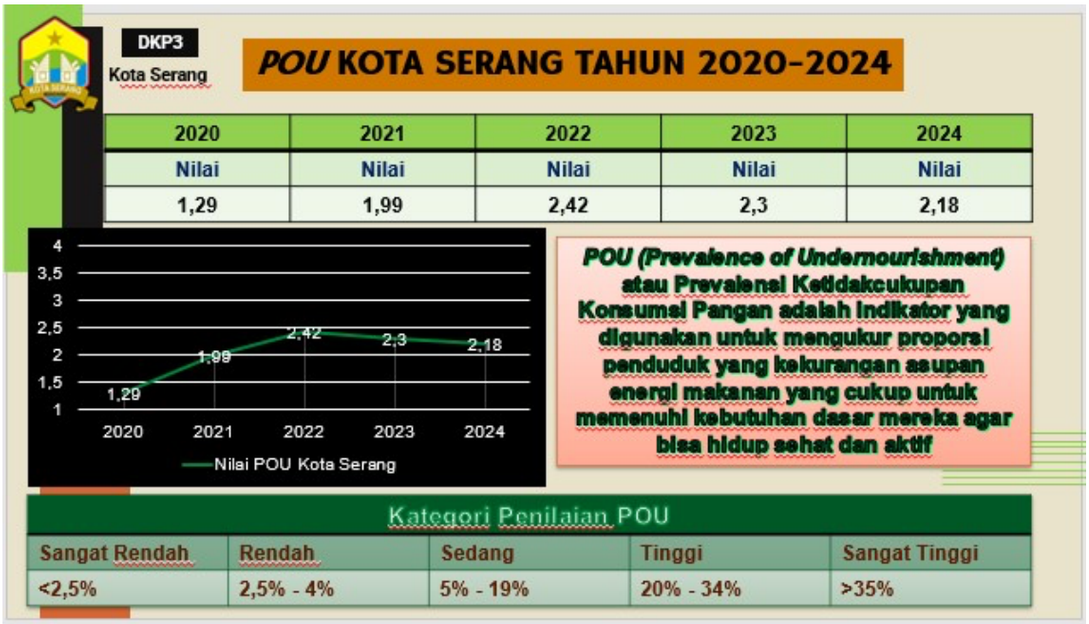

Sumber: DKP3 Kota Serang, 2025

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kota Serang pada tahun 2020 sebesar 1,29 persen naik menjadi 1,99 persen pada 2021 dan 2,42 persen pada 2022, lalu menurun menjadi 2,30 persen pada 2023 dan 2,18 persen pada 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Serang berhasil menjaga prevalensi kekurangan konsumsi pangan tetap berada pada kategori sangat rendah, meskipun sempat terjadi fluktuasi. Hal ini mengindikasikan adanya ketahanan pangan yang relatif baik, terutama dalam penyediaan akses terhadap pangan bergizi yang cukup bagi penduduk.

Upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kota Serang juga dapat dilihat dari data jalan usaha tani yang telah dibangun. Jalan usaha tani dibangun untuk memudahkan akses ke ladang dengan menghubungkan kawasan pertanian atau ladang dengan kawasan utama atau jalan raya, sehingga proses pengolahan dan pemeliharaan kawasan pertanian serta pendistribusian hasil pertanian menjadi lebih efektif dan efisien. Capaian pembangunan jalan usaha tani di Kota Serang tahun 2022-2024 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel II.13
Capaian Pembangunan Jalan Usaha Tani Kota Serang
Tahun 2022 – 2024

No	Tahun	Luas (m^2)	Lokasi
1	2022	1.289,0	Kecamatan Kasemen dan Curug
2	2023	1.365,0	Kecamatan Kasemen
3	2024	1.225,5	Kecamatan Kasemen

Sumber: DKP3 Kota Serang, 2025.

Data di atas memunjukkan bahwa pembangunan jalan usaha tani di Kota Serang masih terfokus di wilayah Kecamatan Kasemen dengan luas pembangunan yang fluktuatif. Kecamatan Kasemen memang memiliki area lahan pertanian yang signifikan, terutama lahan basah (sawah) yang sangat produktif. Hal ini menjadikan Kecamatan Kasemen sebagai sentra produksi padi di Kota Serang. Oleh karena itu, pemerintah Kota Serang terus melakukan pembangunan jalan usaha tani di Kecamatan Kasemen untuk meningkatkan ketahanan di Kota Serang. Namun demikian, upaya pembangunan jalan usaha tani perlu ditingkatkan dengan memperluas jangkauan wilayah agar kawasan pertanian di seluruh wilayah Kota Serang dapat dimanfaatkan dengan optimal demi ketahanan pangan Kota Serang yang lebih baik.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kota Serang, sebagai ibu kota Provinsi Banten, menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan hidupnya. Berdasarkan kajian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024, nilai IKLH Kota Serang berada pada angka 54,19, yang dikategorikan sebagai "sedang".

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang

1) Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2024 sebesar 57,50 mengindikasikan kualitas air di wilayah Kota Serang berada dalam kategori kurang baik. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan dan pengawasan kualitas air yang lebih ketat, termasuk pengendalian pencemaran dan peningkatan sistem pengolahan limbah domestik dan industri.
2) Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2024 tercatat sebesar 66,67 tergolong cukup baik. Meskipun demikian, pengendalian emisi kendaraan bermotor dan kegiatan industri tetap perlu diperkuat untuk menjaga dan meningkatkan kualitas udara yang ada.
3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2024 tercatat sebesar 25,43 berada dalam kategori buruk. Nilai ini menunjukkan bahwa kondisi tutupan lahan di Kota Serang mengalami tekanan yang cukup

tinggi, yang dapat berdampak negatif terhadap fungsi ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

Rendahnya IKTL ini mengindikasikan terjadinya degradasi lahan, seperti berkurangnya area vegetasi alami, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta kurangnya upaya rehabilitasi kawasan terbuka hijau. Tutupan lahan yang buruk dapat memicu berbagai permasalahan lingkungan, antara lain meningkatnya risiko banjir dan penurunan kualitas udara. Oleh karena itu, upaya perbaikan kualitas tutupan lahan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Serang yang lebih baik.

Tabel II.14
Perkembangan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	43,33	53,07	50,00	50,00	57,50
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	72,46	67,95	68,00	65,97	66,67
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	39,71	23,14	24,38	23,26	25,43
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,34	55,05	54,37	50,61	54,19

Sumber: DLH Kota Serang, 2025

Tabel II.13 menjelaskan Menjelaskan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Serang dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Komponen pembentuk IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Secara umum, capaian IKLH Kota Serang menunjukkan fluktuasi selama periode lima tahun tersebut. Setelah mengalami peningkatan dari 54,34 poin pada tahun 2020 menjadi 54,34 poin pada tahun 2021, di 2022 indeks kembali menurun hingga pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, terdapat sedikit perbaikan dengan naiknya indeks menjadi 54,19 poin. Jika disandingkan dengan capaian IKLH Provinsi Banten tahun 2024 sebesar 62,54, maka capaian IKLH Kota Serang tahun 2024 masih berada di bawah rata-rata Provinsi, dengan selisih sebesar 8,35 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kota Serang masih perlu ditingkatkan agar dapat sejajar atau melampaui rata-rata Provinsi, melalui penguatan pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran,

serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

Komponen IKLH Kota Serang yang memiliki nilai cukup rendah adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang memiliki nilai 39,71 pada tahun 2020 dan mengalami titik terendah dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2021 dengan nilai 23,14. Selanjutanya IKTL bergerak fluktuatif dan pada tahun 2024 memiliki nilai 25,43. Perlu dilakukan tindaklanjut dari hasil capaian IKTL yang belum optimal pada periode RPJMD sebelumnya agar dapat ditingkatkan sehingga menunjang capaian IKLH pada periode RPJMD 2025-2029. Aspek terkait lingkungan hidup lainnya yaitu Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dibahas pada bab Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

b. Rumah tangga dengan sanitasi aman

Sanitasi aman merupakan aspek krusial dalam pembangunan kesehatan lingkungan dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Indikator ini mengukur persentase rumah tangga di Kota Serang yang memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi layak serta melakukan pengelolaan akhir limbah tinja secara aman dan berkelanjutan. Indikator ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Gambar II.4
Capaian Rumah Tangga Sanitasi Aman Kota Serang Tahun 2021-2024

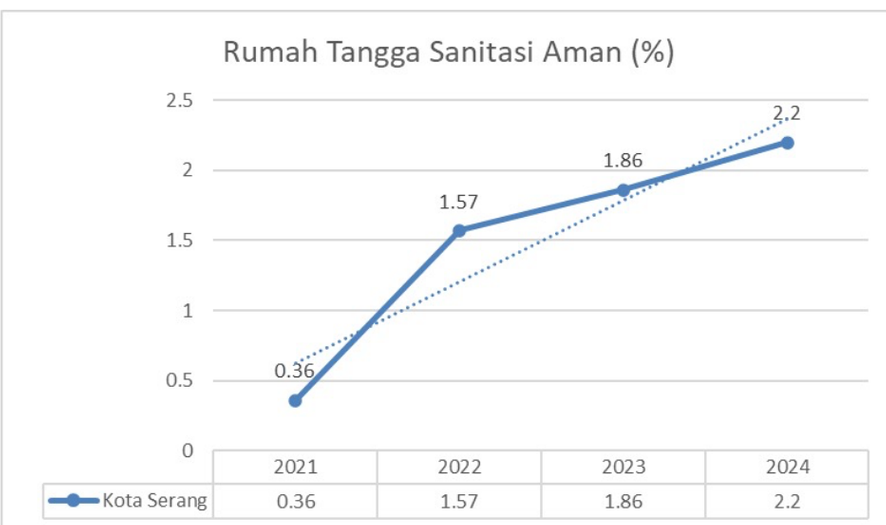

Sumber: DPUPR Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa ada peningkatan yang konsisten dalam askes sanitasi aman dari tahun ke tahun di Kota serang. Sanitasi aman merupakan kondisi dimana fasilitas sanitasi yang digunakan oleh rumah tangga atau masyarakat terkelola dengan baik, sehingga tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi pengguna dan lingkungan sekitarnya. Ini mencakup aspek penggunaan, pengelolaan, dan pembuangan limbah yang aman, termasuk tinja dan air limbah, untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kebersihan lingkungan. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman masih tergolong rendah, hanya mencapai 0,36 persen. Namun, di tahun berikutnya, yaitu tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan, dimana angkanya meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi 1,57 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan pesat dalam upaya penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat Kota Serang. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023, di mana persentase kembali naik menjadi 1,86 persen. Puncaknya, di tahun 2024, persentase rumah tangga dengan sanitasi aman mencapai 2,2 persen. Meskipun angkanya masih terbilang kecil, tren peningkatan yang stabil dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan komitmen dan efektivitas program-program yang dijalankan untuk meningkatkan kualitas sanitasi di Kota Serang. Namun demikian, persentase 2,2 persen masih sangat rendah. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait standar sanitasi di permukiman dan menegakkan pengawasan untuk memastikan setiap pembangunan rumah atau permukiman baru memenuhi standar sanitasi yang telah ditetapkan. Hal ini juga termasuk pengawasan terhadap pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan.

c. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Kota Serang, sebagai ibu kota Provinsi Banten, terus menghadapi tantangan meningkatnya timbulan sampah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan urbanisasi. Oleh karena itu, indikator "Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah" menjadi salah satu ukuran kinerja utama dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan.

Tabel II.15
Capaian Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2024

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) (A)	Timbulan Sampah Harian (ton/hari) (A)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun) (B)	% Pengurangan Sampah (B/A)	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun) (C)	% Penanganan Sampah (C/A)	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun) (B+C)	% Sampah Terkelola (B+C)/A	Daur ulang Sampah Tahunan (ton/tahun)(D)	Bahan baku Sampah Tahunan (ton/tahun) (E)	*Recycling Rate* (D+E)/A	P1/P2
2020	190.440,06	521,75	37.235,99	19,55	106.718,70	56,04	143.954,69	75,59	3.074,83	0	1,61	P 2
2021	209.672,00	574,40	6.696,96	3,20	106.919,99	50,99	113.616,95	54,19	3.288,60	0	3,20	P 2
2022	213.464,02	584,83	1.642,25	0,77	119.514,51	55,99	121.156,76	56,76	1.626,47	0	0,76	P 2
2023	219.503,03	601,38	20.818,54	9,48	128.782,60	58,67	149.601,14	68,15	20.812,30	0	9,48	P 2
2024	223.961,12	613,59	21.545,06	9,62	135.706,06	60,59	157.251,12	70,21	21.762,68	0	9,62	P 2

Sumber: SIPSN (2025), DLH Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Berdasarkan data capaian pengelolaan sampah di wilayah Kota Serang tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan, terdapat perkembangan signifikan dalam pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan catatan tabel di atas, jumlah timbulan sampah tahunan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu dari 190.440,06 ton pada tahun 2020 menjadi 223.961,12 ton pada tahun 2024. Peningkatan timbulan ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, persentase pengurangan sampah terhadap total timbulan sampah menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 tingkat pengurangan mencapai 19,55 persen, kemudian menurun drastis hingga 0,77 persen pada tahun 2022, sebelum naik kembali menjadi 9,62 persen pada tahun 2024. Penurunan pada periode tahun 2021–2022 dapat dikaitkan dengan berkurangnya efektivitas program pengelolaan sampah selama pandemi, serta keterbatasan fasilitas daur ulang. Peningkatan pasca tahun 2023 menunjukkan adanya penguatan strategi, seperti optimalisasi bank sampah, program 3R (*reduce, reuse, recycle*), serta perluasan fasilitas pengolahan sampah terpadu.

Penanganan dan pengelolaan sampah terus ditingkatkan, volume sampah yang berhasil ditangani meningkat dari 106.718,70 ton pada 2020 menjadi 135.706,06 ton di tahun 2024. Persentase penanganan terhadap timbulan sampah relatif stabil, berkisar antara 55–60 persen. Sementara itu persentase total sampah yang berhasil dikelola menunjukan kondisi kurang signifikan dalam pertumbuhannya, yaitu dari 75,59 persen pada tahun 2020 turun menjadi 54,19 persen di tahun 2021, namun kembali meningkat hingga tahun tahun 2024 menjadi menjadi 70,21 persen. Hasil capaian positif terlihat pada indikator Daur Ulang dan *Recycling Rate*, capaian daur ulang meningkat cukup positif, dari hanya 3.074,83 ton di tahun 2020 menjadi 21.762,68 ton pada tahun 2024. Peningkatan ini turut berdampak pada nilai *recycling rate*, yang semula hanya 1,61 persen di tahum 2020, sempat

menurun pada tahun 2022 menjadi 0,76 persen, dan naik signifikan menjadi 9,48 persen di tahun 2023 dan terus tumbuh menjadi 9,62 persen di tahun 2024.

Secara keseluruhan capaian penanganan sampah di Kota Serang menunjukkan perbaikan yang cukup baik, terutama sejak tahun 2023, dengan peningkatan signifikan pada volume daur ulang dan penanganan sampah. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021–2022, capaian tahun 2024 memperlihatkan bahwa strategi pengelolaan yang lebih komprehensif mulai membuahkan hasil. Untuk mendorong keberlanjutan, penguatan sistem pengurangan dari sumber serta perluasan fasilitas daur ulang perlu terus dioptimalkan.

2.1.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kota Serang memiliki potensi bencana antara lain banjir cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, hingga tsunami. Untuk potensi rawan bencana tsunami serta gelombang ekstrim dan abrasi hanya berada di Kecamatan Kasemen. Begitu pula dengan potensi rawan tanah longsor, hanya terjadi di Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Taktakan. Sedangkan potensi bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan kekeringan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Serang.

Di samping berbagai potensi pengembangan di masa depan, terdapat sejumlah daerah yang diidentifikasi sebagai daerah rawan bencana, khususnya bencana alam mengingat karakteristik wilayahnya yang rentan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040, wilayah rawan bencana di Kota Serang diidentifikasi sebagai Kawasan Rawan Bencana Alam yang masuk dalam kategori Kawasan Lindung dalam konteks Pola Ruang Wilayah Kota Serang. Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud meliputi 3 (tiga) kategori kawasan rawan bencana, yaitu:

1) Kawasan rawan banjir yang tersebar di Cipocok Jaya, Banjarsari, Ciracas, Sumur Pecung, Kaujon, Kota Baru, Cipare, Lopang, Kaligandu, Terondol, Sukawana, Priyayi, dan sejumlah titik di Kecamatan Kasemen;
2) Kawasan rawan gempa, gerakan tanah, longsor, dan banjir bandang yang terdapat di sebagian wilayah Taktakan dan Cipocok Jaya; serta
3) Kawasan rawan tsunami yang terdapat di sepanjang Pantai Utara Kota Serang yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa dan Selat Sunda.

Gambar II.5
Indeks Resiko Bencana Kota Serang Tahun 2020-2024

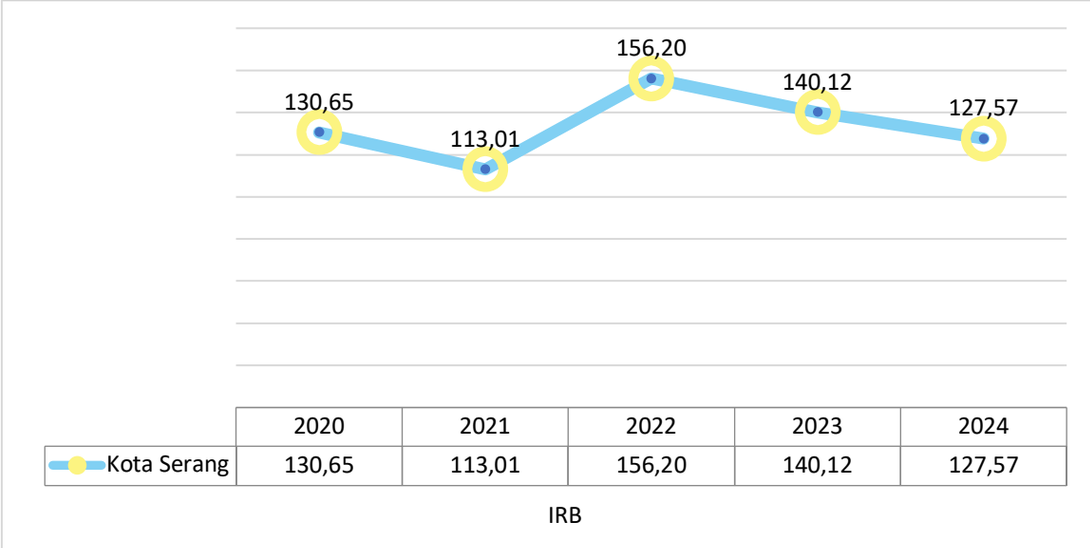

Sumber: Inarisk, BNPB 2025

Meski skala bencana yang terjadi masih dalam skala kecil dan bersifat lokal, namun penanganan yang sistematis dan efektif tetap diperlukan guna mencegah meluasnya cakupan dampak yang dihasilkan di masa mendatang. Termasuk upaya mencegah terjadinya bencana akibat gerakan tanah yang labil, yang dapat diantisipasi melalui implementasi rencana tata ruang yang relevan guna mengantisipasi terjadinya bencana tersebut. Potensi bencana yang dikaji dalam pengkajian risiko bencana BPBD Kota Serang meliputi bencana yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan berpotensi terjadi lagi. Adapun risiko bencana di Kota Serang terlihat dari capaian Indeks Resiko Bencana Kota Serang di tahun 2024 mengalami penurunan 12,55 poin menjadi 127,57. Penurunan ini menunjukkan efektivitas berbagai program mitigasi yang dilakukan pemerintah menunjukan hasil yang positif, seperti pembangunan infrastruktur pengendali banjir, perbaikan tata ruang, dan peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD.

Tabel II.16
Daftar Pemetaan Lokasi Rawan Bencana Kota Serang

Longsor		Kekeringan		Banjir	
Kecamatan	**Kelurahan**	**Kecamatan**	**Kelurahan**	**Kecamatan**	**Kelurahan**
Curug	Kemanisan	Curug	• Sukajaya • Tinggar • Cilaku • Curug	Curug	• Cilaku • Sukajaya
Cipocok Jaya	• Dalung • Gelam	Walantaka	• Kalodran • Kepuren • Teritih	Walantaka	• Pargeragung • Kepuren • Kalodran • Pipitan • Kiara

Longsor		Kekeringan		Banjir	
Kecamatan	**Kelurahan**	**Kecamatan**	**Kelurahan**	**Kecamatan**	**Kelurahan**
Taktakan	• Sayar • Cilowong	Cipocok Jaya	• Banjar Agung • Banjar Sari • Dalung • Cipocok Jaya • Penancang an	Cipocok Jaya	• Banjar Agung • Penancangan • Cipocok Jaya • Gelam • Banjar Sari
		Serang	• Sukawarna • Terondol • Kaligandu • Unyur	Serang	• Terondol • Kaligandu • Lopang • Unyur • Kota Baru • Cipare • Cimuncang
		Taktakan	• Taman Baru • Lialang • Cilowong	Taktakan	• Cilowong
		Kasemen	• Sawah Luhur • Bendung • Warung Jaud • Kilasah • Terumbu • Mesjid Priyayi	Kasemen	• Warung Jaud • Margaluyu • Kasemen • Banten • Kasunyatan • Kilasah • Mesjid Priyayi • Bendung • Sawah Luhur • Terumbu

Sumber: Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Tahun 2021-2041

Kelas risiko bencana yang merupakan rangkuman dokumen BPBD Kota Serang dalam menghasilkan kelas risiko untuk potensi bencana di Kota Serang dapat dilihat pada Tabel II.16. berikut:

Tabel II.17
Kelas Risiko Bencana Kota Serang Per Kecamatan

Kecamatan	Kapasitas							
	Banjir	**Cuaca Ekstrem**	**Gel. Ekstrem dan Abrasi**	**Gempa Bumi**	**Kebakaran Hutan dan Lahan**	**Kekeringan**	**Tanah Longsor**	**Tsunami**
Curug	Sedang	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	-	-
Walantaka	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	-	-
Cipocok Jaya	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	-
Serang	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	-	-
Taktakan	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	-
Kasemen	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	-	Sedang
Kota Serang	**Tinggi**	**Tinggi**	**Rendah**	**Sedang**	**Sedang**	**Sedang**	**Rendah**	**Sedang**

Sumber: Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Tahun 2021-2041

Sementara itu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Serang menunjukkan tren peningkatan positif dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan

kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola risiko, kerentanan, dan potensi gangguan terhadap stabilitas daerah. Pada analisis peningkatan IKD dari 0,45 persen pada tahun 2020 menjadi 0,61 persen di tahun 2024 menandakan bahwa Kota Serang mengalami penguatan kapasitas kelembagaan, ketahanan sosial-ekonomi, serta kemampuan respons terhadap berbagai potensi krisis, baik dalam aspek sosial, ekonomi, keamanan, maupun lingkungan.

Jika dibandingkan dengan kota di Provinsi Banten, capaian Kota Serang menempati posisi kedua setelah Kota Cilegon dan setara dengan capaian Provinsi Banten pada tahun 2024 dengan kelas ketahanan 0,61 (sedang). Dengan tren peningkatan IKD ini, Kota Serang semakin mampu menjaga daya tahan dan ketangguhan terhadap gangguan dan krisis yang mungkin terjadi. Capaian ini penting sebagai fondasi dalam perencanaan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan menuju ketahanan daerah yang lebih kokoh.

Tabel II.18
Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kota Serang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,45	0,46	0,47	0,58	0,61

Sumber: BPBD Provinsi Banten, 2020-2024

Berdasarkan kelas resiko bencana di atas sebagian besar kecamatan di Kota Serang memiliki kapasitas tinggi dalam menghadapi bencana banjir, cuaca ekstrem, dan gempa bumi. Kecamatan seperti Walantaka, Cipocok Jaya, Serang, dan Taktakan menunjukkan tingkat kapasitas tinggi untuk ketiga jenis bencana tersebut. Adapaun capaian pada penanganan gas rumah kaca dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.19
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	NA	NA	NA	NA	4,54
2	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	NA	NA	NA	NA	17,78

Sumber: Bappeda Kota Serang, 2024

Upaya pengendalian perubahan iklim di Kota Serang mulai menunjukkan hasil pada tahun 2024, dengan tercatatnya penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 8,22 persen dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 17,78. Meskipun tidak terdapat data pada tahun-tahun sebelumnya, capaian ini menandai langkah awal yang penting dalam komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan rendah karbon dan keberlanjutan lingkungan. Angka

tersebut mencerminkan adanya inisiatif atau kebijakan yang mulai berdampak, seperti efisiensi energi, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta pengembangan ruang terbuka hijau. Ke depan, konsistensi dan perluasan program penurunan emisi sangat dibutuhkan guna mencapai target lingkungan jangka panjang yang lebih ambisius.

2.1.1.7 Demografi

Kondisi kependudukan Kota Serang dapat dijadikan gambaran untuk memberikan pemahaman tentang kelompok sasaran pembangunan yang akan dituju sehingga mampu menciptakan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap tahunnya jumlah penduduk Kota Serang terus bertambah. Berdasarkan data dari Disdukcapil Kota Serang tahun 2025, jumlah penduduk Kota Serang menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 681.012 jiwa, dan meningkat menjadi 759.929 jiwa pada tahun 2024.

Laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuatif selama periode tersebut. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan cukup tinggi yaitu sebesar 4,42 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2023 menjadi masing-masing 3,12 persen dan 1,53 persen. Kemudian, di tahun 2024, angka pertumbuhan penduduk kembali naik menjadi 3,30 persen dan jika dirata-rata pertumbuhan selama 5 tahun sebesar 2,78 persen. Fluktuatif laju pertumbuhan ini mencerminkan dinamika mobilitas dan faktor demografi lainnya yang memengaruhi peningkatan jumlah penduduk di Kota Serang. Adapun kondisi saat ini berdasarkan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada Tabel II.19.

Tabel II.20
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Serang Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	681.012	702.228	724.552	735.651	759.929
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	4,42	3,12	3,18	1,53	3,30

Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, Tahun 2025

Perkembangan jumlah penduduk Kota Serang dalam rentang waktu dari tahun 2020 hingga 2024 digambarkan pada Tabel II.20. Kenaikan jumlah penduduk ini tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan alami, tetapi juga oleh arus migrasi. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya Kota Serang sebagai kawasan pemukiman bagi kaum *urban commuter* yang bekerja di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Tabel II.21
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2020–2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cipocok Jaya	96.549	99.710	103.679	105.853	110.115
2	Curug	56.940	59.249	62.004	63.299	65.679
3	Kasemen	102.368	106.737	111.205	113.979	118.347
4	Serang	229.901	232.787	235.355	234.993	239.153
5	Taktakan	97.250	101.629	105.768	108.129	112.962
6	Walantaka	98.004	102.116	106.541	109.398	113.673
Jumlah		**681.012**	**702.228**	**724.552**	**735.651**	**759.929**

Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, Tahun 2025

Kepadatan penduduk di Kota Serang terbilang cukup tinggi, dengan rata-rata mencapai 2.760 jiwa per km^2 pada Tahun 2024. Artinya, di setiap 1 kilometer persegi wilayah Kota Serang, rata-rata ada 2.760 orang yang tinggal menunjukkan Kota Serang dengan kondisi yang cukup padat. Tingginya kepadatan ini menimbulkan tantangan dalam penyediaan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Oleh karena itu, strategi pembangunan perlu menitikberatkan pada pemerataan fasilitas antarwilayah. Distribusi tingkat kepadatan penduduk Kota Serang sebagaimana terlihat pada Tabel II.21:

Tabel II.22
Distribusi Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2020–2024

No	Kecamatan	Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cipocok Jaya	2.831,35	2.924	3.040	3.104	3.098,65
2	Curug	1.461,50	1.521	1.591	1.625	1.567,51
3	Kasemen	1.486,83	1.550	1.615	1.655	1.655,37
4	Serang	8.659,17	8.768	8.865	8.815	8.699,28
5	Taktakan	1.590,09	1.662	1.729	1.768	1.785,10
6	Walantaka	2.680,63	2.793	2.914	2.992	3.118,63
Jumlah		**2.558,46**	**2.638**	**2.722**	**2.764**	**2.760,79**

Sumber: Badan Pusat Statisti, Kota Serang Dalam Angka, Tahun 2025

Sementara itu jumlah penduduk Kota Serang Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, total penduduk sebesar 759.929 jiwa dengan rincian penduduk Perempuan sebesar 372.777 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 387.512 jiwa.

Tabel II.23
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Serang Tahun 2024 (Jiwa)

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	31.824	29.738	61.562
5-9	38.515	36.175	74.690
10-14	36.525	34.297	70.822
15-19	28.890	27.582	56.472
20-24	33.303	31.929	65.232

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
25-29	34.897	33.475	68.372
30-34	33.697	32.268	65.965
35-39	32.004	30.035	62.039
40-44	28.528	27.810	56.338
45-49	25.303	25.344	50.647
50-54	21.230	21.210	42.440
55-59	16.909	16.344	33.253
60-64	11.465	11.235	22.700
65-69	6.982	7.057	14.039
70-74	4.102	4.178	8.280
75+	2.978	4.100	7.078
Total	**387.152**	**372.777**	**759.929**

Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk Kota Serang, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Selisih jumlah antara laki-laki dan perempuan sebesar 14.375 jiwa. Komposisi ini mencerminkan distribusi penduduk yang relatif seimbang antara kedua jenis kelamin, yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan berbasis gender di Kota Serang.

Sementara itu berdasarkan data tersebut penduduk usia produktif di Kota Serang, yaitu kelompok umur 15 hingga 64 tahun, merupakan bagian terbesar dari total populasi. Penduduk kelompok umur 15-19 tahun sampai dengan 60-64 tahun yang berjumlah 523.458 jiwa atau 68,9 persen dari total 759.929 jumlah penduduk. Dalam kelompok ini, penduduk laki-laki berjumlah sekitar 266.226 jiwa, sementara perempuan sekitar 257.232 jiwa. Proporsi penduduk usia produktif yang cukup signifikan, menjadi modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di Kota Serang.

Gambar II.6
Piramida Penduduk Kota Serang Tahun 2024

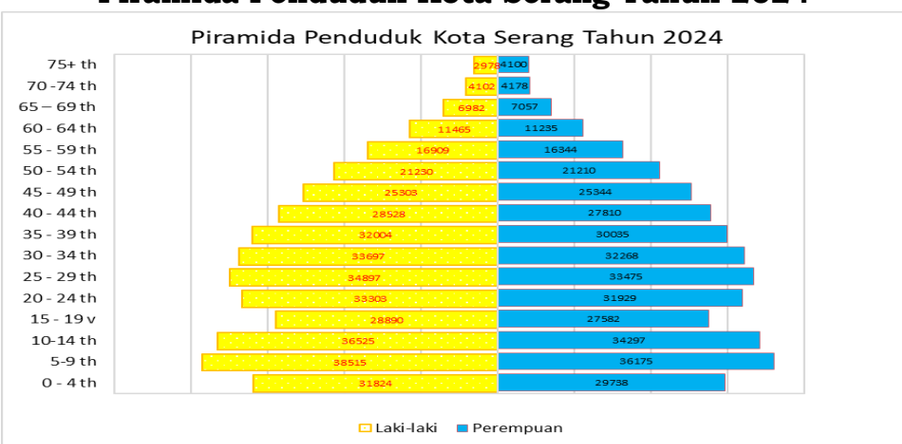

Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, Tahun 2025

Berdasarkan grafik piramida penduduk di atas, dapat disimpulkan bahwa, masyarakat di Kota Serang memiliki cukup banyak penduduk usia muda dan sebagian besar berada pada usia produktif.

Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan, Kota Serang selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terindikasi masih rendah, dimana klasifikasi terendah di tingkat pendidikan penduduk adalah tidak/belum bersekolah sebesar 29,78 persen dan tamat SD/sederajat sebesar 23,88 persen. Penduduk yang tamat SMA atau sederajat mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,08 persen. Tabel II.23 berikut memberikan gambaran komposisi penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan.

Tabel II.24
Jumlah Penduduk Kota Serang Menurut Pendidikan
Tahun 2020-2024

No	PENDIDIKAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tidak/Belum Sekolah	205.702	216.020	221.537	221.537	234.312
2	Belum Tamat SD / Sederajat	40.851	42.266	41.367	41.367	44.360
3	Tamat SD / Sederajat	172.673	171.903	171.129	171.129	171.705
4	SMP / Sederajat	85.477	87.300	87.584	87.584	89.464
5	SMA / Sederajat	146.605	153.140	157.586	157.586	161.250
6	Akademi / Diploma I, II, III / Sarjana Muda	11.811	12.052	12.193	12.193	12.298
7	Diploma IV / Strata I	35.452	37.919	40.043	40.043	42.077
8	Strata II	3.482	3.752	4.001	4.001	4.225
9	Strata III	175	200	211	211	238
	Jumlah	**681.012**	**702.228**	**724.552**	**735.651**	**759.929**

Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, Tahun 2024

Sementara itu dilihat dari ragam jenis pekerjaannya, Kota Serang mencerminkan karakteristik kawasan perkotaan transisional, dimana sektor jasa, perdagangan, dan industri tumbuh secara pesat. Gambaran tentang keragaman pekerjaan penduduk Kota Serang dapat dilihat pada Tabel II.24:

Tabel II.25
Jumlah Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2020–2024

No	Pekerjaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Belum/Tidak Bekerja/Ibu Rumah Tangga	360.717	375.291	390.406	399.250	415.661
2	Pelajar/Mahasiswa	101.595	102.686	105.800	104.466	107.272
3	Pensiunan	2.642	2.703	2.840	2.947	3.094
4	PNS/TNI/POLRI, Perangkat Desa	18.451	18.506	18.699	18.699	18.850
5	Petani/Pekebun/Nelayan/ Peternak	4.207	5.617	6.217	6.243	6.247
6	Wiraswasta	61.340	58.565	56.235	56.825	51.281
7	Karyawan Swasta, BUMN/BUMD	53.742	52.749	56.205	53.544	56.690
8	Buruh Harian Lepas	56.574	62.004	69.588	70.289	82.333
9	Dosen/Guru/Peneliti/Tenaga kesehatan	3.357	5.879	4.380	6.607	7.204

No	Pekerjaan	2020	2021	2022	2023	2024
10	Pedagang/Pialang	1.961	1.984	1.957	1.962	2.589
11	Lainnya	16.426	16.244	12.225	14.819	8.708
	JUMLAH	**681.012**	**702.228**	**724.552**	**735.651**	**759.929**

Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, jenis pekerjaan yang mendominasi dari penduduk Kota Serang adalah buruh harian lepas, diikuti dengan wiraswasta dan karyawan swasta/BUMN/BUMD. Sedangkan jenis pekerjaan belum/tidak bekerja komponennya adalah ibu rumah tangga dan anak yang masih dalam tanggungan orang tua.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

Analisis kinerja tentang aspek kesejahteraan masyarakat pada kondisi perekonomian di Kota Serang berdasarkan beberapa indikator ekonomi makro, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia. Indikator-indikator tersebut umumnya digunakan untuk mengukur aspek kesejahteraan masyarakat secara umum mengingat sifatnya yang merupakan komposit dari fungsi perekonomian daerah yang merepresentasi kesejahteraan rakyat secara umum.

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Selisih antara pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya menghasilkan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang merupakan ukuran peningkatan kapasitas produksi suatu daerah setiap tahunnya. Besarnya nilai tambah produk dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian masyarakat pada suatu tahun atau waktu tertentu dikenal dengan produk domestik regional bruto atau PDRB. Gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi serta konstruksi perekonomian daerah di Kota Serang dapat dilihat pada Gambar II.7.

Gambar II.7
Grafik Perkembangan LPE Kota Serang Tahun 2020 – 2024

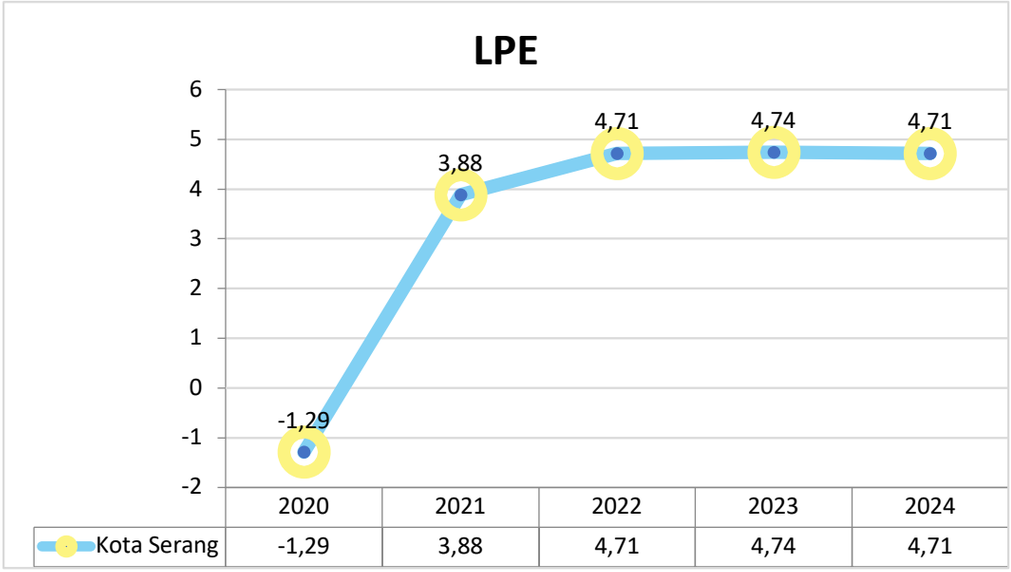

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data BPS (2024), pertumbuhan ekonomi Kota Serang menunjukkan angka yang positif sepanjang tahun 2020–2024. LPE pada tahun 2020 sebesar -1,29 persen akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan hampir semua sub sektor perekonomian mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Kota Serang pada tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Jika melihat capaian LPE kurun waktu tahun 2021– 2023, LPE Kota Serang terus tumbuh dari 3,88 persen hingga mencapai 4,74 persen. LPE Kota Serang Kembali mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2024 menjadi 4,71 persen. Dari 17 sub sektor PDRB semuanya mengalami tren peningkatan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.26
Perkembangan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

No	SEKTOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.075,95	1.074,11	1.087,94	1.127,75	1.183,70
2	Pertambangan & Penggalian	1,34	1,30	1,26	1,26	1,28
3	Industri Pengolahan	1.065,30	1.092,30	1.158,15	1.224,08	1.302,98
4	Pengadaan Listrik dan Gas	28,36	29,98	33,59	34,59	35,62
5	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	6,88	7,35	7,98	8,43	8,54

No	SEKTOR	2020	2021	2022	2023	2024
6	Konstruksi	3.792,79	4.153,48	4.427,68	4.535,69	4.786,16
7	Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.531,14	6.660,60	6.927,55	7.252,35	7.393,40
8	Transportasi dan Pergudangan	1.025,95	1.085,42	1.152,02	1.217,16	1.275,88
9	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	1.387,76	1.439,32	1.545,50	1.684,75	1.809,14
10	Informasi dan Komunikasi	1.479,71	1.572,68	1.669,19	1.804,62	1.916,05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	701,21	732,88	736,03	763,73	801,07
12	*Real Estate*	2.351,49	2.428,38	2.561,12	2.654,51	2.729,93
13	Jasa Perusahaan	190,92	185,99	191,07	205,35	214,69
14	Administrasi Pemerintahan. Pertanahan Dan Jaminan sosial Wajib	1.086,63	1.094,13	1.123,89	1.123,64	1.286,28
15	Jasa Pendidikan	880,82	875,713	873,94	930.822	960.703
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	506,31	550,76	569,10	612.208	665.285
17	Jasa Lainnya	406,12	410,38	429,01	474.356	492.393
	Jumlah	**22.518,66**	**23.392,75**	**24.495,02**	**25.655,61**	**26.863,08**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Meningkatnya PDRB atas dasar harga berlaku dalam lima tahun (2020-2024) menggambarkan kondusifitas iklim perekonomian daerah pada kurun waktu tersebut. PDRB ADHK meningkat pada tahun 2020 sebesar 22.518.66 miliar rupiah menjadi 26.863.08 miliar rupiah pada tahun 2024. Pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan positif sektor-sektor pembentuknya. Sementara itu perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dalam lima tahun (2020-2024) menggambarkan kondusivitas iklim perekonomian daerah pada kurun waktu tersebut. PDRB ADHB meningkat pada tahun 2020 sebesar 31.602,58 miliar rupiah menjadi 42.988,41 miliar rupiah pada tahun 2024. Pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan positif sektor-sektor pembentuknya. Secara umum, tren pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi di Kota Serang, serta peran pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mendorong aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Tabel II.27
Perkembangan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.722,13	1.745,45	1.856,19	2.022,15	2.196,87
2	Pertambangan & Penggalian	1,95	1,91	1,97	2,01	2,00
3	Industri Pengolahan	1.416,47	1.483,75	1.663,44	1.812,04	1.980,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	52,00	54,98	62,34	65,70	67,45
5	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	7,98	8,62	9,45	10,07	10,68
6	Konstruksi	5.901,56	6.741,34	7.605,94	8.093,97	8.730,78
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.842,51	9.117,72	10.030,28	10.934,73	11.596,36
8	Transportasi dan Pergudangan	1.481,45	1.595,59	1.827,27	2.094,06	2.247,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.919,04	2.007,59	2.198,94	2.429,23	2.670,35
10	Informasi dan Komunikasi	1.295,43	1.372,41	1.474,59	1.608,45	1.724,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.025,76	1.088,17	1.152,26	1.236,58	1.320,17
12	*Real Estate*	2.910,88	3.046,94	3.323,20	3.546,54	3.721,93
13	Jasa Perusahaan	288,48	284,94	306,62	342,53	370,93
14	Administrasi Pemerintahan. Pertanahan dan Jaminan sosial Wajib	1.940,10	2.051,49	2.169,67	2.253,73	2.688,52
15	Jasa Pendidikan	1.411,05	1.461,93	1.493,44	1.632,63	1.763,21
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	668,98	797,75	854,24	949,27	1.047,77
17	Jasa Lainnya	641,65	643,39	693,99	804,23	848,40
	Jumlah	**31.602,58**	**33.503,98**	**36.723,84**	**39.837,92**	**42.988,41**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2) PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita merupakan indikator kesejahteraan yang dihitung dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan data BPS sepanjang tahun 2020-2024, diketahui bahwa PDRB per kapita Kota Serang mengalami kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 PDRB per Kapita Kota Serang mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp 50,98 juta per jiwa dan pada tahun 2023 terus mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 55,04 juta. Adapun pada tahun 2024 PDRB Per Kapita meningkat menjadi Rp 58.49 juta per jiwa, hal ini menggambarkan

kecenderungan meningkatnya kesejahteraan rakyat sebagaimana tercermin dari tren peningkatan nilai PDRB per kapita tersebut. Namum demikian, jika dilihat dari tren peningkatan yang ada, capaian saat ini masih cukup jauh untuk mencapai target angka PDRB Per Kapita Rp 90.83 juta pada tahun 2030. Diperlukan upaya dan strategi yang cepat serta tepat agar Pemerintah Kota Serang mampu mencapai target yang telah ditentukan dalam upaya mendukung target Provinsi dan Indonesia Emas 2045, yaitu PDRB per kapita sebesar Rp 300 juta.

Gambar II.8
Grafik PDRB Per Kapita Kota Serang Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)

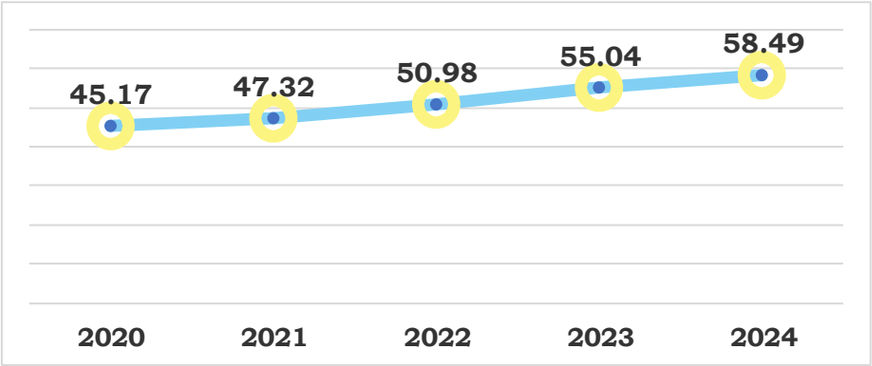

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

3) Tingkat Kemiskinan

Meningkatnya kinerja perekonomian daerah berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial. Salah satu indikatornya tercermin dari angka kemiskinan atau persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di Kota Serang. Fluktuasi angka kemiskinan di daerah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti daya beli masyarakat, tingkat pengangguran, dan kondisi ekonomi secara umum. Pandemi COVID-19 sempat menyebabkan lonjakan angka kemiskinan, dari 6,06 persen pada tahun 2020 menjadi 6,79 persen pada tahun 2021. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi, angka tersebut menurun menjadi 5,94 persen pada tahun 2022, meskipun kembali meningkat menjadi 6,20 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, angka kemiskinan kembali menunjukkan perbaikan dengan penurunan menjadi 5,65 persen.

Penurunan angka kemiskinan di Kota Serang didorong oleh meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, serta bertambahnya kesempatan kerja di sektor-sektor tertentu.

Gambar II.9
Grafik Persentase Penduduk Miskin Kota Serang Tahun 2020-2024

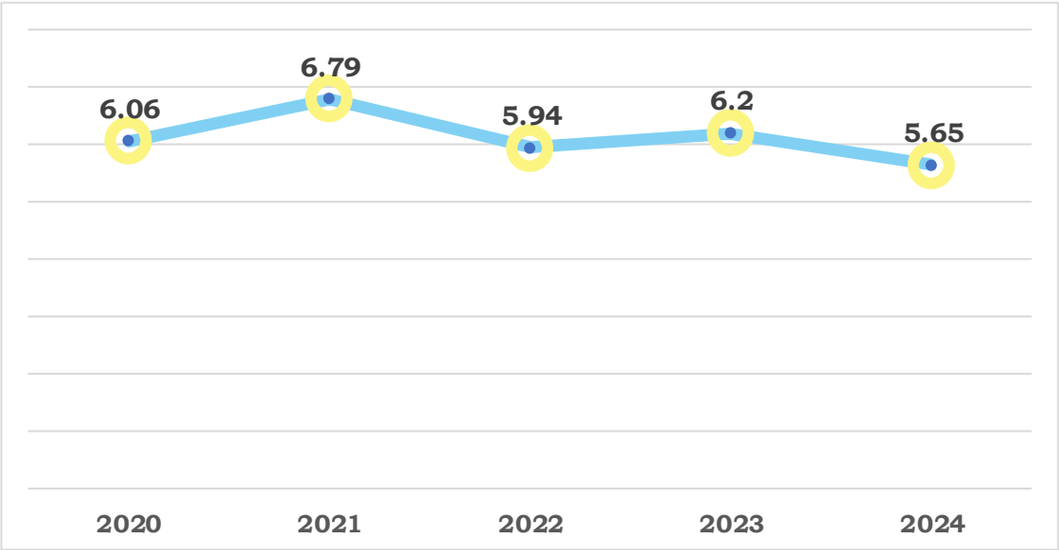

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan selama periode 2020 hingga 2024, tingkat kemiskinan di Kota Serang menunjukkan tren fluktuatif. Jika dibandingkan dengan Provinsi Banten, tingkat kemiskinan Kota Serang umumnya sedikit lebih tinggi hingga tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kota Serang tercatat lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Provinsi Banten, yang berada di angka 5,84 persen pada 2024.

Penurunan angka kemiskinan di Kota Serang dalam lima tahun terakhir menunjukkan arah yang positif, khususnya tahun 2023 pasca-pandemi. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021, kondisi tersebut berhasil dikendalikan, dan tren penurunan berhasil dipertahankan hingga tahun 2024, bahkan berada di bawah rata-rata nasional dan Provinsi. Upaya Pemerintah Kota Serang dalam menekan jumlah penduduk miskin mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang diterapkan di tingkat kota.

Gambar II.10
Grafik Perkembangan Penduduk Miskin Kota Serang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

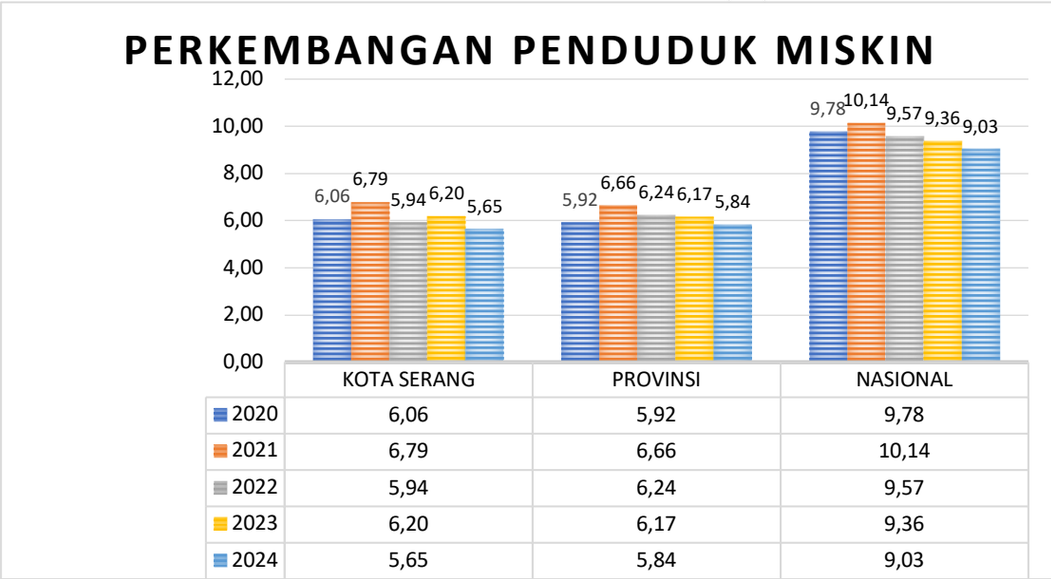

	KOTA SERANG	PROVINSI	NASIONAL
2020	6,06	5,92	9,78
2021	6,79	6,66	10,14
2022	5,94	6,24	9,57
2023	6,20	6,17	9,36
2024	5,65	5,84	9,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar II.11
Grafik Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Tahun Kota Serang Tahun 2020–2024 (Dalam Ribu Rupiah)

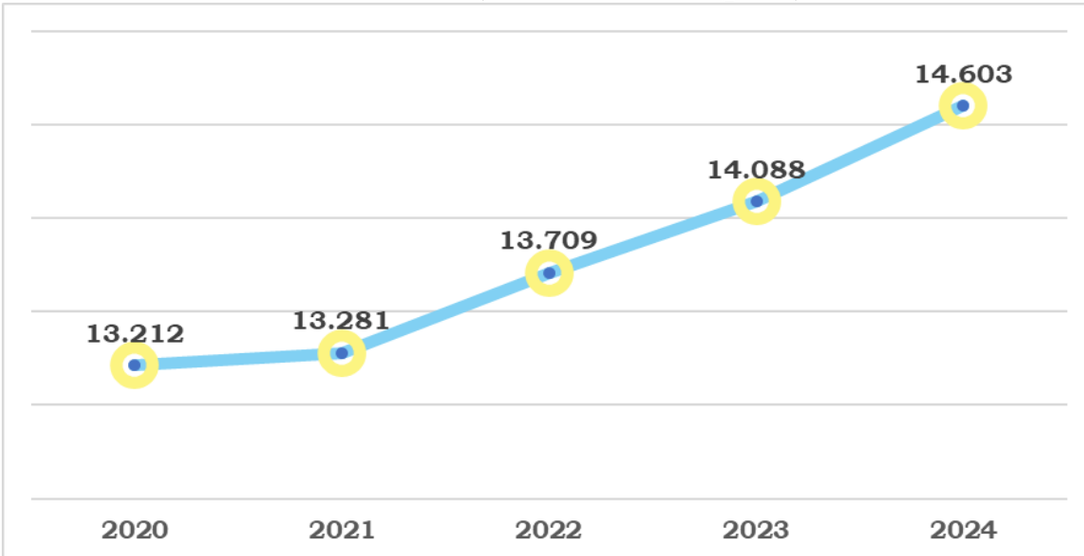

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

4) Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Indeks ini bermanfaat untuk mengevaluasi kesenjangan ekonomi, membantu perumusan kebijakan pemerataan pendapatan, serta menilai efektivitas program pembangunan sosial. Dengan memahami Indeks Gini, pemerintah dan pemangku kebijakan dapat merancang strategi yang lebih tepat untuk mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Nilai Koefisien Gini dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

- G < 0,3 = Ketimpangan rendah
- 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang
- G > 0,5 = Ketimpangan tinggi

Gambar II.12
Indeks Gini Kota Serang Tahun 2020-2024

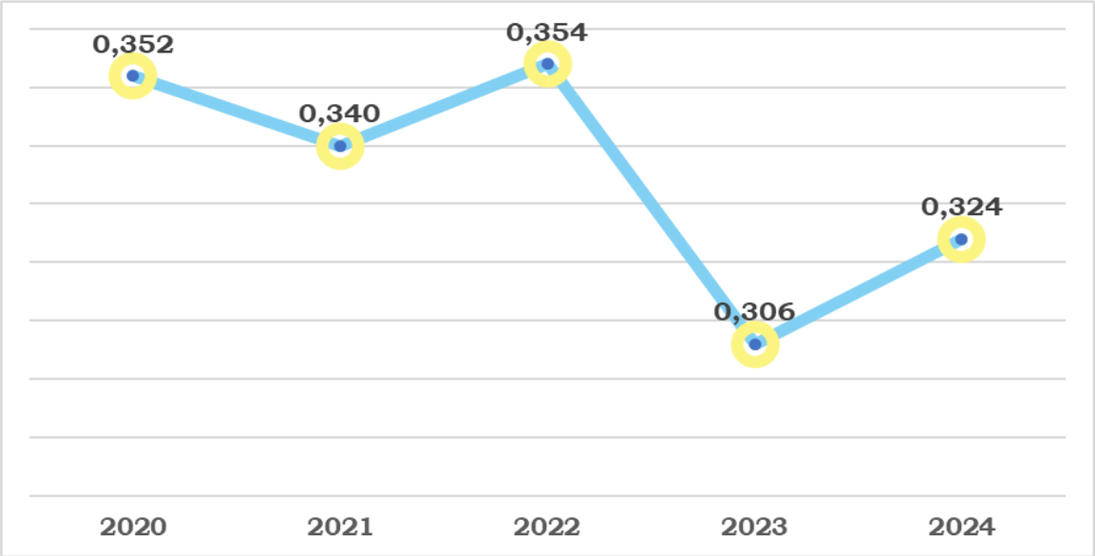

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan Indeks Gini di Kota Serang selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai Indeks Gini tercatat sebesar 0,352, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan berada pada kategori sedang. Nilai ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,340, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan masyarakat.

Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2022, ketimpangan pendapatan di Kota Serang masih berada dalam kategori sedang dan tetap memenuhi target nasional yang ditetapkan sebesar 0,36. Variasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dinamika pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur tenaga kerja, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi. Penurunan Indeks Gini pada tahun 2023 menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendapatan mulai memberikan dampak positif, didukung oleh pembangunan di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur yang semakin merata melalui program-program kewilayahan.

Namun, kenaikan kembali pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam menjaga kesinambungan

pemerataan, terutama akibat faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi makro, ketimpangan sektor informal dan formal. Hal ini memerlukan intervensi kebijakan yang lebih inklusif, seperti memperluas jangkauan bantuan sosial produktif, memperkuat akses UMKM terhadap modal dan pasar, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

5) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Serang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Besar kecilnya TPT mencerminkan tingkat keseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Dalam empat tahun terakhir, angka pengangguran mengalami fluktuasi, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2021 sebesar 9,41 persen akibat dampak pandemi COVID-19. Seiring dengan pemulihan ekonomi, angka pengangguran berangsur menurun hingga mencapai 7,45 persen pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja, sekitar 7 orang masih menganggur, dan sebagian besar disebabkan karena belum optimalnya penciptaan lapangan kerja di beberapa sektor. Adapun pada tahun 2024 TPT menurun menjadi 7,12 persen.

Hal ini menunjukkan perlunya penguatan strategi untuk menurunkan angka pengangguran secara lebih signifikan, antara lain melalui peningkatan ketenagakerjaan, seperti bursa kerja dan pelatihan tenaga kerja, yang saat ini masih relatif rendah dalam pelaksanaannya. Selain itu, permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh angkatan kerja, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan laju penciptaan lapangan kerja turut memperketat persaingan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Serang perlu untuk mengambil kebijakan yang lebih progresif dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja serta peningkatan investasi yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

Gambar II.13
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Serang Tahun 2020 – 2024

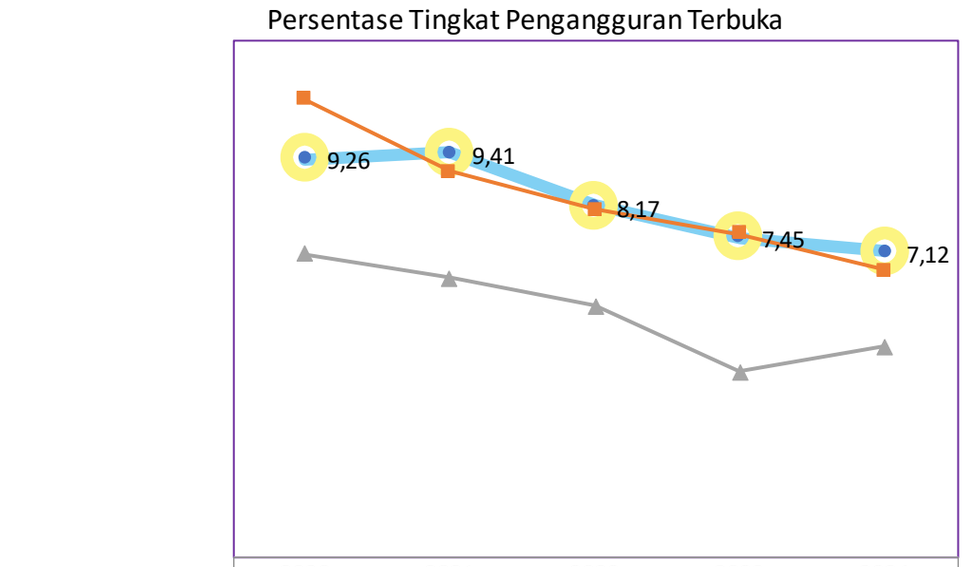

	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Serang	9,26	9,41	8,17	7,45	7,12
Provinsi Banten	10,64	8,98	8,09	7,52	6,68
Nasional	7,07	6,49	5,86	4,32	4,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kecenderungan meningkatnya kesejahteraan rakyat juga tercermin dari meningkatnya indikator komposit pembangunan manusia. yang menggambarkan secara kuantitatif kapasitas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Serang tercermin dari kemajuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur tiga aspek utama: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Selama periode tahun 2020-2024, IPM Kota Serang terus menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2024, IPM Kota Serang mencapai 76,90 poin, meningkat dibandingkan tahun 2023, dengan komponen penyusunnya yaitu Indeks Pendidikan sebesar 65,41 poin, Indeks Kesehatan 85,09 poin, dan Indeks Pengeluaran 81,71 poin. Dari ketiga aspek tersebut, Indeks Kesehatan memiliki nilai tertinggi, yang mencerminkan kualitas layanan kesehatan di Kota Serang yang relatif baik. Sementara itu, Indeks Pendidikan tercatat sebagai komponen dengan nilai terendah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Serang masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Selain upaya peningkatan

akses dan kualitas pendidikan, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga perlu ditingkatkan guna mendorong perbaikan angka IPM. Mengingat Indeks Pengetahuan berhubungan erat dengan Indeks Pendapatan dan Indeks Kesehatan, perbaikan di sektor pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan IPM Kota Serang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel II.27:

Tabel II.28
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang
Tahun 2020–2024

NO	Komponen IPM	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,43	74,54	74,84	75,13	75,31
2	Indeks Kesehatan	Poin	83,74	83,91	84,37	84,82	85,09
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,78	12,79	12,81	12,82	12,83
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,76	8,89	8,9	8,91	8,93
5	Indeks Pendidikan	Poin	64,7	65,16	65,25	65,31	65,41
6	Pengeluaran Per Kapita	ribu rupiah	13.212	13.281	13.709	14.088	14.603
7	Indeks Pengeluaran	Poin	78,65	78,81	79,78	80,61	81,71
IPM Kota Serang		**Poin**	**75,25**	**75,53**	**76,01**	**76,43**	**76,90**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang pada periode tahun 2020-2024 berada di atas rata-rata IPM Provinsi Banten serta IPM Nasional. Capaian ini dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu Indeks Pengetahuan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Pendapatan. Peningkatan Indeks Kesehatan di Kota Serang didorong oleh naiknya angka Usia Harapan Hidup (UHH), sebagaimana tercatat dalam hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (LF SP 2020).

Gambar II.14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang
Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

B. Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang sangat strategis karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Derajat kesehatan menjadi salah satu satu parameter kesejahteraan rakyat yang diukur dari sejumlah indikator, yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Usia Harapan Hidup (AHH), Persentase Balita Gizi Buruk, Cakupan Desa Siaga Aktif dan Prevalensi Stunting. Tabel II.28 berikut ini memberikan gambaran tentang kondisi eksisting dan capaian kinerja layanan kesehatan di Kota Serang.

Tabel II.29
Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	100.000 /kelahiran	130.38	129,02	157,94	161,40	160,17
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	1000 /kelahiran	2,18	0,99	2,52	4,84	5,77
3	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,43	74,54	74,84	75,13	75.31
4	Persentase balita gizi buruk	%	0,16	0,17	0,49	0,28	0,16
5	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	68.42
6	Prevalensi Stunting	%	NA	23,40	23,80	22,30	22,90

Sumber: Dinkes Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Pada tahun 2024, kondisi kesehatan masyarakat di Kota Serang menunjukkan dinamika yang beragam. Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami fluktuasi, dimulai dari 130,38 per 100.000 angka kelahiran hidup pada tahun 2020, sedikit membaik di tahun 2021 menjadi 129,02 per 100.000 angka kelahiran hidup, kemudian meningkat tajam hingga mencapai 161,40 per 100.000 angka kelahiran hidup pada tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 160,17 per 100.000 angka kelahiran hidup pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius dalam upaya menekan angka kematian ibu di Kota Serang. Kondisi ini perlu menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Serang, mengingat capaian saat ini masih jauh dari target *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu 81 per 100.000 kelahiran hidup.

Pada periode tiga tahun terakhir Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan kenaikan, dari 2,52 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2022 menjadi 5,77 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Meskipun sempat menurun di tahun 2021 yaitu 0,99 per 1000 kelahiran hidup, terjadi lonjakan signifikan setelahnya, yang mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Dalam hal status gizi anak, Kota Serang menunjukkan tren perbaikan yang positif.

Persentase balita dengan gizi buruk berhasil ditekan menjadi 0,16 persen sepanjang tahun 2024, mencerminkan peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan bahwa program peningkatan gizi balita yang dijalankan mulai membuahkan hasil nyata.

Angka Harapan Hidup juga menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Pada tahun 2024, Angka Harapan Hidup di Kota Serang mencapai 75,31 tahun, hal mencerminkan kualitas hidup dan layanan kesehatan yang semakin baik. Namun demikian, terdapat tantangan pada sektor kesiapsiagaan masyarakat. Cakupan desa siaga aktif mengalami penurunan drastis sebesar 68,42 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 100 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya kendala dalam mempertahankan keberlangsungan dan keaktifan program desa siaga, yang perlu menjadi fokus perhatian ke depan.

Sementara itu, tren positif terjadi di indikator prevalensi Stunting di Kota Serang. Pada tahun 2022 tercatat Prevalensi sebesar 23,80 persen. Angka tersebut terus mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 22,90 persen. Ini menujukan bahwa upaya pemerintah dalam program penurunan stunting berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa kemajuan di bidang kesehatan, beberapa indikator menunjukkan perlunya penguatan program, terutama terkait kesiapsiagaan komunitas dan keselamatan ibu. Dengan adanya kondisi ini diharapkan *stakeholder* terkait tetap meningkatkan kinerja dan program prioritas dalam rangka mencapai target stunting pada tahun 2024 sesuai arahan Presiden RI.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Salah satu bidang yang sangat strategis dan mendasar dalam pembangunan daerah antara lain adalah bidang pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat akan sangat mendukung pembangunan Kota Serang secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan melalui tingkat pendidikan yang tinggi maka tingkat kemajuan pembangunan akan berjalan searah dengan daya saing sumber daya manusia di Kota Serang. Hal ini pula yang mendasari Pemerintah Kota Serang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kota Serang. Tabel II.29 berikut mendeskripsikan indikator capaian kinerja pendidikan di Kota Serang pada kurun waktu 2020-2024.

Tabel II.30
Capaian Kinerja Pendidikan Kota Serang Tahun 2020–2024

No	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	APMSD/MI/Sederajat	%	100	100	100	100	90,92
2	APMSMP/MTs/Sederajat	%	99,46	99,47	99,98	100	74,98
3	Angka Partisipasi PAUD	%	93,66	93,67	94,23	94,95	66,94
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	60,84
5	Angka Melek Huruf	%	100	100	100	100	100
6	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Thn	8,76	8,89	8,90	8,91	8,93
7	Angka Partisipasi Kasar (APK)						
7.1	APKSD/MI/Sederajat	%	126,51	126,52	125,74	100,69	98,32
7.2	APKSMP/MTs/Sederajat	%	117,97	117,98	118,05	100,22	88,80
7.3	APKSMA/SMK/MA/Sederajat	%	97,16	97,89	103,79	108,34	99,75
7.4	APMSMA/SMK/MA/Sederajat	%	71,89	70,57	75,10	78,56	71,41
8	Angka Putus Sekolah:						
8.1	SD/MI	%	0,05	0,05	0,01	0,21	0,67
8.2	SMP/MTs	%	0,25	0,25	0,14	0,22	0,07
9	Angka Kelulusan:						
9.1	SD/MI	%	100	100	100	100	100
9.2	SMP/MTs	%	100	100	100	100	99
10	Angka Melanjutkan:						
10.1	Angka Melanjutkan(AM)dari SD/MIke SMP/MTs	%	100	100	100	100	97,73
10.2	Angka Melanjutkan (AM) Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	99,63
11	Literasi Numerasi:						
11.1	Rata-rata Literasi SD	%	NA	43,47	48,51	52,38	56,05
11.2	Rata-rata Literasi SMP	%	NA	59,61	61,41	64,56	68,97
11.3	Rata-rata Numerasi SD	%	NA	32,24	35,87	41,19	50,64
11.4	Rata-rata Numeraasi SMP	%	NA	59,61	61,43	58,29	61,57

Sumber: Kemdikbud, Data Agregat Disdikbud Kota Serang (2024) & SIPD Kota Serang, 2025

Sejumlah indikator makro pembangunan manusia antara lain adalah Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tiap jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami peningkatan di Tahun 2023. Namun terjadi penurunan APK dan APM pada tahun 2024 hal ini disebabkan adanya evaluasi sinkronisasi data dapodik sehingga formulasi perhitungan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Angka Melek Huruf menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Data pada dinas terkait menunjukkan peningkatan Angka Melek Huruf selama kurun waktu lima tahun mencatat 100 persen. Demikian pula dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang dari waktu ke waktu juga mengalami peningkatan dimana tahun 2020 RLS hanya sebesar 8,76 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 8,93 tahun. Dimana jika dilihat dari kondisi data jumlah peserta didik berdasarkan jenis kelamin tahun ajaran 2024-2025, tingkat pendidikan PAUD memiliki jumlah 8.331 laki-laki dan 7.923 perempuan. Tingkat SD 41.965 laki-laki dan 3.949

perempuan. Tingkat SMP 14.583 laki-laki dan 14.123 perempuan. Serta RLS kesetaraan 5.174 laki-laki dan 3.176 perempuan.

Pada tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota menunjukan capaian yang positif dengan realisasi capaian pada tahun 2020 hingga 2023 sebesar 100 persen, ini menujukan bahwa partisipasi pendidikan kesetaraan di Kota Serang berjalan dengan baik, namun terjadi penurunan pada tahun 2024 sebesar 60,84 persen. Dengan kondisi penurunan tersebut, Pemerintah Kota Serang perlu melakukan revitalisasi program pendidikan kesetaraan, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan PKBM, melaksanakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan kesetaraan dalam peningkatan kualitas SDM, serta memperkuat monitoring dan evaluasi data partisipasi secara rutin agar lebih akurat dan tepat waktu.

Dari sisi pendidikan, masih banyak anak-anak di Kota Serang yang putus sekolah di jenjang SD/MI dan SMP/MTS sederajat. Faktor ekonomi dan pendapatan orang tua, budaya lingkungan sekitar, serta motif dan kepentingan merupakan beberapa faktor yang menyebabkan angka putus sekolah tersebut. Salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pendidikan adalah pembebasan biaya pendidikan sekolah dasar. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi siswa berprestasi yang kesulitan melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya dan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan pendidikan di Kota Serang. Meskipun pemerintah telah berupaya menyediakan akses pendidikan yang lebih luas dan merata, kenyataannya masih terdapat sejumlah anak yang belum terlayani pada jenjang pendidikan formal. Gambaran mengenai jumlah ATS di Kota Serang tahun 2024–2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.31
Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) Kota Serang
Tahun 2024 – 2025

Kecamatan	Sekolah Dasar (SD)	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Sekolah Menengah Atas (SMA)
Taktakan	53	136	110
Serang	152	166	158
Curug	26	50	68
Kasemen	30	246	113
Cipocok Jaya	14	25	59
Walantaka	85	95	166
Jumlah	360	718	674

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Serang pada tahun 2024–2025 tercatat sebanyak 1.752 anak yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan. Angka tertinggi terdapat pada jenjang SMP dengan 718 anak, diikuti oleh jenjang SMA dengan 674 anak, sedangkan jenjang SD relatif lebih rendah dengan 360 anak. Dari sisi wilayah, Kecamatan Serang memiliki ATS terbanyak pada tingkat SD (152 anak), sementara Kasemen mencatat ATS tertinggi pada jenjang SMP (246 anak). Adapun jumlah ATS pada tingkat SMA paling besar berada di Kecamatan Walantaka dengan 166 anak. Hal ini menunjukkan adanya variasi permasalahan pendidikan di tiap kecamatan, baik dari sisi akses, keterjangkauan, maupun faktor sosial-ekonomi masyarakatnya.

Analisis Potensi Penyebab Anak Tidak Sekolah di Kota Serang Tingginya jumlah ATS di Kota Serang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kondisi Sosial-Ekonomi : Masih terdapat keluarga dengan tingkat ekonomi rendah sehingga anak lebih diarahkan untuk membantu pekerjaan orang tua dibanding melanjutkan pendidikan, terutama di tingkat SMP dan SMA yang membutuhkan biaya tambahan.
2. Aksesibilitas dan Sarana Pendidikan : Beberapa wilayah, khususnya di daerah pinggiran seperti Kasemen dan Walantaka, memiliki keterbatasan sarana sekolah maupun akses transportasi, sehingga berpengaruh pada angka partisipasi sekolah.
3. Kesadaran Pendidikan : Faktor budaya dan kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan juga berkontribusi, terutama di kalangan masyarakat yang masih memandang pendidikan sebagai beban daripada investasi jangka panjang.
4. Perkawinan Dini dan Faktor Sosial Lain : Untuk jenjang SMA, terdapat kasus anak putus sekolah akibat perkawinan dini, pergaulan bebas, atau bekerja lebih awal.
5. Perpindahan dan Administrasi Kependudukan : Sebagian data ATS dapat muncul akibat anak pindah domisili namun belum terdata dalam sistem pendidikan daerah, sehingga terlihat tidak bersekolah meskipun sebenarnya melanjutkan pendidikan di luar wilayah Kota Serang.

D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Pemerintah Kota Serang terus berkomitmen untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang adaptif sebagai bagian dari upaya menanggulangi kemiskinan, mengurangi kerentanan sosial, serta memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai guncangan, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Perlindungan sosial yang adaptif di Kota Serang dirancang tidak hanya untuk memberikan bantuan pada kondisi normal, tetapi juga mampu merespon secara cepat dan efektif saat terjadi bencana, krisis ekonomi, maupun situasi darurat lainnya seperti pandemi. Program ini menggabungkan pendekatan bantuan sosial reguler, penguatan sistem pendataan, dan mekanisme respon krisis yang fleksibel dan tepat sasaran.

Tabel II.32
Perkembangan Indikator Sosial Kota Serang Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sarana Sosial	30	30	31	21	21
	a. Panti Asuhan	28	28	29	19	19
	b. Panti Jompo	0	0	0	0	0
	c. Panti Rehabilitasi	1	1	1	1	1
	d. Rumah Singgah	1	1	1	1	1
2	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial	63,31	75,24	67,25	47,49	0,18
3	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	64,18	75,61	67,9	48,6	40,83
4	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat	100	100	100	100	91,67
5	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	100	100	100	100	100
6	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	31,19	6,02	33,3	100	12,67
7	Tingkat Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	70,79	6,74	100	100	100

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
8	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	NA	NA	NA	62,54	12,09

Sumber: Dinas Sosial Kota Serang & SIPD Kota Serang, Tahun 2025

Dari Tabel II.31 di atas persentase PMKS dapat ditekan walaupun pelayanan terhadap PMKS belum sepenuhnya tertangani. Namun Kota Serang belum memiliki panti jompo dan kurangnya panti rehabilitasi dan rumah singgah sehingga pelayanan sosial yang dilakukan kurang maksimal. Kota Serang menunjukkan komitmen tinggi dalam pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan dan korban bencana. Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan dan pengemis mengalami peningkatan signifikan, yaitu mencatatkan sebesar 70,79 persen di tahun 2020 dan sempat turun menjadi 6,74 persen di tahun 2021, kemudian mencapai 100 persen sejak tahun 2022 hingga 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan layanan sosial yang signifikan. Sementara itu untuk korban bencana alam dan sosial, kebutuhan dasar mereka telah terpenuhi 100 persen dalam 5 tahun terakhir baik pada saat terjadinya bencana maupun setelah masa tanggap darurat.

Adapun terkait jaminan sosial ketenagakeraan di Kota Serang, tercatat 62,54 persen pada tahun 2023 dan mengalami penurunan, pekerja yang sudah terlindungi di tahun 2024 sejumlah 28.821 pekerja atau baru mencapai 12.09 persen, masih terdapat 209.573 pekerja atau 87.91 persen yang belum terlindungi. Pemerintah Kota Serang masih belum berhasil dalam program jaminan ketenagakerjaan. Hal ini butuh upaya intensif yang perlu dilakukan pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan jumlah peserta jaminan ketenagakerjaan.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten memiliki identitas kuat sebagai kota yang religius dan kaya akan budaya lokal. Semangat "Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju" mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Serang dalam membangun masyarakat yang beriman, toleran, harmonis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang luhur. Beragama maslahat berarti mengembangkan kehidupan keagamaan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial. Di Kota Serang, hal ini diwujudkan melalui:

1. Penguatan lembaga keagamaan dan pendidikan keagamaan;
2. Peningkatan peran tokoh agama dalam pembinaan moral masyarakat;
3. Pelibatan masyarakat dalam program keagamaan yang inklusif dan menyejukkan;
4. Toleransi antarumat beragama yang dijaga melalui dialog dan kerja sama lintas iman.

Kerukunan antarumat beragama merupakan pondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten yang memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya, senantiasa menempatkan harmoni sosial sebagai prioritas dalam pembangunan manusia dan masyarakat. Salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat kohesi sosial tersebut adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

Tabel II.33
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Kota Serang 2020-2024

No	Tahun	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Kategori
1	2020	88,00	Rukun Sangat Tinggi
2	2021	85,00	Rukun Sangat Tinggi
3	2022	89,00	Rukun Sangat Tinggi
4	2023	86,05	Rukun Sangat Tinggi
5	2024	76,00	Rukun Tinggi

Sumber: Kemenag Kota Serang, 2025

Berdasarkan tabel diatas selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), IKUB Kota Serang menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama. Pada tahun 2020, IKUB Kota Serang tercatat sebesar 88,00 yang termasuk dalam kategori *Rukun Sangat Tinggi*. Nilai ini sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 85,00, namun masih berada dalam kategori yang sama. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 89,00, tertinggi selama lima tahun terakhir, yang mengindikasikan bahwa suasana kehidupan beragama di Kota Serang berjalan sangat harmonis dan saling menghargai.

Pada dua tahun terakhir, IKUB Kota Serang mengalami penurunan menjadi 86,05, di tahun 2023 (Rukun Sangat Tinggi) dan tahun 2024, nilai IKUB tercatat sebesar 76,00 persen sehingga masuk dalam kategori Rukun Tinggi. Meskipun masih tergolong cukup baik, namun tren penurunan ini dapat menjadi sinyal perlunya penguatan strategi dan

kolaborasi lintas sektor dalam menjaga dan mengembangkan kerukunan umat beragama. Sementara itu, berkebudayaan maju mengarah pada upaya melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan lokal sebagai bagian dari jati diri masyarakat Kota Serang. Ini diwujudkan melalui pelestarian seni dan tradisi khas Banten, seperti debus, pencak silat, dan kasidah serta fasilitasi ruang ekspresi seni bagi generasi muda. Berikut disampaikan kondisi perkembangan kebudayaan di Kota Serang.

Tabel II.34
Perkembangan Indikator Kinerja Kesenian Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Rasio	4,85	4,70	6,82	6,45	64,98
2	Jumlah grup kesenian	*Group*	330	330	494	475	478
3	Jumlah *event* seni budaya dalam 1 tahun	*Event*	2	7	11	2	1

Sumber: Dindikbud Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 jumlah grup kesenian di Kota Serang tercatat mengalami peningkatan, yaitu menjadi sebanyak 478 grup. Kenaikan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam bidang seni budaya di masyarakat. Namun, meskipun secara jumlah grup kesenian bertambah, rasio grup kesenian per 10.000 penduduk justru mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk Kota Serang juga meningkat pada tahun 2024, sehingga pertumbuhan grup kesenian tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Selain itu, meskipun grup kesenian bertambah, penurunan rasio ini juga disebabkan oleh penurunan jumlah grup kesenian di bidang kebudayaan tertentu, yang berarti tidak semua jenis seni berkembang secara seimbang. Melihat kondisi ini, Pemerintah Kota Serang tetap berkomitmen untuk mengembangkan seni dan budaya lokal. Berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya dengan mengadakan event-event kebudayaan serta mendorong partisipasi masyarakat untuk membentuk dan menghidupkan kembali grup-grup kesenian.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat pertumbuhan jumlah grup kesenian, upaya pengembangan seni budaya di Kota Serang perlu diperkuat lagi, terutama dalam aspek frekuensi event, pemberdayaan komunitas seni, dan peningkatan rasio kesenian terhadap jumlah penduduk. Melalui perpaduan antara kehidupan beragama yang maslahat dan budaya yang terus berkembang, Kota Serang diarahkan

menjadi kota yang berkarakter, harmonis, serta berdaya saing, tanpa kehilangan akar tradisi dan nilai spiritual masyarakatnya.

Permasalahan dalam pokok pikiran kebudayaan Daearah memuat beberapa hal sebagimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel II.35
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

No	Permasalahan	Rekomendasi	Indikator Pencapaian 2024
1	Manuskrip di Kota Serang belum terinventarisir dengan baik	perlu dilakukannya komunikasi terhadap lintas Lembaga baik komunistas sejarah, masyarakat umum, kolektor, Dinas Perpustakaan dan kearsipan. Untuk melakukan pendataan Kembali terhadap manuskrip yang belum terda	- sudah tersedianya dokumen inventarisasi manuskrip yang sudah terdigitalisasi - tersedia data penelitian dan pengkajian - Tersedia dokumen Transliterasi manuskrip - Tersedia fasilitas pengarsipan, perawatan, serta pengkajian - Berdiri Lembaga pembelajaran untuk masyarakat terkait manuskrip
2	Minimnya pendataan terkait tradisi lisan	Membentuk Lembaga pemaju objek tradisi lisan	-Tersedia dokumen inventarisasi tradisi lisan -tersedia dokumen kajian tradisi lisan -Berdiri Lembaga pemaju tradisi lisan
3	Semakin ditinggalkanny a adat istiadat oleh masyarakat Kota Serang	Pembangunan Lembaga adat istiadat Kota Serang	- Tersedia inventarisasi dokumen adat istiadat - Terselenggara even pelaksanaan adat istiadat - Tersedian data pengkajian adat istiadat
4	Semakin sedikitnya masyarakat Kota Serang yang mengetahui mengenai teknologi tradisional	Melakukan inventarisasi data mengenai teknologi tadisional -melakukan kajian dan penelitian mengnai teknologi tradisional	-Tersedianya data inventarisasi teknologi tradisional -Tersedianya data pengkajian dan penelitian teknologi tradisional
5	Minimnya fasilitas untuk kemajuan objek seni, Minimnya apresiasi terhadap seni/seni tradisi maupun pelaku seni	- Membangun fasilitas Gedung kesenian - Melakukan apresiasi terhadap pelaku seni di Kota Serang	-Berdiri lembaga kesenian Kota Serang -Apresiasi terhadap pelaku seni -Membangun Gedung kesenian Kota Serang -Menyelenggaraka n Festival, misalnya Festival Cibanten (sungai peradaban)
6	Bahasa	- Mengadakan pelatihan - Mengadakan lomba menulis cerita berbahasa Jawa Serang - Menggelar kongres Bahasa Jawa Serang	-mengadakan pelatihan kepada Pelajar dan masyarakat Kota serang dalam membaca/ menulis Arab Pegon -mengadakan lomba menulis cerita berbahsa Jawa Serang -mengadakan pelatihan husus terhadap pengajar Bahasa Jawa Serang
7	Permainan Rakyat (Semakin sedikitnya	- Membuat Lembaga pelestari permainan tradisiona	-Berdiri Lembaga pelestari permainan tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Indikator Pencapaian 2024
	pelaku pelestari permainan tradisional akibat arus globalisa dan modernisasi)	- Permainan tadisioal diajarkan di sekolah	-lomba permainan tradisional antar kecamatan -kurikulum pembelajaran permainan tradisiona
8	Olahraga Tradisional (Kecilnnya minat masyaraka tdalam melakukan olahraga tradisional), Tidak diajarkan di sekola	- Melakukan sosialisasi dan pelatihan olahraga tradisional kepada masyarakat Kota Serang - Diajarkan di setiap sekolah	-Mendirikan Lembaga pelestari olahraga tradisonal -sosislisasi dan pelatihan olahraga tradisional kepada masyarakat dan pelajar
9	Cagar Budaya (Minimnya upaya penetapan dan inventarisir, Kurangnya menjaga cagar budaya, Tidak ada tim ahli cagar budaya Kota Serang, Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya cagar budya)	- Menetapkan dan menginventarisasi cagar budaya secepatnya - Membuat regulasi yang kuat mengenai perlindungan cagar budaya - Melakukan pelatih terhadap lulusan sejarah - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cagar budaya	-Semua cagar bgudaya di Kota Serang sudah terdata, dan ditetapkan secara keseluruhan -Mendirikan fasilitas Lembaga perawat cagar budaya -Tersedianya tim ahli cagar budaya

Sumber: Pokok Pikiran Kota Serang, 2020

Pemerintah Kota Serang terus berkomitmen melestarikan kebudayaan lokal melalui berbagai upaya, mulai dari pengembangan kesenian tradisional, pemeliharaan situs bersejarah dan cagar budaya, hingga integrasi nilai budaya dalam pendidikan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberdayaan komunitas seni dan budaya, serta memanfaatkan teknologi digital untuk promosi dan dokumentasi budaya. Berbagai festival budaya, dukungan terhadap sanggar seni, dan kerja sama lintas pihak menjadi strategi penting dalam menjaga identitas daerah sekaligus menjadikan kebudayaan sebagai modal sosial dan daya tarik pariwisata yang berkelanjutan.

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak harus terus ditingkatkan. Hal ini turut menjadi perhatian pemerintah Kota Serang. Namun kesenjangan gender masih terlihat terjadi di berbagai sektor pembangunan.

Kesenjangan tersebut menghambat keterlibatan perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan dan untuk memperoleh segala bentuk pelayanan dasar. Pelaksanaan kesetaraan gender akan secara tidak langsung berdampak positif pada anak. Hal ini mengingat sangat erat kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik

bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan juga sangat berdampak pada derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan keluarga.

Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga masih dihadapi oleh sebagian rumah tangga di kota Serang. KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri. Meski begitu rasio KDRT yang terjadi di Kota Serang selama kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Adapun capaian indikator layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2020-2024:

Tabel II.36
Perkembangan Indikator Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender	92,94	93,14	93,31	93,41	93,59
2	Indeks Pemberdayaan Gender	61,26	61,66	62,39	62,98	58,38
3	Indeks pembangunan kualitas keluarga	NA	53,41	56,50	64,49	65,39
4	Indeks ketimpangan gender	0,508	0,521	0,544	0,530	0,543
5	Indeks Perlindungan Anak	NA	62,68	64,54	65,95	65,95
6	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	2,08	0,83	14,03	23,58	14,23
7	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,02	0,02	100	100	100
8	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	4,39	8,59	6,75	6,01	7,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, DP3AKB Kota Serang & SIPD Kota Serang. 2025

Tabel II.35 di atas menunjukkan bahwa sementara itu kondisi keterlibatan perempuan dalam pembangunan di Kota Serang secara umum cukup baik, dibuktikan dengan persentase Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,59 persen (*Long Form* SP 20210). Jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Kota yang berada di Provinsi Banten, persentase Indeks Pembangunan Gender Kota Serang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten (93,41 persen) dan Kota Cilegon (89,17 persen) namun lebih rendah dibandingkan Tangerang selatan (95,29 persen) dan Kota Tangerang (95,91 persen). Kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang relatif setara dengan laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2024 sebesar 58,38 persen lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Banten (66,48 persen),

Kota Cilegon (53,69 persen), Kota Tangerang Selatan (70,59 persen), dan Kota Tangerang (65,21 persen). Indeks pembangunan kualitas keluarga Kota Serang sebesar 65,39 persen Kota Cilegon 64,36 persen, Kota Tangerang 63,29 persen, Kota Tangerang Selatan 65,65 persen. Indeks Perlindungan Anak 2023 Kota Serang sebesar 65,95 persen lebih rendah disbanding dengan Provinsi Banten 66,18 persen, Kota Cilegon 70,78 persen, Tangerang Selatan 71,95 persen, Kota Tangerang 73,12 persen. Adapun Penyebab penurunan tajam pada tahun 2024 bisa diindikasikan adanya keterbatasan perempuan dalam posisi strategis, kurangnya dukungan kebijakan afirmatif, dan adanya hambatan budaya atau sosial yang masih kuat dimasyarakat.

Indeks Ketimpangan Gender Kota Serang sebesar 0,543 poin menunjukkan bahwa kondisi seperti akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan lainnya masih mengalami perlakuan yang rendah antara laki-laki dan perempuan dibandingkan dengan Provinsi Banten sebesar 0,453 poin, Kota Cilegon 0,248 poin, Kota Tangerang Selatan 0,176 Poin, dan Kota Tangerang 0,328 poin.

Anggaran Responsif Gender (ARG) belanja langsung APBD Kota Serang menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir. Dimulai dari angka 2,08 persen pada tahun 2020, dan terus bertambah hingga menjadi 14,23 persen pada tahun 2024. Perubahan ini mencerminkan dinamika dalam prioritas anggaran yang dialokasikan untuk program-program yang mendukung perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait di Kota Serang mencapai 100 persen sejak tahun 2022 hingga 2024. Adapun untuk rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), data menunjukkan angka yang relatif fluktuatif. Dimulai dari 4,39 per 100.000 penduduk perempuan pada tahun 2020, meningkat menjadi 8,59 pada tahun 2021, lalu menurun kembali menjadi 6,75 pada 2022, dan sedikit turun lagi menjadi 6,01 pada 2023, sebelum naik kembali ke 7,79 pada 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa tantangan dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap Perempuan masih cukup besar. sehingga perlu terus diperkuat upaya pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum.

Seara umum capaian pembangunan gender dan perlindungan anak di Kota Serang menunjukkan kemajuan positif, terutama pada IPG,

kualitas keluarga, dan penanganan kasus anak korban kekerasan. Namun, masih terdapat tantangan berupa fluktuasi pemberdayaan gender, ketimpangan gender, serta rasio kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menegaskan perlunya konsistensi dukungan anggaran, penguatan kebijakan, dan perubahan sosial budaya guna mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang berkelanjutan.

Pemuda merupakan aset bangsa dan aktor utama dalam pembangunan, khususnya di bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Urusan wajib kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang. Selanjutnya tabel berikut ini memberikan gambaran tentang perkembangan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Serang selama kurun waktu tahun 2020-2024.

Tabel II.37
Perkembangan Layanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Pemuda	94	62	62	62	62
2	Jumlah Kegiatan Pemuda	3	12	12	12	12
3	Jumlah Wirausaha Muda	270	270	1.410	1.656	6.767
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	40,34	40,46	41,09	42,06	3,55
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	52,11	54,03	52,14	54,07	4,69
6	Peningkatan Prestasi Olahraga	1	21	235	259	24

Sumber: Disparpora Kota Serang & SIPD Kota Serang. 2025

Berdasarkan Tabel II.36 di atas dapat dilihat bahwa jumlah organisasi dan kegiatan kepemudaan tidak mengalami perubahan sejak 4 tahun terakhir. Namun, jumlah wirausaha muda selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada aspek partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, Kota Serang mencatatkan peningkatan capaian secara bertahap, dari 40,34 persen pada tahun 2020 menjadi 42,06 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan hasil dari pembinaan kewirausahaan dan dukungan akses permodalan bagi pemuda. Namun, Pada tahun 2024 terjadi perubahan arah kebijakan prioritas yang berdampak pada penurunan capaian kegiatan dengan perolehan angka capaian sebesar 3,55 persen.

Sementara itu, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan juga mengalami fluktuasi. Capaian meningkat dari 52,11 persen pada tahun 2020 menjadi 54,07 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam penguatan peran pemuda di ruang-ruang sosial dan komunitas. Akan tetapi, pada tahun 2024 indikator ini mengalami penurunan menjadi 4,69 persen, yang mengindikasikan perlunya revitalisasi organisasi kepemudaan serta pembaruan strategi pendekatan kepada generasi muda.

Dalam bidang prestasi olahraga, Kota Serang mencatat capaian positif yang sangat signifikan. Pada tahun 2020, prestasi yang tercatat hanya 1, namun meningkat drastis menjadi 235 pada tahun 2022 dan mencapai 259 pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan keberhasilan pembinaan atlet, penguatan infrastruktur olahraga, serta partisipasi aktif dalam ajang kompetisi. Pada tahun 2024 terjadi penurunan prestasi menjadi 24, pencapaian secara keseluruhan menunjukkan adanya kemajuan luar biasa dibanding awal periode. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kota Serang telah memberikan hasil positif walau masih terdapat tantangan dalam hal keberlanjutan dan konsistensi program. Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olahraga.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah ditentukan oleh adanya penguatan daya saing daerah, dengan demikian diperlukan penguatan daya saing yang mampu mengakselerasi pembangunan berkelanjutan. Indikator variabel aspek daya saing daerah yang meliputi:

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini penting disadari karena manusia berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Mengingat hal tersebut. maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil,

kreatif, disiplin, dan profesional. Di samping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun dan diatas 64 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif, karena secara ekonomi masih bergantung pada orang tua atau pihak lain yang menanggungnya. Rasio ketergantungan di Kota Serang selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.38
Tingkat Ketergantungan Di Kota Serang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	190.724	194.926	197.635	203.563	207.074
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	21.015	22.842	23.542	26.901	29.388
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	211.739	217.768	221.177	230.464	236.462
4.	Jumlah Penduduk Usia Produktif	469.273	484.460	503.375	505.187	523.458
Rasio Ketergantungan		**45.12**	**44.95**	**43,94**	**45,62**	**45,17**

Sumber: Disdukcapil Kota Serang SIPD Kota Serang, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 rasio ketergantungan Kota Serang tercatat sebesar 45,12. Angka ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 44,95, yang menunjukkan adanya peningkatan proporsi penduduk usia produktif dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, rasio ketergantungan kembali mengalami penurunan menjadi 43,94, yang merupakan angka terendah selama periode lima tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi bonus demografi yang lebih kuat di Kota Serang. Namun, pada tahun 2023, rasio ketergantungan meningkat menjadi 45,62, hal tersebut menandakan adanya kenaikan jumlah penduduk tidak produktif dibandingkan penduduk usia produktif. Pada tahun 2024, rasio tersebut sedikit menurun menjadi 45,17, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan angka tahun 2022.

Secara umum, selama periode 2020–2024, rasio ketergantungan mengalami fluktuasi, dengan tren penurunan pada awal periode, diikuti dengan kenaikan pada tahun-tahun berikutnya. Perkembangan ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, dalam rangka mengoptimalkan manfaat dari perubahan struktur demografi tersebut. Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas tenaga kerja yang dimiliki wilayah tersebut. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3). Kualitas tenaga kerja di Kota Serang pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel II.38.

Tabel II.39
Kualitas Tenaga Kerja Di Kota Serang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lulusan S1	33.325	35.452	75.838	40.043	42.003
2	Jumlah lulusan S2	3.276	3.842	7.504	4.001	4.225
3	Jumlah lulusan S3	166	175	400	211	238
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	36.767	39.109	83.724	44.255	46.540
5	Jumlah Penduduk	681.012	702.228	724.552	735.651	759.929
6	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,053	0,055	0,115	0,06	0,061

Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan jumlah lulusan jenjang S1, S2, dan S3 mengalami perubahan secara fluktuatif. Dari tahun 2020 terus mengalami peningkatan sampai tahun 2022 mencapai jumlah 83.724 lulusan. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 44.255 lulusan. Namun, pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 46.540 lulusan.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Serang yang terus meningkat dari 681.012 jiwa pada 2020 menjadi 759.929 jiwa pada 2024, maka rasio lulusan S1/S2/S3 terhadap penduduk juga menunjukkan fluktuatif. Rasio tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 0,115, kemudian turun menjadi 0,06 pada 2023, dan naik sedikit menjadi 0,061 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk terus meningkat, proporsi lulusan perguruan tinggi terhadap total penduduk cenderung menurun dan stagnan pasca 2022. Fenomena ini dapat menjadi perhatian dalam perumusan

kebijakan peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi di Kota Serang, agar sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi tetap tumbuh seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Kemampuan ekonomi daerah berkaitan dengan kapasitas ekonomi yang dimiliki suatu wilayah, terutama dalam kaitannya dengan daya saing daerah. Kapasitas ekonomi tersebut idealnya mampu menciptakan daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang diharapkan dapat menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi juga tercermin dari kapasitas dan produktivitas masyarakat daerah yang diukur melalui *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun.

1) Produktivitas Ekonomi

Kota Serang menunjukkan dinamika produktivitas ekonomi yang mencerminkan pemulihan dan pertumbuhan pasca-pandemi, khususnya dalam dua sektor utama Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi serta Makan Minum.

Tabel II.40
Produktivitas Ekonomi Kota Serang
Tahun 2020-2024

No	SEKTOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Pengolahan	4,47	4,43	4,53	4,55	4,61
2	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,06	5,99	5,99	6,10	6,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Produktivitas sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Di tahun 2020, sektor ini mencatat produktivitas sebesar 4,47 yang tergambar dari kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB. Di tahun 2021 terjadi penurunan, dimana angka tersebut turun menjadi 4,43. Penurunan tersebut diduga kuat merupakan dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang masih membayangi sektor industri secara nasional. Namun, sejak tahun 2022 terjadi tren peningkatan bertahap: 4,53 pada tahun 2022; 4,55 pada tahun 2023 dan mencapai 4,61 di tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya pemulihan dan peningkatan efisiensi dalam proses produksi serta adaptasi industri terhadap tantangan global dan transformasi digital.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan sektor industri pengolahan dengan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, sektor ini memiliki produktivitas sebesar 6,06. Pada tahun 2021–2022 sektor ini

mengalami sedikit penurunan di angka 5,99. Meskipun dalam 2 tahun tersebut angka produktivitas sedikit menurun, namun sektor ini menunjukkan pemulihan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Produktivitas meningkat menjadi 6,10 di tahun 2023 dan 6,21 di tahun 2024. Kenaikan ini menandakan kebangkitan pada sektor pariwisata dan konsumsi domestik, didukung oleh pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi lokal.

2) Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas tenaga kerja dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

Tabel II.41
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Serang Tahun 2024

No	Sektor	PDRB ADHK	Tenaga Kerja	Produktivitas
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.183.698,43	28.032	2.37
2	Industri	1.302.976,50	83.847	6,44
3	Jasa	24.376.401,86	348.081	1,43
Jumlah		**26.863.076,79**	**459.960**	**1,71**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

3) Indeks Inovasi Daerah

Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Indeks ini mencakup pengukuran inovasi di bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah. Pengukuran ini dilakukan setiap tahun melalui program *Innovative Government Award* (IGA), yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang secara aktif menjadikan inovasi sebagai kunci memajukan daerahnya.

Pelaksanaan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan hendaknya dapat menciptakan wadah untuk meningkatkan inovasi daerah. Inovasi daerah diukur melalui Indeks Inovasi daerah yang dihitung oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan sejak tahun 2019. Pada tabel berikut ini tercatat nilai

Indeks Inovasi Daerah Kota Serang dari tahun 2020 hingga 2024 yang menunjukkan fluktuasi cukup signifikan.

Tabel II.42
Capaian Indeks Inovasi Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan PDRB ADHB Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	232	49,71	60,56	54,03	57,12
Kategori	KURANG INOVATIF	INOVATIF	SANGAT INOVATIF	INOVATIF	INOVATIF
Peringkat IID	65	43	11	41	40
Jumlah Inovasi yang Diajukan	34	41	65	97	110
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,89	69,41	64,8	63,33	69,10
PDRB ADHB (Juta Rp)	31.666.094,97	33.503.984,71	36.723.313,57	39.837.917,58	42.988.405,48

Sumber: Kemendagri, Badan Pusat Statistik 2025

Data di atas menunjukkan perkembangan Indeks Inovasi Daerah dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 Indeks Inovasi Daerah cukup tinggi yaitu di angka 232, namun masuk kategori Kurang Inovatif. Tahun 2021 indeks menurun drastis menjadi 49,71 namun sudah masuk kategori Inovatif. Penurunan tersebut terjadi karena terdapat perubahan pada skala dan item penilaian di ajang IGA *award*. Peningkatan berlanjut di tahun 2022 dengan skor 60,56 dan masuk kategori Sangat Inovatif, serta menempati peringkat ke-11 secara nasional. Meskipun Indeks Inovasi Daerah sempat menurun pada tahun 2023 dan sedikit meningkat kembali pada tahun 2024, status "Inovatif" tetap berhasil dipertahankan. Jumlah inovasi yang diterapkan juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 34 inovasi pada tahun 2020 menjadi 110 inovasi pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan tren positif dalam penerapan inovasi, meskipun fluktuasi pada peringkat dan nilai indeks masih terjadi.

Berdasarkan kondisi di atas dimana jumlah inovasi meningkat tiap tahun namun nilai indeks dan peringkat masih fluktuatif maka Kota Serang perlu fokus pada peningkatan kualitas inovasi bukan hanya kuantitas, serta memastikan pelaporan yang diupload lengkap dan sesuai indikator penilaian. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan pemilihan inovasi yang berdampak tinggi akan membantu menjaga tren positif sekaligus meningkatkan peringkat nasional secara konsisten.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja. Pada tahun 2020, TPAK Kota Serang mencapai 69,89 persen dan terus menurun hingga 2023 menjadi 63,33 persen, hal ini terjadi karena adanya dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 dan dinamika pasar kerja lokal. Pada tahun 2024

terjadi peningkatan kembali menjadi 69,10 persen, hal tersebut mencerminkan mulai pulihnya kondisi ketenagakerjaan serta efektivitas program pemulihan ekonomi di tingkat daerah.

PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi yang dihasilkan di suatu daerah berdasarkan harga pasar pada tahun berjalan. Perekonomian Kota Serang menunjukkan tren positif dan konsisten selama periode lima tahun terakhir. PDRB Kota Serang tumbuh dari Rp31.666.094,97 juta pada tahun 2020 menjadi Rp42.988.405,48 juta pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat pasca pandemi serta kontribusi sektor-sektor produktif seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa yang terus meningkat.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Sebagai bagian dari komitmen menuju pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kota Serang terus mendorong penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam berbagai sektor pembangunan daerah. Pendekatan ini menjadi strategi penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dalam menghadapi dinamika global, tantangan perubahan iklim, serta tuntutan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kota Serang menetapkan arah strategis pembangunan ekonomi daerah yang berpijak pada transformasi ekonomi berkelanjutan dan produktif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui penguatan sektor-sektor unggulan dan adopsi inovasi di berbagai lini pembangunan.

Transformasi ekonomi Kota Serang dalam RPJMD ini diarahkan pada beberapa fokus utama:

1) Peningkatan Inovasi dan Penguasaan IPTEK Penguatan kapasitas riset dan Inovasi menjadi pilar penting untuk meningkatkan produktivitas daerah. Pemerintah Kota Serang mendorong sinergi antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah daerah (*triple helix*) guna menghasilkan inovasi yang aplikatif, baik dalam sektor industri, pertanian, pendidikan, maupun pelayanan publik.
2) Pengembangan Ekonomi Produktif Peningkatan Sektor-sektor Ekonomi Strategis dilakukan melalui:
   a) Industri manufaktur skala kecil dan menengah dengan peningkatan akses bahan baku, teknologi, dan pasar;

b) Ekonomi biru melalui optimalisasi sumber daya air, budidaya ikan, serta pengelolaan kawasan sempadan sungai secara berkelanjutan;
c) Pertanian dan ketahanan pangan lokal yang berbasis teknologi ramah lingkungan;
d) Pariwisata berbasis budaya dan lingkungan melalui destinasi dan atraksi lokal;
e) Ekonomi kreatif melalui pengembangan sektor-sektor seperti seni, kuliner, fesyen, dan media digital;
f) UMKM dan koperasi melalui perluasan akses pembiayaan, pelatihan, dan digitalisasi usaha;
g) Pemberdayaan tenaga kerja, melalui pelatihan vokasi dan peningkatan kualitas SDM yang sesuai kebutuhan pasar kerja;
h) Penguatan BUMD dan kolaborasi dengan BUMN, sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

3) Penerapan Ekonomi Hijau Pembangunan diarahkan agar berwawasan lingkungan melalui efisiensi energi, pengelolaan sampah yang terintegrasi, pelestarian ruang terbuka hijau, serta pembangunan infrastruktur hijau. Ekonomi hijau juga menciptakan peluang kerja baru yang mendukung transisi ke pembangunan rendah karbon.
4) Transformasi Digital Digitalisasi sektor ekonomi dan pemerintahan menjadi akselerator dalam menciptakan efisiensi, transparansi, serta perluasan akses pasar. Penguatan ekosistem digital diarahkan untuk mendukung UMKM digital, layanan publik berbasis elektronik, dan integrasi data untuk perencanaan yang presisi.
5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global Peningkatan konektivitas antarwilayah serta pengembangan infrastruktur pendukung logistik menjadi prioritas untuk memperkuat peran Kota Serang dalam rantai pasok nasional dan regional. Kolaborasi dengan kawasan industri, pusat perdagangan, serta pengembangan jalur distribusi dapat mempercepat mobilitas barang, jasa, dan arus investasi.
6) Pembangunan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang diarahkan menjadi pusat pertumbuhan baru di Provinsi Banten melalui pengembangan kawasan perkotaan yang inklusif, produktif, dan layak huni. Hal ini meliputi penataan ruang kota, revitalisasi kawasan ekonomi, pengembangan pusat kegiatan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah dalam kota.

Penerapan ekonomi hijau dan biru ini menjadi bagian penting dari transformasi Kota Serang menuju kota yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan iklim, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja hijau dan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dengan kolaborasi seluruh elemen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, diharapkan Kota Serang dapat menjadi contoh nyata dalam menerapkan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Dalam mendukung keberlanjutan ekonomi daerah sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam pesisir, Kota Serang mulai mengintegrasikan pendekatan ekonomi biru dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Ekonomi biru menekankan pada optimalisasi potensi laut dan perairan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Tabel II.43
Kelautan dan Perikanan Kota Serang tahun 2020-2024

No	Uraian	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	3.096,13	3.589,73	5.435	3.834,58	5.276,63
2	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	1.634,65	812,78	2.135,83	1.200,69	1.481,02
3	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) (ton)	4.730,78	4.402,51	7.570,83	5.035,27	6.757,65

Sumber: DKP3 Kota Serang, 2025

Berdasarkan tabel diatas, produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kota Serang menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020–2024. Sementara itu untuk sektor perikanan budidaya juga mengalami fluktuatif, dengan terjadi peningkatan pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan nelayan dan perikanan budi daya Kota Serang dalam meningkatkan hasil tangkapan dan budidaya, serta dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, bantuan sarana tangkap, dan penguatan koperasi nelayan.

Fluktuasi ini mencerminkan adanya tantangan dalam aspek teknis dan lingkungan budidaya, seperti ketersediaan benih unggul, perubahan iklim mikro, hingga risiko penyakit ikan. Hal ini diperlukan arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya yang memfokuskan pada pengembangan teknologi budidaya ramah lingkungan, peningkatan kapasitas SDM pembudidaya, serta diversifikasi komoditas perikanan air tawar dan payau yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Produksi perikanan secara total dari Tahun 2000-2024 seiring dengan besaran jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya. Pada tahun 2024, total produksi perikanan sebanyak 6.757,65 ton, meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 5.035,27 ton. Hal ini menggambarkan kinerja sektor perikanan yang semakin membaik dan mulai dengan faktor eksternal secara adaptif. Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Serang memiliki potensi besar dalam pengembangan subsektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, yang apabila dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi penopang ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi lokal.

Sektor Pertanian, dan Perikanan merupakan salah satu lapangan usaha strategis di Kota Serang yang turut menopang ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, serta potensi pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam. Meskipun secara kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) belum dominan, namun sektor ini memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip ekonomi biru, yakni pembangunan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Tabel II.44
Distribusi PDRB Atas Dasar Lapangan Usaha Kota Serang
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Capaian tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	5,44	5,21	5,05	5,08	5,11

Sumber: DKP3 Kota Serang, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, distribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Serang berada pada kisaran 5,05 persen hingga 5,44 persen, dengan tren sedikit meningkat dalan 2 tahun terakhir. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang kontribusi sebesar 5,44 persen, turun menjadi 5,05 persen (2022), kemudian meningkat kembali menjadi 5,11 persen pada tahun 2024.

Kecenderungan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perikanan di Kota Serang masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, di tengah dominasi sektor industri dan jasa. Namun, angka ini juga memperlihatkan bahwa sektor ini tetap memiliki basis yang kuat dan berpotensi dikembangkan melalui pendekatan ekonomi biru.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital di Kota Serang merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, memperluas akses layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal

melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selaras dengan sasaran utama misi rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Serang yaitu meningkatnya pengembangan sektor ekonomi kreatif, pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja baru yang sejalan dengan perkembangan era digital. Untuk mendukung keberhasilan arah pembangunan ini akan diukur melalui Indeks Masyarakat Digital (IMD), yang mencerminkan sejauh mana masyarakat Kota Serang mampu mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi. Indeks Masyarakat Digital juga menjadi tolok ukur sejauh mana infrastruktur, keterampilan, dan ekosistem digital di Kota Serang telah mendukung inklusi digital yang merata di seluruh lapisan masyarakat, yang meliputi:

1. Modernisasi Pelayanan Publik

   Pemerintah Kota Serang telah mengimplementasikan berbagai sistem digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Diantaranya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) memungkinkan warga mengurus dokumen kependudukan secara online. Selain itu, aplikasi e-KTP, Sistem Perizinan Daring, dan platform Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah diperkenalkan untuk mengurangi birokrasi yang rumit dan mempercepat proses administrasi.

2. Pemberdayaan UMKM Melalui Digitalisasi

   Transformasi digital juga menyasar sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah Kota Serang bekerja sama dengan PT Telkom Banten mengadakan pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam memanfaatkan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.

3. Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

   Pemerintah Kota Serang telah mengembangkan berbagai aplikasi sistem informasi untuk mendukung kegiatan administrasi dan layanan publik. Namun, sebagian besar aplikasi ini dikembangkan secara parsial oleh masing-masing perangkat daerah, yang menyebabkan data masih belum terintegrasi dan masih ditemukan duplikasi serta inkonsistensi data. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Serang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang SPBE yang bertujuan untuk:

a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis elektronik.
b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses manajemen pemerintahan daerah.
c. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal.
d. Mewujudkan masyarakat daerah yang memiliki akses terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
e. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE.

Meskipun transformasi digital membawa banyak manfaat, tantangan seperti kesenjangan digital dan rendahnya literasi teknologi masih dihadapi pemerintah Kota Serang berkomitmen untuk mengatasi hal ini melalui pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, serta penguatan infrastruktur digital di daerah-daerah terpencil. Secara keseluruhan, transformasi digital di Kota Serang merupakan upaya komprehensif untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan inklusif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan teknologi.

Tabel II.45
Transformasi Digital Kota Serang 2020-2024

No	Uraian	Capaian tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	100	100	100	100
2	Indeks Masyarakat Digital	NA	NA	40,70	44,42	45,33

Sumber: https://imdi.sdmdigital.id/, SIPD Kota Serang, 2025

Berdasarkan tabel capaian layanan SPBE dan Indeks Masyarakat Digital di Kota Serang menunjukkan konsistensi yang sangat baik. Sejak tahun 2020 hingga 2024, persentase layanan SPBE tercatat selalu 100 persen setiap tahunnya. Indeks Masyarakat Digital menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya sejak pertama kali dicatat pada tahun 2022. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan literasi digital, adopsi teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital, meskipun masih terdapat ruang untuk akselerasi lebih lanjut dalam membangun masyarakat digital yang lebih matang dan inklusif. Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Kota lain yang ada di Provinsi Banten, pada tahun 2024 IDM Kota Serang sebesar

45,33, lebih tinggi dari Kota Tangerang yang memiliki persentase IDM sebesar 43,81, namun lebih rendah dari Provinsi Banten yang sebesar 45,70, Kota Cilegon 45,68 dan Kota Tangerang Selatan 49,82.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pemerintah Kota Serang menargetkan peningkatan kualitas pembangunan ekonomi secara progresif untuk memperkuat kontribusinya pada skala nasional maupun internasional. Upaya ini dilakukan melalui penguatan sektor-sektor unggulan daerah serta pembangunan daya saing global, sehingga kegiatan ekonomi di Kota Serang tidak hanya berorientasi pada pasar lokal, tetapi juga mampu terhubung dengan pasar nasional dan internasional. Untuk mendukung hal tersebut, ekspor dan investasi ditempatkan sebagai prioritas utama, disertai langkah-langkah menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengelolaan fiskal yang sehat, pengendalian inflasi, dan peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Tabel II.46
Capaian Indikator Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36,79	36,37	35,76	35,99	36,33
Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-3,07	-3,19	-1,23	-3,92	0,94

Sumber : SIPD Kota Serang dan Badan Pusat Statistik, 2025

Secara umum, capaian indikator-indikator di atas menunjukkan bahwa Kota Serang berada pada jalur yang positif menuju integrasi ekonomi yang lebih kuat, baik dalam konteks domestik maupun global. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam memperkuat kinerja ekspor barang dan jasa. Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat perlu diperkuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Kota Serang bersifat inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kota Serang meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu upaya Kota Serang dalam meningkatkan daya saing daerah.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan

terhadap jumlah kendaraan. Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel II.46 berikut:

Tabel II.47
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Serang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan (km)	208,16	208,16	208,26	411,304	411,304
2	Jumlah Kendaraan (Unit)	457.341	246.912	247,486	273,582	279,259
Rasio		0,000	0,001	0,842	1,503	1,473

Sumber: DPUPR, Dishub, SIPD Kota Serang, 2025

Pada periode lima tahun, panjang jalan yang tercatat relatif tetap tahun 2020–2021 yaitu sekitar 208 km, kemudian naik signifikan tahun 2023–2024 menjadi 411 km, berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor 600.1.7/kep.270-Huk/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan dan Jaringan Jalan di Kota Serang. Kondisi pada tahun 2020–2021 menunjukkan bahwa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan masih sangat rendah, sehingga ketersediaan jalan tidak sebanding dengan banyaknya kendaraan yang ada. Hal tersebut mencerminkan tingginya beban lalu lintas dan potensi terjadinya kemacetan. Pada tahun 2022, rasio mulai mengalami peningkatan seiring dengan berkurangnya jumlah kendaraan, meskipun panjang jalan belum mengalami perubahan. Selanjutnya, pada tahun 2023 hingga 2024 rasio meningkat signifikan akibat adanya penambahan panjang jalan hampir dua kali lipat, dari 208 km menjadi 411 km. Walaupun jumlah kendaraan juga bertambah, peningkatan kapasitas jalan tersebut membuat rasio menjadi lebih baik.

Namun demikian, peningkatan tersebut lebih mencerminkan perbaikan pencatatan data daripada bertambahnya kapasitas jalan secara riil. Selaras dengan hal tersebut, hasil survei kualitas infrastruktur menunjukkan bahwa meskipun kondisi jaringan jalan arteri, lingkungan, dan jalan penghubung memperoleh nilai cukup baik (rata-rata di atas 7), beberapa sarana pendukung masih relatif rendah, terutama pada aspek drainase, fasilitas air bersih, irigasi, serta pengelolaan limbah, bahkan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) belum tersedia sama sekali.

Faktor penyebab utama dari kondisi ini adalah pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, serta lemahnya penyediaan infrastruktur dasar seperti sistem drainase, air bersih, dan sanitasi. Kesimpulannya, terdapat kesenjangan antara pembangunan infrastruktur jalan yang relatif baik dengan ketersediaan sarana pendukung yang masih rendah. Dampaknya, Kota Serang menghadapi potensi permasalahan serius berupa meningkatnya tekanan lalu lintas dan

kemacetan, risiko banjir akibat buruknya drainase, keterbatasan akses layanan dasar publik seperti air bersih dan sanitasi, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah apabila tidak segera dilakukan intervensi kebijakan yang terintegrasi.

1) Layanan Infrastruktur

Dalam upaya mendorong kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kota Serang terus meningkatkan pelayanan infrastruktur dan penyediaan rumah layak huni. Dua indikator utama yang merefleksikan capaian di sektor ini adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Rasio Rumah Layak Huni:

Tabel II.48
Layanan Infrastruktur Kota Serang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Capaian tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	61,87	62,70	62,77	71,78	69,04

Sumber: Bappeda Kota Serang dan Dinas Perkim Kota Serang, 2025

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, sanitasi, dan layanan publik lainnya. Selama periode 2020–2024, terjadi tren peningkatan meskipun disertai sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 61,87 poin dan meningkat hingga mencapai 71,78 poin pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan nyata dalam kualitas layanan infrastruktur yang dirasakan oleh masyarakat. Namun, pada 2024, indeks mengalami penurunan menjadi 69,04, yang menunjukkan adanya dinamika dalam tingkat kepuasan masyarakat. Hal ini perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi layanan dan pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan.

Tabel II.49
Komponen Pembentukan IKLI 2020 – 2024

No	Komponen Pembentukan IKLI	Persentase (%)
1	Bagaimana kualitas jaringan jalan Lingkungan (jalan di perumahan/pemukiman yang ada di sekitar kita) untuk berbagai aktivitas kegiatan anda	7,03
2	Bagaimana kualitas jaringan jalan Arteri untuk berbagai aktivitas (Jalan Arteri adalah jalan yang dapat melayani angkutan utamadengan tujuan perjalanan jarak jauh).	7,27
3	Berikan penilaian terkait kualitas jaringan jalan penghubung (Menghubungkan) antar moda darat, laut dan udara	7,03
4	Bagaimana kondisi drainase di sisi kanan kiri jalan pada jalan Arteri (Jalan milik Pemerintah Kota Serang)	6,33

No	Komponen Pembentukan IKLI	Persentase (%)
5	Bagaimana kondisi drainase di sisi kanan kiri jalan pada jalan Lingkungan	5,92
6	Berikan penilaian terhadap terminal penumpang/barang	6,83
7	Bagaimana kondisi jembatan di lingkungan tempat tinggal atau yang sering anda lalui (Jembatan merupakan suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah, dimana rintangan ini biasanya jalan berupa lain yaitu jalan air atau jalan lalu lintas biasa)	6,93
8	Bagaimana penilaian anda terhadap fasilitas pembuangan dan pengangkutan sampah	5,72
9	Bagaimana fasilitas sistem penyediaan air minum (SPAM) yang di berikan oleh Pemkot Serang/bukan PDAM	0,75
10	Bagaimana ketersediaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	0,00
11	Bagaimana kondisi serta ketersediaan Bendungan Irigrasi	5,25
12	Bagaimana kondisi ketersedian air irigasi untuk pertanian	5,67
13	Bagaimana ketersediaan PERUMDAM (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani) untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di masyarakat	1,08
14	Bagaimana kondisi Jaringan Listrik (PJU) Khususnya Penerangan di kawasan Jalan dan Perumahan/Pemukiman	6,33
15	Bagaimana Kondisi dan kelancaran pada Jaringan Telekomunikasi dan Internet	7,45
16	Bagaimana Kondisi fasilitas tempat bermain (Ruang Terbuka Hijau)	6,05
17	Bagaimana Kondisi fasilitas tempat bermain (Ruang Terbuka Hijau)	5,80
Mean 2024		**69,04**

Sumber: Laporan Akhir Ikli Kota Serang, 2024.

IKLI Kota Serang secara umum meningkat dari 2020 ke 2024, dengan puncak pada 2023. Peningkatan pesat terjadi karena perbaikan besar infrastruktur, sedangkan penurunan di 2024 dipicu oleh keterbatasan pemeliharaan dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang lebih baik. Berikut gambaran tentang kepuasan masyarakat:

Gambar II.15
Gambaran Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Serang
Tahun 2020-2025

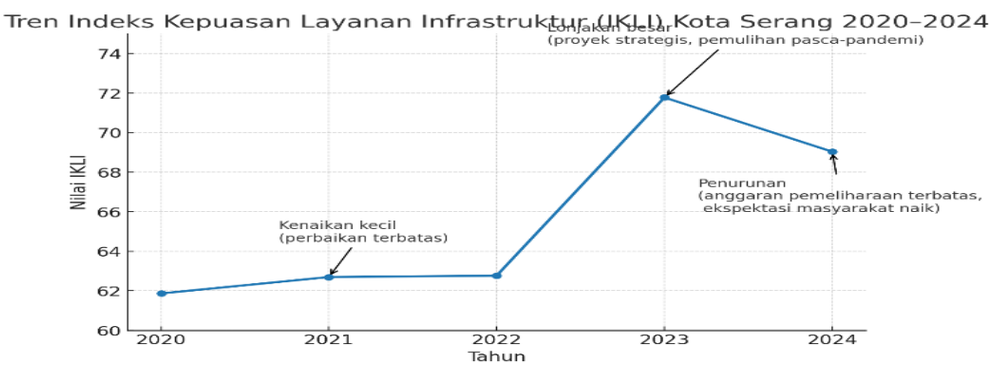

Gambar II.16
Capaian Rumah Layak Huni Kota Serang Tahun 2020-2024

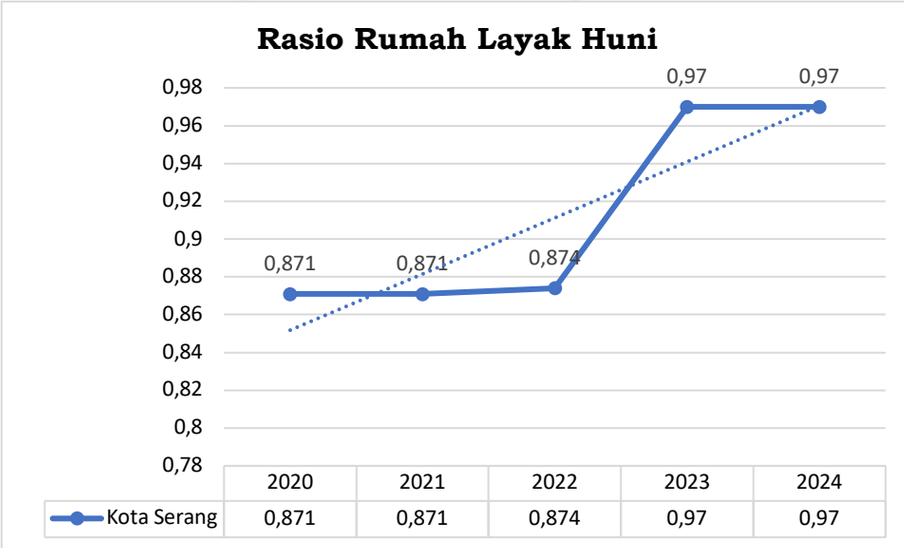

Dinas Perumahan dan Kawasam Permukiman Kota Serang, 2025

Sementara itu, rasio rumah layak huni menggambarkan persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan kondisi fisik dan fasilitas dasar yang memenuhi standar kelayakan. Kota Serang mencatat peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2020, rasio rumah layak huni tercatat sebesar 0,871, meningkat menjadi 0,97 pada tahun 2023 dan stabil pada angka yang sama di tahun 2024.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro Kota Serang menunjukkan arah yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan sejumlah indikator pembangunan. Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang memegang peranan strategis dalam menopang perekonomian wilayah, baik dari sisi investasi, infrastruktur, maupun pelayanan publik.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kota Serang mencatat laju pertumbuhan sebesar 4,71 persen pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi serta keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga iklim usaha yang kondusif. PDRB per kapita Kota Serang juga mengalami peningkatan yang mencapai Rp 58,49 juta rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kenaikan daya beli masyarakat dan peningkatan produktivitas daerah. Investasi merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Nilai investasi di Kota Serang mencapai Rp 8,4 triliun, tersebar pada lebih dari 7.757 proyek. Hal ini menjadi indikator kuat tingginya kepercayaan investor terhadap iklim usaha dan kebijakan

pembangunan daerah. Perkembangan ini turut didukung oleh kebijakan tata ruang yang lebih adaptif serta ketersediaan infrastruktur yang semakin memadai.

Secara keseluruhan, stabilitas ekonomi makro Kota Serang relatif terjaga. Pemerintah daerah perlu melanjutkan upaya reformasi struktural, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta menjaga kestabilan harga dan tingkat inflasi. Dengan sinergi yang kuat antara sektor publik dan swasta, Kota Serang memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi pusat ekonomi regional yang berdaya saing tinggi di masa depan. Sebagai bagian dari upaya penguatan kemandirian fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi daerah, Pemerintah Kota Serang terus memantau dan mengelola dua indikator penting, yaitu rasio pajak daerah terhadap PDRB dan tingkat inflasi daerah:

Tabel II.50
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dan Tingkat Inflasi
Kota Serang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Capaian tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	-	0,43	0,51	0,48	0,51
2	Tingkat Inflasi (%)	1,91	2,21	7,22	2,11	2,33

Sumber : Bappenda, 2025

Tabel diatas menggambarkan bahwa peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kapasitas pemungutan pajak serta efisiensi administrasi perpajakan. Capaian ini juga menunjukkan bahwa sektor ekonomi di Kota Serang mulai memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pendapatan daerah. Meskipun rasio ini masih berada pada tingkat yang relatif rendah, tren positif yang ditunjukkan menjadi sinyal bahwa arah kebijakan fiskal daerah perlu terus diperkuat, terutama melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah. Sementara itu, tingkat inflasi yang merupakan salah satu indikator makroekonomi yang merefleksikan kestabilan harga barang dan jasa di daerah. Pemerintah Kota Serang terus memantau laju inflasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, tingkat inflasi Kota Serang mengalami fluktuasi. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan inflasi mencapai 7,22 persen, yang merupakan puncak tertinggi selama periode lima tahun terakhir. Lonjakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dampak lanjutan pandemi COVID-19 terhadap rantai pasok, kenaikan harga BBM dan pangan global, serta penyesuaian kebijakan fiskal dan

moneter nasional yang berdampak pada daya beli masyarakat di Kota Serang. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kota Serang berhasil menurunkan kembali tingkat inflasi ke level yang lebih moderat. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas sektor, terutama melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang aktif memantau ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok serta memastikan kelancaran arus barang dan jasa.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Serang dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum dalam rumusan perencanaan pembangunan daerah ini mencakup urusan pemerintahan yang terkait langsung dengan indikator kinerja utama pembangunan 2025 atau yang memiliki daya ungkit tinggi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Organisasi Perangkat Kerja Pemerintah Kota Serang.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif

Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis, regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegrasi dan adaptif menjadi fondasi utama untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjalankan regulasi secara administratif, tetapi juga mampu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi aktual masyarakat dan dinamika perkembangan zaman.

Indeks integritas nasional diperoleh melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perubahan skor SPI Pemerintah Kota Serang dari tahun ke tahun terlihat pada table II.47. Pada tahun 2021, indeks SPI dari Pemerintah Kota Serang berada pada angka 66.24. Kemudian, terjadi penurunan yang minor di tahun 2022 menjadi 64.02. Berikutnya, pada tahun 2023, indeks SPI dari Pemerintah Kota Serang berada pada angka 70.25. Kemudian, terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2024 menjadi 64.86.

Skor tersebut menempatkan Pemerintah Kota Serang dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kota Serang sangat rentan terpapar praktik korupsi. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya sistem pencegahan korupsi yang tidak berjalan baik dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini tidak efektif.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi berbasis konflik kepentingan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan melalui pendekatan yang tegas dan sistematis mulai dari penguatan regulasi dan penerapan sanksi tegas bagi pelaku korupsi, nepotisme dan kolusi. Selain itu, perlu pemanfaatan sistem dan teknologi untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. KPK mendorong Pemerintah Kota Serang untuk memperbaiki kondisi integritas mereka secara mandiri melalui aksi nyata dengan melakukan analisis mendalam terhadap akar persoalan dan mengembangkan mitigasi serta mengimplementasikan secara konsisten. Aksi yang dikembangkan harus menjadi langkah strategis untuk memangkas risiko korupsi,memperkuat sistem pencegahan, dan menghadirkan transformasi layanan publik yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel II.51
IRH, IRB, Indeks Pelayanan Public, SPBE, MCP KPK dan Indeks Integritas Nasional Kota Serang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Capaian tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Hukum	NA	NA	NA	NA	98,74
2	Indeks Reformasi Birokrasi	58,30	57,69	60,91	70,97	75,58
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	NA	NA	NA	3,65	3,99
4	SPBE	NA	2,97	2,49	2,60	2,60
5	MCP KPK	69,55	78,34	91,17	93,07	92,96
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	2	3	3	3
7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3
8	Indeks Intgritas Nasional	NA	66,24	64,02	70,25	64,86

Sumber: LHE RB, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, Pemerintah Kota Serang menunjukkan peningkatan kinerja dalam aspek tata kelola pemerintahan yang tercermin dari sejumlah indikator utama, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam

akselerasi transformasi digital dan pelayanan publik. Indeks Reformasi Hukum (IRH) mulai terukur pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 98,74, menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Serang dalam penguatan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung reformasi birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, dimulai dari 58,30 poin pada tahun 2020, meningkat menjadi 75,58 poin pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh, termasuk perbaikan sistem SDM aparatur, efisiensi tata kelola, serta penguatan akuntabilitas kinerja instansi.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, capaian SPBE adalah 2,97, menurun pada tahun 2021 menjadi 2,49, dan stagnan pada 2,60 selama 2022 hingga 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya digitalisasi pemerintahan masih menghadapi tantangan, khususnya dalam aspek integrasi sistem, manajemen data, dan literasi digital aparatur. Pemerintah Kota Serang telah menunjukkan perbaikan dalam aspek reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Ke depan, perlu ditingkatkan integrasi layanan digital (SPBE) secara berkelanjutan serta penguatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan reformasi hukum dan birokrasi agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kota Serang menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi. Hal ini tercermin dalam partisipasi aktif dalam *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Maturitas SPIP Kota Serang berada pada level 3 (berkembang), kecuali pada tahun 2021 yang mengalami penurunan ke level 2 (rintisan) dan terus menunjukan tren positif hingga Tahun 2022–2024, yang kembali stabil di level 3. Adapun capaian indikator Kapabilitas APIP berada pada level 3 secara konsisten sepanjang tahun 2020–2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Serang telah memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang cukup memadai dalam melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pada tahun 2023, *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Kota Serang mencatat pencapaian signifikan dalam MCP, meskipun masih terdapat ruang

untuk perbaikan, khususnya dalam penguatan integritas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa.

Gambar II.17
Grafik Capaian MCP Tahun 2020-2024

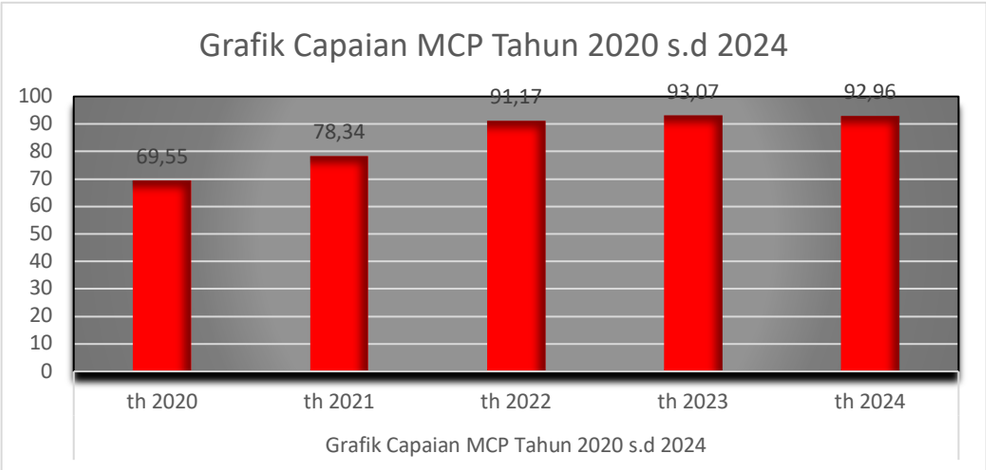

Sumber: KPK, 2025

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1) Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Kota Serang selama kurun waktu 2020-2024 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.52
Angka Kriminalitas di Kota Serang Tahun 2020–2024

No	Jenis Kriminal	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kasus Narkoba	98	107	87	75	66
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	NA	NA	1	2	NA
3	Jumlah Kejahatan Seksual	NA	NA	40	2	NA
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	87	25	109	NA	2
5	Jumlah Kasus Pencurian	327	70	119	121	121
6	Jumlah Kasus Penipuan	99	23	34	NA	100

No	Jenis Kriminal	2020	2021	2022	2023	2024
7	Jumlah Kasus Pemalsuan uang	NA	NA	NA	NA	NA
8	Jumlah Kasus Penggelapan	49	8	20	NA	44
9	Lainnya	NA	NA	63	NA	NA
10	Total Tindak Kriminal selama 1 tahun	762	251	473	294	333
11	Jumlah Penduduk	681.012	702.228	724.552	735.651	759.929
Angka Kriminalitas		20,88	6,89	13,06	6,72	8,76

Sumber: Polres Serang Kota, 2025

Dalam rangka memantau dan mengevaluasi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, telah dilakukan pengumpulan dan analisis data angka kriminalitas selama periode lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, selama periode 2020–2024, angka kriminalitas menunjukkan tren penurunan dibandingkan awal periode sebesar 20,88 persen menjadi 8,76 persen pada akhri periode lima tahun. Meskipun terdapat fluktuasi, kondisi ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pencegahan kriminalitas yang telah dilaksanakan, serta tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil yang telah dicapai.

Tabel II.53
Hasil Penilaian Peduli HAM dan Penegakan Perda Kota Serang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Capaian tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Kota Peduli HAM	NA	NA	NA	67,86	85,10
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100

Sumber: Kemenkumham dan Satpol PP Kota Serang, 2025

Kota Serang mulai mencatat capaian indikator strategis yang pada tahun sebelumnya belum ada yaitu Kota Peduli HAM. Capaian pada tahun 2023 sebesar 67,86 kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 85,10. Kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan yang cukup pesat dalam pelaksanaan program atau kebijakan yang diukur oleh indikator tersebut.

Selama kurun waktu lima tahun, dari tahun 2020 hingga 2024, Kota Serang berhasil mempertahankan persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebesar 100 persen setiap tahunnya. Capaian ini menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari Pemerintah Kota Serang dalam menjalankan fungsi hukum dan regulasi secara konsisten dan optimal.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Dalam menghadapi tantangan global dan regional, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional, termasuk di bidang diplomasi dan pertahanan. Kota Serang, sebagai ibu kota Provinsi Banten, memiliki posisi strategis secara geografis, ekonomi, dan keamanan, yang menjadikannya bagian penting dalam upaya memperkuat ketangguhan nasional dan kawasan.

Pemerintah Kota Serang memiliki posisi strategis karena terletak di jalur utama penghubung antara Jakarta dan Pulau Sumatera.

a. Dekat dengan Selat Sunda, jalur pelayaran internasional penting.
b. Dekat dengan objek vital nasional seperti Pelabuhan Merak (akses utama ke Sumatera), PLTU Suralaya, dan Kawasan industri strategis Cilegon, Serang Timur, dll.

Dari sisi diplomasi, Kota Serang dapat berperan sebagai aktor pendukung dalam kerangka diplomasi sub-nasional (*sub-national diplomacy*), melalui pembangunan kerja sama daerah lintas negara atau kawasan, promosi budaya dan pendidikan, serta penciptaan iklim investasi yang ramah dan stabil. Peran ini berkontribusi terhadap citra Indonesia sebagai negara yang terbuka, damai, dan proaktif dalam menjaga stabilitas kawasan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan instrumen berupa Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mengadopsi terhadap penilaian di tingkat Global seperti *Global Competitiveness Index* (GCI) dari *World Economic Forum*. Perhitungan IDSD didasarkan pada 4 (empat) komponen utama, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi, keempat komponen ini dielaboorasi ke dalam 12 (dua belas) pilar daya saing. Pengukuran IDSD ini bertujuan untuk memperoleh ukuran yang komprehensif terhadap daya saing pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengenai produktivitas daerah sebagai wujud refleksi kemampuan setiap daerah untuk bersaing di tingkat nasional maupun global.

Tabel II.54
Perkembangan Indeks Daya Saing Kota Serang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Serang	NA	0,29	NA	NA	3,85
2	Provinsi Banten	3,43	3,46	3,62	3,60	3,87
3	Nasional	2,26	NA	3,26	3,44	3,43

Sumber : BRIN, 2025

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Serang melonjak dari 0,29 poin pada 2021 menjadi 3,85 poin pada 2024, melampaui rata-rata nasional namun sedikit di bawah Provinsi Banten, sehingga menempati peringkat ketiga tertinggi

di provinsi. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan infrastruktur, penguatan sektor unggulan, stabilitas ekonomi, dan iklim investasi yang kondusif, ditopang oleh kualitas SDM, keterhubungan pasar lokal dengan pasar nasional.

Meskipun Kota Serang memiliki skor IDSD cukup baik (3,85) dan berada di atas rata-rata nasional (3,43), kelemahan utamanya terletak pada pilar 11-12 yaitu Dinamika Bisnis sebesar 2,86 poin dan Kapabilitas Inovasi sebesar 2,90 poin, capaian ini masih relatif rendah dibandingkan dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya iklim usaha yang ramah investasi, keterbatasan infrastruktur penunjang bisnis, serta rendahnya adopsi teknologi dan ekosistem inovasi di Kota Serang. Selain itu, UMKM sebagai penggerak utama ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor konvensional dengan tingkat inovasi produk dan pemanfaatan digital yang terbatas. Untuk meningkatkan daya saing tersebut, Pemerintah Kota Serang perlu melakukan evaluasi strategi kebijakan khusu seperti penyederhanaan regulasi dan perizinan usaha, Peningkatan Kapabilitas Inovasi dengan membangun ekosistem riset dan inovasi, dan Dukungan lintas sektor serta penguatan infrastruktur digital.

Melalui upaya tersebut, diharapkan Kota Serang mampu memperkuat daya tarik investasi, meningkatkan kualitas inovasi lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

2.1.4.4 Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

A. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Analisis kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yaitu:

Layanan Urusan Wajib Dasar

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Serang. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam proses pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat dicapai melalui pendidikan yang baik. SDM yang berkualitas menjadi modal utama dalam mendorong pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Kondisi ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain dalam rangka meningkatkan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan bidang pendidikan juga ditujukan dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan. Tabel berikut ini memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan layanan urusan pendidikan di Kota Serang pada tahun 2020-2024.

Tabel II.55
Perkembangan Indikator Layanan Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**						
	APS SD / MI / Sederajat	%	105,90	105,90	105,95	100,69	90,92
	APS SMP / MTs / Sederajat	%	99,50	99,51	99,89	100,22	74,98
1.2	**Fasilitas Pendidikan**						
	Gedung SD/MI kondisi baik	%	94,45	94,70	80,05	98,15	88,00
	Gedung SMP/MTs kondisi baik	%	95,65	95,88	88,05	100	88,95
1.3	**Rasio Ketersediaan Sekolah**						
	RKS SD/MI	**%**	41,94	41,94	44,46	34,46	35,26
	RKS SMP/MTs	%	41,83	41,83	42,21	37,21	36,32
1.4	**Rasio Jumlah Guru / Murid**						
	RGM-K SD/MI	Rasio	01:42	01:37	01:34	01:32	01:23
	RGM-K SMP/MTs	Rasio	01:48	01:42	01:30	01:25	01:16
1.5	**Jumlah Tenaga Pendidik**						
	Tenaga Pendidik PAUD / TK / RA	Rasio	1.043	1.023	1.104	1.117	1.568
	Tenaga Pendidik SD/MI	Rasio	3.309	3.585	3.640	3.654	3.771
	Tenaga Pendidik SMP/MTs	Rasio	2.684	2.392	2.399	2.462	2.341
1.6	**Jumlah Guru Bersertifikat**						
	Guru SD/MI	Orang	438	421	431	3094	3.751
	Guru SMP/MTs	Orang	2.320	2.242	2.125	2.125	2.301
	Guru SMA/SMK/MA	Orang	892	789	812	812	732
1.7	**Jumlah Ruang Kelas**						
	RKB TK/RA	Ruang	438	421	431	487	1.675
	RKB SD/MI	Ruang	2.320	2.242	2.125	2.125	2.923
	RKB SMP/MTs	Ruang	892	789	812	812	1.510
1.8	Jumlah Lembaga Pendidikan	Unit	40	40	40	40	599

Sumber: Dindikbud Kota Serang dan BPS Kota Serang, 2025

Rasio ketersediaan sekolah diukur dari jumlah gedung sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah. Berdasarkan tabel diatas bahwa RKS untuk pendidikan dasar di Kota Serang baru tercapai sebesar 35,26 persen untuk SD dan 36,32 persen untuk SMP. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan gedung sekolah di Kota Serang belum bisa mengakomodir kebutuhan pendidikan penduduk usia sekolah. Berdasarkan data tahun 2024, rasio guru terhadap murid tercatat sebesar 1:23. Ini berarti, rata-rata terdapat satu orang guru untuk setiap 23 orang murid. Sementara itu, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), rasio guru terhadap murid tercatat sebesar 1:16, yang menunjukkan satu guru untuk setiap 16

murid, rasio tersebut mencerminkan beban pengajaran yang relatif lebih ringan di tingkat SMP/MTs dibandingkan dengan SD/MI.

Meningkatnya aksesibilitas pendidikan sebagaimana tampak pada APK dan APM sebanding dengan meningkatnya cakupan layanan pendidikan sebagaimana tergambarkan dengan kenaikan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan di Kota Serang pada jenjang prasekolah, Sekolah Dasar dan lembaga pendidikan non formal. Tabel berikut memberikan gambaran tentang kondisi eksisting jumlah lembaga-lembaga pendidikan serta kondisi prasarana pendidikan di Kota Serang.

Tabel II.56
Jumlah Sarana Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	TK Negeri	13	13	12	12	12
	TK Swasta	114	114	127	127	138
	Madrasah	79	79	89	89	89
2	SD Negeri	223	223	220	221	221
	SD Swasta	32	32	39	49	49
	Madrasah	21	21	25	26	26
3	SMP Negeri	29	29	29	29	29
	SMP Swasta	54	50	53	85	85
	Madrasah	60	60	59	62	62
4	SMA Negeri	8	8	8	8	8
	SMA Swasta	23	22	24	24	24
	Madrasah	27	27	31	31	31
5	SMK Negeri	8	8	8	8	8
	SMK Swasta	24	37	37	37	37
6	Pondok Pesantren	136	136	213	213	213
Jumlah		**851**	**859**	**974**	**1021**	**1032**

Sumber: Dindikbud dan BPS Kota Serang, 2025

Jumlah satuan pendidikan dalam waktu lima tahun terakhir di Kota Serang secara umum menunjukkan kondisi tren positif. Pada jenjang TK, jumlah TK Negeri tetap (12–13 unit), sedangkan TK Swasta meningkat dari 114 menjadi 138 unit. Pada jenjang Sekolah Dasar Negeri mengalami penurunan dari 223 menjadi 221 unit, sementara SD Swasta meningkat signifikan dari 32 menjadi 49 unit. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri, pada tahun 2020 hingga 2024 stabil di angka 29, sedangkan SMP Swasta naik dari 54 menjadi 85 unit. Satuan madrasah juga mengalami kenaikan tipis di semua jenjang. SMA dan SMK Negeri tetap stagnan di 8 unit, sementara SMK Swasta meningkat dari 24 menjadi 37 unit sejak 2021. Semntara pondok pesantren mengalami lonjakan besar dari 136 unit (2020–2021) menjadi 213 unit sejak 2022 hingga 2024.

2) Kesehatan

Selain sektor pendidikan, sektor kesehatan merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai kondisi kesehatan yang lebih baik.

Setiap tahunnya Pemerintah Kota Serang melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna menciptakan pelayanan kesehatan yang maksimal maka terdapat beberapa indikator yang menjadi tolok ukur melalui perbandingan antara target dan realisasi. Hal ini akan memudahkan Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Kesehatan untuk mencari cara bagaimana indikator tersebut dapat terus tercapai di masyarakat.

Tabel II.55 berikut memberikan gambaran tentang eksisting capaian urusan kesehatan di Kota Serang selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Dari tabel tersebut capaian urusan kesehatan masih harus ditingkatkan sehingga layanan kesehatan semakin baik dari tahun ke tahun.

Tabel II.57
Perkembangan Indikator Layanan Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio posyandu per 1000 balita	Rasio	10.104	10.181	10,26	10,60	10,67
2	Rasio puskesmas. poliklinik. pustuper 1000 penduduk	Rasio	0,0426	0,0413	0,0400	0,0400	0,038
3	Rasio Medis(dr+drg) per1000 penduduk	Rasio	0,011	0,045	0,086	0,70	0,072
4	Rasio Paramedis (Bidan+Perawat) per1000 penduduk	Rasio	0,048	0,88	2,23	2,85	2,78
5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0,51	0,15	0,15	2,099	2,35
6	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	75,2	27,27	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	57,26	94,12	100	100
8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	91,36	91,25	92,42	100	90,99

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
9	Cakupan Ibu Hamil K4	%	74,77	80,59	80,13	100	90,99
10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	27,15	73,28	94,37	98,90	87,91
11	Cakupan Linakes (fasilitas kesehatan)	%	82,8	89,37	91,32	100	100
12	Cakupan Pelayanan Nifas	%	85,97	88,04	82,61	91,86	87,93
13	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	29,41	18,65	11,41	12,72	8,12
14	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	96,12	96,27	100	83,37
15	Cakupan Kunjungan Bayi	%	85,7	81,31	97,95	100	83,37
16	Cakupan Desa UCI	%	28,36	70,15	76,12	82,09	77,61
17	Cakupan Pelayanan Balita	%	54,41	50,97	95,31	100	100
18	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		93,35	93,09	95,31	100	81,2
19	Kelas Ibu Hamil	%	100	100	100	100	90,99
20	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif	%	38,98	62,37	73,65	80,62	NA
21	Persentase Ibu Hamil KEK yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100	100	40,59	NA
22	Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 Tablet Selama masa Kehamilan	%	79,4	83,26	86,12	78,92	NA
23	Persentase Remaja Putri yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah(TTD)	%	57,76	56,09	58,56	89,9	Na
24	Persentase Bayi yang Baru Lahir mendapat IMD	%	89,27	88,16	91,23	90,02	83,37
25	Persentase Balita Kurus yang Mendapat makanan Tambahan	%	100	100	100	100	Na
26	Cakupan Penderita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100
27	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	11,2	52,63	94,12	100	100
28	AFP ≥ 2 per100.000 Penduduk dibawah Umur 15 tahun	%	0,0002	0	0	0,0056	0,0068
29	Penemuan Pneumonia Balita	%	48,05	39,22	68,31	97,76	50,36
30	Penemuan Pasien Baru TBBTA(+)	%	67,81	47,03	89,98	95,77	56,62
31	Penemuan penderita DBD yang Ditangani	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
32	Penemuan Penderita Diare	%	50,85	93,37	57,98	56,73	45,48
33	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	136.56	100	100	100	100
34	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	%	4,2	3,60	3,75	19,04	31,84
35	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi<24jam	%	100	100	100	100	100
36	Cakupan Puskesmas	%	266,6	266,6	266,6	266,6	23,88
37	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	19,4	19,4	19,4	19,4	19,40
38	Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan STBM Pilarke1(satu)	%	2	100	100	100	100
39	Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan	%	52	87,05	89,54	33,33	33
40	Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat Kesehatan (MS)	%	40	68,8	68,41	68,75	77
41	Persentase Rumah Sakit(RS) yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar	%	48	100	100	100	100
42	Persentase Tempat (TPM) yang Memenuhi Syarat	%	38	80	82	83,72	100
43	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	69,31	70,44	100	100	100
44	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	67,18	62,49	92,35	100	96,04
45	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	60,39	32,15	53,54	100	75,03
46	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	77,79	76,57	100	100	100
47	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	80,28	80,79	76,95	100	91,51

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
48	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	97,12	59,74	57,47	100	94,64

Sumber: Dinkes Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Berdasarkan gambaran capaian kinerja urusan kesehatan selama kurun waktu 2020-2024, masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai maksimal antara lain rasio puskesmas yang melayani per 1000 jumlah penduduk, rasio medis dan paramedis yang masih rendah, pelayanan terhadap ibu hamil, penanganan terhadap penemuan pasien penderita penyakit yang belum maksimal sehingga terkadang mengakibatkan korban jiwa karena kurangnya fasilitas kesehatan yang menjangkau di seluruh pelosok Kota Serang. Urusan kesehatan ini menjadi prioritas ke depan agar bisa lebih baik lagi sehingga bisa meningkatkan usia harapan hidup penduduk Kota Serang.

Tabel II.58
Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis Kota Serang Tahun 2024

No	Indikator	Kecamatan						
		Cipocok Jaya	Curug	Kasemen	Serang	Taktakan	Walantaka	Jumlah
1	Jumlah Sarana Kesehatan							
	a. Rumah Sakit	5	0	0	7	2	0	14
	RSU Tipe A	0	0	0	0	0	0	0
	RSU Tipe B	2	0	0	2	0	0	4
	RSU Tipe C	1	0	0	1	2	0	4
	RSU Tipe D	0	0	0	2	0	0	3
	RSU Tipe E	0	0	0	0	0	0	0
	RSAD/AU/AL/ Polri	1	0	0	1	0	0	2
	Rumah sakit Swasta	3	0	0	5	2	0	10
	Rumah Sakit Khusus	0	0	0	1	2	0	3
	b. Puskesmas	3	1	3	5	2	2	16
	Puskesmas Non Rawat inap	0	1	2	2	0	1	6
	Puskesmas Rawat Inap	3	0	1	3	2	1	10
	Puskesmas Pembantu	4	2	2	2	1	2	13
	c. Posyandu	107	47	99	201	98	110	662
	d. Pos Kesehatan Desa	0	3	5	3	6	2	19
2	Jumlah Tenaga Medis	1.053	89	114	652	184	58	2.150
	Jumlah Dokter Umum	115	8	24	137	31	6	321
	Jumlah Dokter Spesialis	17	0	0	0	0	0	7
	Jumlah Dokter Gigi	4	1	2	4	2	1	14
	Jumlah Perawat	650	11	16	305	59	9	1.050
	Jumlah Bidan	205	25	44	180	81	28	563

Sumber: Dinkes Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Sarana kesehatan di Kota Serang masih sangat dibutuhkan, khususnya rumah sakit yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik kalangan menengah atas maupun menengah bawah. Kota Serang saat ini telah memiliki RSUD Kota Serang, yang mulai beroperasi sejak tahun 2019. Hingga saat ini, fasilitas di RSUD tersebut terus dilengkapi guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara optimal. Dengan status RSUD dan puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), diharapkan pelayanan kesehatan dapat menjadi salah satu prioritas utama dalam perencanaan pembangunan bidang kesehatan. Melalui pendekatan ini, masyarakat Kota Serang diharapkan dapat merasakan layanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Serang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berikut ini dipaparkan capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Serang dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel II.59
Perkembangan Indikator Layanan Pekerjaan Umum
Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kondisi jaringan jalan (km)	208,16	208,16	208,16	413,824	411,304
	1. Kondisi Baik	137,074	149,47	146,94	197,244	194,634
	2. Kondisi Sedang	54,785	41.050	43,20	160,360	151,305
	3. Kondisi Rusak Ringan	16,300	17,640	18,02	43,530	59,045
	4. Kondisi Rusak Berat	NA	NA	NA	10,17	6,32
	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik	65,85	71,83	70,59	47,96	47,32
2	Kondisi jaringan jalan Berdasarkan Jenis Permukaan (km)	208,16	208,16	208,16	411.304	411,304
	1. Di Aspal	176,99	175,88	173,84	342,589	334,964
	2. Di Beton	31,17	32,275	34,32	64,335	71,96
	3. Kerikil	NA	NA	NA	4,38	4,38
	4. Tanah	NA	NA	NA	NA	NA
3	Panjang Saluran Irigasi Sekunder (M)	14.163,46	14.163,46	14.163,46	14.163,46	14.163,46
	Saluran Kondisi Baik	11.363,56	12.241,43	13.963,46	13.963,46	13.763
	Saluran Kondisi Sedang	2.799,90	1.922,03	200	200	400,46
	Saluran Kondisi Rusak Ringan	NA	NA	NA	NA	NA

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Saluran Kondisi Rusak Berat	NA	NA	NA	NA	NA
	Persentase Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik	80,23	86,43	98,58	100	97,14
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	95,34	100	100	100	100
4	Jumlah Jembatan (unit)	91	91	91	89	113
	Jembatan Dengan Kondisi Baik	79	80	79	73	95
	Jembatan Dengan Kondisi Sedang	11	10	12	12	12
	Jembatan Dengan Kondisi Rusak Ringan	1	1	NA	3	5
	Jembatan Dengan Kondisi Rusak Berat	NA	NA	NA	1	1
5	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	80,48	81,63	84,31	100	100
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	97,89	97,36	91,34	87,25	84,11
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	87,32	100	100	100	95,07
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	100	100
9	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk (%)	1.037,56	1.037,56	1.037,56	1.037,56	843,05
10	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (m)	71.804	71.804	71.804	71.804	74,85
11	Luas irigasi Kota dalam kondisi baik (m2)	11.363,56	12.241,43	13.963,46	13.963,46	13.763,46
12	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	69,31	69,69	70,07	95,19	97,19
13	Persentase Rumah tangga ber-Sanitasi	69,33	88,75	89,3	99,34	100
14	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap	80,19	72,47	72,74	70,00	86,65

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	rumah tangga di seluruh kabupaten/kota					
15	Persentase Penduduk Berakses air minum	72,30	72,47	78,32	79	79
16	% Areal Kawasan Kumuh Pemukiman	6,50	2,71	2,52	4,10	2,72
17	Tersedianya fasilitas Pengurangan sampah (%)	61,34	14,00	4,9	6.333	9,62
18	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	100	19,42	28,54	44,86	64,72
19	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	100	NA	NA	NA	NA
20	Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	1,66	1,71	1,66	1,63	1,63

Sumber: DPUPR, DPRKP, DLH Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Untuk urusan pekerjaan umum selama kurun waktu tahun 2020-2024 terdapat beberapa indikator kinerjanya yang tidak tercapai seperti infrastruktur jalan di beberapa daerah kondisinya masih banyak yang berlubang dan rusak dengan capaian di akhir tahun 2024 kondisi jaringan jalan baik tercapai sepanjang 194.634 km dari 411.304 km atau masih tersisa 216.67 km jalan yang belum baik. Persentase panjang saluran irigasi kondisi baik tercapai 13.763 M dari 14.163,46 M. Drainase masih banyak yang tersumbat di sepanjang jalan Kota Serang sehingga terjadi banjir jika hujan turun. Rasio tempat pemakaman umum mengalami penurunan dengan tahun 2023 sebesar 843,05. Rumah tangga sanitasi aman tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 86,65 persen dari 99,34 persen di tahun 2023. Hal ini menandakan banyaknya rumah tinggal yang sudah dilengkapi sarana sanitasi. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sebesar 79,00 persen. Sebagian di antaranya telah menggunakan air hidran, sementara sisanya masih mengandalkan air tanah atau air sumur untuk kebutuhan konsumsi.

Berikut ini adalah beberapa capaian yang dapat disoroti:

a. Perlindungan wilayah rawan banjir mengalami peningkatan dari 19,42 persen di 2021, menjadi 64,72 persen pada 2024, menunjukkan penguatan infrastruktur pengendalian banjir.
b. Cakupan layanan irigasi tetap stabil di angka 100 persen sejak 2021, mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan jaringan irigasi.
c. Akses air minum layak meningkat dari 72,47 persen di tahun 2021 menjadi 86,65 persen pada tahun 2024, menunjukkan perbaikan signifikan terhadap layanan SPAM perpipaan.
d. Layanan air limbah domestik juga mengalami lonjakan dari 70,07 persen di 2022 ke 97,19 persen pada 2024.
e. Rasio kepatuhan IMB dan proyek tanpa kecelakaan konstruksi mencapai 100 persen secara konsisten sejak 2023, mencerminkan tata kelola proyek yang baik.
f. Tenaga teknis bersertifikat mencapai 95,07 persen pada 2024, memperkuat aspek profesionalisme dalam layanan teknis.
g. Namun, perlindungan kawasan pesisir belum mengalami kemajuan (0 persen sejak 2021), menunjukkan adanya tantangan besar dalam mitigasi abrasi pantai.

Secara umum, capaian ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kota Serang dalam memperkuat layanan infrastruktur dasar dan tata ruang yang berkelanjutan.

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang bertugas menangani konsumen air bersih di rumah tangga, perumahan dengan penggunaan listrik, administrasi permukiman yang terstruktur, menangani situasi permukiman kumuh, proporsi tempat tinggal terhadap pemukiman yang dihuni. Gambaran tentang kondisi eksisting dan capaian kinerjanya dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.60
Perkembangan Indikator Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	12,92	12,86	12,56	12,11	11,63
2	Persentase kawasan permukiman kumuh	15,52	14,71	29,99	33,52	9,20

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani					
3	Persentase Rumah tangga pengguna listrik	97,54	99,54	99,99	99,99	99.99
4	Persentase Pemukiman Tertata	93,18	96,57	96,58	97,01	97,3
5	Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	6,5	2,71	2,52	4,1	2,69
6	Rasio Rumah layak huni	0,871	0,871	0,874	0,878	0,973
7	Rasio permukiman layak huni	0,955	0,965	0,966	0,97	0,97
8	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	93,33	100	100	100
9	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	0	0	0	0
10	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	80,09	81,86	81,16	36,05	79,00

Sumber: DPKP Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Selama periode lima tahun, beberapa tolok ukur terkait Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum terpenuhi secara optimal, capaian pengurangan unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) berjalan konsisten, meskipun mengalami sedikit fluktuasi, dengan capaian 11,63 persen pada 2024. Jumlah perumahan yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum), sudah mencapai pada angka 79,00 persen di tahun 2024. Fasilitasi relokasi rumah layak huni untuk masyarakat terdampak program pemerintah masih belum terealisasi sejak 2021. Hal ini menjadi catatan penting untuk perhatian ke depan. Komitmen Pemerintah Kota Serang terus ditingkatkan dalam upaya penataan permukiman dan pemenuhan hak atas hunian layak di Kota Serang serta konsistensi dalam pemenuhan PSU di Kota Serang. Indikator kinerja perumahan rakyat dan kawasan pemukiman sebagian besar sudah tercapai tetapi masih perlu penataan agar yang sudah terbangun bisa lebih tertata dengan baik.

persentase penduduk pengguna air bersih capaiannya sebesar 86,65 persen. Oleh karena itu maka sarana dan fasilitas air bersih masih perlu di prioritaskan untuk dibangun. Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana telah mencapai 100 persen sejak tahun 2022,

menandakan respons cepat terhadap situasi darurat, penanganan kawasan kumuh menunjukkan tren membaik, dengan persentase kawasan kumuh yang ditangani menunjukkan penurunan dari 33,52 ke 9,20 dikarenakan adanya pembagian kewenangan antara kota, provinsi dan pusat sehingga adanya penurunan yang signifikan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Hal ini juga karena berkurangnya luasan kawasan kumuh berdasarkan SK Walikota tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor 258 tahun 2024 tentang Penetapan Percepatan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Di Kota Serang tahun 2025-2030 memuat total luas kawasan kumuh di Kota Serang 177,34 Ha terbagi menjadi 27,56 Ha kewenangan Pemerintah Pusat, 71,48 Ha kewenangan Pemerintah Provinsi Banten dan 71,30 Ha kewenangan Pemerintah Kota Serang.

Tabel II.61
Capaian Perumahan Yang Telah Meyerahkan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Kota Serang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Perumahan	NA	NA	205	218	232
2	Total PSU	44	60	81	91	110
2.1	PSU Perumahan Sudah Diserahkan	8	16	21	10	19
2.2	PSU Perumahan Belum Diserahkan	36	44	60	81	91

Pada tahun 2024 tercatat terdapat 232 pengembang dengan 232 perumahan di Kota Serang. Dari jumlah tersebut, baru 19 perumahan yang telah menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah, sementara 91 perumahan lainnya belum menyerahkan PSU. Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan utama, antara lain:

1. Keterlambatan Penyerahan Aset Publik;
2. Kualitas Layanan Infrastruktur Perumahan Belum Optimal;
3. Tanggung Jawab Hukum dan Administratif yang Lemah;
4. Potensi Konflik dan Ketidakpastian bagi Warga.

Dengan demikian, permasalahan utamanya adalah belum optimalnya serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah yang berdampak pada pengelolaan, pemeliharaan, serta kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah strategis berupa Penegakan aturan lebih tegas terkait kewajiban penyerahan PSU,

pengawasan terintegrasi melalui tim lintas OPD dan sistem informasi digital dan Pendampingan pengembang agar proses serah terima lebih mudah dan cepat. Dengan upaya tersebut, diharapkan penyerahan PSU dapat dipercepat, aset daerah semakin tertata, dan kesejahteraan warga perumahan Kota Serang meningkat.

5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mencakup indikator seluruh tindakan seperti rasio linmas terhadap jumlah penduduk, tingkat penyelesaian pelanggaran keamanan dan ketertiban Kota Serang, cakupan layanan pemadam kebakaran, cakupan penegakan hukum setempat dan proporsi petugas polisi dalam pelayanan sipil. Tabel berikut memberikan gambaran kinerja yang dicapai selama lima tahun terakhir.

Tabel II.62
Perkembangan Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Serang Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	42	47	29,55	29,41	28,02
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	99,02	100	99,43	100	100
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
4	Cakupan Penegakan Perda (%)	99,76	100	100	100	100
5	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	0,37	0,50	0,5	0,40	0,32
6	Jumlah LSM Terdaftar	180	52	52	48	21
7	Jumlah Ormas	26	26	26	26	86
8	Pembinaan LSM & Ormas	1	1	1	5	5
9	Kasus Kerusuhan / Konflik Sara	0	0	0	0	0
10	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	7	6	6	2	4
11	Jumlah Linmas	1.558	1.558	2.129	2.129	2.129
12	Jumlah pos ronda/ kamling	668	668	668	668	668
13	Jumlah pelaksanaan operasi pekat	63	43	52	NA	27
14	Jumlah unjuk rasa	8	105	6	17	7
15	Jumlah operasi penegakan Perda	111	72	477	722	27
16	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
17	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	681.012	702.228	100	100	100
18	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	681.012	702.228	100	100	100

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	25.000	355.000	100	100	100
20	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100
21	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	12,88	15	13,94	11,66	11,96

Sumber: Satpol PP Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Pada Tabel II.61 di atas terlihat bahwa Pemerintah Kota Serang menunjukkan komitmen yang baik dalam aspek ketenteraman dan perlindungan masyarakat, dengan beberapa capaian penting walaupun rasio jumlah linmas dan jumlah Polisi Pamong Praja masih kurang ideal. Namun cakupan penegakan Perda mencapai 100 persen yaitu dengan realisasi 27 operasi penegakan perda di tahun 2024. Urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat nilainya fluktuatif setiap tahunnya hal ini disebabkan jumlah linmas dan polisi pamong praja naik turun namun jumlah penduduk yang harus dilayani setiap tahun bertambah. Penegakan Perda/Perkada tercapai 100 persen pada tahun 2020–2024.

Pada indikator layanan informasi dan kesiapsiagaan bencana menjangkau lebih dari 68 ribu warga pada 2020 dan kemudian berhasil mencapai cakupan penuh (100 persen) sejak 2022. Pada layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana juga menunjukkan progres baik dengan capaian program sebesar 100 persen di tahun 2024. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menunjukkan konsistensinya dari tahun 2020 hingga 2024 dengan capaianya 100 persen. Waktu tanggap penanganan kebakaran terus mengalami penyempurnaan, dari 12,88 menit pada tahun 2020 menjadi 11,96 menit tahun 2024, mencerminkan kecepatan dalam merespon laporan suatu kejadian kebakaran dan terjadi peningkatan efisiensi waktu. Secara keseluruhan, Kota Serang telah mencapai banyak capaian penting dalam perlindungan masyarakat dan ketertiban umum, namun perlu peningkatan konsistensi khususnya dalam penegakan regulasi dan pelayanan kebakaran agar tetap optimal dan berdaya tanggap tinggi. Dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa, pemerintah Kota Serang senantiasa melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas keamanan

dan ketertiban dengan terus meningkatkan pengetahuan. Pemahaman wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi bagi seluruh komponen masyarakat. Untuk mengantisipasi kerawanan sosial politik, maka dilakukan pembinaan dan monitoring yang terkait dengan kegiatan politik daerah.

Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1) Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Gambaran tentang kinerja layanan urusan ketenagakerjaan sepanjang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel II.62.

Tabel II.63
Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kota Serang
Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100	83,3	92,88	79,53	79,94
2	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	58,42	59,36	80,18	53,29	90,72
3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	70,59	100	100	100	100
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	40,11	37,18	36,81	35,61	32,36
5	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	4,89	2,17	3,80	1,13	0,35
6	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	7,35	8,89	7,72	7,86	9,72
7	Rasio lulusan S1/S2/S3	54,60	55,82	58,89	51,22	51,22

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
8	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	76,95	80,65	78,46	76,19	77,17

Sumber: Disnakertrans Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2024

Berdasarkan tabel di atas persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan menunjukkan tren peningkatan dari 7,35 persen pada tahun 2020 menjadi 9,72 persen di tahun 2024. Ini mengindikasikan perbaikan dalam pelayanan penempatan kerja, serta meningkatnya kesesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi para pencari kerja. Pada rasio lulusan pendidikan tinggi sempat meningkat dari 54,60 persen di tahun 2020 menjadi puncaknya di 58,89 persen pada tahun 2022. Namun, setelah itu mengalami penurunan ke 51,22 persen di tahun 2023 dan tetap di angka yang sama pada 2024. Meski demikian, angka ini tetap menunjukkan bahwa lebih dari separuh lulusan di wilayah ini berasal dari jenjang pendidikan tinggi.

Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan beberapa tren positif di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan di wilayah terkait. Angka sengketa antara pengusaha dan pekerja menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, angka sengketa tercatat sebesar 4,89 persen, lalu terus menurun setiap tahun hingga mencapai 0,35 persen di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Perencanaan Tenaga Kerja meningkat pesat dari 70,59 persen tahun 2020 hingga 100 persen pada tahun 2021–2023, namun mengalami penurunan tajam pada 2024. Pada tenaga kerja bersertifikat kompetensi menunjukan adanya penurunan, dari 40,11 persen pada tahun 2020 hingga 32,36 persen pada tahun 2024, yang menandakan perlunya penguatan program sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja. Capaian Produktivitas Tenaga Kerja mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa efisiensi tenaga kerja belum terjadi secara optmal. Penerapan tata kelola kerja yang layak oleh perusahaan mengalami fluktuasi selama tahun 2020-2024. Penyebabnya karena berbagai faktor yang dimana faktor utamanya adalah kebijakan yang diambil perusahaan. Pemerintah perlu memberikan pemahaman dan pengawasan bagi perusahaan agar dapat menerapkan tata kelola kerja yang layak. Penempatan tenaga kerja melalui layanan Antar Kerja mengalami fluktuatif, dengan capaian 80,18 persen pada tahun 2022

namun terus mengalam kenaikan yang positif ke 90,72 persen pada 2024. Secara umum, data ini menunjukkan adanya perbaikan dalam dunia ketenagakerjaan, khususnya dalam mengurangi konflik dan meningkatkan penempatan kerja, meskipun rasio lulusan pendidikan tinggi perlu terus ditingkatkan agar dapat mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja di masa depan

2) Pertanahan

Kinerja Urusan Pertanahan mencakup indikator persentase luas lahan bersertifikat. penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian izin lokasi. Gambaran tentang kinerja capaiannya tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel II.64
Perkembangan Capaian Indikator Pertanahan
Kota Serang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100	100	-
2	Tersedianya tanah untuk masyarakat	93,67	100	0,35	100	100
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	85,32	85,32	0,35	100	100
4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	94,55	94,54	0,35	100	100
5	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	54,1	54,1	100	100	NA
6	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	NA	NA	NA	NA
7	Luas Tanah (ha)	26.618	26.618	26.618	26.618	26.618
8	Jumlah lahan bersertifikat	11.015	11.015	11.015	11.015	11.015
9	Jumlah Penduduk	681.012	702.228	702.228	735.651	759.929
10	Jumlah Penduduk memiliki lahan	255.303	255.303	255.303	255.303	255.303
11	Persentase Penduduk memiliki lahan	37,48	37,48	37,48	37,48	37,48
12	Persentase Luas lahan Bersertifikat	41,69	41,69	41,69	41,69	41,69
13	Jumlah Ijin Lokasi	18	18	32	32	4

Sumber: DPMPTSP dan DPUPR Kota Serang, 2025

Permasalahan untuk urusan pertanahan adalah sebagian indikator masih kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kota Serang yang mengeluarkan sertifikat atas pengukuran lahan di Kota Serang sehingga data yang disajikan masih harus berkoordinasi dengan BPN setempat.

Jumlah ijin lokasi tahun 2024 berjumlah 4 ijin Lokasi, datanya berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang karena Persetujuan Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi kewenangannya sesuai amanat Undang-undang Cipta Kerja. Kesadaran masyarakat dalam memperoleh perijinan yang legal masih perlu ditingkatkan mengingat Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten yang memungkinkan akan terus tumbuh dan berkembang di masa akan datang.

Tingkat pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkannya di Kota Serang lokasi dengan angka yang sangat tinggi, yakni sekitar 94,5 persen pada tahun 2020 dan terus mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2024 mencapaian 100 persen. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum mengalami peningkatan dari 54,1 persen pada 2020 dan 2021 menjadi 100 persen pada 2022 dan 2023, dan pada 2024 perubahan kebijakan atau prioritas dalam penetapan lahan fasilitas umum menjadikan capaian tidak tersedia pada tahun terakhir.

Ketersediaan lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal juga mengalami pola serupa, dan untuk tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap didistribusikan hanya berada pada tahun 2020 dengan capaian 100 persen, sementara untuk tahun-tahun selanjutnya program tersebut tidak menjadi bagian program lanjutan pemerintah. Sementara itu, tanah untuk masyarakat menunjukkan ketersediaan yang cukup baik dengan capaian 93,67 persen di tahun 2020, kemudian membaik 100 persen pada 2023 dan 2024. Pada penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi tercatat sangat konsisten dengan angka 100 persen selama empat tahun berturut-turut, namun pada tahun 2024 tidak terdapat penanganan sengketa yang terlaporkan. Hal ini mungkin tren ada aduan sengketa di tahun terakhir.

3) Lingkungan Hidup

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup tergambar pada indikator persentase jumlah sampah yang tertangani, cakupan pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan, wilayah rawan longsor, cakupan pengawasan pelaksanaan amdal, tempat pembuangan sampah dan

penegakan hukum lingkungan. Pelayanan jasa pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup telah menjangkau di seluruh kecamatan. Berikut gambaran mengenai perkembangan indikator urusan lingkungan hidup.

Tabel II.65
Perkembangan Capaian Indikator Lingkungan Hidup
Kota Serang Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mutu Kualitas Air(%)	43,33	53,07	50,00	50,00	57,60
2	Persentase jumlah sampah yang ditangani	61,60	52,36	55,72	68,15	60,59
3	Tempat pembuangan sampah	1	2	130	130	191
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	54,34	55,05	54,37	50,61	54,19
5	Kualitas Mutu Tutupan Lahan	39,71	23,14	24,38	23,26	25,43
6	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	90,01	89,77	91,54	68,15	60,59
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	12,5	35,62	23,73	19,23	16,67

Sumber: DLH Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Berdasarkan Tabel II.64, terdapat beberapa perkembangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Serang antara tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2024, persentase penanganan sampah tercatat sebesar 60,59 persen, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 68,15 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan sampah yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Sementara itu, indikator kualitas mutu tutupan lahan justru menunjukkan tren yang fluktuatif. Namun Pada tahun 2024, nilai mutu tutupan lahan menunjukkan capaiannya meningkat menjadi 25,43 poin, dari 23,26 poin pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya konservasi dan penghijauan yang mulai menunjukkan hasil. Mutu kualitas air juga mengalami perbaikan. Pada tahun 2024, mutu air tercatat sebesar 57,60 persen, lebih tinggi dibandingkan 2 tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya air dan kualitas lingkungan perairan di Kota Serang. Dari sisi sarana pengelolaan sampah, jumlah lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) meningkat tajam. Pada tahun 2024, tercatat 191 lokasi TPS, naik signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebanyak 130 lokasi. Kenaikan jumlah TPS ini menunjukkan adanya upaya serius pemerintah

daerah dalam memperluas fasilitas pengelolaan sampah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2020 hingga 2024 dengan capaian pada tahun terakir mencatatkan penurunan IKLH menjadi 54,19 poin dari 50,61 poin pada tahun 2023.

Sementara itu pada capain pengelolaan sampah menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian indikator menunjukan capaian yang baik, masing-masing mencatatkan sebesar 90,01 persen dan 89,77 persen. Namun penurunan terjadi pada tahun terakir dengan mencatatkan 60,59 persen di akhir tahun. Secara umum ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), serta peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah juga mengalami kondisi yang tidak tetap sehingga pemerintah Kota Serang dalam mengatasi ketidak stabilan ini menandakan perlu penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

4) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambaran tentang kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil capaiannya sepanjang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.66
Perkembangan Indikator Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perekaman KTP Elektronik	99,88	99,79	97,44	98,77	100
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	19,96	32,02	45,13	50,2	64,15
3	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100	100	100	100	100
4	Jumlah Penduduk Wajib KTP	465.794	481.911	495.425	519.166	526,242
5	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	465.224	480.885	510.006	512.755	526,242
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99	99,80	97,10	98,77	100
7	Penduduk yang sudah ber-Akte Lahir	307.158	331.025	339.580	375.476	404.541
8	Persentase Penduduk ber akte Lahir	45,10	47,14	46,87	51,04	53,23
9	Jumlah Penduduk	681.012	702.228	724.552	735.651	759,929
10	Rasio bayi berakte lahir	0,92	0.96	0.97	1,00	1,00
11	Jumlah Kepala Keluarga	186.478	194.488	216.847	221.142	228,235
12	Keluarga yang sudah ber-KK	103.528	136.160	171.462	122.159	228.235

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
13	Persentase Keluarga yang sudah ber KK	91,70	92,77	100	100	100
14	Persentase Keluarga yang sudah ber Akte Nikah	32,28	41,29	50,73	51,43	61,71
15	Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	NA	NA	NA	NA	7,11

Sumber: Disdukcapil Kota Serang & SIPD Kota Serang. 2025

Capaian kinerja bidang administrasi kependudukan di Kota Serang menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2020–2024. Berdasarkan data Disdukcapil Kota Serang, sebagian besar indikator pelayanan dasar mengalami peningkatan signifikan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan dari sisi sosialisasi, integrasi, serta perluasan jangkauan layanan.

Pelayanan perekaman KTP elektronik telah mencapai hasil yang sangat baik, yaitu meningkat dari 99,88 persen pada tahun 2020 menjadi 100 persen pada tahun 2024, Capaian Kartu Identitas Anak (KIA) juga mengalami peningkatan tajam, dari 19,96 persen pada tahun 2020 menjadi 64,15 persen pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja pelayanan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen identitas anak. Namun demikian, masih terdapat sekitar 35 persen anak di Kota Serang yang belum memiliki KIA, yang umumnya disebabkan oleh kurangnya informasi, keterbatasan akses layanan mobile, serta persepsi masyarakat yang belum menjadikan KIA sebagai kebutuhan mendesak.

Seluruh perangkat daerah di Kota Serang telah memanfaatkan data kependudukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir, Indikator penduduk yang sudah memiliki akta lahir menunjukkan peningkatan dari 45,10 persen pada tahun 2020 menjadi 53,23 persen pada tahun 2024. Walaupun terjadi tren positif, capaian tersebut masih tergolong rendah dibandingkan dengan target nasional yang di atas 90 persen. Rendahnya kepemilikan akta lahir sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan kelahiran.

Sementara itu, rasio bayi berakte lahir meningkat dari 0,92 menjadi 1,00 pada tahun 2024, yang berarti seluruh bayi baru lahir di Kota Serang telah dicatat dan memiliki dokumen resmi. Dari sisi ketertiban administrasi keluarga, persentase keluarga yang sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) mencapai 100 persen sejak tahun 2022, menandakan seluruh rumah tangga di Kota Serang telah terdata secara administratif. Kepemilikan akta nikah juga mengalami peningkatan dari 32,28 persen menjadi 61,71 persen selama

periode yang sama. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kesadaran hukum masyarakat, namun masih terdapat sekitar 38 persen pasangan yang belum memiliki akta nikah. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh praktik pernikahan di bawah tangan, kurangnya pemahaman terhadap prosedur legalisasi, serta keterbatasan koordinasi antara KUA, Dukcapil, dan masyarakat.

Adapun, penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2024 menunjukkan capaian 7,11 persen. Meskipun masih rendah, capaian ini mencerminkan langkah awal dalam proses transformasi digital kependudukan di Kota Serang. Tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, akses dan sosialisasi masih rendah, serta kebutuhan peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi.

Secara keseluruhan, capaian bidang administrasi kependudukan di Kota Serang memperlihatkan kinerja yang terus meningkat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemeritah Kota Serang berkomimen dalam sosialisasi layanan, integrasi data lintas sektor, serta percepatan transformasi digital kependudukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, cepat, dan berbasis data akurat.

5) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masyarakat desa/kelurahan merupakan target penting dalam pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan diupayakan sebagai langkah untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Upaya tersebut dijalankan melalui kelompok binaan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Posyandu Aktif. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai kondisi urusan tersebut selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel II.67
Perkembangan Layanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Status Kelurahan cepat berkembang	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pengentasan kelurahan tertinggal	%	100	100	100	100	100
3	Cakupan sarana prasarana perkantoran Kelurahan yang baik	%	52,24	53,73	68,18	67,16	67,16
4	Jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	klp	67	67	67	67	67

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
5	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	persen	100	100	100	100	100
6	Jumlah kelompok binaan PKK	klp	74	74	74	74	74
7	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Reta-rata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	LPM Berprestasi	%	NA	28	3	NA	NA
9	Kelopok Binaan PKK	%	100	100	100	100	100
10	PKK aktif	%	100	100	100	100	100
11	Posyandu aktif	%	64,18	67,00	80,00	80,00	100
12	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	52,24	53,73	68,18	67,16	100
13	Posyandu aktif	klp	100	100	100	100	100
14	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	9,30	9,28	20,00	NA	NA

Sumber: Sekretariat Daerah, DP3AKB, Kecamatan & SIPD Kota Serang, 2025

Cakupan sarana prasarana perkantoran kelurahan dalam kondisi baik selama kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan meskipun nilainya masih berada pada angka 67,16 persen. Hal ini disebabka oleh masih adanya beberapa kantor kelurahan yang belum representatif serta masih menggunakan sistem sewa atau kontrak. Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari tahun 2020 hingga 2024 tetap sebanyak satu kelompok di setiap kelurahan. Hal ini mencerminkan adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Kelompok binaan PKK di tahun 2020 hingga 2023 tercatat sebanyak 74 kelompok dan seluruh kelompok tersebut secara aktif mendapat pembinaan.

Tingkat keaktifan posyandu pada tahun 2024 mencapai 100 persen. Peran lembaga ini perlu terus dipertahankan karena sangat membantu masyarakat dalam memeriksakan balita ke tempat pelayanan terdekat. Capaian indikator yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat tidak tersedia karena urusan tersebut tidak lagi menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), melainkan telah dialihkan kepada kecamatan dan Sekretariat Daerah.

Selama periode 2020 sampai dengan 2024, Kota Serang berhasil mempertahankan capaian 100 persen dalam pengentasan kelurahan tertinggal dan peningkatan status kelurahan cepat berkembang, yang menunjukkan keberhasilan pembangunan wilayah secara merata.

6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah Kota Serang menaruh perhatian terhadap urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, karena urusan ini secara signifikan memengaruhi tingkat kesejahteraan warga Kota Serang secara keseluruhan. Kebijakan yang dilaksanakan antara lain mencakup pengendalian angka kelahiran total, peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

Mencegah kehamilan merupakan salah satu cara untuk menekan kuantitas penduduk, sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan sesuai dengan yang diharapkan. Penundaan usia perkawinan pertama dan penggunaan alat kontrasepsi menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan angka kelahiran. Di kalangan masyarakat awam, alat kontrasepsi umumnya dikenal hanya sebagai alat untuk mencegah kehamilan. Namun sebenarnya, alat kontrasepsi memiliki banyak manfaat lainnya. Secara fisik, kontrasepsi berperan penting dalam setiap fase reproduksi, baik untuk menunda maupun menjarangkan kehamilan. Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program Keluarga Berencana (KB) terus didorong agar angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu, keikutsertaan keluarga pra-sejahtera dalam Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) juga ditingkatkan agar mereka dapat belajar berwirausaha dan memperoleh tambahan penghasilan melalui kegiatan ekonomi produktif di wilayah masing-masing. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Serang, yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai kondisi urusan ini selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel II.68
Perkembangan Layanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,48	1,48	2,30	1,20	1,20
2	Rasio Akseptor KB	73,59	76,13	74,27	77,10	69,35
3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	73,59	76,13	74,27	77,10	69,35
4	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern*	73,60	75,83	74,26	77,10	69,51

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					
5	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia15–19 tahun (ASFR 15–19)	32,50	8,84	6,29	17,46	12,83
6	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)	29,80	27,00	73,10	69,28	70,95
7	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) (%)	16,16	14,95	14,33	12,60	7,00

Sumber: DP3AKB Kota Serang, 2025

Selama periode 2020–2024 angka pemakaian kontrasepsi mengalami fluktuasi. Angka tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 77,10%, namun kembali menurun signifikan pada tahun 2024 menjadi 69,35%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar perempuan menikah usia subur menggunakan kontrasepsi, keberlangsungan dan konsistensi penggunaannya belum stabil. Permasalahan yang muncul dapat disebabkan oleh keterbatasan sarana pelayanan, pergeseran pilihan metode kontrasepsi, serta menurunnya intensitas penyuluhan dan pendampingan keluarga berencana. Penurunan angka ini berpotensi meningkatkan risiko kehamilan tidak direncanakan.

Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15–19 tahun) Data menunjukkan adanya penurunan signifikan dari 32,50 persen pada tahun 2020 menjadi 6,29 persen pada tahun 2022. Namun, tren ini kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 17,46 persen sebelum menurun sedikit ke 12,83 persen di tahun 2024. Meskipun secara umum angka kelahiran remaja lebih rendah dibandingkan tahun 2020, fluktuasi ini menandakan masih adanya pernikahan dini dan kurangnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi pada kelompok usia remaja. Fenomena ini menimbulkan permasalahan serius karena berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan beban sosial-ekonomi keluarga.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (Unmet Need)**.** Tren unmet need menunjukkan penurunan dari 16,16 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 7,00 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akses dan ketersediaan layanan KB bagi pasangan usia subur. Namun demikian, masih terdapat sebagian kelompok PUS yang belum dapat mengakses kontrasepsi sesuai kebutuhannya. Permasalahan ini bisa disebabkan oleh keterbatasan

sarana, hambatan budaya, maupun kurangnya layanan konseling yang responsif terhadap kebutuhan keluarga.

Permasalahan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah masih kurangnya kesadaran pasangan usia subur untuk menjaga jarak kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi, serta masih adanya anggapan bahwa "banyak anak banyak rezeki". Pemerintah Kota Serang terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui optimalisasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Serang.

7) Perhubungan

Urusan perhubungan tidak dapat dipisahkan dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong, dan penunjang pembangunan. Oleh karena itu, transportasi harus mampu menyediakan jasa layanan yang andal dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal. Berikut ini adalah gambaran mengenai capaian kinerja urusan perhubungan.

Tabel II.69
Perkembangan Layanan Perhubungan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas	42,39	0,88	0,8	0,83	0,71
	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	0,27	0,26	0,36	0,33	0,385
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum					
	a. Penumpang Bus b. Penumpang Kereta Api c. Penumpang Kapal Laut d. Angkutan Darat	58.403 147.285 6.210 NA	660.105 341.629 NA NA	646.196 386.253 NA NA	736.214 NA NA NA	442.747 5.016.594 NA 48.684
3	Jumlah Ijin trayek perkotaan	1.337	12	12	12	8
4	Rasio ijin trayek	0,002	NA	NA	NA	0,11
5	Jumlah uji kir angkutan umum	5.450	5.090	4.715	3.920	2.268
6	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bus	2	2	2	2	2
7	Persentase layanan angkutan darat	0,68	12,91	15,93	23,21	11,00
8	Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum	97,96	57,52	51,54	40,40	35,58
9	Pemasangan Rambu-rambu	77,1	46,24	97,87	99,00	63.75
10	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,000	0,001	0,842	1,503	1,473
11	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	410.763	660.105	646.196	1.135.481	5.459.341
12	Jumlah orang melalui dermaga /terminal per tahun	395.157	318.476	646.196	1.135.481	5.459.341

Sumber: Dishub Kota Serang, BPS & SIPD Kota Serang, 2025

Adapun rasio konektivitas Kota Serang menunjukkan penurunan yang cukup tajam. Pada tahun 2020, rasio konektivitas berada di angka

42,39 persen dan mengalami penurunan menjadi 0,71 pada tahun 2024. Sementara itu, V/C Rasio (Volume/*Capacity Ratio*) di jalan wilayah Kota Serang yang menunjukkan tingkat kepadatan lalu lintas mengalami sedikit fluktuasi namun cenderung meningkat. Capaian pada tahun 2020 sebesar 0,27 dan meningkat menjadi 0,385 pada tahun 2024. Kondisi ini menegaskan perlunya prioritas dalam pengembangan jaringan jalan serta peningkatan konektivitas antarwilayah guna mendukung mobilitas dan pertumbuhan kota yang berkelanjutan.

Perkembangan jumlah sepeda motor dan kendaraan pribadi yang cukup pesat berdampak pada pola penggunaan moda transportasi di Kota Serang. Meskipun terjadi peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi, jumlah arus penumpang angkutan umum justru menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan. Pada tahun 2024, jumlah arus penumpang angkutan umum tercatat sebanyak 5.459.341 orang, meningkat tajam dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar 1.135.148 orang. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pelayanan angkutan umum pada berbagai moda tanspotasi kereta api, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik, atau dipengaruhi oleh kebijakan dan fasilitas yang lebih mendukung penggunaan angkutan umum di tengah pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun kepemilikan kendaraan pribadi bertambah, angkutan umum tetap menjadi pilihan penting masyarakat dalam mobilitas sehari-hari. Situasi ini membutuhkan penanganan yang serius melalui kebijakan yang dapat mengatasi kemacetan. Trayek angkutan umum perlu dibenahi lebih lanjut karena saat ini angkutan umum belum memiliki trayek yang jelas. Selain itu, menjamurnya angkutan daring di Kota Serang menambah kesemrawutan lalu lintas dan memperumit kondisi perhubungan di Kota Serang.

8) Komunikasi dan Informatika

Berikut adalah gambaran singkat mengenai kondisi urusan ini selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel II.70
Perkembangan Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	136	389	389	389	409
2	Jumlah Radio Lokal	15	8	9	9	9
3	Jumlah Radio Nasional	26	26	26	26	26
4	Jumlah Penyiaran TV lokal	8	8	8	8	8
5	Jumlah Penyiaran TV	NA	NA	NA	17	17

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100	100	100	100	100
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100
8	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Kota Serang berhasil mempertahankan capaian dalam bidang komunikasi dan informatika. Sejak tahun 2020, seluruh perangkat daerah telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini mencerminkan bahwa infrastruktur digital telah merata dan mendukung efektivitas kerja pemerintahan.

Pemerintah Kota Serang berupaya agar seluruh layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam penerapan *e-Government* dan pelayanan berbasis digital. Tidak hanya dari sisi pemerintahan, tingkat kesadaran dan partisipasi publik juga tinggi, dengan capaian program yang telah memenuhi target hingga 100 persen. Hal ini menunjukan upaya serius pemerintah agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah secara konsisten setiap tahun.

Permasalahan dalam urusan komunikasi dan informatika antara lain adalah masih terbatasnya keterbukaan informasi publik untuk menangkal berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Selain itu, akses internet gratis belum bisa menjangkau ke pelosok daerah di Kota Serang.

9) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi serta usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan urusan ini antara lain adalah peningkatan jumlah koperasi aktif serta penambahan jumlah usaha kecil dan mikro di Kota Serang.

Berikut ini merupakan gambaran singkat mengenai kondisi urusan ini selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel II.71
Perkembangan Layanan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase koperasi aktif	35,42	34,89	35,42	36,14	48,46
2	Jumlah Koperasi Aktif	130	127	130	139	148
3	Jumlah usaha mikro	7.560	7.975	8.439	9.239	7.035
4	Jumlah usaha kecil	3.433	3.390	3.153	2.880	596
5	Jumlah usaha menengah	29	23	23	20	29
6	Jumlah BPR	NA	1	2	1	2
7	Jumlah Lembaga	NA	NA	1	1	1
8	Keuangan Mikro	NA	NA	1	1	1
9	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	100	69,23	70,77	22,81	23,28
10	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	72,05	72,98	73,73	80,64	14,25
11	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	85,16	76,49	77,18	100	51,74
12	Persentase kinerja realisasi pupuk	98,59	33,61	92,05	65,49	54,85
13	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	79,33	95,78	96,2	76,17	80,34
14	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	6,5	9,94	9,29	2,74	2,89
15	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	30	50	75	50	0
16	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	75	100	99,96	100
17	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100	100	100	100

Sumber: Disdaginkop Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2024

Permasalahan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah adalah kurangnya modal dalam membuat usaha produktif, serta sebagian besar koperasi di Kota Serang masih berupa koperasi simpan pinjam dengan capaian koperasi aktif pada tahun 2024 sebesar 48,46 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada capaian 35 persen. Sementara itu jumlah usaha mikro mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 7.035 unit. Usaha kecil juga mengalami penurunan jumlah menjadi 596

unit, sedangkan usaha menengah mengalami peningkatan menjadi 29 unit. Jumlah UMKM dan koperasi aktif yang ada saat ini perlu dibina dan dikembangkan agar dapat bertahan dan bersaing di pasar.

Pemerinatah Kota Serang berupaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal melalui koperasi dan usaha mikro. Pada indikator meningkatnya koperasi yang berkualitas, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 100 persen. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan signifikan hingga mencapai 23,28 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kualitas kelembagaan koperasi, baik dari sisi manajemen, kepatuhan terhadap regulasi, maupun daya saing usaha koperasi di tengah perubahan ekonomi. Sementara itu, capaian indikator meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha menunjukkan tren positif dari tahun 2020 hingga 2023, yakni dari 72,05 persen menjadi 80,64 persen. Hal ini mencerminkan keberhasilan program pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis menjadi 14,25 persen. Hal ini dimungkinkan karena adanya perubahan arah kebijakan sehingga capaian tidak optimal dalam mendorong transformasi usaha mikro menjadi wirausaha mandiri.

Capaian persentase pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai ketentuan menunjukkan tren fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, capaian pelaku usaha yang memperoleh izin tercatat sebesar 85,16 persen, namun menurun menjadi 76,49 persen pada tahun 2021 dan sedikit meningkat sebesar 77,18 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi lonjakan capaian hingga 100 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem perizinan, pemutakhiran data pelaku usaha, serta efektivitas pembinaan dan pengawasan. Namun, pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 51,74 persen. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam pemutakhiran izin, minimnya pengawasan, atau kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha.

Pada indikator persentase kinerja realisasi pupuk, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi juga menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2020, capaian mencapai angka sangat tinggi yaitu 98,59 persen, namun menurun drastis menjadi 33,61 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, capaian meningkat menjadi 92,05 persen, namun kembali menurun menjadi 65,49 persen pada tahun 2023 dan 54,85 persen pada

tahun 2024. Adapun capaian pada Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah merupakan indikator penting dalam perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi perdagangan. Pada tahun 2020, capaian sebesar 79,33 persen, meningkat signifikan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi masing-masing 95,78 persen dan 96,2 persen. Namun, terjadi penurunan kembali pada 2023 menjadi 76,17 persen dan sedikit meningkat pada 2024 menjadi 80,34 persen.

Kinerja ini menunjukkan bahwa program tersebut masih berjalan secara rutin dan cukup berhasil namun perlu dijaga konsistensinya terutama kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang belum sepenuhnya menjadikan tera ulang sebagai kewajiban rutin. Selama periode 2020–2024, pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Serang menunjukkan tren yang kurang stabil dan cenderung menurun di akhir periode. Capaian pada tahun 2020 tercatat sebesar 6,5 persen, naik menjadi 9,94 persen pada tahun 2021 (tertinggi dalam periode tersebut), lalu sedikit menurun menjadi 9,29 persen pada 2022 dan turun tajam hingga 2,89 persen pada 2024.

Sementara itu, persentase pencapaian sasaran pembangunan industri (mengacu pada RIPIN dan RPIK) mencerminkan ketercapaian terhadap rencana pembangunan industri berdasarkan dokumen strategis nasional dan daerah. Pada tahun 2020, capaian sebesar 30 persen, meningkat menjadi 50 persen pada tahun 2021, dan terus naik pada tahun 2022 menjadi 75 persen yang merupakan capaian tertinggi dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2023, terjadi pelambatan dengan tingkat realisasi sebesar 50 persen. Pada tahun 2024, pemerintah ota Serang tidak mentargetkan pada program tersebut sehingga tidak ada data relaisasi.

Persentase pemantauan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) besar menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten. Pada tahun 2020, capaian sebesar 100 persen, turun menjadi 75 persen pada 2021, lalu meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 sedikit melambat menjadi 99,96 persen dan kembali mencapai 100 persen pada tahun 2024 dan Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini pemerintah Kota Serang terus menunjukkan perolehan kinerja yang baik dengan mempertahankan capaiannnya mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar 100

persen. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Serang dalam menjaga kepatuhan industri terhadap perizinan dan regulasi. Keberhasilan ini juga menunjukkan penguatan fungsi pengawasan terhadap kegiatan industri besar sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola industri yang sehat dan berkelanjutan.

10) Penanaman Modal

Sebagai kota administratif yang terus berkembang, Kota Serang memiliki prospek yang tinggi dalam pengembangan berbagai jenis usaha skala sedang hingga besar. Sejauh ini, hal tersebut telah cukup dilakukan melalui masuknya investasi yang terus meningkat, baik dari segi jumlah maupun nilainya. Selanjutnya, tabel berikut ini memberikan gambaran tentang perkembangan capaian investasi di Kota Serang selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024.

Tabel II.72
Jumlah Investor di Kota Serang Tahun 2020-2024

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Non PMA / PMDN	Total
2020	Jumlah Investor	670	1	0	671
2021	Jumlah Investor	1.558	0	0	1.558
2022	Jumlah Investor	5.596	0	0	5.596
2023	Jumlah Investor	11.418	11	1	11.430
2024	Jumlah Investor	7733	24	0	7.757

Sumber: DPMPTSP Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Dari tabel diatas Secara keseluruhan, kelebihan Kota Serang ada pada daya tarik investor domestik yang kuat, tetapi tantangannya adalah menjaga stabilitas pertumbuhan dan meningkatkan porsi investasi asing agar lebih berimbang.

Tabel II.73
Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kota Serang Tahun 2020-2024

Tahun	Target Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
2020	1041	3.000.000.000.000	671	3.143.083.089.632
2021	1191	6.075.000.000.000	1.558	6.025.813.724.338
2022	1291	6.450.000.000.000	5.596	12.039.237.847.502
2023	1391	6.875.000.000.000	11.430	5.568.325.102.524
2024	2391	7.218.750.000.000	7.757	8.416.673.721.161

Sumber: DPMPTSP Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Kota Serang memiliki daya tarik investasi cukup baik, terbukti dengan capaian target yang umumnya terlampaui. Namun, ada tantangan fluktuasi nilai realisasi, terutama ketika jumlah proyek tinggi tapi nilainya rendah pada tahun 2023. Sehingga pemerintahan Kota Serang ke depan perlu fokus pada upaya meningkatkan kualitas proyek investasi yaitu nilai besar, bukan hanya jumlah banyak. Selain itu upaya untuk menarik

lebih banyak PMA agar ada diversifikasi sumber investasi dan menjaga keberlanjutan agar tidak terjadi lonjakan dan penurunan drastis dari tahun ke tahun.

Tabel II.74
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Serang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan MA/PMDN	3.800	4.841	61.056	40.839	60.214
Jumlah seluruh PMA/PMDN	671	1.234	8.086	4.034	9.029
Rasio daya serap tenaga kerja	5,66	3,92	7,55	10,12	6,67
Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	-19,39	91,72	99,79	-53,75	51,15

Sumber: DPMPTSP Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Serang mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Sementara itu, jumlah seluruh perusahaan PMA dan PMDN juga menunjukkan pertumbuhan pesat. Rasio daya serap tenaga kerja per perusahaan menunjukkan tren fluktuatif. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah investor meningkat, rata-rata tenaga kerja yang diserap setiap perusahaan justru semakin sedikit. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan pertumbuhan investasi yang sangat pesat di Kota Serang, namun disertai tantangan dalam optimalisasi penyerapan tenaga kerja di setiap unit usaha.

Kinerja investasi di Kota Serang menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dan mencerminkan tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan ekonomi daerah. Pada tahun 2020, investasi mengalami kontraksi sebesar -19,39 persen, yang sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi dan memperlambat arus modal masuk. Situasi ini menjadi titik awal evaluasi dan penyesuaian strategi kebijakan investasi di tingkat daerah, khusunya di Kota Serang. Memasuki tahun 2021 dan 2022, tren investasi mengalami lonjakan positif yang sangat tinggi, masing-masing mencapai 91,72 persen dan 99,79 persen dari target yang sudah ditentukan. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Serang dalam mendorong pemulihan ekonomi melalui penyederhanaan layanan perizinan, promosi peluang investasi, serta penguatan infrastruktur penunjang dunia usaha. Pada tahun 2023, terjadi penurunan investasi, namun pada tahun 2024 capaian kembali menunjukkan tren pemulihan dengan peningkatan sebesar 51,15 persen. Hal ini menandakan mulai

pulihnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Serang. Meskipun belum setinggi tahun-tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan arah positif dan menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, capaian indikator peningkatan investasi selama lima tahun terakhir menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih konsisten, responsif terhadap dinamika pasar, dan berorientasi pada penguatan sektor unggulan daerah guna menciptakan stabilitas pertumbuhan investasi jangka panjang di Kota Serang.

11) Statistik

Beberapa indikator kinerja Urusan Statistik antara lain adalah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah, Pengolahan, Updating dan Analis Data PDRB. Berikut ini gambaran singkat mengenai kondisi urusan ini selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel II.75
Perkembangan Indikator Layanan Statistik Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Buku Kota Serang Dalam Angka	1	1	1	1	1
2	Buku PRDB Kota Serang	1	1	1	1	1
3	Nilai evaluasi statistik Sektoral (SPSS)	NA	NA	2,2	2,33	3,62
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100
5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	NA	NA	43,1	40,47	40,46

Sumber: Diskominfo Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Urusan statistik dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Serang dengan Badan Pusat Statistik dengan menyajikan buku Kota Serang Dalam Angka dan buku PDRB Kota Serang pada setiap tahunya, buku tersebut menyajikan data evaluasi perkembangan pembangunan Kota Serang dan Pemerintah Kota Serang terus berkomitmen terhadap penguatan tata kelola pembangunan berbasis data. Hal ini tercermin dari 100 persen perangkat daerah yang secara konsisten menggunakan data statistik dalam proses perencanaan

dan evaluasi pembangunan daerah sepanjang lima tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam membudayakan penggunaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih terukur dan akuntabel.

Pada urusan persandian, selama tiga tahun terakhir indikator tingkat keamanan informasi pemerintah menunjukkan penurunan hingga tahun 2024, dengan capaian sebesar 43,1 persen, 40,47 persen, dan 40,46 persen. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga integritas dan keamanan informasi pemerintah daerah, baik dari sisi infrastruktur, kebijakan pengamanan siber, maupun sumber daya manusia yang menangani sistem informasi. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan pada aspek keamanan informasi melalui peningkatan kapasitas teknis, pemutakhiran sistem persandian, serta sinergi antarperangkat daerah untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pemerintahan secara berkelanjutan.

12) Kebudayaan

Kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Karena itu pemerintah daerah harus memiliki peran yang besar dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya.

Tabel II.76
Perkembangan Indikator Kebudayaan di Kota Serang
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	58	58	74	75	75
2	Jumlah fasilitasi pergelaran, Pameran, festival, lomba dan pawai	2	7	7	2	4
3	Terlestarikannya Cagar Budaya (%)	93,02	100	86,05	100	100

Sumber: Dindikbud Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Berdasarkan data pada tabel II.75, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2024 sebanyak 75 benda, situs, dan kawasan. Sementara jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai sebanyak 4 event. Pemerintah Kota Serang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya sebagai bagian dari pelestarian budaya dan

sejarah daerah. Hal ini tercermin dari capaian indikator terlestarikannya cagar budaya yang secara umum mengalami tren positif dan menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pelestarian budaya.

Pada tahun 2020, capaian indikator ini mencapai 93,02 persen, yang kemudian meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2021. Meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 86,05 persen pada tahun 2022, capaian kembali meningkat dan stabil di angka 100 persen pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan yang cepat dan strategis oleh Pemerintah Kota Serang dalam merespons tantangan pelestarian budaya pada tahun sebelumnya.

Kinerja tersebut tidak lepas dari pelaksanaan berbagai program prioritas kebudayaan, seperti pendataan dan registrasi cagar budaya, pemeliharaan fisik dan nonfisik terhadap objek cagar budaya, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya lokal. Permasalahan terkait urusan kebudayaan adalah kegiatan yang dilaksanakan belum bisa memunculkan tentang kearifan lokal yang bisa disaksikan oleh para wisatawan sebagai tujuan destinasi wisata. Tabel di atas menunjukan upaya pelestarian budaya di Kota Serang dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang stabil, khususnya dalam hal pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya.

Selain itu, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, arah kebijakan pembangunan kebudayaan di Kota Serang ditujukan untuk memperkuat 10 aspek pemajuan kebudayaan, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Penguatan terhadap sepuluh aspek tersebut dimaksudkan agar kebudayaan di Kota Serang tidak hanya terjaga dalam bentuk fisik, tetapi juga lestari sebagai identitas dan kearifan lokal yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan strategis yang menjadi tantangan dalam pemajuan kebudayaan di Kota Serang, antara lain masih terbatasnya lembaga pendidikan tinggi yang secara khusus mengembangkan bidang kebudayaan dan kesenian, belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti gedung kesenian, balai kebudayaan, rumah adat, dan balai pertemuan, serta belum adanya regulasi komprehensif di bidang kebudayaan yang mengatur tentang

penetapan cagar budaya, adat istiadat, kesenian, sejarah, tradisi, penggunaan bahasa daerah, pakaian daerah, dan makanan daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan belum optimal, sehingga membutuhkan perhatian serius agar kebudayaan dapat berfungsi sebagai identitas, perekat sosial, dan sumber daya pembangunan daerah.

13) Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Pemerintah Kota Serang terus menambah jumlah perpustakaan maupun jumlah koleksi pustaka serta sumber daya manusia yang mengelola kearsipan. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain adalah melalui peningkatan pelayanan perpustakaan yaitu dengan menambah jumlah jam/hari operasional perpustakaan dan mengikutsertakan petugas dalam kursus atau bimtek terkait dengan pustaka untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan. Tabel berikut ini memberikan gambaran mengenai indikator kinerja urusan kearsipan dan perpustakaan, sebagai berikut.

Tabel II.77
Perkembangan Urusan Perpustakaan Kota Serang
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	1	2	2	2	2
2	Jumlah Perpustakaan milik non Pemda	385	470	998	685	685
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun (orang)	9.670	118.138	137.690	105.782	35.792
4	Rasio Koleksi Judul Buku	3,29	2,91	2,93	3,42	3,41
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan (buku)	6.629	11.100	12.181	10.018	10.018
6	Jumlah Koleksi Buku (buku)	16.000	32.447	35.642	16.684	34.161
7	Cakupan Kunjungan ke Perpustakaan (%)	33	4,44	19,61	27,31	20,80
8	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	59,99	62,51	66,17	52,62	52,00
9	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	41,91	41,91	62,35	43,94	62,97

Sumber: DPK Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat meningkat dari 59,99 persen pada tahun 2020 menjadi 66,17 persen pada tahun 2022. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing menjadi 52,62 persen dan 52,00 persen. Penurunan ini dapat disebabkan

oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya akses terhadap fasilitas membaca yang merata, keterbatasan koleksi literatur digital maupun fisik, serta rendahnya minat baca yang belum teratasi secara menyeluruh.

Sebaliknya, capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menunjukkan perbaikan yang cukup berarti, terutama pada tahun 2022 yang mencapai 62,35 persen dan meningkat kembali menjadi 62,97 persen pada tahun 2024, setelah sebelumnya stagnan di angka 41,91 persen pada tahun 2020 dan 2021 serta sempat menurun menjadi 43,94 persen pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun minat baca mengalami fluktuasi, intervensi pembangunan infrastruktur dan program literasi memberikan dampak positif terhadap penguatan ekosistem literasi masyarakat.

Berdasarkan fakta tersebut, Pemerintah Kota Serang berupaya untuk melakukan penguatan melalui strategi promosi literasi berbasis komunitas, penyediaan sarana perpustakaan yang inklusif, dan peningkatan kualitas layanan serta koleksi pustaka untuk mendorong kegemaran membaca yang lebih merata dan berkelanjutan. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah perpustakaan belum dapat menjangkau ke seluruh pelosok Kota Serang, belum dapat menumbuhkembangkan minat baca dari para penduduk usia sekolah serta koleksi judul buku belum bisa memenuhi semua kebutuhan para siswa sekolah dalam mencari literatur untuk memenuhi tugas sekolah. Pencarian cepat di internet juga menjadi masalah dalam penurunan jumlah kunjungan ke perpustakaan karena masyarakat ingin yang cepat dan instan dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

14) Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan dengan fungsi strategis yaitu dalam rangka perkembangan daerah guna menangani arsip aktif, arsip inaktif, dan dokumen daerah. Penanganan arsip sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kearsipan di antaranya adalah melalui bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan-kegiatan seperti monitoring, lomba, dan pendampingan pengelolaan arsip. Tabel berikut ini memberikan gambaran mengenai indikator kinerja urusan kearsipan, sebagai berikut.

Tabel II.78
Perkembangan Indikator Layanan Kearsipan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	30,30	12,12	24,24	48,48	81,25
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (orang)	14	16	11	16	15
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100	100	100	55,4	74,58
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	83,33	50	66,66	83,33	66,67

Sumber: DPK Kota Serang & SIPD Kota Serang, 2025

Capaian pada indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah tercatat sangat baik pada tahun 2020 hingga 2022 dengan capaian 100 persen. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2023 sebesar 55,4 persen dan meningkat kembali menjadi 74,58 persen pada tahun 2024. Sementara itu, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, capaian berada pada 83,33 persen, turun menjadi 50 persen pada tahun 2021, dan kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 66,66 persen pada tahun 2022, 83,33 persen pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 66,67 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran terhadap pentingnya arsip sebagai dokumen pertanggungjawaban, masih terdapat tantangan dalam hal standarisasi pengelolaan arsip dan penyelamatan arsip statis.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah penguatan kebijakan, penyediaan sarana prasarana modern, serta peningkatan kapasitas SDM guna memastikan sistem literasi dan pengelolaan arsip yang berkelanjutan, transparan, dan mendukung akuntabilitas publik di Kota Serang. Permasalahan kearsipan adalah belum mempunyai gedung arsip yang dapat menampung arsip dari seluruh PD di Kota Serang serta belum adanya arsip digital yang dibutuhkan dalam rangka mengamankan arsip penting jika terjadi bencana alam atau kejadian yang tidak diinginkan. Sumber daya manusia kearsipan telah ada sejak tahun 2020 . Pegawai

yang menjadi fungsional kearsipan terus bertambah hingga tahun 2024 berjumlah 15 orang. Beberapa fungsional arsiparis juga diperbantukan di perangkat daerah diluar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK). Kehadiran fungsional kearsipan dapat menjadi salah satu solusi agar kearsipan Pemerintah Kota Serang dapat tertata sebagaimana mestinya.

15) Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II.79
Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100	80,47	100	64,73	66,87
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	38,39	21,41	98,81	58,96	48,79
4	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	74,19	75,49	94,08	94,83	95.05
5	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3,4	43,09	26,59	29,64	31,49
6	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	60,71	2,28	44,01	42,86	46,24
7	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	7,33	6,76	5,59	6,86	9,24
8	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	31,12	4,81	16,41	17,89	3,64
9	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	0,46	9,07	2,94	1,11	2,89
10	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	8,85	14,94	15,91	15,91	18,61
11	Rasio PAD	9,95	14,72	18,44	18,28	19,62
12	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi *Transfer Expenditures*)	3,28	15,02	81,87	78,97	85,2
13	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	99,62	99,81	96,26	94,18	94,41
15	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)	100	100	100	100	100

Sumber: RKPD Kota Serang 2024-2025 dan RPD Kota Serang Tahun 2024-2026

Pada tahun 2024, kinerja pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah Kota Serang menunjukkan capaian yang relatif baik. Kemandirian fiskal terus meningkat dengan rasio PAD mencapai 19,62 persen, serta deviasi realisasi PAD yang rendah sebesar 3,64 persen menandakan target pendapatan lebih realistis dan tercapai. Dukungan terhadap Produk Dalam Negeri dan UMKM juga melonjak signifikan hingga 84,51 persen, mencerminkan keberpihakan kuat pada ekonomi lokal.

Di sisi sumber daya aparatur, kualitas pegawai semakin baik dengan peningkatan rasio pegawai fungsional dan sertifikasi kompetensi. Transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga dengan opini WTP serta keterbukaan informasi publik yang konsisten 100 persen. Namun demikian, tantangan masih terlihat dari meningkatnya deviasi belanja (9,24 persen) yang mengindikasikan efisiensi belum optimal, serta proporsi belanja pegawai yang naik menjadi 18,61 persen sehingga berpotensi membatasi ruang fiskal. Belanja urusan pemerintahan umum juga masih dominan.

Secara keseluruhan, capaian tahun 2024 menunjukkan arah positif dalam peningkatan kemandirian fiskal, kualitas SDM, serta transparansi, meskipun efisiensi belanja dan pengendalian belanja pegawai perlu terus diperbaiki.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Serang pada Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel II.80
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kota Serang Tahun 2020-2024

NO	JENIS SPM	JENIS PELAYANAN DASAR PADA SPM KAB/KOTA	INDIKATOR SPM	SATUAN	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan	Pendidikan anak usia dini	Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	93,66	93,67	94,23	95	76,81
		Pendidikan dasar	Persentase Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	90,32
		Pendidikan kesetaraan	Persentase Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	60,85
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	74,77	81,06	80,13	100	90,99
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	82,80	89,37	89,62	100	87,93
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	85,70	85,38	88,78	100	83,37
		Pelayanan kesehatan balita	Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	54,41	50,97	95,31	100	81,20
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	11,20	57,26	94,12	100	100
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	51,66	51,66	100	100	100

NO	JENIS SPM	JENIS PELAYANAN DASAR PADA SPM KAB/KOTA	INDIKATOR SPM	SATUAN	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase Jumlah Warga Negara Usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	67,18	62,49	92,35	100	96,04
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	44,66	32,15	53,91	100	75,03
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	77,79	76,57	100	100	100
		Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	80,28	83,33	78,05	100	91,51
		Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkolosis	Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	32,31	41,74	77,12	100	100
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien cy Virus)	Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	97,12	59,74	65,11	100	94,64
3	Pekerjaan Umum	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	%	72,30	72,47	80,00	72,99	102,16
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	79,27	39,12	73,00	70,53	110,40
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	43	100	100	36,00

NO	JENIS SPM	JENIS PELAYANAN DASAR PADA SPM KAB/KOTA	INDIKATOR SPM	SATUAN	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	100	100	0
5	Ketenteraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100
		Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
		Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
		Pelayanan penyelamatan kebakaran dan evakuasi korban	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luarpanti	%	11,38	8,46	93,57	100	100
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	4,56	4,48	91,55	100	100
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang	%	50,78	9,11	94,29	100	100

NO	JENIS SPM	JENIS PELAYANAN DASAR PADA SPM KAB/KOTA	INDIKATOR SPM	SATUAN	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
			memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti						
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	77,52	24,21	98,67	100	100
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	96,00	100	100

Sumber: SIPD Kota Serang, 2025

Pada tahun 2024, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Serang mencapai 94,46 persen, yang mencerminkan kinerja pelayanan dasar pemerintah daerah yang cukup baik dan mendekati target nasional. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan wajib seperti pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial lainnya. Meskipun demikian, beberapa jenis pelayanan, seperti layanan PAUD, kesehatan penderita hipertensi, serta bayi baru lahir dan balita, masih menunjukkan kesenjangan pencapaian dan perlu menjadi prioritas perbaikan di tahun mendatang. Tantangan dalam pendataan, pelacakan kasus, dan pelaporan layanan ditunjukkan oleh data capaian yang fluktuatif, termasuk capaian di atas 100 persen, yang mengindikasikan perlunya peninjauan kembali terhadap target sasaran dan sistem pencatatan. Stigma, akses yang terbatas, serta kendala ekonomi dan sosial menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian optimal SPM.

Upaya yang harus dilakukkan dalam mengatasi permasalahan Standar Pelayanan Minimum di Kota Serang sebagai berikut:

1. Perlunya pemerataan akses layanan pendidikan, serta penguatan sosialisasi pentingnya pendidikan sejak usia dini.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan jejaring layanan kesehatan perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan intervensi dan cakupan sasaran yang tepat.
3. Peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan data sasaran, serta pemerataan layanan di seluruh wilayah.

2.1.6 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Serang memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah daerah, khususnya dalam sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat. BUMD tidak hanya menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah, tetapi juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemda dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik. Melalui penyediaan layanan seperti air bersih, pengelolaan pasar daerah, sektor jasa keuangan, penguatan sektor pangan, serta penyediaan layanan lainnya.

Adanya BUMD di Kota Serang turut memperkuat kemandirian fiskal daerah serta menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan program-program pelayanan publik. Peran BUMD ini semakin relevan seiring meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan publik yang cepat, terjangkau, dan transparan. Dengan dukungan regulasi dan pembinaan dari Pemerintah daerah, BUMD yang telah ada maupun yang akan dibentuk diharapkan dapat terus tumbuh sebagai entitas bisnis yang

sehat sekaligus mitra utama dalam mencapai tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel II.81
Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah Kota Serang

No	Nama BUMD	Bidang Usaha	Status Kepemilikan	Modal Disetor (Rp)	Laba/Rugi (Rp)	Keterangan
1	Perumda Air Minum Tirta Madani	Air Minum	100% Pemda	5.000.000.000	1.429.522.991	Aktif, Berkembang

Sumber: *Business Plan* Perumdam, SIPD, 2025.

BUMD yang aktif beroperasi di Kota Serang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Madani, yang memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat. Dalam laporan keuangan tahun 2025, Perumdam Tirta Madani mencatatkan laba bersih sebesar Rp. 1.429.522.991. Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Daerah Kota Serang memberikan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah. Ke depan, untuk meningkatkan perekonomian serta pendapatan daerah, akan dibentuk BUMD dengan bidang usaha lainnya.

Meskipun keberadaan BUMD telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial, namun secara umum tantangan yang dihadapi masih cukup besar, antara lain keterbatasan permodalan dan akses investasi, pengelolaan perusahaan yang belum optimal, serta masih rendahnya kontribusi terhadap PAD jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Pemerintah daerah juga terus melakukan pembenahan melalui penyertaan modal, evaluasi kinerja secara berkala, serta mendorong transformasi kelembagaan, termasuk kemungkinan pembentukan holding BUMD untuk pengelolaan aset strategis daerah secara lebih efisien dan terintegrasi.

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

2.2.1. Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024

Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator utama untuk untuk mengukur kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan capaian pembangunan pemerintah daerah, yang dinilai melalui berbagai indikator keuangan. Indikator pengelolaan keuangan umumnya bersifat kuantitatif dan digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien merupakan landasan utama untuk kesuksesan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan membangun keberlanjutan ekonomi di wilayahnya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu secara konsisten mengevaluasi kinerja keuangannya baik dalam kurun waktu satu tahunan, lima tahunan, sampai jangka yang lebih panjang. Evaluasi ini bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap keberlanjutan kebijakan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta yang paling penting untuk melakukan penyesuaian rumusan kerangka pengelolaan keuangan pada periode berikutnya. Secara umum, siklus pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1) Perencanaan dan penganggaran keuangan. Perencanaan dan penganggaran keuangan merupakan lingkup penyusunan rencana keuangan yang menggambarkan prioritas pembangunan dan alokasi dana pada suatu periode tertentu. Proses penyusunan anggaran melibatkan identifikasi sumber pendapatan, alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan, serta penetapan berbagai target kinerja keuangan.
2) Pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan lingkup implementasi dari rencana anggaran yang sudah dibuat. Kegiatan yang dilaksanakan pada fase pelaksanaan anggaran ini melibatkan distribusi dana sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dan pengelolaan pengeluaran secara efisien. Pada proses pelaksanaan dapat dimungkinkan adanya penyesuaian atau revisi, yang dapat disebabkan oleh perubahan prioritas program, perubahan asumsi dan perhitungan anggaran dari yang sudah ditetapkan sebelumnya, atau kondisi mendesak yang tidak terprediksi sebelumnya.
3) Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi merupakan pengawasan terhadap penggunaan dana secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang sampai akhirnya dibuat rekomendasi perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang. Adapun ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
    1) Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
    2) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
    3) Penerimaan Daerah;
    4) Pengeluaran Daerah;
    5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintahan daerah di Indonesia untuk mengatur pengeluaran, penerimaan, dan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat daerah. Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kota Serang telah mencatat pencapaian yang cukup baik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun tentu saja pandemi COVID-19 yang terjadi pada periode tersebut, khususnya pada tahun 2020-2022 telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam perubahan proyeksi kinerja pelaksanaan keuangan yang sebelumnya telah disusun. Namun, secara bertahap Pemerintah Kota Serang berhasil melakukan langkah-langkah penyesuaian sehingga dampak pandemi berhasil diatasi dan tidak berlarut sampai saat ini. Secara lebih lengkap, tabulasi realisasi APBD Kota Serang pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.82
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2020-2024

Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN	**1.265.514.990.409,00**	**1.467.062.945.007,00**	**1.391.653.377.237,00**	**1.508.870.966.148,00**	**1.538.613.740.727,98**	**5,30**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	180.263.229.327,00	206.328.434.813,00	258.127.014.994,00	275.791.608.484,00	289.856.399.615,98	12,88
PENDAPATAN TRANSFER	1.000.271.957.082,00	1.177.556.554.294,00	1.133.001.980.132,00	1.233.079.357.664,00	1.248.757.341.112,00	6,01
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	84.979.804.000,00	83.177.955.900,00	524.382.111,00	0,00	0,00	(67,16)
BELANJA	**1.320.606.397.660,00**	**1.397.888.208.930,00**	**1.453.651.289.589,00**	**1.508.593.945.639,00**	**1.515.209.434.414,97**	**3,51**
BELANJA OPERASI	1.057.482.947.418,00	1.147.020.214.043,00	1.253.816.291.161,00	1.287.454.147.324,00	1.359.163.781.796,97	6,51
BELANJA MODAL	178.523.626.330,00	245.657.966.179,00	190.996.539.686,00	219.848.431.315,00	153.734.536.491,00	0,10
BELANJA TAK TERDUGA	84.599.823.912,00	5.210.028.708,00	8.838.458.742,00	1.291.367.000,00	2.311.116.127,00	(7,66)
SURPLUS / (DEFISIT)	**- 55.091.407.251,00**	**69.174.736.077,00**	**(61.997.912.352,00)**	**277.020.509,00**	**23.404.306.313,01**	**1.958,24**
PEMBIAYAAN	**107.286.822.331,00**	**50.936.820.584,00**	**93.771.557.806,00**	**15.836.504.212,00**	**43.613.519.859,00**	**30,96**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107.286.822.331,00	50.936.820.584,00	120.021.556.721,00	32.086.504.212,00	48.613.519.859,00	15,34
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	26.249.998.915,00	16.250.000.000,00	5.000.000.000,00	(53,66)
PEMBIAYAAN NETTO	**107.286.822.331,00**	**50.936.820.584,00**	**93.771.557.806,00**	**15.836.504.212,00**	**43.613.519.859,00**	**30,96**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	**52.195.415.080,00**	**120.111.556.661,00**	**31.773.645.454,00**	**16.113.524.721,00**	**67.017.826.172,01**	**80,80**

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2025

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak penerimaan pemerintah daerah yang menambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar terdapat tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
2) Pendapatan Transfer, merupakan pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh pemerintah dari entitas pemerintah lain, khususnya dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penggambaran data pada tabel II.81 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan secara agregasi dalam kurun waktu 2020-2024, dengan rata-rata pertumbuhan senilai 5,30 persen. Dengan komposisi pertumbuhan pendapatan rata-rata per kelompok pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai 12,88 persen, Pendapatan Transfer senilai 6,01 persen, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah senilai -67,16 persen. Berdasarkan ilustrasi data yang disajikan, ditarik kesimpulan bahwa secara umum tren perubahan pada komponen PAD yang merupakan pendapatan hasil kegiatan pelayanan di Kota Serang, serta Pendapatan Transfer yang berasal dari transfer pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi menunjukkan tren yang sejalan. Artinya, kondisi tersebut dapat menggambarkan faktor ekonomi masyarakat, baik itu pada tingkat kota, provinsi, dan nasional menunjukkan tren yang sama, kecuali saat terjadi tren penurunan pada tahun 2020-2022, dimana pada periode tersebut memang terjadi kondisi anomali pandemi COVID-19.

Tren penurunan yang cukup dalam terjadi pada komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Posisi terendah terjadi pada tahun 2023 dengan tidak adanya pendapatan dari komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Besaran

pendapatan terbesar dari komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai Rp 84.979.804,00. Lain-Lain Pendapatan yang Sah ini berasal dari hibah dan pendapatan tambahan lainnya, dapat disimpulkan bahwa kontribusi komponen ini tidak cukup signifikan terhadap total pendapatan daerah, khususnya pada beberapa tahun terakhir. Apabila Pemerintah Kota Serang ingin menambah komponen pendapatan ini perlu dilakukan pencarian sumber pendapatan yang baru dan dapat memberikan manfaat berkelanjutan.

Adapun ilustrasi kinerja pendapatan perlu juga dilihat melalui perbandingan rencana dan capaian pendapatan dari tahun ke tahun. Evaluasi atas data tersebut dapat digunakan untuk beberapa hal, diantaranya yaitu untuk mengetahui seberapa akurat rencana pendapatan yang telah disusun, seberapa besar upaya yang telah dilakukan untuk dapat merealisasikan rencana pendapatan dimaksud, untuk mengidentifikasikan hambatan yang terjadi dalam upaya realisasi pendapatan. Secara lebih lengkap data mengenai besaran realisasi pendapatan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.83
Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2020-2024

Tahun	Rencana Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Capaian (%)
2020	1.277.357.350.541,00	1.265.514.990.409,00	99,07
2021	1.448.344.033.088,00	1.467.062.945.007,00	101,29
2022	1.445.701.065.486,00	1.391.653.377.237,00	96,26
2023	1.598.792.976.402,00	1.508.870.966.148,00	94,38
2024	1.560.002.139.211,00	1.538.613.740.727,98	98,63

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2025

Berdasarkan data pada tabel Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2020–2024, capaian realisasi pendapatan daerah Kota Serang mengalami fluktuasi dibandingkan dengan target yang telah direncanakan.

1. Tahun 2020, realisasi pendapatan mencapai 99,07 persen, menunjukkan kinerja yang hampir menyamai target meskipun masih sedikit di bawah rencana.
2. Tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan, di mana realisasi pendapatan melampaui target dengan capaian sebesar 101,29 persen. Ini merupakan satu-satunya tahun dalam periode ini dengan capaian di atas 100 persen.

3. Tahun 2022, terjadi penurunan capaian menjadi 96,26 persen, menunjukkan bahwa realisasi tidak berhasil memenuhi target yang ditetapkan.
4. Tahun 2023, penurunan kembali terjadi dengan capaian sebesar 94,38 persen, menjadi capaian terendah selama lima tahun tersebut.
5. Tahun 2024, terdapat sedikit perbaikan dengan capaian sebesar 98,63 persen, meskipun tetap di bawah target.

Secara umum, capaian realisasi pendapatan daerah Kota Serang dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren meningkat, dengan realisasi tertinggi di tahun 2024 sebesar Rp 1,54 Triliun. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan strategi pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah guna mencapai target secara konsisten di masa mendatang. Analisis berikutnya dilakukan dengan melihat komposisi proporsi pendapatan berdasarkan 3 pengelompokan utama, yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah atas keseluruhan total pendapatan. Berikut ini merupakan gambaran proporsi rata-rata pendapatan daerah Kota Serang tahun 2020-2024 pada masing-masing komponen tersebut:

Gambar II.18
Rata-rata Proporsi Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2020-2024

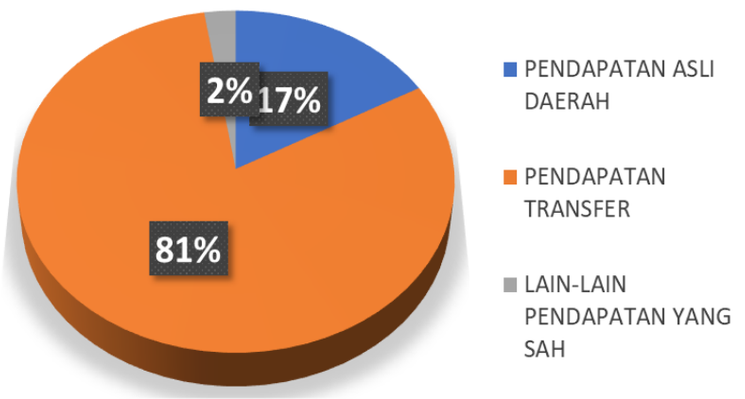

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2025

Dari data diatas diketahui bahwa mayoritas pendapatan daerah Kota Serang tahun 2020-2024 didapatkan dari Pendapatan Transfer yaitu senilai 81 persen, kemudian diikuti PAD senilai 17 persen, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai 2 persen. Secara prinsip Pemerintah Kota Serang perlu melakukan langkah-langkah untuk dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, khususnya pada komponen PAD. Peningkatan PAD akan memperkuat independensi pemerintah daerah karena menggambarkan kemampuan membiayai operasional pemerintahan dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pelayanan di daerahnya.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah, dan diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Secara umum komponen belanja terdiri dari:

1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan.
2) Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk mendapatkan sumber daya/aset tetap pemerintah daerah, yang didalamnya terdiri atas Belanja Tanah, Belanja Peralatan Mesin, Belanja Bangunan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Aset tetap Lainnya.
3) Belanja tak terduga adalah pengeluaran belanja untuk kebutuhan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
4) Belanja Transfer yang di dalamnya terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi dan bagi hasil pendapatan lainnya kepada pemerintah desa.

Data pengeluaran Pemerintah Kota Serang dalam 5 tahun ke belakang pada tabel II.81 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengeluaran telah dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mendukung program-program pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan rata-rata pengeluaran belanja pemerintah yang terjadi dalam 5 tahun ke belakang senilai 3,15 persen masih cukup dapat dikendalikan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara komposisi pertumbuhan belanja rata-rata per kelompok terdiri dari: Belanja Operasi senilai 6,51 persen, Belanja Modal senilai 0,10 persen, dan Belanja Tak Terduga senilai -7,66 persen. Berdasarkan ilustrasi data yang disajikan, diketahui bahwa secara umum tren perubahan pada komponen Belanja Operasi masih menunjukkan peningkatan dalam rentang yang wajar. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik sudah pasti akan berdampak pada peningkatan biaya operasional. Namun peningkatan belanja operasional Pemerintah Kota Serang pada tahun 2020-2024 berada

dalam batasan yang dapat diterima. Tren perubahan belanja modal juga masih dalam batasan yang relatif stabil. Meskipun terjadi kecenderungan kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun, namun perubahannya tidak terlalu signifikan. Besaran belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu Rp245.657.966.179,00, adapun pengeluaran belanja modal terendah terjadi pada tahun 2024 yaitu Rp153.734.536.491,00.

Tren peningkatan yang signifikan terjadi pada komponen Belanja Tak Terduga, khususnya pada tahun 2020. Penurunan yang besar terjadi pada tahun 2020 Rp84.599.823.912,00 menjadi Rp521.028.708,00 pada tahun 2021. Tahun 2020 memiliki angka yang lebih tinggi tersebut tentu saja karena adanya pandemi COVID-19 yang membutuhkan pengeluaran belanja tidak terduga. Namun secara bertahap pengeluaran untuk pos belanja tak terduga tersebut perlahan sudah menurun sampai di tahun 2024. Diharapkan kondisi serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang, sehingga prioritas belanja Pemerintah Kota Serang dapat kembali digunakan sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

Apabila ditinjau dari perbandingan rencana anggaran belanja dan realisasinya, diketahui besaran realisasi belanja dalam 5 tahun terakhir berkisar antara 95,46-94,49 persen. Secara lebih lengkap perbandingan besaran realisasi belanja tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.84
Realisasi dan Capaian Belanja Daerah Tahun 2020-2024

No.	Rencana Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Capaian Belanja Daerah (%)
2020	1.383.374.137.888,00	1.320.606.397.660,00	95,46
2021	1.499.280.853.672,00	1.397.888.208.930,00	93,24
2022	1.539.472.622.207,00	1.453.651.289.589,00	94,43
2023	1.614.656.217.614,00	1.508.593.945.639,00	93,43
2024	1.603.616.663.932,00	1.515.209.434.414,97	94,49

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2025

Analisis berikutnya dilakukan untuk melihat agregasi sebaran masing-masing komponen belanja dibandingkan keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan pada periode tahun 2020-2024, sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar dibawah ini:

Gambar II.19
Rata-rata Komponen Proporsi Belanja Daerah Kota Serang
Tahun 2020-2024

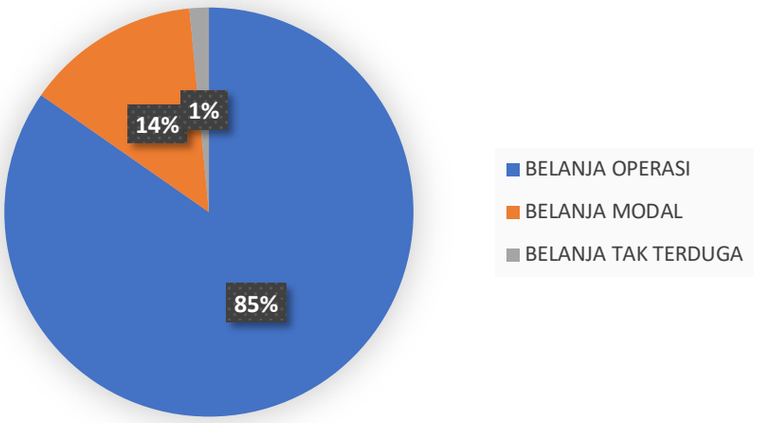

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2025

Dari grafik diatas, rata-rata proporsi belanja daerah Kota Serang tahun 2020–2024 didominasi oleh belanja operasi sebesar 85 persen, sementara belanja modal hanya mencapai 14 persen dan belanja tak terduga sebesar 1 persen. Komposisi ini mencerminkan kecenderungan alokasi anggaran yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan, seperti belanja pegawai dan barang/jasa, dibandingkan dengan investasi pembangunan jangka panjang. Rendahnya proporsi belanja modal menunjukkan keterbatasan ruang fiskal untuk penguatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik, yang dapat berdampak pada lambatnya akselerasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan efisiensi belanja operasi dan mendorong peningkatan kapasitas pendapatan daerah, agar alokasi untuk belanja modal dapat ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah dikelompokkan menjadi dua klasifikasi utama, yaitu:

1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali

pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Laporan realisasi APBD Pemerintah Kota Serang tahun 2020-2024 menunjukan kecenderungan penurunan terjadi dalam indikator pembiayaan, dimana terdapat penurunan nilai bersih pembiayaan dalam lima tahun terakhir. Salah satu penyebab yang cukup signifikan dari penurunan ini adalah karena adanya penurunan penerimaan pembiayaan dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut harus dipetakan dan dicarikan solusinya untuk lima tahun ke depan, sehingga tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan yang akan bergulir.

Pada Tabel II.81 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2020-2024 disajikan gambaran perbandingan realisasi pembiayaan daerah, serta rata-rata pertumbuhan pada tahun 2020-2024. Apabila ditinjau dari perbandingan tingkat pertumbuhan nilai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, masih terdapat surplus selisih pembiayaan setiap tahunnya. Pada komponen pengeluaran pembiayaan, tidak terjadi pengeluaran pada periode tahun 2020-2021. Sedangkan untuk periode tahun 2022-2024 terdapat pengeluaran pembiayaan, yang nilainya masih lebih rendah dari penerimaan pembiayaan.

Sumber penerimaan pembiayaan utama Pemerintah Kota Serang pada umumnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Namun demikian, SILPA tidak dapat dijadikan target penerimaan daerah karena sifatnya yang tidak terencana. Hal ini disebabkan oleh adanya selisih (gap) antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, yang baru dapat diketahui setelah adanya otorisasi berdasarkan hasil audit. Dengan demikian, SILPA hanya dapat diperlakukan sebagai sumber penerimaan insidental yang muncul di akhir periode anggaran.

Pada tahun 2024, selain dari SILPA, terdapat pula sumber penerimaan pembiayaan lain yaitu dari kode rekening Pencairan Dana Cadangan Pemilukada Tahun 2024. Berbeda dengan SILPA, penerimaan dari pencairan dana cadangan bersifat terencana karena telah ditetapkan sebelumnya melalui

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Hal ini mencerminkan adanya upaya Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi kebutuhan anggaran besar yang sifatnya khusus dan strategis.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk mendukung alokasi dana strategis yang berada di luar belanja rutin. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat dua bentuk utama pengeluaran pembiayaan, yaitu Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah.

Pengeluaran dalam bentuk Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk menyisihkan sebagian anggaran guna membiayai kegiatan tertentu di masa depan yang membutuhkan dana cukup besar, seperti pembangunan infrastruktur strategis maupun penyelenggaraan kegiatan berskala besar. Secara historis, Pemerintah Kota Serang telah mengalokasikan dana cadangan sebesar Rp16.250.000.000 pada tahun 2022, serta jumlah yang sama sebesar Rp16.250.000.000 pada tahun 2023.

Sementara itu, Penyertaan Modal Daerah merupakan bentuk investasi pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun entitas usaha lainnya. Tujuan dari penyertaan modal ini adalah memperkuat struktur permodalan BUMD agar mampu meningkatkan kinerja, memperluas pelayanan kepada masyarakat, serta menghasilkan keuntungan berupa dividen yang dapat menjadi tambahan pendapatan bagi daerah. Tercatat, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Serang mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp10.000.000.000, sedangkan pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp6.150.000.000.

Dengan demikian, pola penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Serang tidak hanya bertumpu pada SILPA, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih terencana melalui pembentukan dana cadangan serta penguatan permodalan BUMD. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mendorong pembangunan strategis dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan.

2.2.1.1 Neraca Daerah

Neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang digunakan untuk menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode waktu tertentu. Secara lebih lengkap mengenai masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
3) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Gambaran Neraca Pemerintah Kota Serang Periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel II.85
Neraca Daerah Kota Serang Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
ASET LANCAR	213.252.048.194,26	227.827.849.229,02	127.005.665.707,45	136.845.083.653,41	189.710.617.864,48	2,24
INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	9.999.998.915,00	9.999.998.915,00	14.999.998.915,00	25,00
ASET TETAP	2.738.374.826.694,22	3.063.305.432.482,84	3.316.216.518.266,34	3.463.954.984.784,64	3.381.260.236.851,98	5,55
DANA CADANGAN	0,00	0,00	16.360.138.888,00	32.887.855.899,00	0,00	0,51
ASET LAINNYA	72.289.786.950,84	72.268.318.484,69	79.454.550.384,30	105.480.767.538,09	122.428.626.871,42	14,68
PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00	0,00	0,00	237.210.789.819,17	-
JUMLAH ASET	**3.023.916.661.839,32**	**3.363.401.600.196,55**	**3.549.036.872.161,09**	**3.749.168.690.790,14**	**3.945.610.270.322,05**	**6,91**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15.395.735.472,00	27.833.939.858,95	40.665.384.484,10	62.701.916.787,51	24.629.283.959,59	30,09
JUMLAH KEWAJIBAN	**15.395.735.472,00**	**27.833.939.858,95**	**40.665.384.484,10**	**62.701.916.787,51**	**24.629.283.959,59**	**30,09**
JUMLAH EKUITAS	**3.008.520.926.367,32**	**3.335.567.660.337,60**	**3.508.371.487.676,99**	**3.686.466.774.002,63**	**3.920.980.986.362,46**	**6,87**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3.023.916.661.839,32**	**3.363.401.600.196,55**	**3.549.036.872.161,09**	**3.749.168.690.790,14**	**3.945.610.270.322,05**	**6,91**

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2025

Berdasarkan tabel neraca Pemerintah Kota Serang periode tahun 2020-2024 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa neraca yang merupakan perbandingan antara nilai Aset dengan Kewajiban dan Ekuitas selama 5 tahun terakhir telah mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,91 persen. Secara lebih lengkap rata-rata pertumbuhan tiap tahun untuk komponen aset senilai 6,91 persen, kewajiban 30,09 persen, dan ekuitas dana 6,87 persen. Secara lebih rinci penjelasan atas masing-masing komponen Neraca dapat disajikan pada bagian berikut dibawah ini.

A. Aset

Aset Daerah adalah semua kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Total aset Kota Serang mengalami pertumbuhan rata-rata 6,91 persen per tahun, meningkat dari Rp3.023.916.661.839,32 pada tahun 2020 menjadi Rp3.945.610.270.322,05 tahun 2024. Struktur aset Kota Serang didominasi oleh aset tetap dengan kontribusi rata-rata 90,63 persen, menunjukkan fokus pada infrastruktur dan aset fisik dengan rata-rata 5,55 persen per tahun.

Aset Lancar Kota Serang mengalami fluktuasi dengan penurunan signifikan di tahun 2022 Rp127.005.665.707,45 akibat kemungkinan likuidasi atau penyesuaian akuntansi, namun pulih ke Rp 189.710.617.864,48 pada tahun 2024. Investasi Jangka Panjang baru muncul sejak 2022 dengan pertumbuhan 25 persen per tahun, mencerminkan peningkatan alokasi untuk proyek strategis dan Properti Investasi muncul pertama kali pada tahun 2024 sebesar Rp 237.210.789.819,17 yang menunjukkan diversifikasi aset. Proporsi Aset Daerah Kota Serang tahun 2020-2024 yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, properti investasi dan aset lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.20
Proporsi Aset Kota Serang Tahun 2020-2024

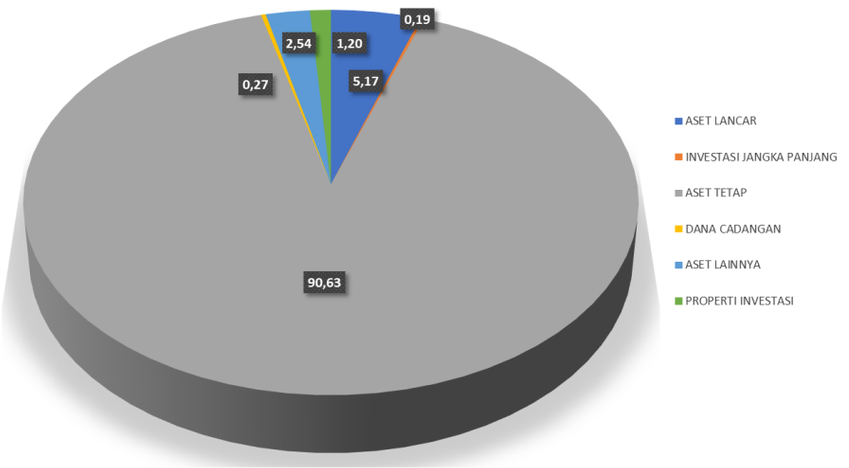

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2025

Berdasarkan ilustrasi Gambar diatas, diketahui bahwa struktur aset Pemerintah Kota Serang pada periode 2020-2024 menunjukkan dominasi yang sangat kuat pada kategori Aset Tetap, yaitu mencapai 90,63 persen dari proporsi total aset Pemerintah Kota Serang. Selebihnya komposisi aset terdiri dari Aset Lancar 5,17 persen, Investasi Jangka Panjang 0,19 persen, Dana Cadangan 0,27 persen, Aset Lainnya 2,54 persen dan Properti Investasi 1,20 persen. Komposisi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan aset daerah masih terfokus pada aset tetap, sedangkan alokasi pada instrumen investasi maupun aset finansial lainnya relatif kecil.

B. Kewajiban

Kewajiban Daerah adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat di daerah. Kewajiban Kota Serang berdasarkan tabel Neraca Daerah Kota Serang Tahun 2020-2024 hanya terdiri dari utang jangka pendek diantaranya utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya. Proporsi utang jangka pendek Kota Serabf tahun 2020-2024 lebih rinci digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.21
Proporsi Kewajiban Kota Serang Tahun 2020-2024

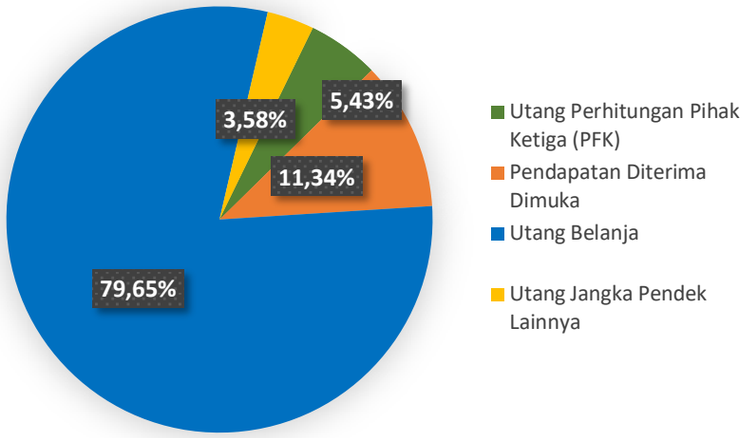

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2025

Berdasarkan gambaran Proporsi rata-rata Kewajiban Kota Serang Tahun 2020-2024 di atas, diketahui bahwa sebaran kewajiban Pemerintah Kota Serang pada periode tersebut relatif berimbang. Mayoritas Kewajiban pemerintah Kota Serang dalam kurun waktu 5 tahun tersebut yaitu dalam bentuk Utang Belanja senilai 79,65 persen, diikuti oleh Pendapatan Diterima Dimuka 11,34 persen, Utang Perhitungan Pihak Ketiga 5,43 dan Utang Jangka Pendek Lainnya 3,58 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kewajiban daerah masih berkaitan langsung dengan kebutuhan belanja pemerintah, sementara porsi kewajiban lain relatif lebih kecil.

C. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Berdasarkan gambaran-gambaran kinerja keuangan diatas, kemudian dilakukan analisis rasio keuangan daerah. Analisis rasio keuangan merupakan upaya untuk melihat proporsi kinerja keuangan berdasarkan perbandingan angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan untuk periode waktu tertentu. Berikut analisis rasio keuangan Pemerintah Kota Serang periode 2020-2024:

Tabel II.86
Analisis Rasio Keuangan Daerah Kota Serang

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar (*Current Ratio*) %	1.385,14	818,53	312,32	218,25	770,26
2	Rasio Utang Terhadap Ekuitas (%)	0,51	0,83	1,16	1,70	0,63

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2025

Pada bagian ini, analisis rasio keuangan dilakukan pada 5 aspek yaitu:

1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar (*Current Ratio*) adalah rasio yang membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Indikator ini umumnya digunakan untuk mencerminkan kemampuan organisasi dalam melunasi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Rasio lancar merupakan bagian dari rasio yang mengukur tentang likuiditas sebuah organisasi. Semakin tinggi persentase rasio ini berarti menggambarkan semakin baik likuiditas sumber daya organisasi untuk memenuhi kewajibannya.

Rasio lancar Pemerintah Kota Serang menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama 5 tahun terakhir yaitu 2020-2024 dengan tren penurunan cukup tajam dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2020 sampai 2023 masing-masing nilai rasio tersebut yaitu 1.385,14 persen pada tahun 2020, 818,53 persen pada tahun 2021, 312,32 persen pada tahun 2022, dan 218,25 persen pada tahun 2023, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan nilai rasio lancar 770,26 persen yang menunjukan adanya pemulihan atau perbaikan likuiditas. Berdsarkan Tabel diatas rasio lancar Pemerintah Kota Serang masih dikategorikan sangat baik meskipun mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. Penurunan-penurunan tersebut harus menjadi perhatian karena dapat mengganggu pemenuhan pembayaran kewajiban pemerintah Kota Serang ke depan, apabila tidak ditangani dengan serius.

2) Rasio Utang Terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio Utang Terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) yaitu rasio utang terhadap ekuitas atau modal. Rasio ini dapat membandingkan jumlah utang pemerintah daerah dengan modal /ekuitas yang dimilikinya. Rasio Utang Terhadap Ekuitas serupa dengan rasio Rasio Utang Terhadap Total Aset diatas. Secara umum besaran nilai dalam 5 tahun terakhir masih berada pada level yang aman, kendati terlihat peningkatan dari tahun ke tahun. Besaran terbesar terjadi pada tahun 2023 yaitu 1.70 persen, sedangkan terendah senilai 0,51 persen yang terjadi pada tahun 2020.

2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2020-2024

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, Pemerintah Daerah Kota Serang telah menerapkan serangkaian kebijakan pengelolaan

keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Beberapa langkah konkret yang telah diambil antara lain:

1) Peningkatan Transparansi. Pemerintah daerah telah meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan publik melalui saluran informasi yang dimiliki, sehingga memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan.
2) Pemantauan Anggaran. Sistem pemantauan anggaran telah diperkuat untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dan menghindari pemborosan atau penyalahgunaan anggaran.
3) Peningkatan Pengelolaan Utang. Pemerintah daerah telah melakukan restrukturisasi utang dan mengadopsi kebijakan pinjaman yang lebih berkelanjutan, dengan mempertimbangkan tingkat bunga dan jangka waktu yang lebih menguntungkan.
4) Pengembangan Sumber Pendapatan Alternatif. Upaya telah dilakukan untuk diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui pengembangan sektor pariwisata, investasi dalam industri lokal, dan promosi investasi asing.

Pemerintah daerah telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan keuangannya selama lima tahun terakhir, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan optimalisasi sumber penerimaan. Pengelolaan sumber pendapatan yang cukup di daerah dapat dilakukan, dengan pengelolaan alokasi anggaran pada berbagai program prioritas daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dengan pendekatan pembangunan holistik, tematik, integratif dan spasial. Pada bagian berikut ini akan digambarkan proporsi pertumbuhan dan realisasi anggaran pendapatan maupun belanja daerah Kota Serang untuk periode tahun 2020-2024.

Tabel II.87
Proporsi rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan terhadap Anggaran Pendapatan Kota Serang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	4,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12,61
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12,03
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	35,16
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19,57
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-8,13
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	6,52
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2,51
1.2.1.1	Dana Perimbangan	3,26
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	2,44
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	0,00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	2,08
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	7,88
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-0,99
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-100,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-100,00
1.2.1.4	Dana Desa	
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	48,58
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5,14
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-23,40
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-8,91
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-100,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-100,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	-100,00
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-100,00

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2025

Pada tabel diatas, dilampirkan data mengenai proporsi rata-rata pertumbuhan dan realisasi pendapatan di Pemerintah Kota Serang tahun 2020-2024. Rata-rata pertumbuhan menggambarkan peningkatan/penurunan nilai pendapatan dari tahun ke tahun, sementara rata-rata realisasi menggambarkan besaran realisasi pendapatan dibandingkan dengan anggaran yang sudah dibuat pada awal proses perencanaan. Berdasarkan gambaran data yang disajikan, diketahui bahwa secara umum pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kota Serang menunjukkan tren positif, khususnya pada komponen Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Peningkatan paling signifikan pada komponen Pendapatan Asli Daerah terjadi pada pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan yang naik rata-rata 19,57 persen dalam 5 tahun, dan Lain-

lain PAD yang Sah yang mengalami peningkatan rata-rata -8,13 persen Adapun pada komponen Pendapatan Transfer, peningkatan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Khusus senilai 7,88 persen. Sedangkan pada komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah secara rata-rata mengalami penurunan. Berdasarkan fakta tersebut pemerintah daerah harus terus berupaya memaksimalkan potensi pendapatan pada kedua komponen yang masih memiliki potensi pendapatan melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, seiring kembali berupaya untuk menghidupkan potensi pendapatan dari komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Adapun berdasarkan data realisasi pendapatan dalam 5 tahun kebelakang, dapat disimpulkan bahwa besaran realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer juga berhasil memperoleh realisasi yang lebih besar dari rencana anggaran pendapatan yang sudah ditetapkan. Hampir seluruh pendapatan mengalami realisasi diatas 100 persen, hanya beberapa yang tidak berhasil mendapatkan realisasi diatas 100 persen yaitu Dana Alokasi Umum sebanyak 2,08 persen, Bantuan Keuangan dari Provinsi sebanyak 98.68 persen, Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota sebanyak -23,40 persen, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dari Hibah sebanyak -100 persen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anggaran pendapatan pada komponen-komponen tersebut juga masih bisa terus ditingkatkan. Harapannya, peningkatan anggaran dapat diikuti dengan peningkatan realisasi pula dan diikuti dengan penyusunan langkah-langkah persiapan yang tepat.

Tabel berikut menggambarkan rata-rata pertumbuhan dan realisasi belanja Kota Serang Tahun 2020-2024:

Tabel II.88
Proporsi rata-rata Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Serang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	BELANJA	2,44
2.1	BELANJA OPERASI	5,47
2.1.1	Belanja Pegawai	6,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,59
2.1.2	Belanja Bunga	
2.1.4	Belanja Subsidi	
2.1.5	Belanja Hibah	36,83
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	47,30

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1.7	Belanja keuangan	
2.2	BELANJA MODAL	-5,37
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	-60,65
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-24,26
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-30,07
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	10,61
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-11,56
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	57,73
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	-59,35
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-59,35
2.4	BELANJA TRANSFER	
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (PARPOL)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2025

Berdasarkan ilustrasi data belanja diatas, diketahui bahwa secara umum pertumbuhan rata-rata belanja Pemerintah Kota Serang Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan senilai 2,44 persen, dengan proporsi peningkatan pada masing-masing komponen yaitu Belanja Operasi 5,47 persen, Belanja Modal -5,37 persen, Belanja Tidak Terduga -59,35 persen. Secara umum peningkatan belanja yang terjadi masih dalam batas kewajaran kecuali pada Belanja Tidak Terduga. Tentu saja pelonjakan tersebut terutama disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19. Diharapkan kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Meskipun secara rata-rata peningkatan pertumbuhan belanja tidak meningkat secara signifikan namun terdapat beberapa belanja yang peningkatannya cukup besar. Beberapa belanja tersebut diantaranya Belanja Bantuan Sosial meningkat 47,30 persen, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -11,56 persen, dan Belanja Tidak Terduga yang sudah dibahas diatas mengalami peningkatan senilai -59,35 persen. Di samping peningkatan, terdapat 2 jenis belanja yang mengalami penurunan dalam

5 tahun terakhir yaitu Belanja Tanah yang menurun -60,65 persen dan Belanja Peralatan dan Mesin -24,26 persen.

2.2.3. Kerangka Keuangan Tahun 2026-2030

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis, pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangannya untuk 5 tahun mendatang. Kerangka pengelolaan yang diusulkan mencakup beberapa aspek kunci:

1) Penguatan kapasitas institusi, diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem administrasi keuangan publik untuk memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
2) Pembangunan infrastruktur, diarahkan pada pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan efisien sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3) Peningkatan pendapatan. Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan, reformasi pajak, dan promosi investasi.
4) Pengendalian pengeluaran. Pengendalian pengeluaran yang ketat dan pemantauan anggaran yang berkelanjutan untuk menghindari defisit anggaran yang berlebihan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan diatas, dilengkapi dengan sinkronisasi atas perencanaan yang disusun oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten, kemudian menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Serang untuk menyusun rencana pengelolaan keuangannya untuk lima tahun kedepan. Rencana pengelolaan keuangan yang disusun harus sejalan dengan kerangka rencana prioritas pembangunan lima tahun kedepan, sehingga arah penggunaan sumber daya keuangan yang dimiliki dapat lebih efisien dan berkelanjutan. Rencana ini mencakup strategi yang setidaknya mencakup:

1) Pembiayaan Eksternal. Mengevaluasi opsi pembiayaan eksternal yang tersedia, termasuk pinjaman jangka panjang, obligasi daerah, dan kemitraan publik-swasta.

2) Pengoptimalan Alokasi Dana. Memastikan alokasi dana yang tepat untuk prioritas pembangunan yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan evaluasi dampak sosial dan ekonomi yang komprehensif.
3) Pengelolaan Risiko Keuangan. Identifikasi dan mitigasi risiko keuangan potensial, termasuk fluktuasi pasar, perubahan kebijakan, dan perubahan lingkungan ekonomi.
4) Monitoring dan Evaluasi. Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan implementasi rencana pendanaan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dan melakukan koreksi jika diperlukan.

Berdasarkan berbagai landasan yang sudah diuraikan diatas, pada bagian selanjutnya dilakukan penyusunan proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Serang untuk periode tahun 2025-2030.

A. Ringkasan Proyeksi APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran

Tabel II.89
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Serang Tahun 2025-2030

Kode	Uraian	TA 2025	Perubahan APBD 2025	TA 2026	TA 2027	TA 2028	TA 2029	TA 2030
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.592.462.990.970**	**1.626.847.643.395,**	**1.287.182.543.002**	**1.324.612.586.798**	**1.372.124.958.599**	**1.419.166.685.651**	**1.471.807.626.855**
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	424.894.985.484	425.454.333.385	412.923.485.484	450.353.529.280	497.865.901.081	544.907.628.133	597.548.569.337
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.167.568.005.486	1.195.213.208.323	874.259.057.518	874.259.057.518	874.259.057.518	874.259.057.518	874.259.057.518
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		6.180.101.687					
5	**BELANJA DAERAH**	**1.610.962.990.970**	**1.683.865.469.567**	**1.432.182.543.002**	**1.307.112.586.798**	**1.363.574.958.599**	**1.454.216.685.651**	**1.471.807.626.855**
5.1	BELANJA OPERASI	1.336.862.574.292	1.508.925.374.921	1.112.682.753.352	1.119.903.235.953	1.103.975.816.852	1.123.525.212.273	1.143.563.342.580
5.2	BELANJA MODAL	267.100.416.678	173.415.094.646	312.499.789.650	180.209.350.845	252.599.141.747	323.691.473.378	321.670.596.425
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000	1.525.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
	Total Surplus/(Defisit)	**(18.500.000.000)**	**(57.017.826.172)**	**(145.000.000.000)**	**17.500.000.000**	**8.550.000.000**	**(35.050.000.000)**	**0**
6	**PEMBIAYAAN**	**18.500.000.000**	**57.017.826.172**	**145.000.000.000**	**(17.500.000.000)**	**(8.550.000.000)**	**35.050.000.000**	**0**
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000	67.017.826.172,	161.125.000.000	63.050.000.000	60.000.000.000	95.000.000.000	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.500.000.000	10.000.000.000,	16.125.000.000	80.550.000.000	68.550.000.000	59.950.000.000	0
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2025

Penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Serang untuk periode tahun 2025 hingga 2030 merupakan bagian integral dari kerangka perencanaan fiskal jangka menengah. Proyeksi ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan keuangan daerah yang lebih terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam penyusunannya, digunakan pendekatan berbasis potensi (*potential-based analysis*) yang mempertimbangkan data historis APBD Kota Serang tahun 2020–2024, tren pertumbuhan indikator ekonomi makro, serta asumsi-asumsi rasional yang mencerminkan kondisi riil perekonomian daerah dan nasional. Proyeksi ini juga telah mengacu pada data keuangan terakhir yang tersedia dalam dokumen perencanaan TA 2025.

Berdasarkan hasil proyeksi, dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya keuangan Pemerintah Kota Serang masih menunjukkan kecenderungan yang positif. Hal ini tercermin dari masih adanya ruang pertumbuhan penerimaan daerah yang dapat dimobilisasi secara optimal, diiringi dengan kapasitas pengendalian belanja daerah yang tetap terjaga.

Arah Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi Pendapatan Daerah untuk periode 2025-2030 disusun dengan mengevaluasi kinerja realisasi anggaran tahun 2020-2024. Analisis historis ini menjadi landasan dalam merumuskan asumsi dan arah kebijakan strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.

1. Hubungan Kinerja Masa Lalu dengan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selama periode 2020-2024, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,88% per tahun. Kinerja ini menjadi fondasi optimisme dalam menetapkan target di masa mendatang. Menjawab adanya lonjakan target PAD pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 424,89 miliar, yang meningkat signifikan dari realisasi TA 2024 sebesar Rp 289,85 miliar, Pemerintah Kota Serang mendasarkan proyeksi tersebut pada serangkaian kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang terencana, antara lain:

- Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah: Melakukan pemutakhiran data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara berkala, meningkatkan pengawasan Wajib Pajak melalui penerapan teknologi, serta

melakukan kaji ulang terhadap potensi retribusi dari pemanfaatan aset daerah yang belum optimal.

- Digitalisasi Layanan Pendapatan: Memperluas implementasi sistem pembayaran pendapatan secara daring (*online*) untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- Penguatan BUMD: Mendorong peningkatan kinerja BUMD agar dapat memberikan kontribusi laba yang lebih signifikan terhadap PAD.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa proyeksi keuangan daerah bersifat indikatif dan harus dibaca secara dinamis. Misalnya, pada tahun 2026, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami sedikit penurunan menjadi Rp 412,92 miliar dibandingkan tahun 2025. Penurunan tersebut bukan disebabkan oleh melemahnya potensi penerimaan, melainkan merupakan hasil dari proses rasionalisasi proyeksi pendapatan yang disusun dengan mempertimbangkan capaian realisasi PAD pada tahun 2022-2024, serta memperhitungkan variabel ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan investasi. Selain itu, ada kebijakan baru dari pemerintah pusat mengenai PBB dan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang turut menjadi pertimbangan. Angka proyeksi PAD tahun 2026 disusun secara lebih terukur dan realistis agar tidak menimbulkan deviasi besar antara perencanaan dan pelaksanaan.

2. Keterbatasan Proyeksi dan Perbedaan Antar Tahun Anggaran

Penting untuk dipahami bahwa proyeksi yang disusun memiliki keterbatasan metodologis, khususnya pada komponen pendapatan yang alokasinya tidak tetap. Keterbatasan utama yang menjelaskan perbedaan signifikan antara proyeksi Pendapatan Transfer TA 2025 (Rp 1.167,56 miliar) dan TA 2026 (Rp 874,25 miliar) adalah merupakan ketidakpastian alokasi Dana Transfer yang bersifat tidak tetap, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID). Kedua jenis pendapatan ini sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan kriteria yang dapat berubah setiap tahunnya. Oleh karena itu, dalam penyusunan proyeksi fiskal jangka menengah ini, pendapatan yang bersumber dari DAK dan DID tidak dimasukkan sebagai komponen tetap dalam struktur perhitungan mulai tahun 2026 dan seterusnya untuk menjaga akurasi dan kehati-hatian dalam penyusunan proyeksi.

Arah Kebijakan dan Rencana Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah periode 2025-2030 dirumuskan dengan mengevaluasi pola belanja tahun 2020-2024, yang menunjukkan dominasi Belanja Operasi (rata-rata 85%) dibandingkan Belanja Modal (rata-rata 14%). Komposisi ini menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan belanja yang lebih produktif dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Rencana belanja ke depan akan dipengaruhi oleh beberapa kebijakan utama sebagai berikut:

1. Efisiensi Belanja Daerah: Pemerintah Kota Serang akan mengadopsi kebijakan efisiensi belanja yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat, seperti yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Fokus utama adalah memprioritaskan belanja untuk program yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
2. Perbaikan Komposisi Belanja: Terdapat kebijakan strategis untuk secara bertahap meningkatkan proporsi Belanja Modal dan membatasi belanja penunjang yang tidak produktif. Hal ini tercermin dalam proyeksi dimana alokasi Belanja Modal terhadap total belanja direncanakan meningkat dari rata-rata historis 14% menjadi 16,6% pada TA 2025 dan 21,8% pada TA 2026.
3. Kebijakan Pembangunan Multiyear: Untuk proyek-proyek infrastruktur strategis yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, Pemerintah Kota Serang akan menerapkan skema penganggaran tahun jamak (*multiyear*). Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin kepastian pendanaan dan keberlanjutan pembangunan.

Dengan memperhatikan dinamika tersebut, Pemerintah Kota Serang perlu memperkuat kapasitas fiskal daerah secara mandiri melalui strategi optimalisasi PAD. Di sisi lain, pengelolaan belanja juga harus diarahkan pada efisiensi, efektivitas, dan ketepatan sasaran.

Lebih lanjut, apabila dalam implementasinya terdapat ruang fiskal tambahan, baik melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), efisiensi belanja, maupun sumber-sumber pendanaan sah lainnya, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui berbagai program prioritas. Beberapa bentuk percepatan pembangunan tersebut antara lain mencakup:

- Transformasi sosial melalui pembangunan dan peningkatan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan.
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar dan strategis.
- Transformasi ekonomi melalui penguatan inovasi daerah dan dukungan terhadap UMKM.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan reformasi birokrasi berbasis kinerja.

Keseluruhan arah kebijakan pendanaan ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya, yang memuat perencanaan sumber-sumber pendanaan baik yang bersifat utama (*mandatory sources*) maupun sumber pelengkap dan alternatif lainnya.

B. Perhitungan Kerangka Pendanaan Utama

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dengan melakukan pungutan kepada masyarakat atas kegiatan layanan yang diberikan. Beberapa sumber pendanaan ini terdiri dari:

1) Pendapatan Pajak Daerah

   Untuk memperkuat kemandirian fiskal, tujuan utama dari pengelolaan Pajak Daerah adalah meningkatkan kontribusinya secara signifikan dan berkelanjutan. Sasaran yang ingin dicapai meliputi tercapainya target penerimaan sesuai proyeksi, meningkatnya rasio pajak terhadap PDRB, serta menurunnya tunggakan pajak. Guna mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan akan difokuskan pada modernisasi administrasi perpajakan melalui perluasan basis Wajib Pajak (ekstensifikasi) dan pendalaman potensi dari Wajib Pajak yang sudah ada (intensifikasi).

2) Pendapatan Retribusi Daerah

   Tujuan dari optimalisasi Retribusi Daerah adalah memaksimalkan penerimaan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi dasar pemungutannya. Sasaran utamanya adalah meningkatnya realisasi penerimaan dari pos-pos retribusi potensial, seperti persampahan, parkir di tepi jalan umum, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Untuk itu, arah kebijakan akan diarahkan pada penyesuaian tarif retribusi secara rasional serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan yang diretribusikan.

3) Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan

Komponen ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kontribusi laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan daerah yang produktif. Sasarannya adalah tercapainya target dividen dari BUMD yang sudah ada serta terbentuknya BUMD baru yang sehat dan berdaya saing. Arah kebijakan akan difokuskan pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), penyertaan modal yang terukur, dan penjajakan diversifikasi usaha.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Tujuan dari komponen ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD di luar tiga komponen utama lainnya. Sasaran yang ditetapkan adalah meningkatnya penerimaan dari pengelolaan aset daerah, denda administratif, dan jasa giro. Arah kebijakan akan berfokus pada peningkatan efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pengelolaan kas daerah.

C. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan lain merupakan tambahan sumber pendapatan yang dapat digunakan dalam rangka mempercepat kegiatan pembangunan daerah. Beberapa sumber pendanaan lain tersebut terdiri dari:

1) Transfer pendapatan dari pemerintah pusat (APBN) dan dari Pemerintah Provinsi Banten (APBD). Pembangunan Daerah selain bersumber dari pendapatan Daerah Kota Serang juga diperoleh melalui transfer pendapatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun daerah provinsi.
2) Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sektor bisnis umumnya memiliki anggaran untuk program CSR/TJSL yang digunakan untuk membangun masyarakat dan lingkungan yang berada di sekitar tempat operasinya. Berbagai kegiatan yang umumnya dijalankan melalui program ini yaitu pada bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di daerah. Pemerintah Kota Serang dapat berkolaborasi dengan sektor bisnis melalui program tersebut dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan melakukan pemetaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tentu saja akan membantu pemerintah

daerah untuk melakukan pembangunan, tanpa membebani anggaran pendapatan yang dimiliki pemerintah. Penyelenggaraan program CSR dan TJSL dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan.
b. Kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.
c. Kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan CSR dan PKBL.

3) Pinjaman Daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Dalam rangka menjawab tantangan pembiayaan pembangunan yang semakin kompleks, Pemerintah Kota Serang menetapkan strategi pembiayaan yang tidak hanya mengandalkan sumber-sumber pendapatan konvensional seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer, tetapi juga mempertimbangkan sumber-sumber pembiayaan alternatif yang sah dan berkelanjutan. Salah satu instrumen yang direncanakan untuk dioptimalkan adalah pinjaman daerah, sebagai bagian dari kebijakan pembiayaan jangka menengah.

Rencana pinjaman daerah ini dirancang dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan tingkat kemampuan pengembalian daerah (*Debt Service Coverage Ratio*/DSCR), serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal dan keberlanjutan fiskal daerah. Berdasarkan hasil analisis fiskal tahun 2025, Kota Serang masih memiliki ruang fiskal untuk pembiayaan melalui pinjaman, dengan mempertimbangkan posisi defisit yang tidak dapat ditutup hanya dari SILPA maupun efisiensi belanja. Pinjaman daerah yang direncanakan akan digunakan secara terarah untuk membiayai program-program pembangunan strategis, khususnya pembangunan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Skema pinjaman tetap menyesuaikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memperoleh persetujuan DPRD, serta persetujuan dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kota Serang juga akan melakukan analisis

kelayakan dan manfaat proyek yang akan dibiayai, agar pinjaman yang diambil benar-benar memberikan *value for money* dan dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Dengan masuknya pinjaman daerah dalam struktur pembiayaan APBD, diharapkan dapat memberikan tambahan ruang fiskal yang strategis untuk menjawab *backlog* pembangunan tanpa membebani keseimbangan fiskal jangka panjang. Kebijakan ini juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Serang dalam mempercepat capaian pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kinerja serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU dilaksanakan dengan konsep pelaksanaan usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Karateristik proyek KPBU meliputi:
   a. proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
   b. skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian atau kontrak kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha;
   c. dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan, dan operasi proyek KPBU;
   d. perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang atau lebih dari 15 tahun untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
   e. basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha
5) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Swasta. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Swasta. Dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kota Serang dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai

sumber pembiayaan alternatif melalui berbagai skema kerja sama dengan pihak lain. Salah satu skema yang dapat digunakan adalah Bangun Guna Serah (BGS), yaitu kerja sama di Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu kepada Pemerintah Kota Serang. Sebaliknya melalui skema Bangun Serah Guna (BSG), yaitu Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Selain itu, terdapat skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) memberikan ruang bagi pihak lain untuk memanfaatkan aset milik daerah secara produktif tanpa mengubah status kepemilikan, di mana pemerintah daerah tetap sebagai pemilik sah aset namun memperoleh pendapatan berupa kontribusi tetap atau variabel berdasarkan hasil pemanfaatan. Skema ini sangat relevan untuk aset-aset strategis yang belum optimal digunakan dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk pengembangan infrastruktur skala besar, Pemerintah Kota Serang dapat menjalin Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), yakni kolaborasi antara pemerintah daerah dan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan penerapan berbagai skema pemanfaatan BMD tersebut, diharapkan dapat mendorong inovasi pembiayaan pembangunan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset, membuka partisipasi sektor swasta, serta mempercepat penyediaan layanan dan infrastruktur publik guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan yang terjadi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan

serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi dan daerah yang bersifat mandatori. Berdasarkan analisis pemetaan permasalahan maka ditetapkan permasalahan pokok daerah Kota Serang sebagai dasar penetapan prioritas dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

2.3.1.1 Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya berjalan efektif

Reformasi Birokrasi di tingkat daerah, ditunjang oleh beberapa indikator utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan efektif, diantaranya yaitu :

a. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Capaian nilai indeks reformasi birkorasi Kota Serang tahun 2024 yang sebesar 75,58 poin (atau kategori BB) masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Banten tahun 2024 yaitu 87,49 poin, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Serang tergolong cukup baik, tetapi belum mencapai kategori sangat baik (biasanya di atas 80 poin). Ini mencerminkan masih adanya berbagai kendala struktural dan budaya kerja dalam birokrasi. Jika dibandingkan dengan kota lain di Provinsi Banten maka capaian Kota Serang lebih rendah dari Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dengan capaian Predikat A dan lebih tinggi dari Kota Cilegon dengan Predikat B.

b. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Capaian SAKIP Kota Serang Tahun 2024 sebesar 62,57 poin atau dengan predikat B, cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi SAKIP Provinsi Banten Tahun 2024 yaitu 69,24 Poin. Jika dibandingkan dengan kota lain di Provinsi Banten, nilai SAKIP Kota Serang menunjukkan predikat yang lebih rendah. ini menunjukkan akuntabilitas kinerja Kota Serang masih belum optimal. Pemerintah daerah dinilai masih belum optimal dalam menyusun perencanaan kinerja yang tepat sasaran dan dalam mengukur capaian secara efektif.

c. IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)

Capaian IPKD Kota Serang Tahun 2024 adalah 77,94 poin. Meskipun cukup sedikit lebih tinggi dari capaian Provinsi Banten yaitu 77,93 persen, angka ini tetap menunjukkan perlunya peningkatan

dalam hal transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

d. Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik Kota Serang tahun 2024 sebesar 3,65 poin, skor ini termasuk kategori sedang (dalam skala 1–5), menandakan bahwa pelayanan publik di Kota Serang belum sepenuhnya memuaskan masyarakat, baik dari aspek kecepatan, kemudahan, maupun kepuasan pengguna layanan.

e. Indeks Integritas Nasional

Capaian Indeks Integritas Nasional dalam empat tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021, indeks tercatat sebesar 66,24, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 64,02. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan cukup signifikan hingga mencapai 70,25, namun pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 64,86. Pola capaian ini mengindikasikan bahwa upaya menjaga konsistensi integritas perlu terus diperkuat, baik melalui pengawasan internal, penguatan budaya kerja yang berintegritas, maupun peningkatan komitmen aparatur terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

f. Indeks Sistem Merit

Capaian indeks merit dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, indeks merit tercatat sebesar 148, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 171,50. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi lonjakan capaian hingga mencapai 251, dan pada tahun 2024 indeks merit tetap berada pada angka yang sama yaitu 251.

keseluruhan, Reformasi Birokrasi di Kota Serang masih membutuhkan perbaikan tata kelola agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur juga menjadi kunci penting untuk membangun aparatur yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih komprehensif guna memastikan setiap program dan kebijakan dapat dijalankan secara konsisten serta terhindar dari praktik yang tidak sesuai prosedur ataupun regulasi yang berlaku.

2.3.1.2 Pembangunan manusia yang belum merata dan berkualitas

Meskipun terjadi peningkatan pada beberapa indikator pembangunan manusia di Kota Serang, namun capaian tersebut belum merata dan belum sepenuhnya berkualitas. Ketimpangan ini terlihat dari disparitas antara angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta capaian Indeks Daya Saing dan Indeks Pembangunan Gender yang menunjukkan perlunya peningkatan keberlanjutan pembangunan berbasis manusia. Berikut data indikatar pendukung Pembangunan Manusia:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Serang Tahun 2024 mencapai 76,90 poin, ini lebih tinggi dari capaian Nasional yang sebesar 75,02 poin dan capaian Provinsi Banten 76,35 poin, nilai ini cenderung lebih tinggi dari Kabupaten Serang yang hanya mencapai 73,28 poin, namun lebih kecil apabila dibandingkan dengan Kota Cilegon mencapain 78,83 poin, dan Kota Tangerang 81,53 poin. Capaian IPM Kota Serang ini termasuk kategori tinggi, namun belum mencapai angka ideal untuk daerah perkotaan, masih terdapat ketimpangan antar kelompok masyarakat atau wilayah dalam pencapaian IPM.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Kondisi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Serang adalah 8,93 tahun, dimana masih di bawah standar wajib belajar 12 tahun, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Kota Serang belum menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas, angka ini masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Banten yaitu 9,23 tahun.

c. Harapan Lama Sekolah: 12,83 tahun

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Serang adalah 12,83 tahun. Namun demikian masih tidak sebanding dengan capaian angka rata-rata lama sekolah. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan struktural atau ekonomi dalam mewujudkan potensi lama sekolah yang ideal. Angka HLS Kota Serang juga masih lebih rendah dari Provinsi Banten yang mencapai 13,10 tahun.

d. Usia Harapan Hidup: 75,31 tahun

Tingkat harapan hidup di Kota Serang tergolong tinggi, yaitu 75,31 tahun pada tahun 2024, angka ini lebih tinggi dari capaian Provinsi Banten yang hanya mencapai 74,97 tahun, angka ini menunjukkan

perbaikan dalam aspek kesehatan dan layanan dasar. Namun, belum cukup menjamin kualitas hidup secara keseluruhan tanpa didukung pendidikan dan daya saing ekonomi.

e. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Serang mencapai 93,59 poin, kondisi ini menggambarkan capaian yang relatif tinggi, hal ini menunjukkan kesetaraan gender sudah cukup baik. Namun, belum menjamin akses dan partisipasi perempuan yang merata dalam pembangunan.

f. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Serang sebesar 62,98 poin. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan publik, masih tergolong sedang dan belum optimal. Capaian IDG ini juga menandakan bahwa perempuan di Kota Serang belum sepenuhnya diberdayakan secara ekonomi dan politik, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti : rendahnya partisipasi kerja perempuan, terbatasnya akses perempuan terhadap pelatihan, modal usaha, dan teknologi, serta kurangnya representasi perempuan dalam jabatan struktural dan lembaga perwakilan.

Untuk mendorong kemajuan pembangunan manusia yang inklusif, Pemerintah Kota Serang perlu menetapkan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Prioritas tersebut harus dilaksanakan melalui penguatan sinergi antar sektor dan aktor pembangunan guna mewujudkan kolaborasi yang efektif dan konsisten. Strategi ini selanjutnya dijadikan dasar penyusunan rencana aksi jangka menengah daerah sekaligus acuan bagi perangkat daerah dalam penjabaran program dan kegiatan, sehingga arah pembangunan lebih terarah, terukur, serta mampu mewujudkan sasaran pembangunan yang inklusif, adil, dan berdaya saing.

G. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan kualitas kehidupan pemuda dalam berbagai aspek kehidupan.

IPP disusun sebagai instrumen untuk memantau kemajuan pembangunan kepemudaan secara nasional maupun daerah.

Secara umum, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) mencerminkan sejauh mana pemuda memiliki kemampuan, kesempatan, dan peran dalam pembangunan, yang mencakup lima domain utama, yaitu: Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan, Lapangan dan peluang kerja, Partisipasi dan kepemimpinan, Gender dan inklusivitas sosial.

Tabel II.90
Nilai Indeks Pembangunan Pemuda Daerah Kota Serang Tahun 2024

Entitas	Nilai IPP / Capaian	Perbandingan & Catatan
Nasional (2024)	56,33	Merupakan tolok ukur pusat; menunjukkan rata-rata capaian pembangunan pemuda di seluruh provinsi.
Provinsi Banten (2024)	53,33	Di bawah rata-rata nasional, menunjukkan provinsi berada di posisi yang tertinggal relatif terhadap performa nasional.
Kota Serang (2024)	57,29	Melebihi nilai nasional dan jauh di atas nilai provinsi.

Sumber: Kemenpora.go.id, SIPD 2025

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Serang tahun terakhir sebesar 57,29 persen menunjukkan bahwa pembangunan pemuda berada pada kategori "**sedang**". Nilai ini mencerminkan kondisi pemuda Kota Serang yang telah menunjukkan perkembangan positif, namun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam aspek pendidikan, partisipasi, dan kemandirian ekonomi.

Secara umum, capaian tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan pemuda di Kota Serang telah sedikit melampaui rata-rata nasional dan Provinsi Banten, namun capaian masih memerlukan upaya penguatan yang lebih terarah agar kontribusi pemuda terhadap pembangunan daerah semakin optimal.

Dari sisi kekuatan, peningkatan partisipasi pendidikan menengah dan kesadaran terhadap kesehatan serta tumbuhnya organisasi kepemudaan menjadi modal penting bagi peningkatan kualitas sumber daya pemuda. Sementara itu, dari sisi tantangan, masih tingginya tingkat pengangguran muda, rendahnya partisipasi pemuda dalam perencanaan pembangunan, serta keterbatasan

keterampilan digital dan kewirausahaan menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius.

Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pemuda Kota Serang belum sepenuhnya termanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui peningkatan akses pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, pengembangan kewirausahaan muda berbasis ekonomi kreatif, serta perluasan partisipasi pemuda dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah.

2.3.1.3 Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing

Ekonomi inklusif adalah sistem ekonomi yang memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin, perempuan, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, dan masyarakat terpencil memiliki akses yang adil terhadap peluang ekonomi, sumber daya, dan manfaat pembangunan. Dalam Permasalahan Pembangunan Ekonomi Daerah ini belum tercapainya pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing. Dimana capaian indikator LPE sebesar 4,71 persen, dan PDRB per Kapita sebesar 58,5 juta per tahun. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pertumbuhan belum merata antarsektor, distribusi pendapatan belum adil, UMKM sulit mengakses modal dan pasar, infrastruktur ekonomi belum memadai serta produktivitas tenaga kerja masih rendah. Berdasarkan permasalahan tersebut, prioritas pembangunan ekonomi daerah difokuskan pada upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Strategi pencapaian diarahkan melalui penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal, pemberdayaan UMKM dan pengembangan kewirausahaan rakyat, perluasan akses pembiayaan disertai program pelatihan UMKM, pembangunan infrastruktur ekonomi produktif, serta pelatihan vokasional dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Dengan pendekatan ini, pembangunan ekonomi Kota Serang diharapkan tidak hanya mendorong angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaatnya secara merata dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan

pembangunan ekonomi Kota Serang tidak hanya mendorong angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaatnya secara merata dan berkelanjutan.

2.3.1.4 Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan sesuai tata ruang yang belum optimal

Pembangunan infrastruktur di Kota Serang masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas dan kesesuaian dengan tata ruang. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Infrastruktur (IKLI) sebesar 69,04 poin dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 54,19 poin, yang menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur dan lingkungan belum optimal. Permasalahan terletak pada perencanaan tata ruang yang belum sepenuhnya menjadi acuan pembangunan, infrastruktur dasar belum merata, kualitas infrastruktur rendah, serta kurangnya integrasi pembangunan dan lingkungan.

Oleh karena itu, dibutuhkan langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan sesuai tata ruang melalui penguatan sistem perencanaan berbasis RTRW dan RDTR, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan integrasi pembangunan fisik dengan pelestarian lingkungan.

2.3.1.5 Kesejahteraan Sosial di Kota Serang masih belum merata

Tingkat kesejahteraan sosial di Kota Serang masih belum merata, yang tercermin dari dua indikator utama yaitu tingkat kemiskinan sebesar 5,65 persen dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,12 persen, angka ini relatif tinggi walaupun masih lebih baik apabila dibandingkan terhadap capaian Kabupaten Serang yang tingkat pengangurannya mencapai 9,18 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan secara adil dan inklusif. Sementara itu Indeks Gini kembali naik pada tahun 2024 sebesar 0,324 poin, mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam menjaga kesinambungan pemerataan, terutama akibat faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi makro, ketimpangan sektor informal dan formal.

Dari tiga indikator TPT, Gini Rasio dan angka kemiskinan yang masih berada di atas 5 persen menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kota Serang belum menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Kondisi ini menggambarkan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi kesejahteraan belum optimal dan masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan secara sosial dan ekonomi.

Untuk itu, diperlukan kebijakan yang terarah dalam memperluas akses terhadap pekerjaan layak, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta memperkuat jaring pengaman sosial guna mengurangi ketimpangan sosial dan mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan meningkatkan akses lapangan kerja berbasis potensi lokal, penguatan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, perluasan cakupan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan pokok yang dihadapi oleh daerah dan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan serta perlu mendapatkan penanganan dan perhatian secara prioritas, antara lain:

1. **Akselerasi implementasi Reformasi Birokrasi mewujudkan *Good Governance.***

   Merupakan percepatan dalam pelaksanaan pembaruan sistem birokrasi bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Percepatan reformasi birokrasi sangat penting untuk membentuk pemerintahan yang profesional, efisien, dan terpercaya, yang pada akhirnya meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

2. **Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing**

   Merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan karakter sumber daya manusia agar memiliki kompetensi tinggi, mampu bersaing secara global, serta berkontribusi optimal dalam pembangunan. Ini adalah proses membentuk masyarakat Kota Serang yang kompeten, produktif, dan adaptif terhadap perubahan, sehingga mampu menghadapi tantangan zaman dan mendorong kemajuan Kota Serang. Hal ini terkait dengan tingkat

pendidikan dan tenaga kerja. Isu strategis ini selaras dengan isu dalam dokumen KLHS yaitu tingginya tingkat kemiskinan.

3. **Pengembangan perekonomian berbasis potensi unggulan dan kawasan strategis**

   Pemerintah Kota Serang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya atau sektor-sektor unggulan yang dimiliki, serta mengembangkan wilayah-wilayah yang memiliki posisi strategis untuk mendukung aktivitas ekonomi. Strategi ini bertujuan menggerakkan ekonomi lokal secara efektif dengan fokus pada kekuatan daerah dan wilayah yang punya nilai strategis, agar pembangunan lebih merata dan berdampak luas bagi perekonomian masyarakat Kota Serang. Hal ini terkait dengan pengembangan kawasan strategis dalam fungsi lahan serta infrastruktur ekonomi. Isu strategis ini selaras dengan isu dalam dokumen KLHS yaitu belum optimalnya penyediaan infrastruktur perkotaan dan tingginya alih fungsi lahan.

4. **Pemenuhan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan**

   Merupakan upaya untuk meningkatkan konektivitas, pelayanan publik, dan daya saing wilayah secara adil dan ramah lingkungan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh masyarakat Kota Serang mendapatkan akses infrastruktur yang layak, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta membangun fondasi ekonomi dan sosial yang tahan terhadap perubahan jangka panjang. Hal ini terkait dengan integrasi dan kualitas infrastruktur. Isu strategis ini selaras dengan isu dalam dokumen KLHS yaitu belum optimalnya penyediaan infrastruktur perkotaan dan tingginya alih fungsi lahan serta Sampah belum terkelola dengan baik.

5. **Peningkatan kesejahteraan sosial yang berkeadilan**

   Upaya ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat Kota Serang secara merata, dengan memastikan tidak ada yang tertinggal dan setiap orang mendapatkan hak, perlindungan, serta akses terhadap layanan dasar. Ini adalah proses menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, setara, dan berdaya, dengan mengurangi kesenjangan sosial serta memberikan kesempatan

yang sama bagi semua untuk hidup layak dan bermartabat. Hal ini terkait dengan Ketimpangan Sosial dan permasalahan perlindungan sosial termasuk kemiskinan. Isu strategis ini selaras dengan isu dalam dokumen KLHS yaitu tingginya tingkat kemiskinan

Isu strategis daerah yang tersusun disimpulkan berdasarkan permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis dan potensi daerah. Isu-isu ini mempertimbangkan isu yang muncul dalam KLHS RPJMD yang telah disusun. Tabel II. 89 menjelaskan simpulan isu strategis daerah berdasarkan potensi daerah, isu KLHS serta isu lingkungan dinamis.

Tabel II.91
Simpulan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024

No	Potensi Daerah	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1.	Capaian IPKD Kota Serang Tahun 2024 lebih tinggi dari capaian Provinsi Banten	-	• Melemahnya multilateralisme & menguatnya unilateralisme • Ancaman keamanan global	• Pelayanan Publik Belum Memenuhi Harapan • Produktivitas birokrasi Tidak Efisien dan Produktivitas Rendah	• Indeks reformasi birokrasi tahun 2024 lebih rendah dari provinsi banten • Capaian SAKIP Kota Serang lebih rendah dari provinsi Banten • Kualitas pelayanan publik Kota Serang masih termasuk kategori sedang	Akselerasi implementasi Reformasi Birokrasi mewujudkan Good Governance.
	• Capaian IPM Kota Serang Tahun 2024 lebih tinggi dari Nasionadan capaian Provinsi Banten • Usia harapan hidup di Kota Serang lebih tinggi dari capaian	Tingginya tingkat kemiskinan	• Persaingan Tenaga Kerja di Tingkat Internasional • Rendahnya Kapasitas Inovasi dan Penelitian di Tingkat Global	• Akses Pendidikan dan Vokasi yang Belum Merata • Rendahnya kompetensi tenaga kerja • Ketimpangan Antarwilayah	• Angka harapan lama sekolah Kota Serang juga masih lebih rendah dari Provinsi Banten • tingkat keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing

No	Potensi Daerah	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	Provinsi Banten				publik, masih tergolong sedang dan belum optimal	
	Terdapat sejumlah produk unggulan daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah	• Belum optimalnya penyediaan infrastruktur perkotaan • Tingginya alih fungsi lahan	• Lemahnya keterkaitan antara pengembangan kawasan strategis dengan kebutuhan perdagangan internasional • Tertinggalnya konektivitas digital dan fisik antarwilayah dalam mendukung integrasi global	• Kurangnya Pengembangan Kawasan Strategis sebagai Pusat Pertumbuhan • Keterbatasan Hilirisasi dan Infrastruktur Penunjang • Disparitas dan Ketimpangan Antar-Wilayah	• pertumbuhan belum merata antarsektor, distribusi pendapatan belum adil, UMKM sulit mengakses modal dan pasar, infrastruktur ekonomi belum memadai serta produktivitas tenaga kerja masih rendah.	• Pengembangan perekonomian berbasis potensi unggulan dan kawasan strategis
	pertumbuhan positif dalam infrastruktur dan layanan energi di Kota Serang	• Belum optimalnya penyediaan infrastruktur perkotaan • Tingginya alih fungsi lahan • Sampah belum terkelola dengan baik	• Infrastruktur rentan terhadap iklim ekstrem dan bencana—ketahanan belum memadai • Ketimpangan akses transportasi & digital antarwilayah menghalangi globalisasi	• Kualitas Infrastruktur yang Belum Merata • Kurangnya Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur • Pendanaan Infrastruktur yang Terbatas dan Kurangnya Inovasi Pembiayaan	• Indeks Kualitas Lingkungan Infrastruktur (IKLI) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur dan lingkungan belum optimal.	• Pemenuhan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan
	Penurunan angka kemiskinan di Kota Serang didorong oleh meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan,	• Tingginya tingkat kemiskinan	• Ketidakpastian Ekonomi Global dan Dampaknya pada Kesejahteraan Sosial • Ketimpangan Sosial dan Ekonomi yang Meluas Secara Global	• Perlindungan Sosial yang Belum Optimal dan Inklusif • Kelemahan Koordinasi dan Kapasitas Pelaksanaan Program Sosial • Tingkat kemiskinan meningkat pada tahun	• angka kemiskinan yang masih berada di atas 5% menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kota Serang belum menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata	• Peningkatan kesejahteraan sosial yang berkeadilan

No	Potensi Daerah	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	serta bertambahnya kesempatan kerja di sektor-sektor tertentu.			2020 akibat kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019. Namun demikian, dengan adanya kebijakan pemerintah dalam perlindungan sosial maka tingkat kemiskinan dapat kembali menurun hingga tahun 2023	• Tingkat kesejahteraan sosial di Kota Serang masih belum merata	

Secara keseluruhan, isu strategis Kota Serang Tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun terdapat capaian positif pada IPKD dan IPM, masih terdapat tantangan besar dalam reformasi birokrasi, kualitas pelayanan publik, peningkatan SDM, pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan, pemerataan infrastruktur, serta kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan akselerasi reformasi, peningkatan daya saing, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta penguatan perlindungan sosial untuk mewujudkan pembangunan Kota Serang yang inklusif dan berkeadilan sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Serang Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kota Serang. Kota Serang dikenal sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Selain itu, Kota Serang juga memiliki sektor unggulan yang dapat memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah seperti pariwisata, perdagangan, konstruksi dan real estate. Oleh karena itu, penyusunan visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kota Serang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam upaya pencapaian visi dan misi maka dirumuskan tujuan dan sasaran untuk memperkuat dan mempertajam apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka menengah. Melalui pendekatan ini, RPJMD berperan sebagai peta jalan yang dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

3.1.1 Visi dan Misi

A. VISI

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Serang, visi RPJMD yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

"MENJADIKAN KOTA SERANG MADANI YANG MAJU KOTANYA, BAHAGIA DAN SEJAHTERA WARGANYA"

Untuk memastikan terjadinya sinergitas antara visi pembangunan jangka Menengah daerah dengan nasional, maka diperlukan penyelarasan antara visi RPJMD Kota Serang, visi RPJMD Provinsi Banten, dan visi RPJMN sebagaimana yang dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar III.1
Penyelarasan Visi RPJMN, Visi RPJMD Provinsi Banten, Dan Visi RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029

VISI RPJMN TAHUN 2025-2029	VISI RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029	VISI RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029
"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"	Provinsi Banten Maju, Adil, Merata, Tidak korupsi	Menjadikan Kota Serang Madani yang Maju Kotanya, Bahagia, dan Sejahtera Warganya

Visi pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", menjadi kompas utama yang mengarahkan seluruh daerah untuk bergerak dalam satu kesatuan menuju kemajuan berkelanjutan. Visi ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia, teknologi, dan tata kelola yang baik sebagai fondasi menuju Indonesia yang unggul di 2045.

Sebagai bagian integral dari bangsa, Provinsi Banten mengadopsi semangat ini melalui visi "Provinsi Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi". Visi ini menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan tata kelola yang bersih dari korupsi, yang sejalan dengan prinsip RPJMN dalam mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan inklusif. Dengan lokasi strategis sebagai pintu gerbang ekonomi Jawa-Sumatera, Banten memainkan peran kunci dalam mendorong konektivitas dan daya saing nasional, sekaligus memastikan tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal.

Di tingkat yang lebih mikro, Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten memperkuat visi tersebut dengan mengusung "Kota Serang Madani yang Maju Kotanya, Bahagia dan Sejahtera Warganya". Konsep "madani" di sini mencerminkan pembangunan berbasis nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan partisipasi Masyarakat yang selaras dengan visi Provinsi Banten yang adil dan RPJMN yang inklusif. Kota Serang menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan yang merata dapat menciptakan lingkungan yang maju sekaligus membahagiakan warganya.

B. MISI

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Berdasarkan pembahasan dengan tim penyusun RPJMD disepakati perumusan Misi Kepala Daerah pada saat pencalonan dari 7 misi menjadi 5 misi pada RPJMD dengan tidak menghilangkan substansi sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar III.2
Histori Perubahan Misi RPJMD

Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Serang Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1) **MISI 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani**

   Pelaksanaan reformasi birokrasi yang akuntabel dan inovatif menuju pemerintahan yang profesional dan melayani melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik, diantaranya dengan dengan menerapkan *merit system*, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis digital/SPBE yang berorientasi pada pelayanan prima.

2) **MISI 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing**

   Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui upaya peningkatan derajat kesehatan, pendidikan dengan disertai penguatan

pembangunan budaya yang karakter serta penguatan ketahanan keluarga, pembangunan pemuda dan pembangunan gender.

3) **MISI 3: Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing**

   Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis potensi daerah, sektor unggulan dan strategis dengan fokus pada sektor perdagangan dan jasa yang didukung oleh pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.

4) **MISI 4: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan**

   Pembangunan infrastruktur dalam upaya pemerataan pembangunan wilayah melalui penyediaan layanan dan infrastruktur yang layak, merata dan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan wilayah yang memperhatikan pembangunan holistik dengan pengelolaan lingkungan hidup serta ketangguhan dan tanggap bencana.

5) **MISI 5: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Mandiri dan Berkeadilan**

   Pelaksanaan misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang layak dan berkeadilan melalui penanganan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat serta menurunnya tingkat pengangguran dalam upaya meningkatnya kemandirian kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya, setiap dokumen perencanaan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memiliki keterkaitan satu sama lain, begitu juga antara penyusunan Misi RPJMD Kota Serang dengan Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Banten sebagaimana berikut ini:

Gambar III.3
Keterkaitan Misi Kota Serang dengan Asta Cita dan RPJMD Provinsi Banten

Berdasarkan gambar III.2 dapat diketahui bahwa 5 Misi yang diusung oleh Pemerintah Kota Serang telah mencakup muatan yang ada pada Asta Cita dan RPJMD Provinsi Banten. Periode 2025–2029 merupakan tahap krusial dalam peta jalan Indonesia menuju 2045. Sebagai pelaksanaan tahap pertama RPJPN 2025–2045 dan RPJPD daerah, misi nasional (RPJMN), Provinsi Banten, dan Kota Serang dirancang saling mengunci, bagai roda penggerak yang berputar seirama. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Misi Kota Serang dapat membantu pencapaian Misi Pembangunan Nasional 2025-2029 menuju Indonesia Emas.

3.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhaan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome PROGRAM Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *SMART-C*. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk

mewujudkan visi pembangunan Kota Serang Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kota Serang dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **T1. Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan inovatif menuju pemerintahan yang profesional dan melayani**

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kota Serang, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
   - Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
   - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi
   - Meningkatnya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit

2. **T2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing**

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kota Serang, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
   - Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat yang berdaya saing
   - Meningkatnya ketahanan keluarga, kualitas pembangunan pemuda dan pembangunan gender
   - Meningkatnya pembangunan kebudayaan yang maju dan berkarakter

3. **T3. Meningkatnya perekonomian daerah yang tumbuh dan berdaya saing berbasis potensi unggulan daerah**

   Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kota Serang, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing pada sektor unggulan dan strategis

4. **T4. Meningkatnya penyediaan layanan dan infrastruktur yang layak, merata dan berkelanjutan**

   Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kota Serang, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
   - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
   - Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah

5. **T5. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang layak dan berkeadilan**

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kota Serang, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

   - Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
   - Menurunnya tingkat pengangguran.

Tabel III.1.
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Serang Tahun 2025-2030

VISI: "MENJADIKAN KOTA SERANG MADANI YANG MAJU KOTANYA, BAHAGIA DAN SEJAHTERA WARGANYA"										
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**TARGET TAHUN**						
				Baseline 2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
MISI 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani	**Tujuan 1. Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan inovatif menuju pemerintahan yang profesional dan melayani**		**Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)**	**75,58**	**76,42**	**77,26**	**78,10**	**78,94**	**79,78**	**80,62**
		Sasaran 1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP (Angka)	62,57	63,79	65,01	66,23	67,44	68,66	69,88
		Sasaran 1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	3,99	4,04	4,09	4,13	4,18	4,23	4,28
		Sasaran 1.3. Meningkatnya tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Angka)	77,94	78,14	79,46	80,78	82,11	83,43	84,75
			Indeks Integritas Nasional (Angka)	64,86	65,40	65,94	66,47	67,01	67,55	68,54
		Sasaran 1.4. Meningkatnya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit	Indeks Sistem Merit (Angka)	251	267	283	299	315	332	350
MISI 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing	**Tujuan 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing**		**Indeks Pembangunan Manusia (Angka)**	**76,90**	**77,31**	**77,73**	**78,15**	**78,57**	**79,41**	**80,25**
		Sasaran 2.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (Angka)	85,09	85,72	86,03	86,35	86,66	86,97	87,28

VISI: "MENJADIKAN KOTA SERANG MADANI YANG MAJU KOTANYA, BAHAGIA DAN SEJAHTERA WARGANYA"										
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**TARGET TAHUN**						
				Baseline 2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
		Sasaran 2.2. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat yang berdaya saing	Indeks Pendidikan (Angka)	65,41	67,24	68,11	68,97	69,83	70,69	71,55
		Sasaran 2.3. Meningkatnya ketahanan keluarga, kualitas pembangunan pemuda dan pembangunan gender	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Angka)	65,39	65,70	66,00	66,30	66,60	66,90	67,20
			Indeks Pembangunan Gender (Angka)	93,59	93,74	93,90	94,05	94,21	94,36	94,52
			Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)	57,29	57,3	57,31	57,32	57,33	57,34	57,35
		Sasaran 2.4. Meningkatnya pembangunan kebudayaan yang maju dan berkarakter	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)	NA	51,56	51,66	51,81	51,95	52,05	52,20
MISI 3: Meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	**Tujuan 3. Meningkatnya perekonomian daerah yang tumbuh dan berdaya saing berbasis potensi unggulan daerah**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**4,71**	**5,34**	**5,73**	**6,15**	**6,58**	**7,00**	**7,42**
			Indeks Akses Keuangan Daerah (Angka)	**5,55**	**5,56**	**5,57**	**5,58**	**5,59**	**5,60**	**5,61**
		Sasaran 3.1. Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing pada sektor unggulan dan strategis	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa (%)	69,78	70,00	70,10	70,20	70,30	70,40	70,50
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	6,52	6,55	6,60	6,65	6,70	6,75	6,80
			Kontribusi PDRB Kota Serang terhadap Provinsi Banten (%)	4,97	5,11	5,23	5,35	5,47	5,59	5,71
			PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	58,49	61,67	67,50	73,34	79,17	85,00	90,83

VISI: "MENJADIKAN KOTA SERANG MADANI YANG MAJU KOTANYA, BAHAGIA DAN SEJAHTERA WARGANYA"										
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**TARGET TAHUN**						
				Baseline 2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
MISI 4: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan	**Tujuan 4. Meningkatnya penyediaan layanan dan infrastruktur yang layak, merata dan berkelanjutan**		**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Angka)**	**69,04**	**72,47**	**72,84**	**73,22**	**73,59**	**73,96**	**74,33**
			Penurunan intensitas emisi GRK (%)	**17,78**	**18,45**	**19,04**	**19,58**	**20,06**	**20,47**	**20,86**
		Sasaran 4.1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah (%)	76,5	76.83	77,21	77,60	77,99	78,38	78,77
		Sasaran 4.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	54,19	64,53	64,74	64,96	65,17	65,38	65,59
		Sasaran 4.3. Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Risiko Bencana (Angka)	127,57	126,89	126,25	125,60	124,96	124,31	123,63
MISI 5: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Mandiri dan Berkeadilan	**Tujuan 5. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang layak dan berkeadilan**		**Tingkat Kemiskinan (%)**	**5,65**	**5,60**	**5,50**	**5,35**	**5,14**	**4,61**	**4,30**
			Indeks Kesejahteraan Sosial (%)	**NA**	**56,27**	**57,17**	**58,17**	**59,27**	**59,85**	**60,35**
		Sasaran 5.1. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) (Angka)	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69
			Rasio Gini (Angka)	0,324	0,323	0,321	0,319	0,317	0,314	0,311

VISI: "MENJADIKAN KOTA SERANG MADANI YANG MAJU KOTANYA, BAHAGIA DAN SEJAHTERA WARGANYA"										
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**TARGET TAHUN**						
				Baseline 2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
		Sasaran 5.2. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,12	7,00	6,67	6,63	6,59	6,55	6,51

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui Program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang tepat memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, sementara arah kebijakan menjadi panduan normatif yang memastikan seluruh program pembangunan selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai sinergi antar-sektor, efisiensi alokasi sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Perencanaan strategis yang dilakukan bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja selama lima tahun yang akan datang. Pengimplementasian tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana dalam melaksanakan transformasi reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan PROGRAM dan pelayanan kepada masyarakat.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

A. Strategi

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirancang dengan jelas dapat menjadi upaya dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang terfokus dan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, strategi dirancang untuk menjembatani antara misi yang bersifat jangka panjang dengan kebijakan dan PROGRAM konkret yang dapat diimplementasikan, sehingga setiap langkah pembangunan berjalan terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Sebagaimana mengacu pada RPJPD Kota Serang Tahun 2025-2045, pembangunan jangka menengah Kota Serang Tahun 2025-2029 memiliki fokus pada penguatan transformasi menyeluruh dengan memastikan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial tersedia secara merata. Kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada inovasi, produktivitas tenaga kerja, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan kualitas ASN. Selain itu, penguatan lembaga yang mendukung pembangunan berkelanjutan dilakukan dalam mendorong ketahanan sosial, pelestarian budaya, dan menjaga kualitas lingkungan. Infrastruktur juga menjadi prioritas untuk memastikan distribusi yang merata dan memadai. Strategi yang dapat dirumuskan dalam mendukung penguatan transformasi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, strategi pembangunan Kota Serang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

a. Pengembangan implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang berdampak

Strategi dalam meningkatkan pengembangan implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang berdampak di Kota Serang adalah dengan mengimplementasikan optimalisasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pemenuhan Infrastruktur TIK, penguatan tata kelola persandian untuk keamanan informasi dan komunikasi, penguatan data statistik sektoral dalam pembangunan daerah, pengembangan dan implementasi sistem perencanaan dan pelaporan kinerja secara akuntabel dan transparan, optimalisasi peran riset dan inovasi melalui kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan tata kelola kearsipan secara efektif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki proses administratif, memperpendek jalur birokrasi, serta

meningkatkan koordinasi antar instansi guna memastikan pelayanan yang lebih cepat dan responsif. Peningkatan kualitas ASN menjadi prioritas melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta promosi nilai-nilai etika dan integritas dalam menjalankan tugas. ASN yang profesional dan berintegritas akan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Selain itu, penerapan konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan *smart city*, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan akses internet publik menjadi langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi akan mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan keterjangkauan layanan bagi masyarakat. Dalam hal ini teknologi bukan hanya sekedar alat bantu, melainkan penggerak utama perubahan tata kelola pemerintahan kearah yang lebih adaptif, responsif dan akuntabel. Pemerintah Kota Serang mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan *smart city*, serta digitalisasi layanan publik, termasuk kolaborasi dengan sektor perbankan untuk memperluas akses layanan digital.

b. Optimalisasi tata kelola kelembagaan dan manajemen Pemerintah Daerah

Strategi dalam meningkatkan optimalisasi tata kelola kelembagaan dan manajemen Pemerintah Daerah di Kota Serang adalah dengan penataan kelembagaan pemerintah daerah yang adaptif, tepat fungsi dan sesuai dengan kebutuhan daerah, optimalisasi implementasi, penataan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.

c. Peningkatan akuntabilitas sistem pelayanan publik yang inovatif dan berbasis Informasi Teknologi

Strategi dalam peningkatan akuntabilitas sistem pelayanan publik yang inovatif dan berbasis informasi teknologi di Kota Serang adalah dengan peningkatan iklim investasi daerah yang kompetitif, optimalisasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien, penegakan dan fasilitasi penguatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan yang rukun, harmoni dan berdemokrasi, peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik.

d. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi

Strategi peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi di Kota Serang adalah dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan

akuntabel melalui pengembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital, pemanfaatan aset daerah dan kelembagaan BUMD guna meningkatkan pendapatan asli daerah. penerapan sistem digital ini bertujuan untuk percepatan implementasi sistem pembayaran non-tunai, integrasi sistem informasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring dan pelaporan keuangan yang lebih akurat, cepat, dan dapat diakses secara real time, termasuk kolaborasi dengan sektor perbankan untuk memperluas akses layanan digital. Masyarakat dapat membayar pajak dan retribusi daerah secara mudah via QRIS, Virtual Account (VA), ATM, *mobile banking*, *e-commerce*, dan platform digital lainnya, yang sejalan dengan implementasi ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah).

e. **Peningkatan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan**

Strategi peningkatan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota serang adalah dengan peningkatan mekanisme dan prosedur pengawasan internal dan eksternal secara akuntabel dan berintegrasi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan kualitas pengawasan menjadi salah satu elemen kunci yang harus terus diperkuat. Pengawasan yang efektif berperan penting dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, efisiensi, serta mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

f. **Penerapan dan pengembangan sistem merit pada penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah**

Strategi dalam penerapan dan pengembangan sistem merit pada penyelenggaran manajemen kepegawaian daerah adalah dengan penyediaan dan penataan regulasi serta unsur penunjang untuk pengembangan sistem merit, optimalisasi pembinaan kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berintegrasi, inovatif dan adaptif, penerapan manajemen talenta, sistem penilaian kinerja dan pengembangan karir yang obyektif dan akuntabel.

g. **Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat untuk semua**

Strategi dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Serang adalah dengan memastikan pemenuhan layanan dasar yang merata dan optimal bagi seluruh masyarakat. Upaya ini mencakup penambahan serta peningkatan layanan, sarana, prasarana, dan tenaga medis di berbagai fasilitas kesehatan masyarakat,percepatan penuntasan dan pencegahan stunting secara komprehensif, perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, pencegahan dan

pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penguatan pelayanan kesehatan, ibu, anak, dan lanjut usia, peningkatan kesehatan mental (mental health) masyarakat, penguatan dan pemenuhan jaminan dan embiayaan kesehatan, penguatan kelembagaan badan layanan umum daerah kesehatan. Untuk mewujudkan sistem kesehatan yang efektif dalam lima tahun ke depan, diperlukan sinergi antara berbagai instansi dan dukungan kerja sama dengan swasta. Selain itu, pengentasan *stunting* menjadi prioritas dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai sektor, seperti pendampingan calon orang tua dalam kesehatan dan gizi, penataan lingkungan dan sistem sanitasi, edukasi risiko pernikahan dini, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu. Layanan kesehatan mental juga perlu diintegrasikan dalam sistem pelayanan dasar seperti puskesmas dan sekolah. Dalam Upaya peningkatan kesehatan mental diarahkan pada perluasan akses layanan psikologis yang terjangkau, edukasi publik untuk meningkatkan literasi mental, serta penguatan dukungan sosial di lingkungan keluarga dan komunitas.

h. Pemenuhan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata

Strategi dalam pemenuhan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di Kota Serang adalah dengan optimalisasi fasilitas dan sistem pendidikan dasar, usia dini dan kesetaraan, akselerasi peningkatan capaian wajib belajar 13 tahun yang inklusif, pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas dan berkompetensi, penguatan kurikulum pendidikan berbasis pengembangan talenta dan karakter, sains kreatif serta kewirausahaan berbasis potensi dan keunggulan daerah. Keberhasilan strategi ini memerlukan dukungan dari kerja sama antar perangkat daerah, swasta, dan unit organisasi lain dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, tenaga pendidik yang berkualitas, serta kebijakan ekonomi yang memastikan anak usia sekolah tidak perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, pendidikan nonformal berbasis komunitas juga perlu diperkuat guna menjangkau lebih banyak peserta didik. Upaya lain yang penting adalah peningkatan kualitas, kuantitas, dan pemerataan kompetensi tenaga pendidik untuk menghilangkan kesenjangan kualitas antar sekolah.

i. Peningkatan literasi masyarakat

Strategi dalam meningkatkan literasi masyarakat Kota Serang adalah dengan optimalisasi akses dan kualitas perpustakaan berbasis inkusi. Dengan pemerataan layanan perpustakaan hingga ke tingkat kelurahan, serta melalui mobil perpustakaan keliling. Upaya ini bertujuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, dan lansia. upaya meningkatkan literasi tidak hanya diarahkan pada penguasaan

baca-tulis semata, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis, memahami informasi, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perpustakaan berbasis inklusi ini menjadi lebih dari sekedar tempat meminjam buku, tetapi menjadi ruang terbuka bagi siapa pun untuk belajar, berkembang, dan berkarya.

j. Peningkatan perwujudan keluarga yang berkualitas

Strategi dalam meningkatkan perwujudan keluarga yang berkualitas di Kota Serang adalah dengan penguatan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk dan keluarga berencana secara lebih efektif dan berkelanjutan, pembangunan keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Selain itu, dengan memperluas akses layanan KB, meningkatkan edukasi masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan dan pembinaan keluarga, diharapkan terbentuk keluarga yang sehat, sejahtera, dan tangguh. Hal ini bertujuan untuk penguatan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk dan keluarga berencana secara lebih efektif dan berkelanjutan. Strategi ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang berkualitas serta mendukung pembangunan Kota Serang secara menyeluruh dan berkelanjutan.

k. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga

Strategi dalam meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga adalah melalui pembinaan wirausaha muda guna menciptakan generasi yang mandiri secara ekonomi dan inovatif dalam menghadapi tantangan zaman. Di sisi lain, organisasi kepemudaan terus didorong agar menjadi wadah pengembangan karakter, kepemimpinan, dan kepedulian sosial yang konstruktif. Melalui pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi lintas sektor, pemuda diberi ruang untuk lebih aktif terlibat dalam pembangunan Kota Serang. Dalam bidang olahraga, perhatian difokuskan pada pembinaan atlet muda secara sistematis serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan representatif. Hal ini tidak hanya untuk mencetak prestasi di berbagai ajang kompetisi, tetapi juga untuk membentuk gaya hidup sehat dan sportivitas di kalangan generasi muda.

l. Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Strategi dalam meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Serang adalah dengan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, optimalisasi pemenuhan akses layanan perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah Kota Serang berkomitmen untuk memastikan bahwa hak dan perlindungan bagi seluruh

lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia, terpenuhi melalui PROGRAM pengasuhan, perawatan, serta peningkatan resiliensi guna meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam pembangunan. Upaya ini juga mencakup pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berbasis komunitas, agar mereka dapat berkontribusi secara setara dalam pembangunan daerah. Selain itu, perlindungan anak akan terus diperkuat melalui kebijakan yang mencegah kekerasan dan eksploitasi, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka. Adanya PROGRAM yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang inklusif.

m. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat

Strategi dalam meningkatkan penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat melalui penguatan pengembangan kebudayaan yang maju dan berkarakter. Kebudayaan lokal yang merupakan identitas dan jiwa dari suatu daerah. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang begitu cepat, pengelolaan pelestarian dan implementasi nilai budaya dan tradisi masyarakat, serta pelestarian peninggalan sejarah purbakala, benda, situs, kawasan cagar budaya menjadi pondasi dalam menjaga kesinambungan warisan budaya yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan Pancasila, sehingga membentuk karakter masyarakat yang khas, berintegritas, dan menjunjung tinggi kearifan lokal.

n. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah yang terintegrasi dalam menghasilkan daya saing di tingkat domestik dan global

Peningkatan produktivitas perekonomian daerah di Kota Serang merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing di tengah persaingan global. Strategi ini dijalankan secara terintegrasi dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang memiliki potensi dan berdaya saing, peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan, peningkatan nilai tambah komoditas perdagangan dan penguatan sistem distribusi produk perdagangan, peningkatan daya saing dan produktivitas industri dan sektor jasa, penguatan koperasi sebagai lembaga pembiayaan rendah berbasis kerakyatan, penguatan ekonomi daerah melalui optimalisasi BUMD dan penyertaan modal.

o. Peningkatan perkembangan kewirausahaan dan industri kreatif yang berorientasi pertumbuhan inklusi

Strategi dalam meningkatkan perkembangan kewirausahaan dan industri kreatif di Kota Serang adalah dengan mengembangkan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang menyeluruh dengan konsep kebudayaan, industri kreatif dan penyelenggaraan *Meetings, Incentives, Conventions, and Exibitions* (MICE)

p. Peningkatan infrastruktur wilayah daya dukung pembangunan berkelanjutan

Pemerintah Kota Serang berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur wilayah pembangunan yang berkelanjutan melalui Peningkatan kualitas pengelolaan jalan, Peningkatan ketersediaan fasilitas umum dan pelayanan publik, Optimalisasi fungsi irigasi, drainase serta penanggulangan genangan air, Pemenuhan akses air bersih, air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif, Peningkatan kualitas perumahan dan penanganan kawasan kumuh untuk pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, Optimalisasi pengelolaan administrasi pertanahan dalam mendukung pembangunan, Optimalisasi pengelolaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan lahan, serta mitigasi risiko, Pembangunan tata kota dengan memperhatikan perencanaan dan pengaturan ruang untuk menciptakan lingkungan yang teratur, nyaman dan berkelanjutan.

q. Peningkatan akses transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau

Pemerintah Kota serang berkomitmen untuk meningkatkan akses transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Strategi peningkatan akses transportasi ini dilakukan melalui optimalisasi sarana dan prasarana perhubungan guna pengembangan sistem dan moda layanan transportasi publik, optimalisasi pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU).

r. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, persampahan dan ruang terbuka hijau

Strategi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, persampahan dan ruang tebuka hijau melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peningkatan akses layanan persampahan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu, peningkatan ketersediaan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

s. Peningkatan pembangunan rendah karbon

Pemerintah Kota Serang berkomitmen untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui penerapan pembangunan rendah

karbon, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi, guna mendorong transisi menuju penggunaan energi bersih di berbagai sektor. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan efisiensi energi di sektor industri, pengelolaan limbah dan transportasi.

t. Peningkatan mitigasi dan pengelolaan tanggap bencana

Strategi peningkatan mitigasi dan pengelolaan tanggap bencana di Kota Serang berfokus pada penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi dan merespons bencana secara cepat dan efektif. Pemerintah Kota Serang dapat mengembangkan sistem peringatan dini berbasis teknologi untuk meminimalkan risiko serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan mitigasi bencana. Infrastruktur tahan bencana, seperti saluran drainase yang lebih baik untuk mencegah banjir serta perencanaan tata ruang berbasis kajian risiko bencana, akan menjadi prioritas utama. Selain itu, sinergi antarinstansi, baik pemerintah, dunia usaha, maupun komunitas lokal, dapat diperkuat guna memastikan respons tanggap darurat yang lebih terkoordinasi.

u. Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial dan pemberdayaan masyarakat

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, Pemerintah Kota Serang terus mendorong optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Strategi ini diarahkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar kelompok rentan dan meningkatkan kemandirian sosial secara berkelanjutan melalui penguatan dan updating data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , penguatan akses perlindungan dan kualitas bagi penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang komprehensif, perluasan bantuan dan jaminan sosial baik secara langsung maupun melalui PROGRAM pemberdayaan masyarakat

v. Penguatan pengendalian inflasi daerah

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, Pemerintah Kota Serang terus memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah secara komprehensif. Salah satu pendekatan kunci yang diambil adalah optimalisasi kerja sama dan kolaborasi antar pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengembangan infrastruktur, logistik, dan distribusi barang, penguatan pengawasan dan pemantauan harga khususnya bahan pokok. Selain itu, didukung dengan infrastruktur yang memadai dan

pengawasan harga yang ketat, Kota Serang diharapkan mampu menjaga inflasi tetap terkendali, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, serta melindungi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

w. Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau

Strategi dalam meningkatkan ketersediaan dan cadangan yang berkualitas dan terjangkau adalah dengan pengembangan dan diversifikasi produksi pangan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan, pengamanan dan penguatan cadangan pangan, pengembangan infrastruktur pangan dalam mendukung efisiensi rantai pasok pangan dan distribusi pangan. peningkatan produksi pangan lokal menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Serang, terutama melalui optimalisasi lahan pertanian, penerapan teknologi pertanian modern, dan pemberdayaan petani sebagai pelaku utama dalam sistem pangan. Diversifikasi produksi pangan juga didorong untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

x. Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan peluang usaha tenaga kerja

Strategi dalam meningkatkan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja Kota Serang menekan pada pendidikan dan pelatihan kerja guna mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, Peningkatan informasi dan penempatan tenaga kerja akan menjadi prioritas guna mengurangi pengangguran, juga mengatasi ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja, memperluas akses kerja yang layak, serta mengoptimalisasikan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.

Pembangunan jangka menengah Kota serang dilakukan dengan tema di setiap tahunnya sebagai berikut:

Gambar III.4
Tema Pembangunan Per Tahun Kota Serang Tahun 2025-2029

Tabel III.2.
PENAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2026-2030

Visi	Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN				
Menjadikan Kota Serang Madani Yang Maju Kotanya, Bahagia Dan Sejahtera Warganya	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani	Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah melalui inovasi pelayanan terpadu dan akuntabel	Peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi melalui inovasi pelayanan terpadu dan akuntabel	Percepatan peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi melalui inovasi pelayanan terpadu dan akuntabel	Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi dalam upaya peningkatan daya saing daerah	Pemantapan implementasi Reformasi Birokrasi yang efektif, transparan, efisien akuntabel dan inovatif
		Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas	Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas dan merata	Percepatan peningkatan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas dan merata melalui kolaborasi dan inovatif	Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan akses pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas dan merata	Pemantapan pemenuhan akses pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas dan merata menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat
	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing	Pemenuhan wajib belajar tiga belas tahun	Peningkatan Pemenuhan wajib belajar tiga belas tahun yang berkualitas	Percepatan peningkatan pemenuhan wajib belajar tiga belas tahun yang berkualitas, inovatif dan kolaborasi	Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan akses Pendidikan yang berkualitas dan merata	Pemantapan pemenuhan akses pendidikan yang berkualitas dan merata menuju peningkatan derajat pendidikan yang berdaya saing

Visi	Misi	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
		(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
		PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN				
		Implementasi kehidupan masyarakat berbasis pembangunan kebudayaan yang maju dan berkarakter	Peningkatan implementasi kehidupan masyarakat berbasis pembangunan kebudayaan yang maju dan berkarakter	Peningkatan implementasi kehidupan masyarakat berbasis pembangunan kebudayaan yang maju dan berkarakter	Penguatan implementasi kehidupan masyarakat berbasis pembangunan kebudayaan yang maju dan berkarakter mendukung peningkatan perekonomian	Pemantapan implementasi kehidupan masyarakat berbasis pembangunan kebudayaan yang maju dan berkarakter mendukung peningkatan perekonomian
		Implementasi pembangunan pemuda, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan pembangunan pemuda, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkeadilan	Percepatan implementasi pembangunan pemuda, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkeadilan	Penguatan implementasi pembangunan pemuda, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkeadilan	Pemantapan implementasi pembangunan pemuda, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkeadilan
	Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis sektor unggulan dan strategis	Penguatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis sektor unggulan dan strategis	Percepatan penguatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis sektor unggulan dan strategis	Optimalisasi kapasitas kinerja perekonomian melalui sinergitas dan inovatif berbasis pengembangan sektor unggulan dan strategis	Pemantapan kapasitas kinerja perekonomian berbasis pengembangan sektor unggulan dan strategis
	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan	Pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan aksi pembangunan rendah karbon pada aktivitas ekonomi	Penguatan Pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan aksi pembangunan rendah karbon pada aktivitas ekonomi	Percepatan penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan aksi pembangunan rendah karbon pada aktivitas ekonomi	Optimalisasi penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan aksi pembangunan rendah karbon mendukung pembangunan berkelanjutan	Pemantapan penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan aksi pembangunan rendah karbon mendukung pembangunan berkelanjutan
		Peningkatan mitigasi, ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Penguatan pengelolaan mitigasi, ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Percepatan penguatan pengelolaan mitigasi, ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Peningkatan ketahanan daerah melalui penguatan pengelolaan mitigasi, ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Pemantapan ketahanan daerah melalui penguatan pengelolaan mitigasi, ketangguhan dan tanggap bencana daerah

Visi	Misi	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN				
		Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas yang merata dan memadai	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas yang merata dan berkualitas melalui pendekatan kolaborasi	Percepatan peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas yang merata dan berkualitas melalui pendekatan kolaborasi	Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas yang merata dan berkualitas melalui pendekatan kolaborasi	Pemantapan perluasan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas yang merata dan berkualitas melalui pendekatan kolaborasi
	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Mandiri dan Berkeadilan	Penurunan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Penurunan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif yang berkualitas	Percepatan penurunan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif yang berkualitas	Optimalisasi penurunan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif yang berkualitas melalui pendekatan kolaborasi dan inovatif	Optimalisasi pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif yang berkualitas untuk peningkatan kesejahteraan sosial
		Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan peluang usaha tenaga kerja	Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan peluang usaha tenaga kerja	Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan peluang usaha tenaga kerja melalui pendekatan kolaborasi dan inovatif	Perluasan dan peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan peluang usaha tenaga kerja melalui pendekatan kolaborasi dan inovatif	Optimalisasi perluasan dan peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan peluang usaha tenaga kerja melalui pendekatan kolaborasi dan inovatif

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan dirumuskan dalam rangka Pelaksanaan strategi pembangunan, juga sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini disusun berdasarkan misi dan mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat di Kota Serang. Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tema pembangunan per tahun yang saling berkaitan dapat mendukung fokus pembangunan jangka menengah setiap tahunnya. Dalam mewujudkna strategi pembangunan jangka menengah di Kota Serang, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel III.3.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : MENJADIKAN KOTA SERANG MADANI YANG MAJU KOTANYA, BAHAGIA DAN SEJAHTERA WARGANYA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Melayani			
1. Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan inovatif menuju pemerintahan yang profesional dan melayani	1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1.1.1 Pengembangan implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang berdampak	1.1.1.1 Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pemenuhan infrastruktur TIK 1.1.1.2 Penguatan tata kelola persandian untuk keamanan informasi dan komunikasi 1.1.1.3 Penguatan data statistik sektoral dalam pembangunan daerah 1.1.1.4 Pengembangan dan implementasi sistem perencanaan dan pelaporan kinerja secara akuntabel dan transparan 1.1.1.5 Optimalisasi peran riset dan inovasi melalui kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah 1.1.1.6 Peningkatan tata kelola kearsipan secara efektif
		1.1.2 Optimalisasi tata kelola kelembagaan dan manajemen Pemerintah Daerah	1.1.2.1 Penataan kelembagaan pemerintah daerah yang adaptif, tepat fungsi dan sesuai dengan kebutuhan daerah 1.1.2.2 Optimalisasi implementasi, penataan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah
	1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien	1.2.1 Peningkatan akuntabilitas sistem pelayanan publik yang inovatif dan berbasis Informasi Teknologi	1.2.1.1 Peningkatan iklim investasi daerah yang kompetitif 1.2.1.2 Optimalisasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien 1.2.1.3 Penegakan dan fasilitasi penguatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat 1.2.1.4 Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan yang rukun, harmoni dan berdemokrasi 1.2.1.5 Peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	1.3 Meningkatnya tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi	1.3.1 Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi	1.3.1.1 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel melalui pengembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. 1.3.1.2 Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital, pemanfaatan aset daerah, dan kelembagaan BUMD guna meningkatkan pendapatan asli daerah
		1.3.2 Peningkatan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	1.3.2.1 Peningkatan mekanisme dan prosedur pengawasan internal dan eksternal secara akuntabel dan berintegritas
	Sasaran 1.4. Meningkatnya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit	1.4.1. Penerapan dan pengembangan sistem merit pada penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah	1.4.1.1. Penyediaan dan penataan regulasi serta unsur penunjang untuk pengembangan sistem merit 1.4.1.2. Optimalisasi pembinaan kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berintegrasi, inovatif dan adaptif. 1.4.1.3. Penerapan manajemen talenta, sistem penilaian kinerja dan pengembangan karir yang obyektif dan akuntabel
MISI 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Berbudaya, Dan Berdaya Saing			
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing	2.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat untuk semua .	2.1.1.1. Peningkatan layanan, sarana, prasarana, dan tenaga medis di fasilitas kesehatan masyarakat 2.1.1.2. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting secara komprehensif 2.1.1.3. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat 2.1.1.4. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular 2.1.1.5. Penguatan pelayanan kesehatan, ibu, anak, dan lanjut usia 2.1.1.6. Peningkatan kesehatan mental (mental health) masyarakat 2.1.1.7. Penguatan dan pemenuhan jaminan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			dan pembiayaan kesehatan 2.1.1.8. Penguatan kelembagaan badan layanan umum daerah kesehatan
	2.2. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat yang berdaya saing	2.2.1. Pemenuhan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata	2.2.1.1. Optimalisasi fasilitas dan sistem pendidikan dasar, usia dini dan kesetaraan 2.2.1.2. Akselerasi peningkatan capaian wajib belajar 13 tahun yang inklusif 2.2.1.3. Pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas dan berkompetensi 2.2.1.4. Penguatan kurikulum pendidikan berbasis pengembangan talenta dan karakter, sains kreatif serta kewirausahaan berbasis potensi dan keunggulan daerah
		2.2.2. Peningkatan literasi masyarakat	2.2.2.1. Optimalisasi akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi
	2.3. Meningkatnya ketahanan keluarga, kualitas pembangunan pemuda, dan pembangunan gender	2.3.1. Peningkatan perwujudan keluarga yang berkualitas	2.3.1.1. Penguatan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk dan keluarga berencana secara lebih efektif dan berkelanjutan 2.3.1.2. Pembangunan keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
		2.3.2. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	2.3.2.1. Peningkatan daya saing kepemudaan melalui pembinaan wirausaha muda dan organisasi kepemudaan 2.3.2.2. Pembinaan dan pemenuhan sarana dan prasarana olah raga untuk peningkatan prestasi
		2.3.3. Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2.3.3.1. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 2.3.3.2. Optimalisasi pemenuhan akses layanan perlindungan perempuan dan anak
	2.4. Meningkatnya pembangunan kebudayaan yang maju dan berkarakter	2.4.1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat	2.4.1.1. Pengelolaan pelestarian dan implementasi nilai budaya dan tradisi Masyarakat 2.4.1.2. Pelestarian peninggalan sejarah purbakala, benda,

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			situs serta kawasan cagar budaya
Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berdaya saing			
3. Meningkatnya perekonomian daerah yang tumbuh dan berdaya saing berbasis potensi unggulan daerah	3.1. Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing pada sektor unggulan dan strategis	3.1.1. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah yang terintegrasi dalam menghasilkan daya saing di tingkat domestik dan global	3.1.1.1. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang memiliki potensi dan berdaya saing 3.1.1.2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan 3.1.1.3. Peningkatan nilai tambah komoditas perdagangan dan penguatan sistem distribusi produk perdagangan 3.1.1.4. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri dan sektor jasa 3.1.1.5. Penguatan koperasi sebagai lembaga pembiayaan rendah berbasis kerakyatan 3.1.1.6. Penguatan ekonomi daerah melalui optimalisasi BUMD dan penyertaan modal
		3.1.2. Peningkatan perkembangan kewirausahaan dan industri kreatif yang berorientasi pertumbuhan inklusi	3.1.2.1. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang menyeluruh dengan konsep kebudayaan, industri kreatif dan penyelenggaraan *Meetings, Incentives, Conventions, and Exibitions* (*MICE*).
Misi 4. Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkualitas, Merata, Dan Berkelanjutan			
4. Meningkatnya penyediaan layanan dan infrastruktur yang layak, merata dan berkelanjutan	4.1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	4.1.1. Peningkatan Infrastruktur wilayah daya dukung pembangunan berkelanjutan	4.1.1.1. Peningkatan kualitas pengelolaan jalan 4.1.1.2. Peningkatan ketersediaan fasilitas umum dan pelayanan publik 4.1.1.3. Optimalisasi fungsi irigasi, drainase serta penanggulangan genangan air 4.1.1.4. Pemenuhan akses air bersih, air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif 4.1.1.5. Peningkatan kualitas perumahan dan penanganan kawasan kumuh untuk pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan 4.1.1.6. Optimalisasi pengelolaan administrasi pertanahan dalam mendukung pembangunan 4.1.1.7. Optimalisasi pengelolaan tata

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan lahan, serta mitigasi risiko 4.1.1.8. Pembangunan tata kota dengan memperhatikan perencanaan dan pengaturan ruang untuk menciptakan lingkungan yang teratur, nyaman dan berkelanjutan
		4.1.2. Peningkatan akses transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	4.1.2.1. Optimalisasi sarana dan prasarana perhubungan guna pengembangan sistem dan moda layanan transportasi publik 4.1.2.2. Optimalisasi pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
	4.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	4.2.1. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, persampahan dan Ruang Terbuka Hijau	4.2.1.1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 4.2.1.2. Peningkatan akses layanan persampahan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu 4.2.1.3. Peningkatan ketersediaan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		4.2.2. Peningkatan pembangunan rendah karbon	4.2.2.1. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi dalam mendukung penguatan penggunaan energi bersih di sektor industri, pengelolaan limbah dan transportasi
	4.3. Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	4.3.1. Peningkatan mitigasi dan pengelolaan tanggap bencana	4.3.1.1. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana 4.3.1.2. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hibrid berbasis penguatan kemampuan masyarakat, sistem dan infrastruktur dalam menghadapi bencana
Misi 5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Mandiri dan Berkeadilan			
5. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang layak dan berkeadilan	5.1. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat	5.1.1. Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	5.1.1.1. Penguatan dan updating data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			5.1.1.2. Penguatan akses perlindungan dan kualitas bagi penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang komprehensif 5.1.1.3. Perluasan bantuan dan jaminan sosial baik secara langsung maupun melalui PROGRAM pemberdayaan masyarakat
		5.1.2. Penguatan pengendalian inflasi daerah	5.1.2.1. Optimalisasi kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengembangan infrastruktur, logistik dan distribusi barang 5.1.2.2. Penguatan pengawasan dan pemantauan harga khususnya bahan pokok
		5.1.3. Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	5.1.3.1. Pengembangan dan diversifikasi produksi pangan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan 5.1.3.2. Pengamanan dan penguatan cadangan pangan 5.1.3.3. Pengembangan infrastruktur pangan dalam mendukung efisiensi rantai pasok pangan dan distribusi pangan
	5.2. Menurunnya tingkat pengangguran	5.2.1. Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan peluang usaha tenaga kerja	5.2.1.1. Pendidikan dan pelatihan kerja mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja 5.2.1.2. Peningkatan informasi dan penempatan tenaga kerja 5.2.1.3. Optimalisasi hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan

Disamping perumusan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui pendekatan spasial dirumuskan juga arah kebijakan pembangunan kewilayahan sebagai berikut:

Tabel III.4.
Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Antara Provinsi Banten dan Kota Serang Tahun 2025-2029

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
	KOTA SERANG					
1	Kawasan Pertumbuhan : a) Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang; b) Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang	Pembangunan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Sumber Daya Air, dan Hunian Layak	Pengembangan Kota Serang menjadi Ibu Kota Provinsi yang layak menuju Serang Metropolitan Area	Pembangunan Flyover, peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan kewenangan Kota Serang	Program Penyelenggaraan Jalan	Semua Kecamatan
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
				Dukungan Akses dan sarana prasarana BRT dan KRL	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kecamatan
				Penyediaan kantong parkir	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kecamatan Serang, Kec. Cipocok Jaya, Kec. Taktakan
				Normalisasi saluran pembuang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Semua Kecamatan
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
					Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
				Penanganan kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman	Semua Kecamatan
				Pembangunan IPLT Cilowong	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kecamatan Taktakan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
				Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Semua Kecamatan
				Pembangunan SPAM Dalung	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya
				Perluasan Jaringan Perpipaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Semua Kecamatan
				Pembangunan Identitas Kota (*Land Mark*) Alun - Alun Kota Serang	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kecamatan Serang
				Peningkatan kelas RSUD Kota menjadi Tipe B	Program Penataan Bangunan Gedung	Kecamatan Cipocok Jaya
				Penguatan Kelembagaan Riset Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Semua Kecamatan
			Penyelesaian Pembangunan Ruas Jalan Kewenangan Provinsi (Jl Syekh Nawawi Al Bantani, Sempu-Dukuh Kawung, dan Cikeusal-Boru)	Dukungan pengamanan pelaksanaan kegiatan, rekayasa lalu lintas, sosialisasi ke Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Semua Kecamatan
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
				Pembangunan dan peningkatan jalan kota yang beririsan dengan jalan provinsi	Program Penyelenggaraan Jalan	Semua Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan Optimalisasi Kebermanfaatan Jalan Tol Serang-Panimbang (Khususnya Exit Tol Cikeusal)	Pembangunan dan peningkatan jalan kota yang beririsan dengan jalan Serang – Panimbang	Program Penyelenggaraan Jalan	Semua Kecamatan
			Pembangunan Kebinamargaan	Pembangunan Flyover, peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan kewenangan Kota Serang	Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kecamatan
			Dukungan Optimalisasi Kebermanfaatan Jalan Tol Serang-Panimbang (Khususnya Exit Tol Cikeusal)	Pembangunan jalan KPI Walantaka dan peningkatan jalan kota	Program Penyelenggaraan Jalan	Kecamatan Walantaka
			Dukungan Pembangunan Spam Regional Karian Barat Dan Pembangunan Spam Regional Sindangheula	Pembangunan offtaker Cipocok Jaya dan offtaker Sepang (Bendung Sindangheula) dan Pembangunan offtaker Pager Agung untuk Bendung Karian Barat serta pembangunan jaringan pipa dari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kecamatan Cipocok jaya, Kecamatan Serang

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
				offtaker ke sambungan rumah.		
			Pembangunan *Fly Over* Kereta Api Bogeg Syekh Nawawi Al-Bantani	Dukungan pengamanan pelaksanaan kegiatan, rekayasa lalu lintas, sosialisasi ke Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya
			Pembangunan Sistem Angkutan Massal Serang Metropolitan Area (BRT Trans Banten Cilegon-Cikande, Terondol-Kota Serang, Banten Lama-Baros)	Dukungan Akses angkutan pengumpan, dan sarana prasarana BRT. Memfasilitasi BRT di Terminal KPW dan Kepandean. Penyediaan kantong parkir, dan penataan pedestrian	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Penyelenggaraan Jalan	Semua Kecamatan
			Dukungan Pembangunan rumah/hunian murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Cilegon-Serang (PHTC).	Dukungan iklim investasi yang baik bagi developer, ketersediaan lahan sesuai tata ruang	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Semua Kecamatan
				Pembangunan Sanimas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Semua Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan rintisan Kerata Api Tangerang Raya-Serang dan dukungan elektrifikasi jalur Kereta Api Rangkasbitung-Serang-Merak	Dukungan akses transportasi masal ke stasiun kereta	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kecamatan
			Dukungan Pembangunan *Flyover* Sudirman, Kebon Jahe, dan Palima	Pengadaan lahan (Flyover Sudirman), pengamanan, sosialisasi warga	Program Penyelenggaraan Jalan	Kecamatan Serang, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya
				Rekayasa lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
			Dukungan Pembangunan Statsiun Cihideung menuju Terminal Intermoda dan TOD (Transit Oriented Development)	Dukungan akses transportasi dan angkutan pengumpan / *feeder*	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kecamatan
				Penyediaan kantong parkir	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
			Dukungan Pembangunan *Fly over frontage* Kaligandu Unyur dan Sudirman Kota serang	Pengadaan lahan), pengamanan, sosialisasi warga	Program Penyelenggaraan Jalan	Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan Optimalisasi Fungsi dan Konservasi Wilayah Sungai Cidano, Ciujung, Cidurian	Normalisasi saluran pembuang kewenangan Kota Serang, Penataan sempadan sungai. Relokasi warga yang berada di sempadan sungai.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Semua Kecamatan
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
					Program Kawasan Permukiman	
			Dukungan Pembangunan infastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutarma pada DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS Cidurian-Cimanceuri, DAS Cibungur-Ciliman, DAS Cibaliung, DAS Cikadubuluh-Cipuntenageung-Cibama	Pemantauan kualitas air di Sungai Cibanten	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kecamatan Taktakan, Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Kasemen

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan Reformasi pengelolaan Sampah dan sanitasi yang terintegrasi dari Hulu ke Hilir yang berkelajutan, melalui: i) perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan; ii) peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan di TPA/LUR; dan iii) adopsi teknologi pemrosesan sampah dan sanitasi yang berkelanjutan	Pembentukan Bank Sampah, Pembangunan TPS 3R, Pembangunan TPST Cilowong, Penyusunan regulasi pengurangan sampah plastik	Program Pengelolaan Persampahan	Semua Kecamatan
			Dukungan Optimalisasi TPA Cilowong Dan Pembangunan TPST Cilowong –	Penyusunan perencanaan (FS dan DED), dokumen lingkungan, andalalin TPST Cilowong	Program Pengelolaan Persampahan	Semua Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Taktakan Dan Pembangunan IPLT Cilowong – Taktakan Sebagai Potensi Pengembangan Menjadi Tpst Regional Serang-Cilegon	Penyediaan sarana prasarana penunjang TPA (Pengelolaan air lindi, Alat berat, drainase, dan TPT)	Program Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Taktakan
				Pembangunan IPLT	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kecamatan Taktakan
			Dukungan Pembangunan IPLT dan SPAL Regional	Kelembagaan pengelola IPLT	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kecamatan Taktakan
				Penyediaan sarana prasarana penunjang IPLT	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kecamatan Taktakan
			Pembangunan Psu Permukiman, Pos Layanan Desa Sejahtera, Dan Penataan Permukiman Kumuh Terpadu Kewenangan Provinsi	Penanganan kumuh kewenangan Kota Serang	Program Kawasan Permukiman	Semua Kecamatan
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Pembangunan PJU, sarana dan prasarana perhubungan Serta Transportasi Publik Massal Yang Ramah Lingkungan, Nyaman, Mudah Diakses, Aman, Dan Efisien	Pembangunan PJU di Jalan Kota Serang, PJU Perumahan dan PJU jalan lingkungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kecamatan
			Dukungan Penyusunan masterplan penataan kawasan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah secara terpadu	Review RTRW Tahun 2020 - 2040	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Semua Kecamatan
				Siteplan KPW	Program Penataan Bangunan Gedung	Kecamatan Kasemen
				Review RDTR Serang Cipocok	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya
			Pembangunan konektivitas kawasan produktif ekonomi (infrastruktur dan sistem logistik)	Pembangunan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Semua Kecamatan
				Pembangunan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Semua Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan pengembangan kawasan perkotaan Cilegon-Serang	Pembangunan Jalan Perbatasan	Program Penyelenggaraan Jalan	Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Taktakan
				Integrasi penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Semua Kecamatan
				Transportasi terintegrasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Semua Kecamatan
			Dukungan penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, penanganan limbah/sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perkotaan, rumah/hunian layak huni dan ruang terbuka hijau)	Pembangunan SPAM Dalung	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				Perluasan Jaringan Perpipaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Semua Kecamatan
				Pembinaan dan pengelolaan rumah susun	Program Pengembangan Perumahan	Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen
				Pembangunan IPLT	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kecamatan Taktakan
				Penanganan kumuh kewenangan Kota Serang	Program Kawasan Permukiman	Semua Kecamatan
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
				Pengurangan RTLH	Program Kawasan Permukiman	Semua Kecamatan
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
				Revitalisasi dan Pembangunan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Semua Kecamatan
			Dukungan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan daerah	Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase Kewenangan Kota	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Semua Kecamatan
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Dukungan Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada cathment area, terutama pada DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS Cidurian-Cimanceuri, DAS Cibungur-Ciliman, DAS Cibaliung, DAS Cikadubuluh-	Penghijauan, pelaksanaan kampung proklim, pembangunan embung dan kolam retensi. Penataan sempadan sungai. Peningkatan kualitas RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kecamatan Taktakan, Kecamatan kasemen, Kecamatan Curug

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Cipuntenageung-Cibama			
			Pengembangan Kawasan strategis provinsi KP3B dan infrastruktur penunjang lainnya sebagai pusat pemerintahan provinsi yang inklusif berkonsep "*smart green office*"	Pelaksanaan Penghijauan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Semua Kecamatan
		Akses Kesehatan bagi Warga dan Pelayanan Sosial Tanpa Diskriminasi	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Banten (PHTC)	Fasilitasi kemudahan layanan dan rujukan dari FKTP dan RSUD wilayah kota serang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Semua Kecamatan
			Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat	Kota Serang mendukung aksesibilitas Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat di Provinsi Banten		Semua Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan Pemberian Makan Bergizi Untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Dan Balita	1) Validasi data penerima MBG. 2)Pendampingan pelaksanaan MBG. 3)Evaluasi Pelaksanaan MBG. 4)Pemberian PMT Lokal Bagi Ibu Hamil KEK, Ibu Menyusui, dan Balita dengan Masalah Gizi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Semua Kecamatan
			Dukungan Pencapaian UHC	Dukungan Pembiayaan Kesehatan Bagi Peserta PBI	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Semua Kecamatan
			Dukungan Pembangunan Dan Pelaksanaan Sekolah Rakyat	1) Penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. 2) Verifikasi bagi calon siswa sekolah rakyat		Semua Kecamatan
			Dukungan Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan dengan mengupayakan pengoptimalan	1. Verfikasi dan validasi DTSEN secara berkala 2. Peningkatan kapasitas tenaga pendata DTSEN 3. Pemberian bantuan sosial sesuai data terpiih	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Semua Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			pemanfaatan satu sistem Regsosek maupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)			
			Optimalisasi Fungsi Balai Pelayanan Sosial Cipocok	Fasilitasi layanan bagi lanjut usia terlantar dan anak terlantar di Kota Serang ke dalam Panti Rehab Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Semua Kecamatan
			Dukungan optimalisasi fasilitas kesehatan (sarana dan prasarana yang memadai) dan PROGRAM kesehatan yang adil dan merata	Pembangunan dan rehab Pustu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Semua Kecamatan
			Dukungan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Untuk Menangani Kasus Gigi Dan Mulut/Kasus Kesehatan Mental/Kasus Multi-Penyakit Pada Lanjut	1) Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut anak sekolah melalui penjaringan kesehatan, 2) Pemberian flouride untuk mencegah karies gigi pada anak suia 6-12 tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Semua Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Usia/Kasus Ketergantungan Obat Serta Pembudayaan Hidup Sehat			
			Dukungan Peningkatan Kesehatan Dan Gizi Masyarakat, Melalui: I) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Promotif, Preventif, Rehabilitatif, Dan Kuratif; Ii) Penyediaan Sarana-Prasarana Kesehatan Primer Dan Rujukan; Iii) Pemerataan Pelayanan Kesehatan Serta Penuntasan Eliminasi Penyakit Prioritas, Menular, Dan Tropis Terabaikan; Iv) Penurunan Kematian Ibu Dan	Pemberian TTD bagi Remaja Putri di sekolah, Screening Anemia Remaja Putri, Pemberian Tablet Tambah darah pada Ibu hamil Anemia, Pemberian PMT Bagi Ibu Hamil KEK (BOK) , Pemantauan Tumbuh Kembang balita di Posyandu, Pemberian ASI Ekslusif (Meningkatkan Jumlah konselor) , Tatalaksana Balita dengan masalah Gizi pemberian PMT bagi Balita dengan masalah gizi (Balita Tidak Naik selama 14 hari, Balita BB kurang 28 Hari dan Balita Gizi Kurang selama 58 hari) , Rujukan Balita Stunting dan terapi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Semua Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Anak; V) Pencegahan Dan Penurunan Stunting Dan Penuntasan Tbc; Vi) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Gizi Bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, Dan Lansia Serta Kb Dan Kesehatan Reproduksi; Dan Vii) Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	pemberian PKMK, Meningkatkan Cakupan Layanan Imunisasi). 1) Monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelayanan pada Ekohort di Rumah Sakit; 2) Melakukan supervisi fasilitatif pelayanan KIA di Puskesmas; 3) Pendampingan dokter spesialis (SpOG dan SpA) di Puskesmas dalam pelayanan kegawatdaruratan maternal perinatal dan sistem rujukan		

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan Penguatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Dari Kekerasan, Melalui: I) Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas Dari Kekerasan; Dan Ii) Penguatan Tata Kelola Dan Pelembagaan Pug (Pengarusutamaan Gender) Dalam Proses Pembangunan	Kegiatan investigasi Kontak, Kegiatan grebek TBC, Screening Rutan, Lapas dan tempat-tempat khusus, Amprah obat TBC di gudang Farmasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Semua Kecamatan
			Dukungan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terahdap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia secara inklusif dalam proses pembangunan	Penyedian Alat Bantu bagi disabilitas terlantar	Program Rehabilitasi Sosial	Semua Kecamatan
				Memberikan bantuan sosial berupa permakanan bagi disabilitas terlantar	Program Rehabilitasi Sosial	Semua Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
		Sekolah Gratis Untuk SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Provinsi Banten	Pelaksanaan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Menengah Dan Khusus Ditunjang Dengan Tenaga Pendidik Yang Berkompeten Sesuai Keahlian	Memuat sasaran yang mendukung kebijakan provinsi, seperti peningkatan angka partisipasi murni (APM), penurunan angka putus sekolah, dan peningkatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.	Program Pengelolaan Pendidikan	Semua Kecamatan
						Semua Kecamatan
			Dukungan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah Dan 12 Tahun Pendidikan Dasar Dan Menengah) Melalui: I) Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud); Ii) Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Sekolah Dan Madrasah Yang Berkualitas; Iii) Penyaluran	1. Memperluas jumlah satuan PAUD, memfasilitasi pendirian PAUD berbasis masyarakat, dan melakukan sosialisasi pentingnya PAUD. 2.Melakukan inventarisasi kebutuhan, mengusulkan prioritas perbaikan, serta memelihara sarana yang ada. 3 Mengidentifikasi dan memverifikasi data siswa penerima bantuan pada jenjang		Semua Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Bantuan Pendidikan Yang Tepat Sasaran; Iv) Pencegahan Dan Penanganan Anak Tidak Sekolah; V) Revitalisasi Pendidikan Nonformal; Vi) Penguatan Pengelolaan Dan Akselerasi Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berkualitas; Vii) Modernisasi Dan Akselerasi Stem (Science, Technology, Engineering, And Mathematics)	SD/SMP. 4.Melakukan pendataan dan intervensi langsung terhadap ATS di tingkat SD/SMP, serta memfasilitasi kembali ke sekolah. 5.Menyelenggarakan PROGRAM keaksaraan, kesetaraan, dan keterampilan di PKBM dan SKB tingkat dasar 6.Menjamin ketersediaan guru SD/SMP sesuai rasio ideal, meningkatkan kompetensi melalui KKG/MGMP. 7.menyediakan laboratorium dan pelatihan dasar guru.		
				Pengembangan lembaga untuk menjadi PAUD HI	Program Pengelolaan Pendidikan	Semua Kecamatan
			Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA, SMK dan Pendidikan khusus (untuk	Memberikan dukungan lingkungan dan fasilitasi promosi sekolah kepada masyarakat setempat.		Semua Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Anak Berkebutuhan Khusus) dengan memperhatikan Kondisi Wilayah			
			Dukungan Pemberian Makan Bergizi Di Sekolah, Madrasah, Dan Dayah/Pesantren, Serta Pemberian Makan Bergizi Untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Dan Balita	Menjadi anggota tim untuk pendataan sekolah yang belum MBG		Semua Kecamatan
			Dukungan percepatan transformasi digital, melalui: i) penyederhanaan proses bisnis; ii) perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; iii) pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; iv) perluasan layanan penyiaran digital;	Penguatan infrastruktur TIK	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Semua Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			dan v) layanan digital terpadu, terpersonalisasi dan berfokus pada user centric			
			Dukungan penguatan pendidikan, pelatihan vokasi, penyediaan, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja maupun layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pembangunan/pengembangan/ peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan wilayah	Memberikan pelatihan kepada pencari kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Semua Kecamatan
		Zona Ekonomi Baru, Penguatan UMKM, Dan	Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan, Ekonomi Kreatif, dan UKM dengan	Memberikan layanan kompehensif dan terpadu kepada UMKM termasuk pendampingan,pelatih	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Semua Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
		Pemerataan Ekonomi	optimlalisasi fungsi Prasarana dan Sarana PLUT	an, dan berbagai fasilitas lainnya.		
			Dukungan Optimalisasi Koperasi Merah Putih	1) Pembentukan regulasi. 2)Pendampingan dan pembinaan dalam Pengembangan usaha. 3) melakukan Monitoring dan evaluasi kinerja koperasi.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Semua Kecamatan
			Dukungan pengembangan UMKM terhadap akses pasar, perbankan, peningkatan kompetensi dan kualitas produk usaha sesuai unggulan wilayah, pendampingan terhadap inovasi produk dan layanan, menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan wirausaha	1). Bantuan Permodalan untuk pelaku usaha (melalui imbal jasa penjaminan) 2). Pameran Ina Craft 3). Bantuan Alat 4). Pelatihan Digital Marketing untuk Pelaku usaha 3). Pameran BCF Banten Creative Festival	Program Pengembangan Umkm	Kecamatan Serang

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan pembangunan/revitalisasi sentra Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas	Pelaksanaan Festival IKM (Tahunan) di Sentra IKM	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Kecamatan Kasemen
		Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dukungan Pengembangan Dan Peningkatan Event, Infrastruktur, Dan Sistem Informasi Destinasi Wisata Berbasis Mice (Meetings, Incentives, Conventions, And Exhibitions)	Penyusunan perencanaan (FS dan DED), dokumen lingkungan, andalalin, Pengadaan lahan, Pembangunan Serang Convention Center (SCC)	Program Penataan Bangunan Gedung	Kecamatan Curug
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Banten, melalui: i) desa budaya; ii) pelindungan, pelestarian, dan revitalisasi warisan budaya; iii) pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan (cagar budaya, permuseuman, dan pusat kebudayaan lainnya); dan iv) jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, sertifikasi kompetensi pelaku budaya dan pemberdayaan masyarakat hukum adat	Pengembangan dan Penetapan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Semua Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan pengembangan pariwisata yang terintegrasi, berkualitas, berbasis masyarakat lokal dan berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan POKDARWIS (kelompok sadar wisata)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Semua Kecamatan
			Pengembangan Pariwisata Berupa Event Tourism Internasional, Wisata Alam, Wisata Sejarah/Budaya, Wisata Religi, Wisata Buatan Dan Event Lainnya Yang Akan Diintervensi Lintas Sektoral	Penyelenggaraan Calendar of Event di Kota Serang seperti Festival Kaibon, Festival Pesisir	Program Pemasaran Pariwisata	Kecamatan Kasemen, Kecamatan Serang
			Dukungan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Ekonomi Syariah, Ekonomi Biru, Ekonomi Hijau, Maupun	Pelatihan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Semua Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Ekosistem Ekonomi Lainnya			
			Dukungan Pengembangan Infrastruktur Dan Sistem Informasi Wisata Memanfaatkan Percepatan Transformasi Digital, Melalui: I) Perluasan Infrastruktur Digital; Dan Ii) Peningkatan Kapasitas Sdm Digital Dan Literasi Digital	Perluasan infrastruktur TIK meliputi Wi-Fi publik, dan fasilitas jaringan fiber-optik di destinasi wisata prioritas.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Semua Kecamatan
				Membangun Portal informasi wisata terintegrasi yang menyajikan informasi dan atraksi wisata, transportasi, akomodasi, dan agenda budaya secara real-time	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Semua Kecamatan
				Membangun kolaborasi literasi digital berbasis komunitas yang melibatkan influencer, content kreator daerah dan komunitas digital	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Semua Kecamatan
				Membangun kolaborasi literasi digital berbasis komunitas yang melibatkan influencer, content kreator daerah dan komunitas digital	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Semua Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
				Publikasikan destinasi wisata melalui media nasional, daerah dan online	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Semua Kecamatan
				Publikasikan destinasi wisata melalui media nasional, daerah dan online	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Semua Kecamatan
				Kebijakan dan Regulasi Pendukung keamanan sistem informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Semua Kecamatan
				Kebijakan dan Regulasi Pendukung keamanan sistem informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Semua Kecamatan
			Dukungan Pengembangan Atraksi Wisata Dan Peningkatan 6a Kpw Banten Lama Sebagai Kawasan Wisata Religi, Optimalisasi Baitul Quran, Dan Museum Banten	Peningkatan kualitas RTH KPW	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kecamatan Kasemen
				Penyusunan Dokumen perencanaan KPW	Program Penataan Bangunan Gedung	Kecamatan Kasemen
				Pengadaan lahan jalan dan Pembangunan Jalan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kecamatan Kasemen
				Pembangunan Drainase	Program Penyelenggaraan Jalan	Kecamatan Kasemen
				Pembangunan Pos Jaga	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Kecamatan Kasemen

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
				Pembangunan panggung pertunjukan / Amphitheatre	Program Penataan Bangunan Gedung	Kecamatan Kasemen
				Pembangunan pintu keluar ke Benteng Surosoan dan speelwijk	Program Penataan Bangunan Gedung	Kecamatan Kasemen
				Pembangunan gedung miniatur surosoan	Program Penataan Bangunan Gedung	Kecamatan Kasemen
				Rehabilitasi Toilet	Program Penataan Bangunan Gedung	Kecamatan Kasemen
				Rehabilitasi mushola	Program Penataan Bangunan Gedung	Kecamatan Kasemen
				Penyediaan sarpras persampahan	Program Penataan Bangunan Gedung	Kecamatan Kasemen
				Rehabilitasi Kios	Program Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Kasemen
				Pembangunan Parkir	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kecamatan Kasemen
				Pembangunan shuttle halte	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kecamatan Kasemen
				Pembangunan PJU	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kecamatan Kasemen

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
				Revitalisasi TIC	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kecamatan Kasemen
				Angkutan pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kecamatan Kasemen
		Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan	Dukungan Optimalisasi Kawasan Agriculture Serang Utara (Kasemen-Sawah Luhur)	1) Mempertahankan Tata ruang peruntukan LP2B. 2) Pemanfaatan teknologi Pertanian. 3) Pembangunan Sarana dan prasarana pertanian. 4) Mendukung kegiatan Sekolah Lapang. 5) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kecamatan Kasemen
			Peningkatan Fungsi Kawasan Sitandu sebagai show room percontohan pengelolaan pertanian	peningkatan Kapasitas petani dalam meningkatkan hasil pertanian melalui inovasi dan teknologi modern	Program Penyuluhan Pertanian	Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka
			Dukungan intervensi PROGRAM Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan	Pemberian makanan menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)	Program Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Seluruh Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Rawan Pangan (PHTC)			
			Dukungan peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan yang berkelanjutan	Penghijauan, pelaksanaan kampung proklim, pembangunan embung dan kolam retensi. Penataan sempadan sungai. Peningkatan kualitas RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Seluruh Kecamatan
			Dukungan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sesuai krakteristik dan potensi daerah guna mendukung kemandirian pangan (Seperti Pangan Akuatik/Blue Food, Dsb)	1) Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal; 2) Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal; 3) Pemberian Paket Pangan B2SA; 4) Gerakan Menanam melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Seluruh Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, melalui: i) kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; ii) reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; iii) optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan iv) peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/ pakan organik	bantuan saprodi, ALSINTAN, mempermudah akses pupuk subsidi di lahan LP2B	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka
			Penguatan kawasan agrikultur pangan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan daerah dengan pendekatan terpadu FEW	1) Pembangunan/pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi di kawasan agrikultur 2) Bantuan Benih/bibit Padi dan Hortikultura di kawasan agrikultur pangan berkelanjutan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Seluruh Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Nexus (food, energy, water)			
			Dukungan pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian	Bantuan Sarpras laboratorium riset pertanian, Pendampingan Teknis dalam Penyiapan Varietas Unggul Baru	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka
			Dukungan pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perikanan, pertanian tanaman pangan, dan pertanian hortikultura	Pengadaan Indukan Ikan, pakan ikan dan obat-obatan budidaya perikanan	Program Pengeolaan Perikanan Budidaya	Seluruh Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Peningkatan Manajemen Usaha Tani, Perluasan Akses Pasar Dan Pembiayaan Usaha Tani, Perluasan Akses Asuransi Pertanian Dan Perikanan, Serta Pengendalian Kepastian Pasar, Melalui: I) Peningkatan Literasi Keuangan Petani Dan Penguatan Manajeman Poktan/Gapoktan; Ii) Penguatan Kelembagaan Koperasi Dan Korporasi Petani; Iii) Pembiayaan Dana Bergulir Dan Kredit Lunak Petani; Iv) Perluasan Akses Asuransi Usaha Tani; V) Peningkatan	Peningkatan kelembagaan ekonomi petani dan bimtek petani milenial	Program Penyuluhan Pertanian	Seluruh Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Infrastruktur Logistik Dan Perluasan Akses Layanan Sistem Resi Gudang; Vi) Pengelolaan Dan Pengendalian Penyerapan Hasil Panen Komoditas Pangan Utama			
			Dukungan Peningkatan Produktivitas Peternakan/Pangan Hewani (Termasuk Pengembangan Kawasan Peternakan, Pengembangan Serta Peningkatan Produktivitas Hortikultura Dan Peningkatan Produktivitas Perikanan (Tangkap Dan Budidaya)	a.) Dukungan Peningkatan Produktivitas Hortikultura yaitu fasilitasi sarana produksi demplot bawang merah dan cabai b.) Dukungan Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap yaitu penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan seperti alat penangkapan ikan c.) Dukungan Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya	A.) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian B.) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap C.) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Seluruh Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
				yaitu fasilitasi Sertifikat CBIB dan CPIB untuk penjaminan hasil budidaya ikan		
			Dukungan Peningkatan Daya Guna Lahan Pertanian Dan Produktivitas Melalui Intensifikasi Dan Peningkatan Prasarana Produksi, Melalui: I) Penyediaan Dan Perluasan Akses Alsintan Modern/Benih Dan Bibit Berkualitas/Pupuk Dan Pestisida Berkualitas; Ii) Mitigasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Dan Kesehatan Hewan; Iii) Peningkatan Infrastruktur	Fasilitasi Sarana Produksi Demplot Bawang Merah, Demplot Cabai, Demplot Padi, Penyediaan Bibit hortikultura, Penyediaan Pestisida, Pelatihan Perbengkelan Alsintan, Gerakan Pengendalian OPT	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Seluruh Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Konektivitas Transportasi Dan Digital Bagi Petani; Dan Iv) Peningkatan Kualitas Pascapanen Melalui Peningkatan Prasarana Pascapanen			
		Investasi, Kemudahan Industri Dan Penyerapan Tenaga Kerja	Optimalisasi Fungsi Badan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri, dan Badan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Bahan	1)Pemanfaatan teknologi industri untuk pengembangan produksi. 2)Fasilitasi pendampingan dan konsultasi industri. 3)Fasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Seluruh Kecamatan
				Fasilitasi packaging PIRT, BPOM dan sertifikasi ketetapan halal bagi industri kecil dan menengah di Kota Serang	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
				Fasilitasi packaging PIRT, BPOM dan sertifikasi ketetapan halal bagi industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
				kecil dan menengah di Kota Serang		
			Dukungan kemudahan izin usaha dalam mendorong penyediaan lapangan kerja dengan padat karya, akses dukungan permodalan bagi tuna karya serta pengutamaan tenaga kerja lokal	Optimalisasi layanan MPP, Fasilitasi pelayanan dan kemudahan perizinan berusaha ke Kecamatan di Kota Serang meliputi: 1) Penerbitan perizinan berusaha; 2) Layanan konsultasi persyaratan dasar dan perizinan berusaha; 3) Informasi peta potensi dan peluang usaha,Informasi pengadaan lahan untuk kegiatan usaha yang sesuai dengan rencana tata ruang; 4) Klinik OSS: 5)Klinik LKPM; 6) Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha.	Program Pelayanan Penanaman Modal; 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Seluruh Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan pengelolaan kawasan industri berbasis padat karya berprinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) dan penyediaan infrastruktur ramah lingkungan, mencakup: transportasi hijau, energi terbarukan, pengelolaan air dan limbah, serta adopsi teknologi ramah lingkungan dan ekonomi sirkular	1)Mewujudkan Serang Bersih dengan Pembentukan 1000 Bank sampah; 2) Melaksanakan PROGRAM Sekolah Adiwiyata; 3) Sosialisasi/ BIMTEK dalam mencapai Pengurangan Sampah di Hulu (Rumah Tangga); 4) Melakukan Upaya Penanganan Sampah dengan Teknologi Terbarukan yang Ramah Lingkungan di Hilir; 5) Melakukan Upaya Pendampingan dan Pembinaan kepada Kelompok masyarakat Penggiat Lingkungan (Bank Sampah, TPS 3R, PROKLIM (PROGRAM kampung Iklim)	1)Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 2)Program Pengelolaan Persampahan; 3)Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Seluruh Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, graphene, surfaktan, kelapa, perikanan tangkap dan produk unggulan sesuai karakteristik wilayah lainnya	1. Penyediaan sarana penangkapan ikan (Alat penangkapan ikan, Sarana pendukung penangkapan ikan) 2. Bimbingan Teknis Pengolahan Ikan Asin, Baso ikan, otak-otak, Kerupuk ikan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Seluruh Kecamatan
			Dukungan pembangunan dan pengembangan industri halal/industri hijau/ industri biru khususnya pada industri unggulan, potensial, dan berorientasi ekspor sesuai potensi daerah yang ditetapkan oleh RTRW daerah	1. Fasilitasi Sertifikasi Ketetapan Halal Reguler bagi IKM di Kota Serang 2. Pemanfaatan limbah industri menjadi produk yang memiliki nilai tambah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Seluruh Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan pengembangan koridor industri Cilegon-Serang-Tangerang (sektor industri prioritas: industri kimia, industri makanan dan minuman, industri logam, besi, dan baja)	Koridor Industri Serang dalam penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kecamatan Walantaka, Kecamatan Kasemen
		Tata Kelola Pemerintahan tidak korupsi dan Sistem Merit Dalam Birokrasi	Optimalisasi Fungsi Pemerintahan, Ekonomi, Edukasi, dan Ekologi KP3B	1. mendukung pembangunan KP3B; 2.merencanakan tata ruang pada kawasan sekitar pusat pemerintahan; 3. mendukung pengembangan jaringan jalan yang menuju KP3B; dan 4. mengantisipasi pertumbuhan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali.	Program Penyelenggaraan Jalan	Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Sinergi Peningkatan Pendapatan Daerah	1) Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah. 2) Pemanfaatan teknologi informasi. 3)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Seluruh Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
				Memperluas jaringan pembayaran. 4)Pemutakhiran data Wajib Pajak.		
			Pembentukan Unit Layanan Berpredikat Zona Integritas	Pembentukan Sekretariat Zona Integritas	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Seluruh Kecamatan
			Dukungan transformasi, efisiensi reformasi birokrasi dan perkuatan reformasi hukum, melalui : i) pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); ii) penanggulangan judi dan penyelundupan; dan iii) pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	1)Penguatan sistem informasi pengawasan; 2)Percepatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi; 3) Meningkatkan fungsi Inspektorat sebagai Quality Assurance dan Consulting bagi Perangkat Daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Seluruh Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan pengembangan dan tranformasi pemerintahan digital, melalui: i) penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahandigital; ii) pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN; iii) digitalisasi layanan publik prioritas; dan iv) pengembangan ekosistem layanan publik digital	Penguatan infrastruktur TIK	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Seluruh Kecamatan
		Lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan serta resiliensi terhadap bencana	Dukungan peningkatan ketahanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kelurahan Tangguh Bencana, Tim Reaksi Cepat	Program Penanggulangan Bencana	Seluruh Kecamatan
				Kelurahan Tangguh Bencana, Tim Reaksi Cepat	Program Penanggulangan Bencana	
				Kelurahan Tangguh Bencana, Tim Reaksi Cepat	Program Penanggulangan Bencana	

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Dan Danau Melalui Pengurangan Beban Pencemar Dari Sumber Domestik, Industri, Peternakan, Pertanian Dan Hal Lainnya Sebagai Upaya Mengembalikan Mutu Air	Pengendalian dan Penanganan Pencemaran	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Seluruh Kecamatan
			Resiliensi bencana dan adaptasi perubahan iklim guna mendukung ketahanan daerah melalui proses pendidikan dan penyadaran sejak dini	Kelurahan Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Seluruh Kecamatan
			Dukungan Nature-Based Solution dan Gray	Tanggul Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Seluruh Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Infrastructure untuk mitigasi	Pembangunan TPT	Program Pengelolaan Persampahan	
				Pembangunan TPT	Program Penyelenggaraan Jalan	
				Kolam Retensi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				Pembangunan Embung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
			Dukungan percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: i) pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan; ii) penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi; iii) adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas	Smart PJU	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Seluruh Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			pasokan listrik; iv) penerapan Internet Of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-time; dan v) perluasan penggunaan kendaraan listrik			
			Dukungan perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi	Peningkatan Kualitas RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Seluruh Kecamatan
			Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung Bioekonomi	Peningkatan Kualitas RTH	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Seluruh Kecamatan
				Pembangunan Embung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Seluruh Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			Dukungan peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Seluruh Kecamatan
			Dukungan penguatan pengelolaan hutan lestari (hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan kota, dan hutan mangrove sesuai kondisi daerah)	Pemeliharaan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Seluruh Kecamatan
				Penghijauan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
			Dukungan peningkatan fungsi sosial kawasan hutan (hutan lindung, hutan produksi,	Pemeliharaan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Seluruh Kecamatan

NO	RPJMD PROVISI BANTEN TAHUN 2025-2029			RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029	PROGRAM	LOKUS
	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN (ARAH PER KAB/KOTA)					
	LOKASI PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI		
			hutan produksi terbatas, hutan kota, dan hutan mangrove sesuai kondisi daerah)	Penghijauan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Seluruh Kecamatan
			Dukungan perlindungan dan pengamanan hutan (hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan kota, dan hutan mangrove sesuai kondisi daerah)	Pemeliharaan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Seluruh Kecamatan
				Penghijauan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Seluruh Kecamatan

Tabel III.5.
Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan RTRW Kota Serang Tahun 2025-2029

PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	KECAMATAN
Perwujudan Pola Ruang Rencana Tata Ruang	Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung	Percepatan rehabilitasi kawasan lindung yang telah mengalami penurunan kualitas tegakan serta degradasi lahannya	Seluruh Kecamatan
		penambahan kawasan lindung baru yang termasuk dalam kawasan perlindungan bawahan	Seluruh Kecamatan
		pengendalian jenis tegakan untuk kawasan dengan fungsi perlindungan bawahan disesuaikan dengan karakter tanah dan analisa potensi ekonomi di masing-masing wilayah	Seluruh Kecamatan
	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	kawasan resapan air	Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Curug, serta seluruh wilayah Kecamatan
		rehabilitasi kawasan resapan air yang telah mengalami degradasi dengan penghijauan	Seluruh Kecamatan
		pengembangan resapan air untuk fungsi hutan	Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Cipocok Jaya
		pengembangan rimba kota yang terintegrasi dengan pertanian perkotaan	Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya. Kecamatan Taktakan
	Sempadan Pantai	melestarikan hutan mangrove maupun non mangrove sebagai pembentuk ekosistem dan berkembangbiak nya berbagai biota laut	Kecamatan Kasemen
		mengembangkan sempadan pantai RTH dan/atau RTNH lainnya yang beracuan pada perairan	Kecamatan Kasemen
		Membangun tanggul pantai	Kecamatan Kasemen
	Sempadan Sungai	Sungai menjadi muka dari orientasi bangunan	Seluruh Kecamatan
		Penataan dan perbaikan lingkungan kawasan sempadan sungai yang telah terbangun secara tidak tertata	Seluruh Kecamatan
		Peningkatan nilai ruang visual kawasan sempadan sungai sesuai dengan struktur ruang kota	Seluruh Kecamatan
		Penetapan dan pengoptimalan kawasan sempadan sungai sebagai RTH dan RTNH	Seluruh Kecamatan
	Kawasan Rawan Bencana	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana	Seluruh Kecamatan
	Kawasan Cagar Budaya	Pelestarian Gedung dan/atau lingkungan Cagar Budaya	Seluruh Kecamatan
		Pengembangan kawasan cagar budaya untuk pariwisata dan ilmu pengetahuan	Kecamatan Kasemen

PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	KECAMATAN
	RTH Kota	Pengembangan RTH taman dan rimba Kota di seluruh kecamatan	Seluruh Kecamatan
	Kawasan tanaman pangan	Pengembangan hutan produksi tetap	Kecamatan Taktakan
	Kawasan Pertanian	Pengembangan sawah irigasi teknis	Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka
		Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka
		Pengembangan kawasan lahan pertanian terpadu	Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka
	Kawasan Peruntukkan Industri	Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri	Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka
		Pengembangan sentra industri kecil menengah	Semua Kecamatan
		Perwujudan industri kecil dan menengah	Semua Kecamatan
		Buffering zone kawasan industi yang berbatasan dengan kawasan permukiman	Semua Kecamatan
		Pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan industri	Semua Kecamatan
	Kawasan Pariwisata	Perwujudan kawasan desa pariwisata	Semua Kecamatan
		Pengembangan kawasan pariwisata religi	Kecamatan Kasemen
		pengembangan kawasan pariwisata alam	Semua Kecamatan
		Pelestarian gedung sejarah	Semua Kecamatan
		Promosi kegiatan pariwisata	Semua Kecamatan
		Pengembangan sarana wisata dalam kota (Wisata anak dan Wisata kuliner)	Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya
	Kawasan Perumahan	Perwujudan kawasan perumahan berkelanjutan	Semua Kecamatan
		Pengembangan cluster perumahan	Semua Kecamatan
		Pengembangan kawasan perumahan vertical	Semua Kecamatan
		Pembangunan dan pengembangan perumahan berbasis komunitas dan partisipatif	Semua Kecamatan
		Peningkatan kualitas permukiman kumuh	Semua Kecamatan

PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI	KECAMATAN
	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pengembangan Pusat Perdagangan Regional	Kecamatan Serang dan Kecamatan Walantaka
		Pengembangan Pusat Perdagangan Kota	Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya
		Pengembangan Pusat Perdagangan lainnya	Semua Kecamatan
		Pengembangan kawasan perdagangan modern	Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug
	Kawasan Perkantoran	Pengembangan dan penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Kota	Kecamatan Cipocok Jaya
		Pengembangan dan penataan Perkantoran bersifat jasa, perdagangan, sosial, dan sebagainya	Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya
		Pengembangan dan penataan KP3B	Kecamatan Curug
		kawasan fungsi campuran	Kecamatan Cipocok Jaya
		kawasan perkantoran yang bercampur dengan kawasan perdagangan, jasa dan fasilitas umum dan sosial	Semua Kecamatan
	Kawasan Pendidikan	Perwujudan Kawasan Pendidikan	Semua Kecamatan
	Kawasan Transportasi	Pengembangan kawasan transportasi pelabuhan	Kecamatan Kasemen
	Perwujudan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Perwujudan RTNH	Seluruh Kecamatan
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Pengembangan Kawasan Markas Kopassus Grup I	Kecamatan Taktakan
		Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan lainnya	Seluruh Kecamatan

3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program dalam mencapai strategi pembangunan jangka menengah daerah merupakan rangkaian langkah konkret yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Program-program ini disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada berbagai sektor prioritas seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data guna memastikan efektivitas pelaksanaannya serta dampak yang maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memperkuat daya saing Kota Serang.

Tabel III.6.
PROGRAM PRIORITAS RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2024-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
20252029 - Menjadikan Kota Serang Madani yang Maju Kotanya, Bahagia dan Sejahtera Warganya - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani - Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing - Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing - Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan - Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Mandiri dan Berkeadilan	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan inovatif menuju pemerintahan yang profesional dan melayani			Indeks Reformasi Birokrasi(Angka)		
		Meningkatnya Aparatur Negara yang Kompeten dan Berkinerja Tinggi Berdasarkan Sistem Merit		Indeks Sistem Merit (Angka)		
			Meningkatkan Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar,Kader,Manajerial, dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Meningkatnya akuntabiitas kinerja pemerintahan daerah		Nilai SAKIP (Angka)		
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Angka)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya keselarasan,konsistensi, dan hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Rata-Rata Tingkat Capaian Evaluasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Riset dalam penyelesaian permasalahan daerah (%)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Persentase Inovasi yang dimanfaatkan (%)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien		Indeks Pelayanan Publik (Angka)		
			Meningkatnya Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perijinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya Kualitas Bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Penerapan Indentitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya Layanan Digitalisasi Investasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Online Terintegrasi	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Pemenuhan Capaian Kebutuhan Dasar SPM Sub Urusan Trantibum (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
		Meningkatnya tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Angka)		
				Indeks Integritas Nasional (Angka)		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Tingkat pertumbuhan transaksi penerimaan pajak daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase BLUD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Tingkat pengelolaan barang milik daerah (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya tata Kelola Penganggaran	Tingkat kesesuaian dokumen penganggaran terhadap dokumen perencanaan Pembangunan (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase ketepatan waktu penganggaran (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia(Angka)		
		Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kualitas Pembangunan Pemuda dan Pembangunan Gender		Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)		
				Indeks Pembangunan Gender (Angka)		
				Indeks pembangunan kualitas keluarga (Angka)		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya Kualitas Bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan (Angka)		
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum	Presentase Peningkatan Akses Air Minum Aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Presentase Peningkatan Akses Air Minum Layak (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan sanitasi	Presentase Peningkatan Akses Sanitasi Layak (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Presentase Peningkatan Akses Sanitasi Aman (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya Capaian Penanganan Sampah	Persentase Penanganan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Meningkatnya Distribusi Bantuan Jaminan Sosial Yang Tepat Sasaran	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Angka)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Angka)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya keselarasan, konsistensi, dan hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-Rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan Renstra PD dengan Renja PD pada mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Insidensi Tuberkulosis (Kasus)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Penerapan Indentitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya Rehabilitasi Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangkat mewujudkan tempat tinggal yang layak huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat yang berdaya saing		Indeks Pendidikan (Angka)		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesra	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Angka)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik serta Tenaga Kependidikan	Rasio Murid Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Meningkatnya pembangunan kebudayaan yang maju dan berkarakter		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)		
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya Kualitas Bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Cakupan Kelompok Budaya yang Dibina (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan yang Memadai (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
	Meningkatnya perekonomian daerah yang tumbuh dan berdaya saing berbasis potensi unggulan daerah			Indeks Akses Keuangan Daerah(Angka)		
				Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		
		Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing pada sektor unggulan dan strategis		PDRB per Kapita (Rp. Juta Per Tahun)		
				Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		
				Kontribusi PDRB Kota Serang terhadap Provinsi Banten (%) (%)		
			Meningkatkan Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar,Kader,Manajerial, dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan Jalan Kondisi Baik (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum	Presentase Peningkatan Akses Air Minum Aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Presentase Peningkatan Akses Air Minum Layak (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya Capaian Penanganan Sampah	Persentase Penanganan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Angka)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Kapasitas SMD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kemudahan Berinvestasi	Persentase peningkatan investor yang baru menanamkan modal (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya keselarasan, konsistensi, dan hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Persentase Keselarasan Renstra PD dengan Renja PD pada mitra Bidang Perekenomian dan Sumber Daya Alam (SDA) (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Rata-Rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekenomian dan Sumber Daya Alam (SDA) (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Dengan Lingkungan Hunian Yang Nyaman dan Sehat	Persentase PSU PErumahan yang Layak (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Insidensi Tuberkulosis (Kasus)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Tingkat pertumbuhan transaksi penerimaan pajak daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesra	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			MENINGKATNYA KUALITAS PERIJINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN	Persentase izin usaha Industri yang Diterbitkan (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya Optimalisasi Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai SOP/SP/Ketentuan	Presentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai SOP/SP/Ketentuan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan Kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan pelimpahan kewenangan	Presentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai SOP/SP/Ketentuan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Cakupan Kelompok Budaya yang Dibina (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan yang Memadai (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Upaya Eksenstifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah I	Tingkat Pertumbuhan PPD I (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Upaya Eksentifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah II	Tingkat Pertumbuhan PPD II (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
	Meningkatnya penyediaan layanan dan infrastruktur yang layak, merata, dan berkelanjutan			Penurunan intensitas emisi GRK((%))		
				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)(Angka)		
		Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah		Indeks Risiko Bencana (Angka)		
			Meningkatnya keselarasan, konsistensi, dan hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-Rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Keselarasan Renstra PD dengan Renja PD pada mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Korban Bencana yang Tertangani Dengan Bantuan Sosial	Persentase Korban bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Insidensi Tuberkulosis (Kasus)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Pemenuhan Capaian Kebutuhan Dasar SPM Sub Urusan Trantibum (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah		Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah (%)		
			Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan Jalan Kondisi Baik (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan sanitasi	Presentase Peningkatan Akses Sanitasi Layak (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Presentase Peningkatan Akses Sanitasi Aman (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya Capaian Penanganan Sampah	Persentase Penanganan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Meningkatnya keselarasan, konsistensi, dan hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-Rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan Renstra PD dengan Renja PD pada mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya ketertiban angkutan umum	Persentase Angkutan Umum yang Tertib (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya Kualitas Bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Dengan Lingkungan Hunian Yang Nyaman dan Sehat	Persentase PSU PErumahan yang Layak (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Di Kawasan Permukiman (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Presentase Luas Kawasan Permukiman yang Tertangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Drainase (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong (%)	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota (%)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Presentase Irigasi Dalam Kondisi baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangkat mewujudkan tempat tinggal yang layak huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak atas Tanah	Persentase Ketersediaan Dokumen Penatagunaan Tanah (%)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Angka)		
			Meningkatnya Capaian Penanganan Sampah	Persentase Penanganan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Meningkatnya capaian pengaduan lingkungan hidup kewenangan kota yang tertangani	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Capaian Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan/Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pmerintah Daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya keselarasan, konsistensi, dan hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-Rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan Renstra PD dengan Renja PD pada mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan Hidup	Capaian Dokumen Kajian Di Lingkungan Hidup yang Di Susun (%)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Pemantauan Pengendalian limbah B3	Persentase Capaian Pengendalian Limbah B3 (%)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya Pengendalian terhadap Hasil Pemantauan Air dan Udara	Capaian Pengendalian Pencemaran Lingkungan (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang layak dan berkeadilan			Tingkat Kemiskinan((%))		
				Indeks kesejahteraan Sosial(%)		
		Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kedalaman Kemiskinan (Angka)		
				Rasio Gini (Angka)		
			Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan Jalan Kondisi Baik (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum	Presentase Peningkatan Akses Air Minum Aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Presentase Peningkatan Akses Air Minum Layak (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan sanitasi	Presentase Peningkatan Akses Sanitasi Layak (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Presentase Peningkatan Akses Sanitasi Aman (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya Distribusi Bantuan Jaminan Sosial Yang Tepat Sasaran	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Angka)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani	Persentase Kelembagaan Petani yang Ditingkatkan (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya keselarasan,konsistensi, dan hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Rata-Rata Tingkat Capaian Evaluasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya Korban Bencana yang Tertangani Dengan Bantuan Sosial	Persentase Korban bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Dengan Lingkungan Hunian Yang Nyaman dan Sehat	Persentase PSU PErumahan yang Layak (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Di Kawasan Permukiman (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Presentase Luas Kawasan Permukiman yang Tertangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Insidensi Tuberkulosis (Kasus)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya kualitas pembangunan Kawasan transmigrasi	Capaian Transmigran Yang Ditempatkan (%)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Persentase Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tersedia (%)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Rumah yang Diperbaiki Akibat Bencana (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Cakupan Hunian Terhadap Daya Tampung Rusunawa (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra-NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Unit Usaha)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Peternakan (Kg)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan SIAK	Cakupan Penyelenggaraan SIAK (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Presentase Irigasi Dalam Kondisi baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Meningkatnya Rehabilitasi Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangkat mewujudkan tempat tinggal yang layak huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
		Menurunnya Tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan Kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	

Dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah Kota Serang, terdapat program pembangunan yang berisi program prioritas pembangunan daerah. Beberapa program pembangunan tersebut terdiri dari program unggulan, Program Rb Tematik, dan program strategis. Program unggulan berupa Program Unggulan Wali Kota terpilih yang terdiri dari 13 program unggulan yaitu Serang Bebas Pungli, Serang Bagus, Serang Bebas Banjir, Serang Bersih, Serang Cerdas, Serang Digital, Serang Hijau, Serang Kreatif Produktif, Serang Makmur, Serang Mengaji, Serang Menyala, Serang Preneur, dan Serang Sehat.

Program RB Tematik merupakan program pembangunan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Serang yaitu peningkatan investasi, pengendalian inflasi, stunting, dan kemiskinan. Program Strategis merupakan program pembangunan yang merupakan program mendesak untuk menangani permasalahan pembangunan di Kota Serang yaitu pengendalian banjir, pengembangan KPW banten Lama, pengelolaan sampah, dan ekonomi kreatif.

Penentuan program prioritas pembangunan daerah dikaitkan juga dengan analisis LQ (*Location Quotient*) dan Analisis *Shift-Share* (SSA). Analisis LQ (*Location Quotient*) terhadap 17 (tujuh belas) sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Serang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2024, diukur dengan rumus SLQ (*Static Location Quotient*) terhadap 17 (tujuh belas) sektor PDRB Provinsi Banten ADHB Tahun 2024 sebagai pembanding, serta total PDRB Kota Serang ADHB Tahun 2024 dan total PDRB Provinsi Banten ADHB 2024, menghasilkan angka yang cukup beragam di berbagai sektor. Nilai tertinggi pada indeks SLQ Kota Serang Tahun 2024 dihasilkan oleh sektor "Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib", dengan angka indeks sebesar (2,84). Kemudian, disusul oleh sektor "Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum" (2,57) dan sektor "Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor" (2,17). Sedangkan nilai sektor terendah yaitu pada sektor "Pertambangan & Penggalian" dengan nilai (0,01), disusul oleh sektor "Pengadaan Listrik dan Gas" (0,12) serta sektor "Industri Pengolahan" (0,15).

Sistem Penilaian LQ menyatakan bahwa jika LQ > 1, artinya peranan sektor PDRB tersebut lebih besar di Kota Serang daripada Provinsi Banten (sektor basis/unggulan), mengindikasikan dimungkinkannya dilakukan ekspor pada sektor tersebut (*Relative Specialisation in Sector*). Ekspor dilakukan karena adanya surplus di Kota Serang. Sedangkan jika LQ < 1, artinya peranan sektor PDRB tersebut lebih kecil daripada Provinsi Banten (sektor non-basis/non-unggulan), sehingga perlu melakukan impor (*Production Deficit in Sector*), karena sektor

tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan Kota Serang. Jika LQ = 1, artinya peranan sektor PDRB tersebut sama antara Kota Serang dengan Provinsi Banten.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sektor "Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib", sektor "Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum", dan sektor "Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor" yang merupakan tiga sektor dengan nilai indeks SLQ tertinggi di Kota Serang, merupakan tiga sektor yang lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Banten, memungkinkannya untuk dilakukan ekspor dan menjadikannya sebagai sektor basis (B)/unggulan. Sedangkan sektor "Pertambangan & Penggalian", sektor "Pengadaan Listrik dan Gas", dan sektor "Industri Pengolahan", yang merupakan tiga sektor dengan nilai indeks SLQ terendah di Kota Serang, merupakan tiga sektor yang lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Banten, memerlukan adanya impor dan menjadikannya sebagai sektor non-basis (NB)/non-unggulan.

Analisis *Shift-Share* (SSA) dilakukan untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan antar wilayah, dalam hal ini Kota Serang terhadap Provinsi Banten, untuk masing-masing sektor dengan melihat keunggulan kompetitifnya. Analisis dilakukan dengan menghitung laju pertumbuhan sektor PDRB di Kota Serang dan Provinsi Banten, membandingkannya dengan total PDRB Kota Serang dan PDRB Provinsi Banten, kemudian dilakukan kategorisasi terhadap sektor tersebut untuk menentukan tingkat keunggulan kompetitif.

Berdasarkan hasil perhitungan, tiga sektor PDRB di Kota Serang dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor "Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib" dengan nilai (0,19), sektor "Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial" dengan nilai (0,10), dan sektor "Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum" dengan nilai (0,09). Sedangkan tiga sektor PDRB di Kota Serang dengan laju pertumbuhan terendah adalah sektor "Pertambangan & Penggalian" dengan nilai (-0,01), sektor "Pengadaan Listrik dan Gas" dengan nilai (0,02), dan sektor "Real Estate" dengan nilai (0,04).

Program prioritas pembangunan daerah berdasarkan Program Unggulan, Program Tematik, dan Program Strategis sebagai berikut:

Tabel III.7.
Program Prioritas pada Program Unggulan Kepala Daerah
Kota Serang Tahun 2025-2029

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	AKSI PROGRAM UNGGULAN	RENCANA AKSI PEKERJAAN	PROGRAM PRIORITAS
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan inovatif menuju pemerintahan yang profesional dan melayani	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien	Serang Bebas Pungli	Menerapkan sistem berbasis elektronik (E-Government)	Peningkatan Kualitas Internet (OPD ONLINE)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
						Peningkatan Jaringan malalui pemasangan kabel Optic	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
						Perapihan Kabel Bawah Tanah	
						Peningkatan layanan Kualitas E-Government (Aplikasi Pemerintah Kota Serang)	
					Penguatan sistem pengawasan dan audit internal maupun eksternal	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
				Serang Bagus	Optimalisasi layanan pengaduan Reaksi atas berita warga (Rabeg) sebagai platform pengaduan yang mudah diakses dan responsif terhadap laporan pengaduan oleh masyarakat	Sosialisasi layanan rabeg, SP4N Lapor, dan peningkatan kualitas aplikasi serta peningkatan koordinasi untuk penyelesaian pengaduan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Serang Digital	Pembangunan Serang Digital Center	*Pembangunan Gedung Serang Digital Center*	Program Penataan Bangunan Gedung
						Dokumen FS	
						Dokumen DED	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	AKSI PROGRAM UNGGULAN	RENCANA AKSI PEKERJAAN	PROGRAM PRIORITAS
						UKL UPL dan Andalalin	
						Pembangunan	
				Serang Bagus	Optimalisasi Mall Pelayanan Publik (MPP)	Penambahan Sarpras MPP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
						Pemeliharaan Gedung dan Sarpras MPP	
						Penyusunan Kebijakan Optimalisasi fungsi MPP	Program Pelayanan Penanaman Modal
				Serang Makmur	Menaikan insentif RT/RW, kader posyandu, kader PKK, Guru ngaji dan Guru madrasah	Pendataan calon penerima insentif RT/RW, kader posyandu, kader PKK, guru ngaji dan guru madrasah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
						Perhitungan kenaikan insentif RT/RW, kader posyandu, kader PKK, guru ngaji dan guru madrasah	
			Meningkatnya tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi	Serang Bebas Pungli	Penguatan sistem pengawasan dan audit internal maupun eksternal	Sosialisasi Anti Korupsi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
						Peningkatan Kuantitas dan kualitas auditor	
						Penyuluhan Anti Korupsi	
						Pengendalian Gratifikasi	
						Evaluasi Benturan Kepentingan	
						Survei Penilaian Integritas	
			Meningkatnya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi		Penyederhanaan prosedur birokrasi dan penerapan sistem merit (tidak jual beli jabatan) dalam promosi dan rotasi	Asesment Jabatan Kritikal dan atau seluruh level jabatan	Program Kepegawaian Daerah
						Profiling Seluruh Pegawai	
						Penghargaan ASN Award	
						Pendampingan Penerapan Manajemen Talenta	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	AKSI PROGRAM UNGGULAN	RENCANA AKSI PEKERJAAN	PROGRAM PRIORITAS
			berdasarkan sistem merit			Penempatan Talent yang menjadi suksesor (Talent Pool)	
						Meminimalisir pungli di semua sektor Pelayanan Publik	
						Pembentukan UPTD Assesment Center	
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Serang Sehat	Meningkatkan sarana prasarana pusat kesehatan masyarakat (PKM) dan RSUD	Pembangunan Puskesmas Pembantu Baru untuk mendukung program integrasi primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Pengembangan rumah sakit (penambahan sarpras dan alkes)	
					Pembenahan data penerima bantuan iuran (PBI) program BPJS Kesehatan	Peningkatan/penambahan anggaran pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam bentuk penerima bantuan iuran PBI program BPJS Kesehatan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
					Meningkatkan anggaran dan pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)	Peningkatan/penambahan anggaran pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam bentuk Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Membangun pusat olah raga disetiap kecamatan (gerakan senam rutin & pelayanan mental health)	Penegakan Perda/Perkada tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya derajat	Serang Bagus		Pembangun USB SD dan SMP	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	AKSI PROGRAM UNGGULAN	RENCANA AKSI PEKERJAAN	PROGRAM PRIORITAS
			pendidikan masyarakat yang berdaya saing		Membangun Sekolah baru SD dan SMP sesuai standar rasio	Rehabilitasi SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan
						mendukung Fasilitasi pembangunan sekolah rakyat	Program Provinsi Banten
					Pemenuhan ruang kelas baru bagi sekolah SD dan SMP sesuai standar rasio	Pembangunan RKB SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan
					Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah (ruang kelas dan sarana dan prasarana lainnnya)	Pengadaan Meubeler SD dan SMP	
				Serang Mengaji	Gerakan memakmurkan masjid, menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk remaja dan anak muda (masjid ramah remaja dan pemuda)	Fasilitasi kelembagaan DKM	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
						Fasilitasi pelatihan dan keterampilan remaja masjid	
						Gerakan maghrib mengaji	
						Pemenuhan Sarpras melalui hibah	
						Memperkuat dewan masjid indonesia (DMI) melalui melalui hibah	
						Penambahan Honor dan jumlah Guru Ngaji	
						Verifikasi dan validasi data guru ngaji	
					Insentif kesejahteraan Guru madrasah	Pemberian hibah melalui FKDT	
					Bantuan untuk pesantren	Pemberian Hibah pesantren	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	AKSI PROGRAM UNGGULAN	RENCANA AKSI PEKERJAAN	PROGRAM PRIORITAS
				Serang Cerdas	Pemberian seragam dan buku gratis (bagi yang tidak mampu)	Pemberian bantuan perlengkapan Sekolah (Seragam dan Buku) untuk siswa baru pada tingkat SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan
						Pemberian bantuan perlengkapan Sekolah (Seragam dan Buku) untuk anak tidak sekolah, anak rentan putus sekolah	
					Peningkatan kesejahteraan Guru PAUD, TK, SD dan SMP	Kenaikan Tunjangan dan honor Guru Non ASN	
					Pemberian beasiswa kuliah	Kerjasama dengan perguruan tinggi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
						Kerjasama dengan Baznas	
						Pemerintah daerah secara langsung memberikan beasiswa kuliah	
						Pendampingan bagi calon penerima beasiswa (bagi kelas 3 dan 2 SMA dan SMK)	
			Meningkatnya ketahanan keluarga, kualitas pembangunan pemuda dan pembangunan gender	Serang Sehat	Membangun pusat olah raga disetiap Kecamatan (gerakan senam rutin & pelayanan mental health)	*Pembangunan Lapangan Stadion Mini*	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
						Pembangunan Kawasan Terpadu Sirkuit, Wisata, dan UMKM	Program Penataan Bangunan Gedung
						a.Penyusunan FS	
						b.Penyusunan DED	
						c.Pembangunan fisik	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	AKSI PROGRAM UNGGULAN	RENCANA AKSI PEKERJAAN	PROGRAM PRIORITAS
						Pembangunan Sarana Olahraga	Program Penataan Bangunan Gedung
							Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
						Pemeliharaan Stadion Maulana Yusuf	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
						Klinik konseling di tiap Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Revitalisasi Lapangan olahraga	Program Penataan Bangunan Gedung
							Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
						Memfungsikan kembali sarana olahraga yang sudah ada	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
						Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	
				Serang Makmur	Memberikan insentif untuk Ketua Pemuda	1Honor ketua Ketua Pemuda (Legal dibuktikan SK) di tiap RW	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Serang Bagus	Optimalisasi destinasi wisata bahari, religi, sejarah dan agro	*Pembangunan dan Pengembangan KPW Banten Lama*	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	AKSI PROGRAM UNGGULAN	RENCANA AKSI PEKERJAAN	PROGRAM PRIORITAS
			yang maju dan berkarakter			a. Penyusunan DED	Program Penataan Bangunan Gedung
						b. Revitalisasi TIC	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
						c. Rehabilitasi Kios	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
						d. Pengadaan lahan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
						e. Pembangunan jalan dan drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
						f. Pembangunan PJU	Rogram Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
						g. Penyediaan sarpras persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
						h. Rehabilitasi Toilet	Program Penataan Bangunan Gedung
						i. Rehabilitasi mushola	
						j. Pembangunan Parkir	Rogram Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
						k. Rekayasa lalu lintas	
						l. Pembangunan shuttle halte	
						m. Pembangunan pos jaga	Program Penataan Bangunan Gedung

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	AKSI PROGRAM UNGGULAN	RENCANA AKSI PEKERJAAN	PROGRAM PRIORITAS
						n. Pembangunan RTH/jogging track	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
						o. Angkutan pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
						p. Pembangunan gedung miniatur surosoan	Program Penataan Bangunan Gedung
						q. Pembangunan panggung pertunjukan/Amphitheatre	
						r. Pembangunan pintu keluar ke Benteng Surosoan dan speelwijk	
						s. Pembentukan Lembaga Pengelola KPW	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
						Membentuk Tim pengamanan Satpol PP Khusus Pariwisata (Satpol PP Pariwisata)	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
						Melakukan penataan/penertiban PKL	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
						Melakukan Pengamanan, Pengawasan, dan atau patroli rutin pasca penataan / penertiban	
						Revitalisasi Alun-Alun	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	AKSI PROGRAM UNGGULAN	RENCANA AKSI PEKERJAAN	PROGRAM PRIORITAS
				Serang Kreatif Produktif	Bantuan untuk peguron, pelestari seni dan budaya di Kota Serang	Hibah/CSR Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
3	Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Tumbuh dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian daerah yang tumbuh dan berdaya saing berbasis potensi unggulan daerah	Meningkatnya pembangunan ekonomi pada sektor unggulan dan strategis	Serang Kreatif Produktif	Pembangunan Serang Expo Center	Penyusunan DED pembangunan SCC	Program Penataan Bangunan Gedung
						Pematangan Lahan	
						Pembebasan Lahan (Pelebaran Akses Masuk)	
						DPPT, apraisal	
						Pembangunan Akses masuk baru	
						Pembangunan fisik SCC	
					Pendampingan dan penguatan pelaku ekonomi kreatif dan seni budaya	Fasilitasi HAKI untuk pelaku Ekraf	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
						Pembentukan Serang Creative and Culture Hub	Program Pengembangan Kebudayaan
						Event seni budaya dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Umkm
							Program Pengembangan Ekspor
						Menyusun Kalender event	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	AKSI PROGRAM UNGGULAN	RENCANA AKSI PEKERJAAN	PROGRAM PRIORITAS
						Fasilitasi pembentukan Dekranasda	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
						Rehabilitasi Gedung dan Sarpras Iwak Banten untuk Dekranasda	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
						Memberikan fasilitas pentas seni budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
						Memperkuat Pelaku seni budaya	
						Pemanfaatan gedung juang sebagai tempat pertunjukan seni budaya	
				Serang Preneur	Mencetak 1 keluarga 1 pengusaha	Dukungan Inkubasi bisnis di semua kecamatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
						Pelatihan bidang industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
						Pelatihan bidang jasa (Kecantikan, tata boga, Pendidikan, perbengkelan, dll)	Program Pelatihan Kerja Ddan Produktifitas Tenaga Kerja
						Pelatihan manajemen kewirausahaan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	AKSI PROGRAM UNGGULAN	RENCANA AKSI PEKERJAAN	PROGRAM PRIORITAS
						Fasilitasi Kewirausahaan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
						Monitoring dan evaluasi pelaksanaan	Program Perekonomian Dan Pembangunan
						Memasukkan Muatan lokal (mulok) "Enterpreneurship, spirit, and mentality" dari tingkat paud sampai SMA	Program Pengelolaan Pendidikan
					Memberikan modal usaha bagi pelaku UMKM mikro	Pemberian subsidi bunga pinjaman	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
						Subsidi imbal jasa penjaminan untuk usaha mikro	
						Bantuan Modal dalam bentuk peralatan	
					Memberikan pendamping kepada pelaku UMKM (Klinik UMKM)	memberikan pendampingan (klinik UMKM) pada kantor Dinas Kopukmperindag kota Serang	
						pengadaan kendaraan untuk memberikan pelayanan bagi pengusaha umkm (Clinic Mobile).	
						Layanan meliputi pembuatan NIB, Rekomendasi HKI, Halal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	AKSI PROGRAM UNGGULAN	RENCANA AKSI PEKERJAAN	PROGRAM PRIORITAS
						Selfdeclare (Layanan Mobile)	Usaha Mikro (Umkm)
							Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
					ASN Preneur	Menciptakan Enterpreneur Spirit pada ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan	Meningkatnya penyediaan layanan dan infrastruktur yang layak, merata dan berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Serang Bagus	Infrastruktur jalan mulus, transportasi rapih ramah lingkungan, pasar bersih dan ramah difabel	Betonisasi jalan perbatasan	Program Penyelenggaraan Jalan
						Pemeliharaan jalan	
						Rekonstruksi jalan	
						Pengadaan lahan jalan	
						Pembangunan jalan	
						Pasar Bersih Kepandean	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
						Pasar Bersih Pasar Lama	
						Pasar Bersih Kalodran	
						Revitalisasi Pasar Rau	Program Penataan Bangunan Gedung
						Sentra oleh-oleh KPW	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
						Kajian Analisis aktivasi Pasar	
						Penataan Pedestrian ramah difabel	Program Penataan Bangunan Gedung
						Penataan Trayek angkutan	Program Penyelenggaraan Palu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	AKSI PROGRAM UNGGULAN	RENCANA AKSI PEKERJAAN	PROGRAM PRIORITAS
					Pembangunan Fly Over untuk mengurai kemacetan	*Fly over jalan jendral sudirman*	Program Penyelenggaraan Jalan
						a. penyusunan amdal, dan andalalin	
						b. Pembebasan lahan	
						c. Pembangunan Fisik	
						Fly over Frontage Tol kaligandu-unyur (csr)	
						Fly Over Terondol	
						1. Penyusunan amdal, dan andalalin	
						2. Pembebasan lahan	
						3. Pembangunan Fisik	
						Fly Over Unyur	
						1. Penyusunan amdal, dan andalalin	
						2. Pembebasan lahan	
						3. Pembangunan Fisik	
				Serang Menyala	Pembangunan penerangan jalan umum	Pembangunan 10.000 unit PJU jalan kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
					Perbaikan penerangan jalan umum yang mati	Pemeliharaan PJU jalan kota	
					Pembangunan sarana penerangan jalan lingkungan	Pembangunan PJU dan pemeliharaan jalan lingkungan	
			Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Serang Bersih	Mengedukasi gerakan pilah sampah dari rumah, ubah sampah menjadi uang	Penyuluhan penanganan sampah 3R di sekolah, masyarakat dan pengusaha	Program Pengelolaan Persampahan
						Penyusunan Perwal untuk pengurangan sampah (misal tidak menggunakan kantong plastik di mini	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	AKSI PROGRAM UNGGULAN	RENCANA AKSI PEKERJAAN	PROGRAM PRIORITAS
						atau supermarket), botol minuman di hotel dll	
					Menciptakan 1.000 bank sampah	Pembentukan Bank Sampah 200 kelompok, Peningkatan kapasitas kelompok Bank Sampah dan TPS 3R yang sudah ada	
						Memasukkan Kurikulum mengenai kebersihan dan bank sampah tingkat PAUD sampai SMA	
					Optimalisasi TPA Cilowong	Sanitary Landfill TPA Cilowong	
						Pengadaan Lahan	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang TPA Cilowong	
					Pembangunan TPST Cilowong	Penyusunan FS	
						Pengadaan Lahan	
						Penyusunan DED, amdal, dan andalalin	
						Operasional dan Pemeliharaan	
					Pembangunan IPLT Cilowong	Pembentukan lembaga pengelola IPLT Cilowong	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
					Memberikan/memfasilitasi motor roda tiga untuk pengangkutan sampah	Pengadaan Cator untuk kelompok TPS 3R, Bank Sampah dan DLH	Program Pengelolaan Persampahan
				Serang Hijau		Pemanfaatan lahan pekarangan	PROGRAM Peningkatan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	AKSI PROGRAM UNGGULAN	RENCANA AKSI PEKERJAAN	PROGRAM PRIORITAS
					Gerakan menanam pohon di rumah sebagai upaya ketahanan pangan lokal	2. Membuat panduan menanam di RT RW	Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
					Pembangunan Ruang terbuka hijau disetiap kecamatan (Ruang ramah perempuan dan anak)	Peningkatan fungsi RTH (Revitalisasi, pemeliharaan, penambahan fasilitas)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
						Pelimpahan kewenangan pengelolaan RTH ke Tk. Kecamatan	
						Pembangunan sarana dan prasarana olahraga untuk optimalisasi fungsi RTH di setiap Kecamatan	
			Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Serang Bebas Banjir	Pembangunan dan perbaikan drainase	Pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
						Pembangunan dan peningkatan drainase	
					melakukakn normalisasi sungai (melebarkan, mendalamkan dan membersihkan)	Pengadaan Pompa air pengendali banjir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
					Melakukan revitalisasi daerah bantaran sungai dan mencegah pendirian bangunan ilegal yang menghambat aliran air	Penegakan dan pengawasan RTRW serta relokasi	Rogram Penyelenggaraan Penataan Ruang
						Penegakan Perda/Perkada tentang RTRW	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
						Pengawasan Pelanggaran Perda/Perkada tentang RTRW	
						Melakukan Penertiban Bangunan Liar (Bangli)	
5	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang	Menurunnya kemiskinan dan	Serang Makmur	Sembako murah tiap kelurahan	Operasi Pasar	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	AKSI PROGRAM UNGGULAN	RENCANA AKSI PEKERJAAN	PROGRAM PRIORITAS
	yang Mandiri dan Berkeadilan	layak dan berkeadilan	ketimpangan kesejahteraan masyarakat				Dan Barang Penting
					Memberikan makanan bergizi gratis bagi penerima PKH/bansos, Ibu hamil dan Menyusui	Pemberian paket sembako bagi penerima PKH	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
					Memberikan santunan sosial bagi warga tidak mampu yang meninggal dunia dan melahirkan	Pemberian bantuan biaya pemakaman bagi warga tidak mampu yang meninggal dunia	Rehabilitasi Sosial
						Stimulus Bagi yang tidak mampu/penerima manfaat	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Menurunnya tingkat pengangguran	Serang Kreatif Produktif	Pembangunan Balai Latihan Keterampilan (BLK) Mobile	Pelatihan keterampilan di setiap kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
						Pemberian Kendaraan berdasarkan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan	

Tabel III.8.
Program Prioritas pada Program Pembangunan Tematik
Kota Serang Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kesehatan	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua orang termasuk pencegahan, tes HIV, dan pengobatan bagi ODHA dengan fokus THREE ZERO (Tidak ada kasus HIV baru, Tidak ada kematian akibat AIDS, Tidak ada diskriminasi bagi kelompok berisiko ataupun penderita)	Menuju eliminasi epidemi HIV/AIDS pada tahun 2030, dengan fokus pada peningkatancakupan layanan pencegahan dan pengobatan HIV melalui program 95-95-95, serta penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	eliminasi HIV	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung percepatan eliminassi TBC 2030 dan peningkatan	Layanan kuratif dan rehabilitasi menuju lebih fokus dalam peningkatan promosi kesehatan dalam penguatan manajemen program TBC	eliminasi TBC	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
				akses layanan TBC bermutu dan berpihak pada pasien			
				Melalui pendekatan yang terpadu antar pemerintah, lembaga kesehatan, komunitas lokal dan sektor terkait lainya dalam peningkatan akses layanan penanggulangan malaria	Eliminasi malaria secara penuh pada tahun 2045 dengan target bebas malaria pada tahun 2030 dimana kebijakan ini mencakup peningkatan surveilans dan deteksi kasus melalui rapid tes dan laboratorium PCR dan penerapan berbagai strategi dalam pencegahan pengendalian dan pemeliharaan disetiap tahapan eliminasi	eliminasi malaria	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Peningkatan kualitas tenaga kesehatan, Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer	Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan	Penurunan AKI AKB	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Pengadakan BMHP Skrining Bayi Baru Lahir	Mengadakan BMHP Skrining Bayi Baru Lahir		
				Peningkatkan kualitas tenaga kesehatan, Mendeteksi sedini	Memperkuat pelaksanaan skrining bayi baru lahir di seluruh fasilitas kesehatan		

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
				mungkin kelainan bawaan			
				Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan, Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer	Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan		
				Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Kualitas dan cakupan layanan fasilitas kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Kualitas dan cakupan layanan fasilitas kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
						Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Peningkatan mutu pelayanan kesehatan lanjutan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Pemenuhan SDM Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
						Pencegahan Stunting pada balita dengan masalah gizi	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
							dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Upaya Meningkatkan Capaian ASI Ekslusif	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Pelacakan dan Konfirmasi Kasus Balita dengan Masalah Gizi Pada Anak balita	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Evaluasi Rujukan Balita Stunting	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Evaluasi Surveilans Gizi	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Pembentukan MOU Jejaring Balita Stunting	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Pembinaan Program Gizi	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Penguatan Surveilans Gizi dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pemantauan dan Pertumbuhan Balita	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
							dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat yang berdaya saing	ATS	Pengembalian Anak Tidak Sekolah	Peningkatan Akses terhadap layanan dasar	Penyediaan Perlengkapan siswa ATS	Pengelolaan Pendidikan
			Pendidikan Iklusi	Penguatan Kapasitas Guru Pembimbing Khusus	Meningkatkan Kompetensi GPK agar layanan ABK di satuan pendidikan lebih optimal	Peningkatan Mutu Guru & Layanan Inklusi	Pengelolaan Pendidikan
			Sarana dan Prasarana	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengelolaan Pendidikan
			Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Pengembangan Profesional Berke lanjutan	Sosialisasi dan Pemanfaatan Komunitasi Belajar	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Kompetensi Pendidik	Pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Tumbuh dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian daerah yang tumbuh dan berdaya saing berbasis potensi	Meningkatnya pembangunan ekonomi pada sektor unggulan dan strategis	Peningkatan Investasi	Peningkatan kondusifitas iklim investasi	Peningkatan identifikasi dan pemasaran potensi investasi daerah	Peningkatan promosi penanaman modal	Program promosi penanaman modal
						Peningkatan pengawasan dan kepatuhan pelaporan kegiatan Penanaman Modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
	unggulan daerah					Pengembangan destinasi wisata	Program peningkatan Daya tarik destinasi Pariwisata
							Program pemasaran Pariwisata
						Aksesibilitas dan infrastruktur penunjang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
							Program Peningkatan Prasarana, Sara dan Utilitas Umum (PSU)
							Program Pengelolaan Persampahan
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
						Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
							Program Penempatan Tenaga Kerja
							Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
							Pengembangan Kebudayaan

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
							Pengembangan Kebudayaan
							Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
							Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan
							Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makan minuman
							Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
							Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
							Program Perekonomian dan Pembangunan
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
							Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Hilirisasi Industri Pengolahan	1. Penyederhanaan Perizinan di Sektor Hlirisasi	1. Penyederhanaan Perizinan di Sektor Hlirisasi	Pertumbuhan Hilirisasi Produk	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
							Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
							Program Pelayanan Penanaman Modal
							Program Pengendalian Izin Usaha Industri
				2. Insentif Fiskal dan Non-Fiskal untuk Industri Pengolahan	2. Insentif Fiskal dan Non-Fiskal untuk Industri Pengolahan	Pemenuhan Penghargaan/Reward	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
				3. Penguatan Kolaborasi Regulasi antar K/L/D	3. Penguatan Kolaborasi Regulasi antar K/L/D	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Stakeholder	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
							Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
							Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
				4. Pengembangan Riset dan Inovasi Teknologi Hilirisasi	4. Pengembangan Riset dan Inovasi Teknologi Hilirisasi	Pemenuhan Kebutuhan Perluasan Produk	Program Riset Dan Inovasi Daerah
							Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
							Program Pengembangan Ekspor
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
							Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
							Program Penempatan Tenaga Kerja
				5. Peningkatan Efisiensi Logistik dan Infratsruktur Pendukung Hilirisasi	5. Peningkatan Efisiensi Logistik dan Infratsruktur Pendukung Hilirisasi	Pemenuhan Infrastruktur Hilirisasi Produk	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
							Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
							Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
							Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
							Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
							Program Penyelenggaraan Jalan

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
							Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
							Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
							Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang	Menurunnya kemiskinan dan	Kemiskinan	Pengurangan kemiskinan	Standarisasi kebutuhan dasar, penguatan gudang	Penyediaan logistik darurat bencna	Program Penanggulangan Bencana

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
yang Mandiri dan Berkeadilan	layak dan berkeadilan	ketimpangan kesejahteraan masyarakat			logistik, kolaborasi lintas pihak		
					SOP evakuasi, peningkatan SDM, penyediaan sarana evakuasi	Penyelamatan korban bencana secara cepat, tepat, dan akuntabel	Program Penanggulangan Bencana
				Menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	Menangani kawasan permukiman kumuh dan mengurangi jumlah RTLH	Memberikan bantuan sosial untuk rumah tidak layak huni	Program Kawasan Permukiman
						Membangun PSU di lingkungan permukiman kumuh	Program Kawasan Permukiman
						Memberikan bantuan sosial untuk rumah tidak layak huni	Progam Perunahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
				Peningkatan akses kebutuhan pokok warga miskin	Peningkatan layanan untuk kemudahan akses logistik, kebutuhan pokok, maupun mobilitas menuju mata pencaharian	Penyediaan jas aangkutan orang/barang	Program Pengendalian Operasional Dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
			Penanganan Kemiskinan	Penurunanan Kantong Kemiskinan	Peningkatan Akses terhadap layanan dasar	Meningkatkan jumlah unit sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik daerah bagi investor	Pengelolaan Pendidikan
				Penurunanan Kantong Kemiskinan	Peningkatan Akses terhadap layanan dasar	Membangun sarana pendidikan yang merata dan meningkatkan akses pendidikan	Pengelolaan Pendidikan

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
				Penurunanan Kantong Kemiskinan	Peningkatan Akses terhadap layanan dasar	Penyediaan fasilitas pendidikan yang mendukung proses pembelajaran	Pengelolaan Pendidikan
				Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Peningkatan akses layanan dasar warga miskin	Penyediaan Perlengkapan siswa ATS	Pengelolaan Pendidikan
				Penurunanan Kantong Kemiskinan	Peningkatan Akses terhadap layanan dasar	Membangun Ruang Kelas Baru untuk mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan pemerataan akses	Pengelolaan Pendidikan
				Penurunanan Kantong Kemiskinan	Peningkatan Akses terhadap layanan dasar	Melakukan rehabilitasi ruang kelas sekolah yang rusak untuk mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan pemerataan akses	Pengelolaan Pendidikan
				Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Peningkatan akses layanan dasar warga miskin	Penyediaan Seragam Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan
				Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Peningkatan akses layanan dasar warga miskin	Penyediaan sarana TIK untuk pendukung pembelajaran	Pengelolaan Pendidikan
				Penurunanan Kantong Kemiskinan	Peningkatan Akses terhadap layanan dasar	Meningkatkan jumlah unit sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya	Pengelolaan Pendidikan

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
						tarik daerah bagi investor	
				Penurunanan Kantong Kemiskinan	Peningkatan Akses terhadap layanan dasar	Membangun sarana pendidikan yang merata dan meningkatkan akses pendidikan	Pengelolaan Pendidikan
				Penurunanan Kantong Kemiskinan	Peningkatan Akses terhadap layanan dasar	Melakukan rehabilitasi ruang kelas sekolah yang rusak untuk mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan pemerataan akses	Pengelolaan Pendidikan
				Penurunanan Kantong Kemiskinan	Peningkatan Akses terhadap layanan dasar	Penyediaan fasilitas pendidikan yang mendukung proses pembelajaran	Pengelolaan Pendidikan
				Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Peningkatan akses layanan dasar warga miskin	Penyediaan Seragam Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan
				Penurunanan Kantong Kemiskinan	Peningkatan Akses terhadap layanan dasar	Membangun Ruang Kelas Baru untuk mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan pemerataan akses	Pengelolaan Pendidikan
				Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Peningkatan akses layanan dasar warga miskin	Penyediaan Perlengkapan siswa ATS	Pengelolaan Pendidikan
				Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Peningkatan akses layanan dasar warga miskin	Penyediaan sarana TIK untuk pendukung pembelajaran	Pengelolaan Pendidikan

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
				Penurunanan Kantong Kemiskinan	Peningkatan Akses terhadap layanan dasar	Membangun sarana pendidikan yang merata dan meningkatkan akses pendidikan	Pengelolaan Pendidikan
				Penurunanan Kantong Kemiskinan	Peningkatan Akses terhadap layanan dasar	Melakukan rehabilitasi ruang kelas sekolah yang rusak untuk mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan pemerataan akses	Pengelolaan Pendidikan
				Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Peningkatan akses layanan dasar warga miskin	Penyediaan ATK Untuk PKBM	Pengelolaan Pendidikan
				Penurunanan Kantong Kemiskinan	Peningkatan Akses terhadap layanan dasar	Melakukan rehabilitasi ruang kelas sekolah yang rusak untuk mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan pemerataan akses	Pengelolaan Pendidikan
				Penurunanan Kantong Kemiskinan	Peningkatan Akses terhadap layanan dasar	Membangun sarana pendidikan yang merata dan meningkatkan akses pendidikan	Pengelolaan Pendidikan
			KEMISKINAN	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kesempatan kerja melalui Job Fair dan Pelatihan Kewirausahaan	Program Penempatan Tenaga Kerja
				Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kesempatan kerja melalui Job Fair dan	Program Penempatan Tenaga Kerja

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
						Pelatihan Kewirausahaan	
				Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
				penurunan kantong kemiskinan	Peningkatan akses terhadap layanan dasar	Peningkatan akses bertransmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
				penurunan kantong kemiskinan	Peningkatan akses terhadap layanan dasar	Peningkatan akses bertransmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
				PELATIHAN, UJI KOMPETENSI PELAYANAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	PENINGKATAN KOMPETENSI PELAYANAN KESEHATAN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
					pelayanan masyarakat		Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
					pelayanan masyarakat		Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				PENGENTASAN KEMISKINAN	PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL	REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
				PENGENTASAN KEMISKINAN	PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL	PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT SECARA KELOMPOK	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
				PENGENTASAN KEMISKINAN	PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL	BANTUAN STIMULAN MODAL USAHA BAGI MASYARAKAT	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
				PENGENTASAN KEMISKINAN	PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMADIRIAN PANGAN	PENINGKATAN KEMANDIRIAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
				PENGENTASAN KEMISKINAN	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	MENGURANGI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI	Penanganan Kerawanan Pangan
				PENGENTASAN KEMISKINAN	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				PENGENTASAN KEMISKINAN	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	PENINGKATAN PRASARANA PERTANIAN	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
					PRASARANA PERTANIAN		
				PENGENTASAN KEMISKINAN	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PENINGKATAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				PENGENTASAN KEMISKINAN	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL	Pengelolaan Perikanan Tangkap
				PENGENTASAN KEMISKINAN	PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	KETERSEDIAAN BAHAN BAKU IKAN	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
				PENGENTASAN KEMISKINAN	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PENGUATAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN	Pengelolaan Perikanan Budidaya
				PENGENTASAN KEMISKINAN	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL	Pengelolaan Perikanan Budidaya
				PENGENTASAN KEMISKINAN	PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
				Peningkatan akses kebutuhan pokok warga miskin	Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan OPD yang menangani kemiskinan secara langsung dan tidak langsung	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan Melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) secara terintegrasi dengan tujuan mendapatkan hak akses SIAK (untuk mengidentifikasi data adminduk masyarakat Kota Serang)	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Peningkatan akses kebutuhan pokok warga miskin	Peningkatan pelayanan keliling (Yanling) pencatatan	Jumlah Pelayanan dalam 1 tahun Melaksanakan Jemput Bola pada Kelurahan-	Program Pencatatan Sipil

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
					sipil pada lokus tertentu	kelurahan di Kota Serang dengan sasaran penduduk rentan rentan	
				Peningkatan akses kebutuhan pokok warga miskin	Peningkatan dalam penyajian data dan informasi perkembangan yang akurat data kependudukan	Presentasetingkat ketersediaan dokumen profil, agregat dan data kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
				Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Mandiri dan Berkeadilan				Keterjangkauan harga	Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat	Penyediaan barang kebutuhan pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
						Peningkatan kompetensi UMKM	Program Pengembangan Umkm
				Ketersediaan pasokan	Pemantauan ketersediaan Pupuk	Pengawasan Pupuk bersubsidi	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
					Peningkatan cadangan dan kemandirian pangan daerah	Peningkatan kemandirian pangan daerah	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
							Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
						penguatan SDM Pertanian	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
							Program Pengelolaan Perikanan Budiday
							Program Pengawasan Keamanan Pangan
				kelancaran distribusi	Peningkatan alur distribusi pangan yang lancar	Penyediaan Infrastruktur sarana dan prasarana distribusi pangan dan perdagangan yang berkualitas	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
							Rogram Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
							Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
					Peningkatan konektivitas wilayah	Peningkatan konektivitas jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
						Peningkatan kualitas data dan sistem	Program Perencanaan, Pengendalian Dan

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
						informasi penanganan inflasi daerah	Evaluasi Pembangunan Daerah
				komunikasi efektif	Peningkatan koordinasi pengendalian inflasi daerah	Peningkatan pengendalian informasi yang berdampak pada kestabilan harga	Program Perekonomian Dan Pembangunan
							Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Ketahanan Pangan	1. Pengembangan Produksi Pangan	1. Pengembangan Produksi Pangan	1. Produktivitas Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
							Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
						2. Pengembangan Teknologi Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
						3. Irigasi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
						4. Jalan Usaha Tani (JUT)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
						5. Penganekaragaman Pangan Lokal	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				2. Pengamanan Cadangan Pangan	2. Pengamanan Cadangan Pangan	1. Pemenuhan target CPPD	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
						2. Pemantauan Stok Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
							Ketahanan Pangan Masyarakat
				3. Pengembangan Infrastruktur Pangan	3. Pengembangan Infrastruktur Pangan	1. Sarana Distribusi Barang	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
						2. Sarana & Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
							Program Penyelenggaraan Jalan
				4. Keterjangkauan Pangan	4. Keterjangkauan Pangan	1. Kemudahan Mendapatkan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
						2. Pangan Gratis	Program Penanganan Kerawanan Pangan
						3. Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
							Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM TEMATIK	STRATEGI PROGRAM TEMATIK	KEBIJAKAN PROGRAM TEMATIK	FOKUS PEMBANGUNAN PROGRAM TEMATIK	PROGRAM PRIORITAS
							Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
				5. Pemberdayaan Petani	5. Pemberdayaan Petani	1. Pelatihan-Pelatihan	Program Penyuluhan Pertanian
						2. Penyuluhan dan Sosialisasi Petani	Program Penyuluhan Pertanian
						3. Penyediaan Sarana penangkapan Ikan (Alat Penangkapan Ikan, Sarana Pendukung Penangkapan Ikan)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
							Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tabel III.9.
Program Prioritas pada Program Strategis
Kota Serang Tahun 2025-2029

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan inovatif menuju pemerintahan yang profesional dan melayani	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien	Pengendalian Banjir	Optimalisasi Fungsi dan Konservasi Wilayah Sungai dan Drainase	Relokasi warga yang berada di sempadan sungai.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
					Penanganan Dampak Banjir	Penanganan Dokumen Kependudukan yang hilang	Program Pencatatan Sipil
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing	Meningkatnya pembangunan kebudayaan yang maju dan berkarakter	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Penyediaan Promosi, Pemasaran dan Kerja Sama	Penyelenggaraan Event-Event Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kebudayaan
							Pengembangan Kebudayaan
3	Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Tumbuh dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian daerah yang tumbuh dan berdaya saing berbasis potensi unggulan daerah	Meningkatnya pembangunan ekonomi pada sektor unggulan dan strategis	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Infrastruktur Penunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Penyediaan Sarana & Prasarana	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS
						Pengembangan Digitalisasi (IT) Penunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pengelolaan Aplikasi Informatika
						Pengembangan Informasi dan Komunikasi Penunjang Pengembagan Ekonomi Kreatif	Informasi Dan Komunikasi Publik
					Promosi, Pemasaran dan Kerja Sama	Penyelenggaraan Event-Event Ekonomi Kreatif	Program Pemasaran Pariwisata
							Program Pengembangan Umkm
							Pengembangan Kebudayaan
							Pengembangan Kebudayaan
						Penyediaan Kalender Event	Program Pemasaran Pariwisata
						Penyelenggaraan Seni Pameran	
						Penyelenggaraan Paket Wisata	
						Penyelenggaraan Promosi melalui Videotron	Informasi Dan Komunikasi Publik

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS
						Penyelenggaraan Promosi billboard di bandara	Promosi Penanaman Modal
				Ekonomi Kreatif	Pengembang SDM Pelaku Ekonomi Kreatif	Fasilitas untuk Memperoleh HAKI	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
							Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
						Pelatihan-Pelatihan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
						Pelatihan-Pelatihan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
						Pengembangan Ekonomi Kreatif	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS
				Pengembangan KPW Banten Lama	Pengembangan KPW Banten Lama sebagai Kawasan Wisata Religi	Rehabilitasi Kios	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
						Revitalisasi TIC	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
						Angkutan pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
4	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan	Meningkatnya penyediaan layanan dan infrastruktur yang layak, merata dan berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Infrastruktur Penunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Aksesibilitas Angkutan	Program Penyelenggaraan Jalan
				Pengembangan KPW Banten Lama	Pengembangan KPW Banten Lama sebagai Kawasan Wisata Religi	Penyusunan Dokumen perencanaan KPW (DED)	Program Penataan Bangunan Gedung
						Pengadaan lahan jalan dan Pembangunan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
						Pembangunan Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS
						Pembangunan Pos Jaga	Program Penataan Bangunan Gedung
						Pembangunan panggung pertunjukan / Amphitheatre	Program Penataan Bangunan Gedung
						Pembangunan pintu keluar ke Benteng Surosoan dan speelwijk	Program Penataan Bangunan Gedung
						Pembangunan gedung miniatur surosoan	Program Penataan Bangunan Gedung
						Rehabilitasi Toilet	Program Penataan Bangunan Gedung
						Rehabilitasi mushola	Program Penataan Bangunan Gedung
						Pembangunan Parkir	Rogram Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
						Pembangunan shuttle halte	Rogram Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
						Pembangunan PJU	Rogram Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS
							Angkutan Jalan (LLAJ)
				Pengendalian Banjir	Optimalisasi Fungsi dan Konservasi Wilayah Sungai dan Drainase	Normalisasi saluran pembuang kewenangan Kota Serang,	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
						Pemeliharaan saluran pembuang kewenangan Kota Serang,	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Embung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
						Pembangunan embung dan kolam retensi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
						Penataan sempadan sungai.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
				Pengendalian Banjir	Optimalisasi Fungsi dan Konservasi Wilayah Sungai dan Drainase	Penanganan Saluran Drainase Kawasan Kumuh	Program Kawasan Permukiman
						Normalisasi saluran pembuang kewenangan Kota Serang,	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengendalian Banjir	Rehabilitasi hutan dan lahan pada cathment area	Penghijauan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
						Pelaksanaan kampung proklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
						Peningkatan kualitas RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
					Penanganan Sampah	Pengangkutan Sampah dan Sedimentasi	Program Pengelolaan Persampahan
				Pengembangan KPW Banten Lama	Pengembangan KPW Banten Lama sebagai Kawasan Wisata Religi	Penyusunan Dokumen perencanaan KPW	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
						Penyediaan sarpras persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
				Pengelolaan Sampah	Optimalisasi pengelolaan Sampah	Pembentukan Bank Sampah	Program Pengelolaan Persampahan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS
					Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	Pembangunan TPS 3R	Program Pengelolaan Persampahan
						Pembangunan TPST Cilowong	Program Pengelolaan Persampahan
						Penyediaan sarana prasarana penunjang TPA (Pengelolaan air lindi, Alat berat, drainase, dan TPT)	Program Pengelolaan Persampahan
						Pemeliharaan saluran pembuang kewenangan Kota Serang,	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
						Penanganan Saluran Drainase Kawasan Kumuh	Program Kawasan Permukiman
			Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Pengendalian Banjir	Sosialisasi Warga Terdampak Relokasi Penataan Sempadan Sungai	Sosialisasi dan edukasi warga yang terdampak relokasi penataan sempadaan sungai	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
							Program Pemberdayaan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS
							Masyarakat Desa Dan Kelurahan
						Pendataan Warga yang terdampak relokasi penataan sempadaan sungai	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
					Mitigasi Bencana Banjir	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana
					Penanganan Dampak Banjir	Pendataan dan penanganan Bencana Banjir melalui Tim Reaksi Cepat Tanggap	Program Penanggulangan Bencana
						Pemberian Bantuan Warga Terdampak Banjir	Program Penanggulangan Bencana
						Pemberian Bantuan Warga Terdampak Banjir	Program Penanganan Bencana
						Pemberian Bantuan	Program Pemenuhan Upaya

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS
						Pelayanan Kesehatan Warga Terdampak Banjir	Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Penanganan Dampak Banjir	Pemberian Bantuan Warga Terdampak Banjir	Program Penanganan Bencana
5	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Mandiri dan Berkeadilan	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang layak dan berkeadilan	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat	Pengendalian Banjir	Penanganan Dampak Banjir	Pemberian Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Ketahanan Pangan	Pengembangan Infrastruktur Pangan	Penyediaan dan Peningkatan Sarana & Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
							Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
							Program Penyelenggaraan Jalan
					Pengembangan Produksi Pangan	Penganekaragaman Pangan Lokal	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS
					Pengamanan Cadangan Pangan	Pemenuhan target CPPD	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
						Pemantauan Stok Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
					Pengembangan Infrastruktur Pangan	Peningkatan Sarana Distribusi barang	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
					Keterjangkauan Pangan	Kemudahan Mendapatkan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
						Pangan Gratis	Program Penanganan Kerawanan Pangan
						Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS
							Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
					Pengembangan Produksi Pangan	Produktivitas Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota / Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman
						Pengembangan Teknologi Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
						Penyediaan dan Pembiayaan Irigasi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian/

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS
						Penyediaan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
					Pemberdayaan Petani	Pelatihan-Pelatihan	Program Penyuluhan Pertanian
						Penyuluhan dan Sosialisasi Petani	Program Penyuluhan Pertanian

Tabel III.10
Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2025-2029

VISI:
"MENJADIKAN KOTA SERANG MADANI YANG MAJU KOTANYA, BAHAGIA DAN SEJAHTERA WARGANYA"

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani	1. Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan inovatif menuju pemerintahan yang profesional dan melayani	1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1.1.1 Pengembangan implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang berdampak	1.1.1.1 Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pemenuhan infrastruktur TIK	2.16.02 - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	SERANG BEBAS PUNGLI	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					1.1.1.2 Penguatan tata kelola persandian untuk keamanan informasi dan komunikasi	2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	SERANG BEBAS PUNGLI	Dinas Komunikasi Dan Informatika
						2.21.02 - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Dinas Komunikasi Dan Informatika
					1.1.1.3 Penguatan data statistik sektoral dalam pembangunan daerah	2.20.02 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Dinas Komunikasi Dan Informatika
					1.1.1.4 Pengembangan dan implementasi sistem perencanaan dan pelaporan kinerja secara akuntabel dan transparan	5.01.02 - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						5.01.03 - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
					1.1.1.5 Optimalisasi peran riset dan inovasi melalui kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah	5.05.03 - Program Riset Dan Inovasi Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					1.1.1.6 Peningkatan tata kelola kearsipan secara efektif	2.24.03 - Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
						2.24.02 - Program Pengelolaan Arsip		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
				1.1.2 Optimalisasi tata kelola kelembagaan dan manajemen Pemerintah Daerah	1.1.2.1 Penataan kelembagaan pemerintah daerah yang adaptif, tepat fungsi dan sesuai dengan kebutuhan daerah	4.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SERANG BAGUS	Sekretariat Daerah dan Seluruh Perangkat Daerah
					1.1.2.2 Optimalisasi implementasi, penataan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah	4.01.02 - Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SERANG MENGAJI SERANG CERDAS	Sekretariat Daerah
						4.01.03 - Program Perekonomian Dan Pembangunan	SERANG PRENEUR	Sekretariat Daerah
						4.02.02 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		Sekretariat DPRD

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien	1.2.1 Peningkatan akuntabilitas sistem pelayanan publik yang inovatif dan berbasis Informasi Teknologi	1.2.1.1 Peningkatan iklim investasi daerah yang kompetitif	2.18.02 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	SERANG PRENEUR	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					1.2.1.2 Optimalisasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	2.12.02 - Program Pendaftaran Penduduk		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						2.12.03 - Program Pencatatan Sipil		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						2.12.04 - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						2.12.05 - Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
					1.2.1.3 Penegakan dan fasilitasi penguatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat	1.05.02 - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Satuan Polisi Pamong Praja
					1.2.1.4 Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan yang rukun, harmoni dan berdemokrasi	8.01.02 - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						8.01.03 - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
						8.01.04 - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
						8.01.05 - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
						8.01.06 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
					1.2.1.5 Peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik	7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Kecamatan
						7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	SERANG MAKMUR	Kecamatan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						7.01.04 - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Kecamatan
						7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kecamatan
			1.3 Meningkatnya tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi	1.3.1 Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi	1.3.1.1 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel melalui pengembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.	5.02.02 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
						5.02.03 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
					1.3.1.2 Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital, pemanfaatan aset daerah, dan kelembagaan BUMD guna meningkatkan pendapatan asli daerah	5.02.04 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Badan Pendapatan Daerah
						4.01.03 - Program Perekonomian Dan Pembangunan		Sekretariat Daerah
				1.3.2 Peningkatan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	1.3.2.1 Peningkatan mekanisme dan prosedur pengawasan internal dan eksternal secara akuntabel dan berintegritas	6.01.02 - Program Penyelenggaraan Pengawasan		Inspektorat
						6.01.03 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	SERANG BEBAS PUNGLI	Inspektorat
			1.4 Meningkatnya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja	1.4.1. Penerapan dan pengembangan sistem merit pada penyelenggaraan manajemen	1.4.1.1. Penyediaan dan penataan regulasi serta unsur penunjang untuk pengembangan sistem merit	5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah	SERANG BEBAS PUNGLI	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			tinggi berdasarkan sistem merit	kepegawaian daerah	1.4.1.2. Optimalisasi pembinaan kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berintegrasi, inovatif dan adaptif	5.04.02 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	SERANG PRENEUR	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					1.4.1.3. Penerapan manajemen talenta, sistem penilaian kinerja dan pengembangan karir yang obyektif dan akuntabel			
2	2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing	2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing	2.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat untuk semua	2.1.1.1. Peningkatan layanan, sarana, prasarana, dan tenaga medis di fasilitas kesehatan masyarakat	1.02.02 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.03 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02.04 - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 1.02.05 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	SERANG SEHAT	Dinas Kesehatan
					2.1.1.2. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting secara komprehensif			
					2.1.1.3. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat			
					2.1.1.4. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular			

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2.1.1.5. Penguatan pelayanan kesehatan, ibu, anak, dan lanjut usia			
					2.1.1.6. Peningkatan kesehatan mental (mental health) masyarakat			
					2.1.1.7. Penguatan dan pemenuhan jaminan dan pembiayaan kesehatan			
					2.1.1.8. Penguatan kelembagaan badan layanan umum daerah kesehatan			
			2.2 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat yang berdaya saing	2.2.1. Pemenuhan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata	2.2.1.1. Optimalisasi fasilitas dan sistem pendidikan dasar, usia dini dan kesetaraan	1.01.02 - Program Pengelolaan Pendidikan	SERANG BAGUS SERANG CERDAS SERANG PRENEUR	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					2.2.1.2. Akselerasi peningkatan capaian wajib belajar 13 tahun yang inklusif	1.01.04 - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					2.2.1.4. Penguatan kurikulum pendidikan berbasis pengembangan talenta dan karakter, sains kreatif serta kewirausahaan berbasis potensi dan keunggulan daerah			

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2.2.1.3. Pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas dan berkompetensi			
				2.2.2. Peningkatan literasi masyarakat	2.2.2.1. Optimalisasi akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi	2.23.02 - Program Pembinaan Perpustakaan		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
						2.23.03 - Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			2.3 Meningkatnya ketahanan keluarga, kualitas pembangunan pemuda dan pembangunan gender	2.3.1. Peningkatan perwujudan keluarga yang berkualitas	2.3.1.1. Penguatan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk dan keluarga berencana secara lebih efektif dan berkelanjutan	2.14.02 - Program Pengendalian Penduduk		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
						2.14.03 - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
					2.3.1.2. Pembangunan keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	2.14.04 - Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
				2.3.2. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	2.3.2.1. Peningkatan daya saing kepemudaan melalui pembinaan wirausaha muda dan organisasi kepemudaan	2.19.02 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
						2.19.03 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	SERANG SEHAT	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2.3.2.2. Pembinaan dan pemenuhan sarana dan prasarana olah raga untuk peningkatan prestasi	2.19.04 - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
				2.3.3. Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2.3.3.1. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	2.08.02 - Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
						2.08.03 - Program Perlindungan Perempuan		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
					2.3.3.2. Optimalisasi pemenuhan akses layanan perlindungan perempuan dan anak	2.08.04 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
						2.08.06 - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
						2.08.07 - Program Perlindungan Khusus Anak		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
			2.4 Meningkatnya pembangunan kebudayaan	2.4.1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi	2.4.1.1. Pengelolaan pelestarian dan implementasi nilai budaya dan tradisi Masyarakat	2.22.02 - Program Pengembangan Kebudayaan	SERANG KREATIF PRODUKTIF	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
						2.22.04 - Program Pembinaan Sejarah		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			yang maju dan berkarakter	kehidupan masyarakat	2.4.1.2. Pelestarian peninggalan sejarah purbakala, benda, situs serta kawasan cagar budaya	2.22.05 - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	3. Meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	3. Meningkatnya perekonomian daerah yang tumbuh dan berdaya saing berbasis potensi unggulan daerah	3.1 Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing pada sektor unggulan dan strategis	3.1.1. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah yang terintegrasi dalam menghasilkan daya saing di tingkat domestik dan global	3.1.1.1. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang memiliki potensi dan berdaya saing	2.17.02 - Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
						2.17.03 - Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
						2.17.04 - Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
						2.17.05 - Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
						2.17.06 - Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
						2.17.07 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	SERANG PRENEUR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
						2.17.08 - Program Pengembangan UMKM	SERANG KREATIF PRODUKTIF	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
					3.1.1.2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan	3.27.02 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						3.27.03 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
						3.27.04 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
						3.27.05 - Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
						3.27.07 - Program Penyuluhan Pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
						3.25.03 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
						3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
						3.25.05 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
						3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
					3.1.1.3. Peningkatan nilai tambah komoditas perdagangan dan penguatan sistem	3.30.02 - Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
					distribusi produk perdagangan	3.30.05 - Program Pengembangan Ekspor	SERANG KREATIF PRODUKTIF	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
						3.30.06 - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
					3.1.1.4. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri dan sektor jasa	3.31.02 - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	SERANG PRENEUR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
					3.1.1.5. Penguatan koperasi sebagai lembaga pembiayaan rendah berbasis kerakyatan	3.31.03 - Program Pengendalian Izin Usaha Industri		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
					3.1.1.6. Penguatan ekonomi daerah melalui optimalisasi BUMD dan penyertaan modal	4.01.03 - Program Perekonomian Dan Pembangunan	SERANG PRENEUR	Sekretariat Daerah
				3.1.2. Peningkatan perkembangan kewirausahaan dan industri kreatif yang berorientasi pertumbuhan inklusi	3.1.2.1. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang menyeluruh dengan konsep kebudayaan, industri kreatif dan penyelenggaraan Meetings, Incentives, Conventions, and Exibitions (MICE).	3.26.02 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	SERANG BAGUS SERANG KREATIF PRODUKTIF	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
						3.26.03 - Program Pemasaran Pariwisata		Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
						3.26.04 - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	SERANG KREATIF PRODUKTIF	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						3.26.05 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
4	4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan	4. Meningkatnya penyediaan layanan dan infrastruktur yang layak, merata dan berkelanjutan	4.1 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	4.1.1. Peningkatan Infrastruktur wilayah daya dukung pembangunan berkelanjutan	4.1.1.1. Peningkatan kualitas pengelolaan jalan	1.03.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	SERANG BEBAS BANJIR	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					4.1.1.2. Peningkatan ketersediaan fasilitas umum dan pelayanan publik	1.03.03 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					4.1.1.3. Optimalisasi fungsi irigasi, drainase serta penanggulangan genangan air	1.03.05 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	SERANG BERSIH	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					4.1.1.4. Pemenuhan akses air bersih, air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif	1.03.06 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	SERANG BAGUS SERANG BEBAS BANJIR	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					4.1.1.5. Peningkatan kualitas perumahan dan penanganan kawasan kumuh untuk pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	1.04.04 - Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
					Arah kebijakan 4.1.1.6. Optimalisasi pengelolaan administrasi pertanahan dalam mendukung pembangunan	2.10.04 - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
						2.10.08 - Program Pengelolaan Tanah Kosong		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2.10.10 - Program Penatagunaan Tanah		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
					4.1.1.7. Optimalisasi pengelolaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan lahan, serta mitigasi risiko	1.03.09 - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Arah kebijakan 4.1.1.8. Pembangunan tata kota dengan memperhatikan perencanaan dan pengaturan ruang untuk menciptakan lingkungan yang teratur, nyaman dan berkelanjutan	1.03.10 - Program Penyelenggaraan Jalan	SERANG BAGUS	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						1.03.11 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						1.03.12 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	SERANG BEBAS BANJIR	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						1.04.02 - Program Pengembangan Perumahan		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
						1.04.03 - Program Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
						1.04.04 - Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
						1.04.05 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				4.1.2. Peningkatan akses transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	4.1.2.1. Optimalisasi sarana dan prasarana perhubungan guna pengembangan sistem dan moda layanan transportasi publik	2.15.02 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	SERANG BAGUS	Dinas Perhubungan
					4.1.2.2. Optimalisasi pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)			
			4.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	4.2.1. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, persampahan dan Ruang Terbuka Hijau	4.2.1.1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2.11.02 - Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
						2.11.06 - Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Dinas Lingkungan Hidup
						2.11.08 - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Dinas Lingkungan Hidup
						2.11.09 - Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Dinas Lingkungan Hidup
						2.11.10 - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
					4.2.1.2. Peningkatan akses layanan persampahan dan pengembangan sistem	2.11.11 - Program Pengelolaan Persampahan	SERANG BAGUS SERANG BERSIH	Dinas Lingkungan Hidup

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
					pengelolaan sampah terpadu	2.11.05 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		Dinas Lingkungan Hidup
					4.2.1.3. Peningkatan ketersediaan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	2.11.04 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	SERANG BAGUS SERANG BERSIH	Dinas Lingkungan Hidup
				4.2.2. Peningkatan pembangunan rendah karbon	4.2.2.1. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi dalam mendukung penguatan penggunaan energi bersih di sektor industri, pengelolaan limbah dan transportasi	2.11.03 - Program Pengendalian Pencemaran Dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
			4.3 Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	4.3.1. Peningkatan mitigasi dan pengelolaan tanggap bencana	4.3.1.1. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana	1.05.03 - Program Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					4.3.1.2. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hibrid berbasis penguatan kemampuan masyarakat, sistem dan infrastruktur dalam menghadapi bencana	1.05.04 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Satuan Polisi Pamong Praja

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
5	5.Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Mandiri dan Berkeadilan	5. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang layak dan berkeadilan	5.1 Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat	5.1.1. Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	5.1.1.1. Penguatan dan updating data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.06.02 - Program Pemberdayaan Sosial		Dinas Sosial
					5.1.1.2. Penguatan akses perlindungan dan kualitas bagi penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang komprehensif	1.06.04 - Program Rehabilitasi Sosial	SERANG MAKMUR	Dinas Sosial
					5.1.1.3. Perluasan bantuan dan jaminan sosial baik secara langsung maupun melalui program pemberdayaan masyarakat	1.06.05 - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	SERANG SEHAT SERANG MAKMUR	Dinas Sosial
						1.06.06 - Program Penanganan Bencana		Dinas Sosial
						1.06.07 - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Dinas Sosial
				5.1.2. Penguatan pengendalian inflasi daerah	5.1.2.1. Optimalisasi kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengembangan infrastruktur, logistik dan distribusi barang	3.30.03 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	SERANG BAGUS	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
					5.1.2.2. Penguatan pengawasan dan pemantauan harga khususnya bahan pokok	3.30.04 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	SERANG MAKMUR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				5.1.3. Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	5.1.3.1. Pengembangan dan diversifikasi produksi pangan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan	2.09.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
					5.1.3.2. Pengamanan dan penguatan cadangan pangan	2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	SERANG HIJAU	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
					5.1.3.3. Pengembangan infrastruktur pangan dalam mendukung efisiensi rantai pasok pangan dan distribusi pangan	2.09.04 - Program Penanganan Kerawanan Pangan		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
						2.09.05 - Program Pengawasan Keamanan Pangan		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
			5.2 Menurunnya tingkat pengangguran	5.2.1. Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan peluang usaha tenaga kerja	5.2.1.1. Pendidikan dan pelatihan kerja mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja	2.07.03 - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	SERANG PRENEUR	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
					5.2.1.2. Peningkatan informasi dan penempatan tenaga kerja	2.07.02 - Program Perencanaan Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
						2.07.04 - Program Penempatan Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
					5.2.1.3. Optimalisasi hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan	2.07.04 - Program Penempatan Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
						2.07.05 - Program Hubungan Industrial		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
						3.32.03 - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						3.32.04 - Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan daerah serta program perangkat daerah yang mencakup indikasi program dan pagu indikatif program guna mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu, bab ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, dengan memuat target indikasi program dan pagu indikatif sesuai periodesasi RPJMD.

Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kota Serang untuk periode 2026-2030, sedangkan belanja daerah merupakan kebutuhan anggaran yang diperlukan guna membiayai pembangunan selama periode tersebut.

Indikasi program merujuk pada program-program yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2026-2030. Sementara itu, pagu indikatif merupakan gambaran kebutuhan pendanaan yang tersedia dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disusun beserta kebutuhan pendanaannya selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rumusan target kinerja program dalam setiap urusan pemerintahan, baik bidang wajib maupun pilihan, disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

Tabel IV.1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SERANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					338.909.444.398,00		313.999.021.038,00		322.061.042.937,00		326.952.195.549,00		330.229.831.991,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					297.565.292.398,00		275.667.606.531,00		285.835.088.699,00		287.031.193.980,00		290.263.430.598,00	
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	64	64,51	65,03	297.565.292.398,00	65,55	275.667.606.531,00	66,07	285.835.088.699,00	66,60	287.031.193.980,00	67,13	290.263.430.598,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					37.885.881.100,00		35.127.326.518,00		33.197.859.753,00		36.584.041.447,00		36.622.767.351,00	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	66,94	73,23	76,27	37.885.881.100,00	79,31	35.127.326.518,00	82,34	33.197.859.753,00	85,31	36.584.041.447,00	88,28	36.622.767.351,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	90,92	98,88	99,15		99,39		99,60		99,73		99,73		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	74,98	95,23	96,36		97,40		98,30		98,86		98,86		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	60,84	63,88	66,92		69,96		72,99		75,96		78,93		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					3.458.270.900,00		3.204.087.989,00		3.028.094.485,00		3.336.960.122,00		3.343.634.042,00	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik serta Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	60,87	62,35	63,83	3.458.270.900,00	65,31	3.204.087.989,00	66,79	3.028.094.485,00	68,27	3.336.960.122,00	69,75	3.343.634.042,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
	Rasio Murid Guru (Rasio)	20:1	20:1	20:1		20:1		20:1		20:1		20:1		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					191.324.497.190,00		186.324.497.045,00		192.474.483.689,00		197.474.483.689,00		199.449.228.526,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					141.406.164.777,00		130.396.164.632,00		137.661.225.954,00		139.755.601.866,00		142.778.735.503,00	
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	70	72	74	91.751.926.126,00	76	80.741.925.981,00	78	88.006.987.303,00	80	90.101.363.215,00	82	93.124.496.852,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	2.849.823.963,00	85	2.849.823.963,00	86	2.849.823.963,00	87	2.849.823.963,00	88	2.849.823.963,00	1.02.0.00.0.00.02.0020 - BLUD PUSKESMAS CURUG
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	948.078.332,00	85	948.078.332,00	86	948.078.332,00	87	948.078.332,00	88	948.078.332,00	1.02.0.00.0.00.02.0021 - BLUD PUSKESMAS RAU
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	2.228.304.507,00	88	2.228.304.507,00	86	2.228.304.507,00	87	2.228.304.507,00	88	2.228.304.507,00	1.02.0.00.0.00.02.0022 - BLUD PUSKESMAS WALANTAKA
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	734.676.619,00	85	734.676.619,00	86	734.676.619,00	87	734.676.619,00	88	734.676.619,00	1.02.0.00.0.00.02.0023 - BLUD PUSKESMAS CIRACAS
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	665.936.534,00	85	665.936.534,00	86	665.936.534,00	87	665.936.534,00	88	665.936.534,00	1.02.0.00.0.00.02.0024 - BLUD PUSKESMAS SAWAH LUHUR
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	2.561.625.780,00	85	2.561.625.780,00	86	2.561.625.780,00	87	2.561.625.780,00	88	2.561.625.780,00	1.02.0.00.0.00.02.0025 - BLUD PUSKESMAS SERANG KOTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	2.619.229.025,00	85	2.619.229.025,00	86	2.619.229.025,00	87	2.619.229.025,00	88	2.619.229.025,00	1.02.0.00.0.00.02.002 6 - BLUD PUSKESMAS SINGANDARU
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	3.028.922.566,00	85	3.028.922.566,00	86	3.028.922.566,00	87	3.028.922.566,00	88	3.028.922.566,00	1.02.0.00.0.00.02.002 7 - BLUD PUSKESMAS KILASAH
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	1.003.937.231,00	85	1.003.937.231,00	86	1.003.937.231,00	87	1.003.937.231,00	88	1.003.937.231,00	1.02.0.00.0.00.02.002 8 - BLUD PUSKESMAS KALODRAN
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	1.384.122.892,00	85	1.384.122.892,00	86	1.384.122.892,00	87	1.384.122.892,00	88	1.384.122.892,00	1.02.0.00.0.00.02.002 9 - BLUD PUSKESMAS UNYUR
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	2.227.746.380,00	85	2.227.746.380,00	86	2.227.746.380,00	87	2.227.746.380,00	88	2.227.746.380,00	1.02.0.00.0.00.02.003 0 - BLUD PUSKESMAS KASEMEN
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	1.109.718.559,00	85	1.109.718.559,00	86	1.109.718.559,00	87	1.109.718.559,00	88	1.109.718.559,00	1.02.0.00.0.00.02.003 1 - BLUD PUSKESMAS PANCUR
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	1.554.448.800,00	85	1.554.448.800,00	86	1.554.448.800,00	87	1.554.448.800,00	88	1.554.448.800,00	1.02.0.00.0.00.02.003 2 - BLUD PUSKESMAS BANTEN GIRANG
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	681.253.022,00	85	681.253.022,00	86	681.253.022,00	87	681.253.022,00	88	681.253.022,00	1.02.0.00.0.00.02.003 3 - BLUD PUSKESMAS CIPOCOK JAYA
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	2.276.788.962,00	85	2.276.788.962,00	86	2.276.788.962,00	87	2.276.788.962,00	88	2.276.788.962,00	1.02.0.00.0.00.02.003 4 - BLUD PUSKESMAS TAKTAKAN
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	1.242.165.098,00	85	1.242.165.098,00	86	1.242.165.098,00	87	1.242.165.098,00	88	1.242.165.098,00	1.02.0.00.0.00.02.003 5 - BLUD PUSKESMAS BANJAR AGUNG
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	156.460.381,00	85	156.460.381,00	86	156.460.381,00	87	156.460.381,00	88	156.460.381,00	1.02.0.00.0.00.02.003 6 - BLUD PUSKESMAS LABKESDA
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan BLUD (Angka)	82,31	83	84	22.381.000.000,00	85	22.381.000.000,00	86	22.381.000.000,00	87	22.381.000.000,00	88	22.381.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.003 7 - BLUD RSUD KOTA SERANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					48.988.166.111,00		54.998.166.111,00		53.883.091.433,00		56.788.715.521,00		55.740.326.721,00	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	72	70	68	48.988.166.111,00	64	54.998.166.111,00	62	53.883.091.433,00	60	56.788.715.521,00	60	55.740.326.721,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	153	139	131		124		116		108		108		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Insidensi Tuberkulosis (Kasus)	4.093	3.181	2.744		2.377		2.116		1.917		1.765		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	87,5	87,5	87,5		87,5		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	22,90	19,46	18,19		17,01		15,90		14,87		14,54		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (%)	2,30	2,31	2,32		2,33		2,34		2,35		2,36		1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					437.850.902,00		437.850.902,00		437.850.902,00		437.850.902,00		437.850.902,00	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	30	40	50	437.850.902,00	60	437.850.902,00	70	437.850.902,00	80	437.850.902,00	90	437.850.902,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					267.315.800,00		267.315.800,00		267.315.800,00		267.315.800,00		267.315.800,00	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	85	85,5	86	267.315.800,00	86,5	267.315.800,00	87	267.315.800,00	87,5	267.315.800,00	88	267.315.800,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					224.999.600,00		224.999.600,00		224.999.600,00		224.999.600,00		224.999.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	224.999.600,00	100	224.999.600,00	100	224.999.600,00	100	224.999.600,00	100	224.999.600,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					222.941.776.972,00		124.500.510.426,00		134.500.510.426,00		170.176.436.191,00		174.926.974.900,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.685.353.973,00		18.813.775.484,00		19.158.869.693,00		21.360.470.147,00		22.240.073.980,00	
Meningkatnya Kebijakan Mutu, Prosedur pelayanan dan Pengujian, Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan, Serta peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan hasil pengujian untuk pengembangan infrastruktur	Presentase Kualitas Layanan dan Efektivitas Operasional UPT Lab dan Perbengkelan DPUPR (%)	90	95	95	1.000.000.000,00	95	3.900.000.000,00	97	3.765.000.000,00	97	4.430.000.000,00	99	4.770.000.000,00	1.03.0.00.0.00.34.0001 - UPTD PERLENGKAPAN, PERBENGKELAN DAN LABORATORIUM
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Kesekretariatan (poin)	85	85	86	12.685.353.973,00	87	14.913.775.484,00	88	15.393.869.693,00	89	16.930.470.147,00	90	17.470.073.980,00	1.03.0.00.0.00.34.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					5.840.755.500,00		8.711.802.361,00		9.020.000.000,00		17.003.805.500,00		13.103.805.500,00	
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Presentase Irigasi Dalam Kondisi baik (%)	96	97	98	5.840.755.500,00	98	8.711.802.361,00	99	9.020.000.000,00	99	17.003.805.500,00	99	13.103.805.500,00	1.03.0.00.0.00.34.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					678.067.600,00		4.870.000.000,00		6.647.142.964,00		7.005.857.260,00		7.980.442.986,00	
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum	Presentase Peningkatan Akses Air Minum Aman (%)	5,86	5,94	6,12	678.067.600,00	6,3	4.870.000.000,00	6,49	6.647.142.964,00	6,69	7.005.857.260,00	6,89	7.980.442.986,00	1.03.0.00.0.00.34.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Presentase Peningkatan Akses Air Minum Layak (%)	86,79	89,39	92,08		94,84		97,68		98,68		100		1.03.0.00.0.00.34.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					621.932.400,00		2.327.321.800,00		5.882.168.060,00		6.730.384.866,00		28.083.423.353,00	
Meningkatnya Cakupan Pelayanan sanitasi	Presentase Peningkatan Akses Sanitasi Aman (%)	2,2	2,6	2,68	621.932.400,00	2,76	2.327.321.800,00	2,84	5.882.168.060,00	2,93	6.730.384.866,00	3,01	28.083.423.353,00	1.03.0.00.0.00.34.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Presentase Peningkatan Akses Sanitasi Layak (%)	66,28	68,27	70,32		72,43		73,6		74,8		100		1.03.0.00.0.00.34.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					9.159.244.500,00		12.591.050.000,00		14.591.050.000,00		29.670.380.778,00		18.501.095.500,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Drainase (%)	10	12	14	9.159.244.500,00	16	12.591.050.000,00	18	14.591.050.000,00	20	29.670.380.778,00	22	18.501.095.500,00	1.03.0.00.0.00.34.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					130.731.542.999,00		12.538.145.225,00		16.191.959.747,00		22.911.155.723,00		15.141.693.253,00	
Meningkatnya Kualitas Bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik (%)	41	43	45	130.731.542.999,00	47	12.538.145.225,00	48	16.191.959.747,00	49	22.911.155.723,00	50	15.141.693.253,00	1.03.0.00.0.00.34.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					204.095.000,00		2.925.000.000,00		7.562.500.000,00		8.318.750.000,00		9.150.625.000,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	41	43	45	204.095.000,00	47	2.925.000.000,00	48	7.562.500.000,00	49	8.318.750.000,00	50	9.150.625.000,00	1.03.0.00.0.00.34.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					60.500.000.000,00		56.439.967.556,00		51.046.823.022,00		53.337.135.283,00		56.302.469.031,00	
Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan Jalan Kondisi Baik (%)	83,77	85	87	60.500.000.000,00	89	56.439.967.556,00	91	51.046.823.022,00	93	53.337.135.283,00	95	56.302.469.031,00	1.03.0.00.0.00.34.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					620.785.000,00		445.040.000,00		1.134.996.940,00		1.248.496.634,00		1.373.346.297,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	100	100	100	620.785.000,00	100	445.040.000,00	100	1.134.996.940,00	100	1.248.496.634,00	100	1.373.346.297,00	1.03.0.00.0.00.34.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					900.000.000,00		4.838.408.000,00		3.265.000.000,00		2.590.000.000,00		3.050.000.000,00	
Meningkatnya Kesesuaian Pembangunan Dengan Rencana Tata Ruang	Presentase Kesesuaian Pembangunan Terhadap Rencana Tata Ruang (%)	70	70	71	900.000.000,00	72	4.838.408.000,00	73	3.265.000.000,00	74	2.590.000.000,00	75	3.050.000.000,00	1.03.0.00.0.00.34.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					33.002.741.611,00		27.073.665.558,00		29.033.665.558,00		31.993.665.558,00		32.356.867.283,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.521.201.611,00		10.555.502.050,00		11.415.502.050,00		12.275.502.050,00		12.638.703.775,00	
Meninglkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	70	80	81	10.521.201.611,00	82	10.555.502.050,00	83	11.415.502.050,00	84	12.275.502.050,00	85	12.638.703.775,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					3.141.290.000,00		2.423.887.568,00		2.523.887.568,00		2.623.887.568,00		2.623.887.568,00	
Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Rumah yang Diperbaiki Akibat Bencana (%)	104,26	100,00	100,00	3.141.290.000,00	100,00	2.423.887.568,00	100,00	2.523.887.568,00	100,00	2.623.887.568,00	100,00	2.623.887.568,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Cakupan Hunian Terhadap Daya Tampung Rusunawa (%)	48,96	49,64	50,36		51,07		51,43		51,79		52,14		1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					3.154.692.600,00		5.412.000.000,00		5.732.060.000,00		6.583.554.000,00		6.583.554.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Di Kawasan Permukiman (%)	10,63	9,87	9,02	3.154.692.600,00	7,93	5.412.000.000,00	6,84	5.732.060.000,00	5,76	6.583.554.000,00	4,67	6.583.554.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Presentase Luas Kawasan Permukiman yang Tertangani (%)	8,36	15,13	20,77		26,41		32,05		37,68		43,32		1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.148.507.400,00		1.925.260.000,00		2.105.200.000,00		2.253.706.000,00		2.253.706.000,00	
Meningkatnya rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangkat mewujudkan tempat tinggal yang layak huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (%)	11,67	11,65	11,61	1.148.507.400,00	11,57	1.925.260.000,00	11,54	2.105.200.000,00	11,50	2.253.706.000,00	11,46	2.253.706.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					15.037.050.000,00		6.757.015.940,00		7.257.015.940,00		8.257.015.940,00		8.257.015.940,00	
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Dengan Lingkungan Hunian Yang Nyaman dan Sehat	Persentase PSU PErumahan yang Layak (%)	71,82	72,81	73,73	15.037.050.000,00	74,59	6.757.015.940,00	75,40	7.257.015.940,00	76,15	8.257.015.940,00	76,87	8.257.015.940,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					26.802.847.139,00		25.260.264.817,00		25.765.470.113,00		27.053.743.618,00		27.324.281.055,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.523.735.644,00		15.940.471.114,00		16.380.757.564,00		17.449.825.274,00		17.627.796.124,00	
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	80	85	85	10.894.008.524,00	85	10.105.113.014,00	90	10.474.496.364,00	95	11.212.073.874,00	100	11.295.420.224,00	1.05.0.00.0.00.05.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Kesekretariatan (poin)	100	85	86	5.629.727.120,00	87	5.835.358.100,00	88	5.906.261.200,00	89	6.237.751.400,00	90	6.332.375.900,00	1.05.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4.880.249.172,00		4.439.329.972,00		4.412.329.972,00		4.547.829.972,00		4.597.829.972,00	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase penyelesaian pelanggaran perda atau perkada yang dilakukan melalui penindakan non yustisi dan yustisi (%)	-	70,00	71,50	177.769.800,00	73,00	136.345.000,00	74,50	136.345.000,00	76,00	136.345.000,00	77,50	136.345.000,00	1.05.0.00.0.00.05.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	4.622.972.372,00	100	4.224.977.972,00	100	4.197.977.972,00	100	4.331.977.972,00	100	4.381.977.972,00	1.05.0.00.0.00.05.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Pemenuhan Capaian Kebutuhan Dasar SPM Sub Urusan Trantibum (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.05.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	75	75	80	79.507.000,00	85	78.007.000,00	90	78.007.000,00	95	79.507.000,00	100	79.507.000,00	1.05.0.00.0.00.05.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.485.156.900,00		2.305.739.838,00		2.397.658.696,00		2.481.364.491,00		2.473.931.150,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	2.485.156.900,00	100	2.305.739.838,00	100	2.397.658.696,00	100	2.481.364.491,00	100	2.473.931.150,00	1.05.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.913.705.423,00		2.574.723.893,00		2.574.723.881,00		2.574.723.881,00		2.624.723.809,00	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Pemenuhan Capaian Kebutuhan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran (%)	100	100	100	2.913.705.423,00	100	2.574.723.893,00	100	2.574.723.881,00	100	2.574.723.881,00	100	2.624.723.809,00	1.05.0.00.0.00.05.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.05.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					18.313.152.581,00		18.313.152.581,00		18.679.415.633,00		19.613.386.414,00		19.809.520.278,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.886.621.281,00		10.074.647.481,00		10.140.159.833,00		10.261.162.914,00		10.286.023.178,00	
Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Kesekretariatan (poin)	77,5	79	80	9.886.621.281,00	81	10.074.647.481,00	82	10.140.159.833,00	83	10.261.162.914,00	84	10.286.023.178,00	1.06.0.00.0.00.07.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.153.215.400,00		1.079.963.400,00		1.116.224.600,00		1.162.239.100,00		1.195.688.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	0	100	100	1.153.215.400,00	100	1.079.963.400,00	100	1.116.224.600,00	100	1.162.239.100,00	100	1.195.688.700,00	1.06.0.00.0.00.07.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.07.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.127.994.200,00		2.495.589.800,00		2.495.589.800,00		2.495.589.800,00		2.495.589.800,00	
Meningkatnya Rehabilitasi Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100	2.127.994.200,00	100	2.495.589.800,00	100	2.495.589.800,00	100	2.495.589.800,00	100	2.495.589.800,00	1.06.0.00.0.00.07.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.07.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.07.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.07.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					2.929.019.300,00		3.266.079.400,00		3.436.669.300,00		4.167.189.300,00		4.267.189.300,00	
Meningkatnya Distribusi Bantuan Jaminan Sosial Yang Tepat Sasaran	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	100	100	100	2.929.019.300,00	100	3.266.079.400,00	100	3.436.669.300,00	100	4.167.189.300,00	100	4.267.189.300,00	1.06.0.00.0.00.07.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.07.000 0 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.245.092.400,00		1.267.092.400,00		1.357.807.800,00		1.391.581.800,00		1.429.405.800,00	
Meningkatnya Korban Bencana yang Tertangani Dengan Bantuan Sosial	Persentase Korban bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	1.245.092.400,00	100	1.267.092.400,00	100	1.357.807.800,00	100	1.391.581.800,00	100	1.429.405.800,00	1.06.0.00.0.00.07.000 0 - DINAS SOSIAL
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.07.000 0 - DINAS SOSIAL
	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.07.000 0 - DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					971.210.000,00		129.780.100,00		132.964.300,00		135.623.500,00		135.623.500,00	
Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	100	100	100	971.210.000,00	100	129.780.100,00	100	132.964.300,00	100	135.623.500,00	100	135.623.500,00	1.06.0.00.0.00.07.000 0 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					11.414.213.449,00		12.175.839.523,00		12.891.888.987,00		13.517.599.652,00		13.615.385.750,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.958.478.591,00		10.605.855.703,00		11.384.088.327,00		11.705.709.336,00		11.877.274.698,00	
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	70	75	77	9.958.478.591,00	79	10.605.855.703,00	80	11.384.088.327,00	82	11.705.709.336,00	83	11.877.274.698,00	2.07.3.32.0.00.08.000 0 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					164.063.554,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		85.356.750,00	
Meningkatnya informasi dan pengelolaan pendayagunaan tenaga kerja	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan (%)	-	-	100	164.063.554,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	85.356.750,00	2.07.3.32.0.00.08.000 0 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					293.500.670,00		372.850.737,00		443.454.270,00		469.172.159,00		484.264.331,00	
Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan (%)	70	75	76	293.500.670,00	77	372.850.737,00	78	443.454.270,00	79	469.172.159,00	80	484.264.331,00	2.07.3.32.0.00.08.000 0 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					758.892.450,00		908.927.080,00		749.819.788,00		964.801.766,00		780.281.941,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)	9,72	9,72	10,22	758.892.450,00	10,72	908.927.080,00	11,22	749.819.788,00	11,72	964.801.766,00	12,22	780.281.941,00	2.07.3.32.0.00.08.000 0 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					239.278.184,00		263.206.003,00		289.526.602,00		352.916.391,00		388.208.030,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	79,94	80	80,5	239.278.184,00	81	263.206.003,00	81,5	289.526.602,00	82	352.916.391,00	82,5	388.208.030,00	2.07.3.32.0.00.08.000 0 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					11.662.991.757,00		10.984.314.733,00		11.223.881.061,00		11.599.249.973,00		11.687.536.655,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.033.340.891,00		9.408.193.486,00		9.642.503.610,00		9.836.460.259,00		9.773.806.316,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	84	85	86	10.033.340.891,00	87	9.408.193.486,00	88	9.642.503.610,00	89	9.836.460.259,00	90	9.773.806.316,00	2.08.2.13.2.14.09.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					534.464.370,00		615.853.291,00		618.253.073,00		752.399.538,00		775.507.190,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	14,23	15,19	16,15	534.464.370,00	17,12	615.853.291,00	18,08	618.253.073,00	19,04	752.399.538,00	20,00	775.507.190,00	2.08.2.13.2.14.09.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	53,21	53,74	54,50		55,04		55,59		56,15		56,71		2.08.2.13.2.14.09.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					292.932.996,00		255.493.356,00		256.166.923,00		279.604.911,00		304.411.896,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	292.932.996,00	100	255.493.356,00	100	256.166.923,00	100	279.604.911,00	100	304.411.896,00	2.08.2.13.2.14.09.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		82.500.000,00		173.250.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	-	78	79	0,00	80	75.000.000,00	81	75.000.000,00	82	82.500.000,00	83	173.250.000,00	2.08.2.13.2.14.09.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					510.048.500,00		191.352.500,00		191.352.500,00		193.266.025,00		191.352.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	60,87	61,60	62,00	510.048.500,00	62,40	191.352.500,00	62,60	191.352.500,00	63,00	193.266.025,00	63,40	191.352.500,00	2.08.2.13.2.14.09.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					292.205.000,00		438.422.100,00		440.604.955,00		455.019.240,00		469.208.753,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	292.205.000,00	100	438.422.100,00	100	440.604.955,00	100	455.019.240,00	100	469.208.753,00	2.08.2.13.2.14.09.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	83,39	84,00	84,30		84,60		84,90		85,20		85,50		2.08.2.13.2.14.09.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					347.750.000,00		347.750.000,00		347.750.000,00		347.750.000,00		347.750.000,00	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	203,73	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					157.750.000,00		157.750.000,00		157.750.000,00		157.750.000,00		157.750.000,00	
Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	90,9	91	91,1	64.750.000,00	91,2	64.750.000,00	91,3	64.750.000,00	91,4	64.750.000,00	91,5	64.750.000,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (%)	84,81	89,25	89,35	93.000.000,00	89,45	93.000.000,00	89,55	93.000.000,00	89,65	93.000.000,00	89,75	93.000.000,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					114.000.000,00		114.000.000,00		114.000.000,00		114.000.000,00		114.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2,98	2,97	2,96	114.000.000,00	2,95	114.000.000,00	2,94	114.000.000,00	2,93	114.000.000,00	2,92	114.000.000,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	94,44	94,45	94,46	36.000.000,00	94,47	36.000.000,00	94,48	36.000.000,00	94,49	36.000.000,00	94,50	36.000.000,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.451.999.950,00		1.246.507.016,00		2.286.507.016,00		4.326.507.016,00		4.326.507.016,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					135.000.000,00		98.450.000,00		154.561.500,00		165.380.805,00		176.957.465,00	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota (%)	100,00	100,00	100,00	135.000.000,00	100,00	98.450.000,00	100,00	154.561.500,00	100,00	165.380.805,00	100,00	176.957.465,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					1.116.999.950,00		964.057.016,00		1.902.965.516,00		3.916.117.611,00		3.887.390.351,00	
Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong (%)	33,3	100,00	100,00	1.116.999.950,00	100,00	964.057.016,00	100,00	1.902.965.516,00	100,00	3.916.117.611,00	100,00	3.887.390.351,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					200.000.000,00		184.000.000,00		228.980.000,00		245.008.600,00		262.159.200,00	
Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak atas Tanah	Persentase Ketersediaan Dokumen Penatagunaan Tanah (%)	100,00	100,00	100,00	200.000.000,00	100,00	184.000.000,00	100,00	228.980.000,00	100,00	245.008.600,00	100,00	262.159.200,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					65.748.564.015,00		62.016.265.572,00		89.521.365.572,00		70.066.365.572,00		70.890.779.228,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.594.327.180,00		18.126.725.572,00		18.916.365.572,00		19.956.365.572,00		20.305.779.228,00	
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasaan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	85	13.594.327.180,00	85	18.126.725.572,00	87	18.916.365.572,00	87	19.956.365.572,00	90	20.305.779.228,00	2.11.0.00.0.00.10.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					17.428.750,00		318.780.000,00		370.000.000,00		400.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Dokumen Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan Hidup	Capaian Dokumen Kajian Di Lingkungan Hidup yang Di Susun (%)	37,5	40	100	17.428.750,00	100	318.780.000,00	100	370.000.000,00	100	400.000.000,00	100	600.000.000,00	2.11.0.00.0.00.10.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					824.804.000,00		2.334.500.000,00		2.905.000.000,00		3.300.000.000,00		3.450.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian terhadap Hasil Pemantauan Air dan Udara	Capaian Pengendalian Pencemaran Lingkungan (%)	73	74	74,25	824.804.000,00	74,5	2.334.500.000,00	74,75	2.905.000.000,00	75	3.300.000.000,00	75,25	3.450.000.000,00	2.11.0.00.0.00.10.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					28.980.000.000,00		5.500.000.000,00		28.980.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00	
Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua (Persentase)	3,05	3,05	3,08	28.980.000.000,00	3,08	5.500.000.000,00	3,10	28.980.000.000,00	3,10	7.000.000.000,00	3,12	7.000.000.000,00	2.11.0.00.0.00.10.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					8.657.800,00		300.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya Pemantauan Pengendalian limbah B3	Persentase Capaian Pengendalian Limbah B3 (%)	27	27	32	8.657.800,00	34	300.000.000,00	36	400.000.000,00	38	450.000.000,00	40	450.000.000,00	2.11.0.00.0.00.10.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					10.647.500,00		281.260.000,00		325.000.000,00		360.000.000,00		375.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan/Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pmerintah Daerah Kab/Kota (%)	83,33	83,53	83,73	10.647.500,00	83,93	281.260.000,00	84,13	325.000.000,00	84,33	360.000.000,00	84,53	375.000.000,00	2.11.0.00.0.00.10.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					20.793.600,00		550.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		775.000.000,00	
Meningkatnya Capaian Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	9,62	13	16	20.793.600,00	19	550.000.000,00	23	700.000.000,00	27	750.000.000,00	30	775.000.000,00	2.11.0.00.0.00.10.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatkan Kesadaran Lingkungan dan partisipasi Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	-	-	20	0,00	25	100.000.000,00	30	150.000.000,00	35	175.000.000,00	50	200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.10.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					9.537.300,00		125.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00	
Meningkatnya capaian pengaduan lingkungan hidup kewenangan kota yang tertangani	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	9.537.300,00	100	125.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	160.000.000,00	2.11.0.00.0.00.10.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					22.282.367.885,00		34.380.000.000,00		36.625.000.000,00		37.525.000.000,00		37.575.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Capaian Penanganan Sampah	Persentase Penanganan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	60,59	62	64	22.282.367.885,00	65	34.380.000.000,00	67	36.625.000.000,00	69	37.525.000.000,00	70	37.575.000.000,00	2.11.0.00.0.00.10.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					13.374.745.469,00		12.037.270.922,00		12.278.016.340,00		12.891.917.157,00		13.020.836.329,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.560.707.469,00		10.595.655.922,00		10.836.401.340,00		11.450.302.157,00		11.206.798.329,00	
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	75,00	76,00	77,00	11.560.707.469,00	78,00	10.595.655.922,00	79,00	10.836.401.340,00	80,00	11.450.302.157,00	81,00	11.206.798.329,00	2.12.0.00.0.00.11.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					636.600.000,00		493.115.000,00		493.115.000,00		493.115.000,00		636.600.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%)	63,00	66,00	99,00	636.600.000,00	99,2	493.115.000,00	99,4	493.115.000,00	99,6	493.115.000,00	99,8	636.600.000,00	2.12.0.00.0.00.11.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penerapan Indentitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	-	7,39	10		15		20		25		30		2.12.0.00.0.00.11.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					579.888.000,00		464.000.000,00		464.000.000,00		464.000.000,00		579.888.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)	46,00	47,00	52,00	579.888.000,00	53,00	464.000.000,00	54,00	464.000.000,00	55,00	464.000.000,00	56,00	579.888.000,00	2.12.0.00.0.00.11.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					530.050.000,00		434.000.000,00		434.000.000,00		434.000.000,00		530.050.000,00	
Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100	258.050.000,00	100	226.000.000,00	100	226.000.000,00	100	226.000.000,00	100	258.050.000,00	2.12.0.00.0.00.11.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan SIAK	Cakupan Penyelenggaraan SIAK (%)	100	100	100	272.000.000,00	100	208.000.000,00	100	208.000.000,00	100	208.000.000,00	100	272.000.000,00	2.12.0.00.0.00.11.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					67.500.000,00		50.500.000,00		50.500.000,00		50.500.000,00		67.500.000,00	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Persentase Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tersedia (%)	100	100	100	67.500.000,00	100	50.500.000,00	100	50.500.000,00	100	50.500.000,00	100	67.500.000,00	2.12.0.00.0.00.11.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					1.478.832.000,00		1.043.326.648,00		1.044.313.148,00		1.282.353.945,00		1.322.883.304,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					177.874.600,00		288.632.500,00		289.619.000,00		298.400.475,00		302.038.300,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	12,43	12.43-12.04	12.04-11.60	177.874.600,00	11.60-11.08	288.632.500,00	11.08-10.80	289.619.000,00	10.80-10.50	298.400.475,00	10.50-10.30	302.038.300,00	2.08.2.13.2.14.09.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					816.959.400,00		476.815.588,00		460.817.000,00		511.273.900,00		512.828.967,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persen) (%)	69,51	69,75	70,00	816.959.400,00	70,28	476.815.588,00	70,86	460.817.000,00	71,02	511.273.900,00	71,30	512.828.967,00	2.08.2.13.2.14.09.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	7,00	6,84	6,67		6,49		6,30		6,10		5,89		2.08.2.13.2.14.09.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase tenaga penyuluh yang terbina (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.2.13.2.14.09.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.2.13.2.14.09.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					483.998.000,00		277.878.560,00		293.877.148,00		472.679.570,00		508.016.037,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	37,77	38,00	39,00	483.998.000,00	40,00	277.878.560,00	41,00	293.877.148,00	42,00	472.679.570,00	43,00	508.016.037,00	2.08.2.13.2.14.09.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					36.034.956.206,00		28.107.265.840,00		28.669.411.157,00		30.102.881.715,00		30.403.910.532,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.106.565.206,00		11.579.352.847,00		11.581.498.164,00		11.710.453.722,00		11.681.482.539,00	
Meningkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	80	80	81	12.106.565.206,00	82	11.579.352.847,00	83	11.581.498.164,00	84	11.710.453.722,00	85	11.681.482.539,00	2.15.0.00.0.00.12.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					23.928.391.000,00		16.527.912.993,00		17.087.912.993,00		18.392.427.993,00		18.722.427.993,00	
Meningkatnya ketertiban angkutan umum	Persentase Angkutan Umum yang Tertib (%)	0	0	11,36	420.000.000,00	28,41	531.000.000,00	45,45	581.000.000,00	62,50	652.000.000,00	80,68	652.000.000,00	2.15.0.00.0.00.12.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	23	33,5	44,33	6.647.000.000,00	55,17	5.927.427.993,00	66	5.937.427.993,00	76,83	6.040.000.000,00	87,67	5.940.000.000,00	2.15.0.00.0.00.12.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan yang Memadai (%)	6,75	9,01	29,52	16.661.391.000,00	33,92	9.867.485.000,00	54,43	10.367.485.000,00	60,49	11.498.427.993,00	66,55	11.928.427.993,00	2.15.0.00.0.00.12.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tindak lanjut hasil audit dan inspeksi keselamatan jalan	Persentase Penanganan Ruas Jalan yang Berkeselamatan (%)	44	48	52	200.000.000,00	56	202.000.000,00	60	202.000.000,00	64	202.000.000,00	72	202.000.000,00	2.15.0.00.0.00.12.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					10.751.121.747,00		12.729.121.747,00		12.978.548.562,00		13.511.685.538,00		13.611.734.379,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.038.325.947,00		9.374.967.347,00		9.357.504.574,00		9.411.968.174,00		9.473.157.015,00	
Meningkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	80	81	82	9.038.325.947,00	84	9.374.967.347,00	86	9.357.504.574,00	88	9.411.968.174,00	90	9.473.157.015,00	2.16.2.20.2.21.13.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					658.175.800,00		624.290.800,00		637.113.988,00		809.607.364,00		818.467.364,00	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Angka)	96,95	96,95	96,96	658.175.800,00	96,97	624.290.800,00	96,98	637.113.988,00	96,99	809.607.364,00	97	818.467.364,00	2.16.2.20.2.21.13.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.054.620.000,00		2.729.863.600,00		2.983.930.000,00		3.290.110.000,00		3.320.110.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	1.054.620.000,00	100	2.729.863.600,00	100	2.983.930.000,00	100	3.290.110.000,00	100	3.320.110.000,00	2.16.2.20.2.21.13.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	36	40	45		50		55		60		65		2.16.2.20.2.21.13.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					20.118.534.155,00		17.670.939.898,00		18.591.019.789,00		19.061.191.015,00		21.230.887.313,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.958.506.473,00		13.548.568.929,00		13.847.156.481,00		14.390.696.465,00		15.737.729.441,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	80	80	81	12.958.506.473,00	82	13.548.568.929,00	83	13.847.156.481,00	84	14.390.696.465,00	85	15.737.729.441,00	2.17.3.30.3.31.37.000 0 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					555.070.504,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	32,61	37,50	40,00	555.070.504,00	60,00	100.000.000,00	80,00	100.000.000,00	80,00	100.000.000,00	100	100.000.000,00	2.17.3.30.3.31.37.000 0 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					50.000.000,00		52.000.000,00		54.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	22,19	23,08	27,67	50.000.000,00	28,10	52.000.000,00	28,54	54.000.000,00	28,54	55.000.000,00	29,19	60.000.000,00	2.17.3.30.3.31.37.000 0 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					815.602.852,00		205.151.169,00		487.533.608,00		250.000.000,00		819.916.047,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	22,19	23,08	27,67	815.602.852,00	28,10	205.151.169,00	28,54	487.533.608,00	28,54	250.000.000,00	29,19	819.916.047,00	2.17.3.30.3.31.37.000 0 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					467.121.126,00		265.000.000,00		272.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	-	-	0,58	467.121.126,00	0,97	265.000.000,00	1,36	272.000.000,00	1,75	270.000.000,00	2,14	270.000.000,00	2.17.3.30.3.31.37.000 0 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					2.846.813.200,00		2.520.219.800,00		2.830.329.700,00		2.995.494.550,00		3.243.241.825,00	
Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	5,41	6,50	7,59	2.846.813.200,00	8,68	2.520.219.800,00	9,77	2.830.329.700,00	10,86	2.995.494.550,00	10,86	3.243.241.825,00	2.17.3.30.3.31.37.000 0 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					2.425.420.000,00		980.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	4,33	5,41	6,41	2.425.420.000,00	7,57	980.000.000,00	8,65	1.000.000.000,00	9,73	1.000.000.000,00	9,73	1.000.000.000,00	2.17.3.30.3.31.37.000 0 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					12.881.652.332,00		12.605.321.918,00		12.857.428.357,00		13.500.299.776,00		13.635.302.773,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.530.746.832,00		10.265.116.457,00		10.216.195.962,00		10.579.144.376,00		10.678.144.376,00	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	77	77	78	10.530.746.832,00	79	10.265.116.457,00	80	10.216.195.962,00	80,50	10.579.144.376,00	81	10.678.144.376,00	2.18.0.00.0.00.14.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					233.560.500,00		499.190.875,00		354.637.678,00		729.432.135,00		629.432.135,00	
Meningkatnya kemudahan Berinvestasi	Persentase peningkatan investor yang baru menanamkan modal (%)	100	100	100	233.560.500,00	100	499.190.875,00	100	354.637.678,00	100	729.432.135,00	100	629.432.135,00	2.18.0.00.0.00.14.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					1.141.277.200,00		864.946.786,00		1.117.053.225,00		1.195.655.465,00		1.195.655.465,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Optimalisasi Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	1.141.277.200,00	100	864.946.786,00	100	1.117.053.225,00	100	1.195.655.465,00	100	1.195.655.465,00	2.18.0.00.0.00.14.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					293.359.000,00		293.359.000,00		345.362.194,00		313.359.000,00		314.359.000,00	
Meningkatnya Layanan Digitalisasi Investasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	100	100	100	293.359.000,00	100	293.359.000,00	100	345.362.194,00	100	313.359.000,00	100	314.359.000,00	2.18.0.00.0.00.14.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					387.648.000,00		387.648.000,00		487.648.000,00		387.648.000,00		522.650.997,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	387.648.000,00	100	387.648.000,00	100	487.648.000,00	100	387.648.000,00	100	522.650.997,00	2.18.0.00.0.00.14.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					295.060.800,00		295.060.800,00		336.531.298,00		295.060.800,00		295.060.800,00	
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Online Terintegrasi	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	69	70	79,45	295.060.800,00	79,75	295.060.800,00	80	336.531.298,00	80,25	295.060.800,00	80,50	295.060.800,00	2.18.0.00.0.00.14.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					10.362.174.750,00		3.276.491.613,00		3.533.094.097,00		3.940.572.043,00		3.748.278.605,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.636.974.750,00		357.000.000,00		357.000.000,00		357.000.000,00		357.000.000,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	3,56	3,57	3,58	1.636.974.750,00	3,58	357.000.000,00	3,60	357.000.000,00	3,61	357.000.000,00	3,62	357.000.000,00	2.19.3.26.0.00.15.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					8.375.200.000,00		2.819.491.613,00		3.076.094.097,00		3.483.572.043,00		3.291.278.605,00	
Meningkatnya Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	1,43	1,44	1,45	8.375.200.000,00	1,46	2.819.491.613,00	1,47	3.076.094.097,00	1,48	3.483.572.043,00	1,49	3.291.278.605,00	2.19.3.26.0.00.15.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (%)	13,18	0	13,20		0		13,21		0		13,22		2.19.3.26.0.00.15.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					350.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	8,05	8,06	8,07	350.000.000,00	8,08	100.000.000,00	8,09	100.000.000,00	8,10	100.000.000,00	8,11	100.000.000,00	2.19.3.26.0.00.15.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					274.000.200,00		288.000.200,00		292.543.800,00		416.000.200,00		448.943.710,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					274.000.200,00		288.000.200,00		292.543.800,00		416.000.200,00		448.943.710,00	
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	274.000.200,00	100	288.000.200,00	100	292.543.800,00	100	416.000.200,00	100	448.943.710,00	2.16.2.20.2.21.13.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					35.172.800,00		43.172.800,00		50.408.280,00		59.889.936,00		66.773.342,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					35.172.800,00		43.172.800,00		50.408.280,00		59.889.936,00		66.773.342,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	40,46	41	43	35.172.800,00	45	43.172.800,00	47	50.408.280,00	49	59.889.936,00	50	66.773.342,00	2.16.2.20.2.21.13.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.218.729.800,00		1.129.153.160,00		1.067.131.261,00		1.175.978.649,00		1.179.623.949,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					966.593.800,00		895.549.156,00		846.358.611,00		932.687.189,00		934.552.563,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Cakupan Kelompok Budaya yang Dibina (%)	64,57	66,80	67,56	966.593.800,00	68,24	895.549.156,00	69,02	846.358.611,00	69,97	932.687.189,00	70,46	934.552.563,00	1.01.2.22.0.00.01.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					134.036.000,00		124.184.354,00		117.363.181,00		129.334.225,00		130.886.236,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah	Persentase Benda Bersejarah yang Dilestarikan (%)	100	100	100	134.036.000,00	100	124.184.354,00	100	117.363.181,00	100	129.334.225,00	100	130.886.236,00	1.01.2.22.0.00.01.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					118.100.000,00		109.419.650,00		103.409.469,00		113.957.235,00		114.185.150,00	
Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	118.100.000,00	100	109.419.650,00	100	103.409.469,00	100	113.957.235,00	100	114.185.150,00	1.01.2.22.0.00.01.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					10.957.070.124,00		10.728.374.065,00		10.871.102.697,00		11.411.803.190,00		11.522.254.408,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.445.151.311,00		9.653.021.708,00		9.691.237.861,00		10.248.069.198,00		10.323.394.823,00	
Meningkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	74	75	77	9.445.151.311,00	81	9.653.021.708,00	85	9.691.237.861,00	87	10.248.069.198,00	90	10.323.394.823,00	2.23.2.24.0.00.16.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.447.005.713,00		1.009.936.022,00		1.112.630.446,00		1.095.643.393,00		1.130.252.884,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Angka)	52,00	53,00	53,50	1.447.005.713,00	54,00	1.009.936.022,00	54,50	1.112.630.446,00	55,00	1.095.643.393,00	55,50	1.130.252.884,00	2.23.2.24.0.00.16.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					64.913.100,00		65.416.335,00		67.234.390,00		68.090.599,00		68.606.701,00	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	-	-	20	64.913.100,00	20	65.416.335,00	20	67.234.390,00	20	68.090.599,00	20	68.606.701,00	2.23.2.24.0.00.16.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.910.030.269,00		565.306.249,00		648.451.224,00		683.728.427,00		694.232.525,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					387.461.000,00		444.023.769,00		528.274.024,00		551.533.507,00		562.037.605,00	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	74,58	74,64	74,75	387.461.000,00	74,84	444.023.769,00	74,89	528.274.024,00	75,08	551.533.507,00	75,38	562.037.605,00	2.23.2.24.0.00.16.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					1.522.569.269,00		121.282.480,00		120.177.200,00		132.194.920,00		132.194.920,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	33	0	50	1.522.569.269,00	50	121.282.480,00	50	120.177.200,00	50	132.194.920,00	50	132.194.920,00	2.23.2.24.0.00.16.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					198.800.000,00		200.300.000,00		201.800.000,00		203.150.000,00		204.500.000,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	5.276	5.381	5.488	50.000.000,00	5.597	50.000.000,00	5.708	50.000.000,00	5.822	50.000.000,00	5.938	50.000.000,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					69.000.000,00		69.000.000,00		69.000.000,00		70.000.000,00		71.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.481	1.510	1.540	69.000.000,00	1.570	69.000.000,00	1.601	69.000.000,00	1.633	70.000.000,00	1.665	71.000.000,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					17.300.000,00		17.300.000,00		17.300.000,00		17.400.000,00		17.500.000,00	
Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati	Persentase Pengawasan Pada Pelaku Usaha Sumber Daya Perikanan (%)	4,63	4,64	4,65	17.300.000,00	4,66	17.300.000,00	4,67	17.300.000,00	4,68	17.400.000,00	4,69	17.500.000,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					62.500.000,00		64.000.000,00		65.500.000,00		65.750.000,00		66.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	43,13	43,50	44	62.500.000,00	44,50	64.000.000,00	45	65.500.000,00	45,50	65.750.000,00	46	66.000.000,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					11.746.177.935,00		11.199.355.267,00		11.232.269.720,00		11.563.059.965,00		11.910.389.723,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.171.679.945,00		10.807.355.267,00		10.840.269.720,00		11.171.059.965,00		11.518.389.723,00	
Tercapainya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	82	82,1	82,2	9.171.679.945,00	82,3	10.807.355.267,00	82,4	10.840.269.720,00	82,5	11.171.059.965,00	82,6	11.518.389.723,00	2.19.3.26.0.00.15.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.280.999.990,00		129.000.000,00		129.000.000,00		129.000.000,00		129.000.000,00	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	0,72	0,73	0,74	1.280.999.990,00	0,75	129.000.000,00	0,76	129.000.000,00	0,77	129.000.000,00	0,78	129.000.000,00	2.19.3.26.0.00.15.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					290.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	30	30	30	290.000.000,00	30	52.000.000,00	30	52.000.000,00	30	52.000.000,00	30	52.000.000,00	2.19.3.26.0.00.15.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					813.030.000,00		209.000.000,00		209.000.000,00		209.000.000,00		209.000.000,00	
Meningkatya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0,23	0,231	0,232	813.030.000,00	0,233	209.000.000,00	0,234	209.000.000,00	0,235	209.000.000,00	0,236	209.000.000,00	2.19.3.26.0.00.15.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					190.468.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas SMD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	11,53	15,38	17,30	190.468.000,00	19,23	2.000.000,00	21,15	2.000.000,00	23,07	2.000.000,00	25,00	2.000.000,00	2.19.3.26.0.00.15.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					23.034.312.688,00		23.032.812.688,00		23.502.929.942,00		24.704.203.939,00		24.955.404.978,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.482.812.688,00		22.481.312.688,00		22.950.429.942,00		24.150.703.939,00		24.401.904.978,00	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Kesekretariatan (poin)	80	81	82	22.482.812.688,00	83	22.481.312.688,00	84	22.950.429.942,00	85	24.150.703.939,00	86	24.401.904.978,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					118.000.000,00		118.000.000,00		119.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	54,41	62,41	74,41	67.000.000,00	90,41	67.000.000,00	112,91	67.000.000,00	142,91	67.000.000,00	182,81	67.000.000,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	81.364	84.520	88.694		93.660		101.027		110.147		121.614		2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Peternakan (Kg)	-	1.604.612,65	1.620.820,86	51.000.000,00	1.633.930,49	51.000.000,00	1.653.399,36	52.000.000,00	1.669.933,35	53.000.000,00	1.679.952,95	53.000.000,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3,022	3,022	3,022	190.000.000,00	3,022	190.000.000,00	3,022	190.000.000,00	3,022	190.000.000,00	3,022	190.000.000,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Peternakan	Persentase Ketersediaan Prasarana Peternakan Sesuai Standar (%)	40	50	55	40.000.000,00	60	40.000.000,00	65	40.000.000,00	70	40.000.000,00	75	40.000.000,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					76.500.000,00		76.500.000,00		76.500.000,00		76.500.000,00		76.500.000,00	
MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra-NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Unit Usaha)	0	0	1	76.500.000,00	1	76.500.000,00	1	76.500.000,00	1	76.500.000,00	1	76.500.000,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	90	3,4	3,35		3,30		3,25		3,20		3,15		2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					57.000.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	14	20	25	57.000.000,00	30	57.000.000,00	35	57.000.000,00	40	57.000.000,00	45	57.000.000,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani	Persentase Kelembagaan Petani yang Ditingkatkan (%)	7	10	15	70.000.000,00	18	70.000.000,00	20	70.000.000,00	22	70.000.000,00	25	70.000.000,00	2.09.3.27.3.25.36.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					20.915.372.294,00		9.993.741.352,00		10.963.720.235,00		11.839.327.384,00		9.854.280.905,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					37.959.500,00		49.470.000,00		60.470.000,00		62.470.000,00		65.417.000,00	
Meningkatnya Kemudahan Proses Perijinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	40,00	60,00	70,00	37.959.500,00	80,00	49.470.000,00	90,00	60.470.000,00	100	62.470.000,00	100	65.417.000,00	2.17.3.30.3.31.37.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					17.856.465.131,00		6.645.749.484,00		6.689.020.003,00		7.007.629.495,00		5.096.003.874,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33,33	22,22	22,22	17.856.465.131,00	22,22	6.645.749.484,00	11,11	6.689.020.003,00	11,11	7.007.629.495,00	11,11	5.096.003.874,00	2.17.3.30.3.31.37.000 0 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					614.630.663,00		428.969.388,00		449.469.388,00		446.969.388,00		467.469.388,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	67,50	70,00	72,50	614.630.663,00	72,50	428.969.388,00	75,00	449.469.388,00	75,00	446.969.388,00	75,00	467.469.388,00	2.17.3.30.3.31.37.000 0 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					1.920.360.200,00		2.340.000.000,00		3.187.253.116,00		3.692.000.000,00		3.537.106.292,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	28,57	42,86	57,14	1.920.360.200,00	71,43	2.340.000.000,00	85,71	3.187.253.116,00	100	3.692.000.000,00	100	3.537.106.292,00	2.17.3.30.3.31.37.000 0 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					485.956.800,00		529.552.480,00		577.507.728,00		630.258.501,00		688.284.351,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	485.956.800,00	100	529.552.480,00	100	577.507.728,00	100	630.258.501,00	100	688.284.351,00	2.17.3.30.3.31.37.000 0 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.015.211.700,00		1.219.701.454,00		1.329.642.680,00		1.453.083.440,00		1.576.969.640,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					547.293.700,00		613.975.754,00		663.344.400,00		720.155.440,00		782.448.860,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	6,93	7,43	18,75	547.293.700,00	21,05	613.975.754,00	21,74	663.344.400,00	22,86	720.155.440,00	23,26	782.448.860,00	2.17.3.30.3.31.37.000 0 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					467.918.000,00		605.725.700,00		666.298.280,00		732.928.000,00		794.520.780,00	
MENINGKATNYA KUALITAS PERIJINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN	Persentase izin usaha Industri yang Diterbitkan (%)	0,00	0,00	13,68	467.918.000,00	14,81	605.725.700,00	15,31	666.298.280,00	16,08	732.928.000,00	16,26	794.520.780,00	2.17.3.30.3.31.37.000 0 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					312.128.695,00		343.341.565,00		377.675.721,00		415.443.293,00		456.987.623,00	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					285.440.595,00		313.984.655,00		345.383.120,00		379.921.432,00		417.913.576,00	
Meningkatnya kualitas pembangunan Kawasan transmigrasi	Capaian Transmigran Yang Ditempatkan (%)	100	100	100	285.440.595,00	100	313.984.655,00	100	345.383.120,00	100	379.921.432,00	100	417.913.576,00	2.07.3.32.0.00.08.000 0 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					26.688.100,00		29.356.910,00		32.292.601,00		35.521.861,00		39.074.047,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan Kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	64,71	65	65	26.688.100,00	65,20	29.356.910,00	65,50	32.292.601,00	65,70	35.521.861,00	66	39.074.047,00	2.07.3.32.0.00.08.000 0 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					68.341.938.238,00		50.998.389.355,00		53.999.389.355,00		56.989.389.355,00		57.565.383.239,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					48.429.209.061,00		38.817.143.869,00		41.261.856.387,00		43.845.659.476,00		44.114.076.244,00	
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	100	100	100	1.345.879.000,00	100	771.637.405,00	100	795.877.300,00	100	818.092.286,00	100	837.168.075,00	4.01.0.00.0.00.19.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya layanan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Difasilitasi (%)	100	100	100	4.871.579.000,00	100	3.053.573.980,00	100	3.637.711.377,00	100	3.591.819.795,00	100	3.924.243.791,00	4.01.0.00.0.00.19.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	42.211.751.061,00	100	34.991.932.484,00	100	36.828.267.710,00	100	39.435.747.395,00	100	39.352.664.378,00	4.01.0.00.0.00.19.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					15.762.892.077,00		9.768.900.364,00		10.132.764.216,00		10.459.840.636,00		10.610.641.764,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otononi Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (%)	100	100	100	547.660.700,00	100	356.426.330,00	100	371.168.963,00	100	386.385.858,00	100	397.624.434,00	4.01.0.00.0.00.19.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otononi Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	1.463.319.200,00	100	978.945.514,00	100	994.563.231,00	100	1.011.419.554,00	100	1.026.961.510,00	4.01.0.00.0.00.19.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesra	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	100	100	11.406.542.377,00	100	6.833.750.000,00	100	7.152.625.000,00	100	7.422.987.500,00	100	7.533.385.000,00	4.01.0.00.0.00.19.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (%)	100	100	100	2.345.369.800,00	100	1.599.778.520,00	100	1.614.407.022,00	100	1.639.047.724,00	100	1.652.670.820,00	4.01.0.00.0.00.19.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					4.149.837.100,00		2.412.345.122,00		2.604.768.752,00		2.683.889.243,00		2.840.665.231,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	100	100	100	1.142.253.300,00	100	671.767.312,00	100	735.944.043,00	100	759.938.448,00	100	806.801.715,00	4.01.0.00.0.00.19.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (%)	100	100	100	1.290.278.000,00	100	694.893.388,00	100	772.895.894,00	100	790.883.523,00	100	856.350.399,00	4.01.0.00.0.00.19.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	100	100	100	1.717.305.800,00	100	1.045.684.422,00	100	1.095.928.815,00	100	1.133.067.272,00	100	1.177.513.117,00	4.01.0.00.0.00.19.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					96.250.000.000,00		71.894.837.047,00		81.894.837.047,00		91.894.837.047,00		92.813.785.417,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					56.843.287.836,00		55.017.639.534,00		56.799.770.543,00		58.385.896.018,00		58.385.896.018,00	
Meningkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Kesekretariatan (poin)	97	97	97	56.843.287.836,00	98	55.017.639.534,00	98	56.799.770.543,00	99	58.385.896.018,00	99	58.385.896.018,00	4.02.0.00.0.00.21.0000 - SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					39.406.712.164,00		16.877.197.513,00		25.095.066.504,00		33.508.941.029,00		34.427.889.399,00	
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	22.271.350.414,00	100	9.877.869.224,00	100	16.115.505.015,00	100	22.153.707.481,00	100	23.005.962.986,00	4.02.0.00.0.00.21.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	97,83	98	98,25		98,25		98,5		98,75		99,25		4.02.0.00.0.00.21.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100	17.135.361.750,00	100	6.999.328.289,00	100	8.979.561.489,00	100	11.355.233.548,00	100	11.421.926.413,00	4.02.0.00.0.00.21.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					18.033.094.306,00		19.879.846.051,00		20.391.282.972,00		21.360.847.121,00		21.675.455.592,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.771.850.406,00		16.329.846.051,00		16.821.282.972,00		17.680.847.121,00		18.125.455.592,00	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	85,62	88,00	90,00	13.771.850.406,00	91,00	16.329.846.051,00	92,00	16.821.282.972,00	93,00	17.680.847.121,00	94,00	18.125.455.592,00	5.01.5.05.0.00.22.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.561.126.900,00		1.200.000.000,00		1.270.000.000,00		1.300.000.000,00		1.250.000.000,00	
Meningkatnya keselarasan,konsistensi, dan hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD (%)	98,04	100	100	1.561.126.900,00	100	1.200.000.000,00	100	1.270.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	1.250.000.000,00	5.01.5.05.0.00.22.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Rata-Rata Tingkat Capaian Evaluasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	87,87	89,11	91,22		93,39		95,48		96,60		97,75		5.01.5.05.0.00.22.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.700.117.000,00		2.350.000.000,00		2.300.000.000,00		2.380.000.000,00		2.300.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya keselarasan, konsistensi, dan hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-Rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	102,55	92,00	92,00	1.000.000.000,00	94,00	830.000.000,00	96,00	820.000.000,00	98,00	850.000.000,00	100	800.000.000,00	5.01.5.05.0.00.22.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase Keselarasan Renstra PD dengan Renja PD pada mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	96,34	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.22.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya keselarasan, konsistensi, dan hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-Rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	93,03	93,30	93,53	945.387.000,00	94,00	800.000.000,00	96,00	770.000.000,00	98,00	800.000.000,00	100	780.000.000,00	5.01.5.05.0.00.22.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase Keselarasan Renstra PD dengan Renja PD pada mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	91,35	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.22.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya keselarasan, konsistensi, dan hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Rata-Rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) (%)	84,34	92,00	92,00	754.730.000,00	94,00	720.000.000,00	96,00	710.000.000,00	98,00	730.000.000,00	100	720.000.000,00	5.01.5.05.0.00.22.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase Keselarasan Renstra PD dengan Renja PD pada mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) (%)	95,09	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.22.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02 - KEUANGAN					63.609.465.489,00		54.507.963.984,00		55.598.123.263,00		58.378.029.427,00		58.961.809.721,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					49.270.572.681,00		45.088.739.939,00		46.266.408.925,00		48.111.259.779,00		48.395.068.263,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	90	90	90	23.014.795.998,00	90	21.983.656.458,00	90	22.069.329.587,00	90	22.735.296.067,00	90	22.772.149.027,00	5.02.0.00.0.00.23.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	68	70	73	26.255.776.683,00	75	23.105.083.481,00	78	24.197.079.338,00	80	25.375.963.712,00	85	25.622.919.236,00	5.02.0.00.0.00.38.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					6.319.999.800,00		3.300.000.000,00		3.550.000.000,00		4.050.000.000,00		4.200.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (%)	100	100	100	1.625.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.250.000.000,00	100	1.300.000.000,00	5.02.0.00.0.00.23.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase BLUD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.23.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tata Kelola Penganggaran	Tingkat kesesuaian dokumen penganggaran terhadap dokumen perencanaan Pembangunan (%)	100	100	100	2.744.999.800,00	100	1.300.000.000,00	100	1.350.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.550.000.000,00	5.02.0.00.0.00.23.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase ketepatan waktu penganggaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.23.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	100	100	100	1.950.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	1.350.000.000,00	5.02.0.00.0.00.23.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.769.774.775,00		1.500.000.000,00		1.700.000.000,00		1.900.000.000,00		2.000.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Tingkat pengelolaan barang milik daerah (%)	90	90	100	2.769.774.775,00	100	1.500.000.000,00	100	1.700.000.000,00	100	1.900.000.000,00	100	2.000.000.000,00	5.02.0.00.0.00.23.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					5.249.118.233,00		4.619.224.045,00		4.081.714.338,00		4.316.769.648,00		4.366.741.458,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Tingkat pertumbuhan transaksi penerimaan pajak daerah (%)	5	5,4	5,8	3.811.682.010,00	6,1	3.354.280.169,00	6,4	2.963.963.931,00	6,8	3.135.108.453,00	7	3.170.938.264,00	5.02.0.00.0.00.38.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya Upaya Eksenstifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah I	Tingkat Pertumbuhan PPD I (%)	8	9	9,5	130.122.713,00	10	114.507.987,00	10,5	101.183.422,00	11	106.395.833,00	11,5	108.249.085,00	5.02.0.00.0.00.38.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya Upaya Eksentifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah II	Tingkat Pertumbuhan PPD II (%)	8	9	9,5	1.307.313.510,00	10	1.150.435.889,00	10,5	1.016.566.985,00	11	1.075.265.362,00	11,5	1.087.554.109,00	5.02.0.00.0.00.38.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					8.947.637.591,00		9.891.211.448,00		10.075.905.035,00		10.461.215.685,00		10.545.527.619,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.575.826.691,00		7.982.284.171,00		8.121.745.031,00		8.327.066.223,00		8.368.791.271,00	
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	70	73	75	7.575.826.691,00	76	7.982.284.171,00	78	8.121.745.031,00	79	8.327.066.223,00	80	8.368.791.271,00	5.03.5.04.0.00.24.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.371.810.900,00		1.908.927.277,00		1.954.160.004,00		2.134.149.462,00		2.176.736.348,00	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	80	82	84	752.036.800,00	85	756.728.477,00	87	775.889.759,00	89	853.738.030,00	90	871.570.866,00	5.03.5.04.0.00.24.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	80	80	83	149.421.600,00	84	220.421.600,00	84	230.935.892,00	85	301.030.017,00	85	316.399.383,00	5.03.5.04.0.00.24.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
meningkatnya pengembangan kompetensi asn	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	80	80	83	164.507.800,00	84	173.910.500,00	84	178.210.500,00	85	176.710.500,00	85	178.410.500,00	5.03.5.04.0.00.24.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	80	80	83	305.844.700,00	84	757.866.700,00	84	769.123.853,00	85	802.670.915,00	85	810.355.599,00	5.03.5.04.0.00.24.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.827.922.000,00		1.884.348.143,00		1.935.165.748,00		2.145.408.639,00		2.192.212.946,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.827.922.000,00		1.884.348.143,00		1.935.165.748,00		2.145.408.639,00		2.192.212.946,00	
Meningkatkan Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar,Kader,Manajerial, dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	70	73	75	2.827.922.000,00	76	1.884.348.143,00	78	1.935.165.748,00	79	2.145.408.639,00	80	2.192.212.946,00	5.03.5.04.0.00.24.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.337.471.890,00		1.092.000.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.010.000.000,00	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.337.471.890,00		1.092.000.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.010.000.000,00	
Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Riset dalam penyelesaian permasalahan daerah (%)	-	-	60,00	1.337.471.890,00	65,00	1.092.000.000,00	70,00	1.000.000.000,00	75,00	1.100.000.000,00	80,00	1.010.000.000,00	5.01.5.05.0.00.22.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase Inovasi yang dimanfaatkan (%)	66,67	70,00	75,00		77,00		79,00		81,00		83,00		5.01.5.05.0.00.22.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					25.381.786.616,00		22.843.697.957,00		23.300.480.116,00		24.465.504.122,00		24.710.159.163,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.585.670.616,00		18.962.569.957,00		19.076.682.916,00		19.984.521.067,00		19.980.159.163,00	
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	93	93	93	21.585.670.616,00	93	18.962.569.957,00	94	19.076.682.916,00	94	19.984.521.067,00	95	19.980.159.163,00	6.01.0.00.0.00.26.0000 - INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.480.216.000,00		2.501.128.000,00		2.693.297.200,00		2.811.033.055,00		2.926.557.500,00	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	100	100	100	2.480.216.000,00	100	2.501.128.000,00	100	2.693.297.200,00	100	2.811.033.055,00	100	2.926.557.500,00	6.01.0.00.0.00.26.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.315.900.000,00		1.380.000.000,00		1.530.500.000,00		1.669.950.000,00		1.803.442.500,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan (%)	100	100	100	1.315.900.000,00	100	1.380.000.000,00	100	1.530.500.000,00	100	1.669.950.000,00	100	1.803.442.500,00	6.01.0.00.0.00.26.0000 - INSPEKTORAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					137.801.703.125,00		137.801.703.125,00		140.557.737.188,00		147.585.624.047,00		149.061.480.288,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					93.760.014.378,00		93.308.952.392,90		94.738.696.667,00		101.122.222.061,20		102.866.925.288,25	
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (poin)	95	96	100	110.946.430,00	100	110.946.430,00	100	114.274.823,00	100	117.703.068,00	100	121.234.159,00	7.01.0.00.0.00.31.0001 - KELURAHAN WALANTAKA
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (poin)	60	70	80	108.313.359,00	80	108.313.359,00	80	111.562.760,00	80	114.909.643,00	80	118.356.932,00	7.01.0.00.0.00.31.0002 - KELURAHAN CIGOONG
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (poin)	96	100	100	104.210.800,00	100	104.210.800,00	100	107.337.124,00	100	110.557.238,00	100	113.873.955,00	7.01.0.00.0.00.31.0003 - KELURAHAN NYAPAH
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (poin)	95	96	97	108.271.230,00	97	108.271.230,00	97	111.519.367,00	97	114.864.948,00	97	118.310.896,00	7.01.0.00.0.00.31.0004 - KELURAHAN PANGAMPELAN
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (poin)	95	96	97	108.939.469,00	97	108.939.469,00	97	112.207.653,00	97	115.573.883,00	97	119.041.099,00	7.01.0.00.0.00.31.0005 - KELURAHAN KIARA
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (poin)	95	96	97	118.027.116,00	97	118.027.116,00	97	121.567.929,00	97	125.214.967,00	97	128.971.416,00	7.01.0.00.0.00.31.0006 - KELURAHAN PAGER AGUNG
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (poin)	95	96	97	107.197.630,00	97	107.197.630,00	97	110.413.559,00	97	113.725.966,00	97	117.137.745,00	7.01.0.00.0.00.31.0007 - KELURAHAN KALODRAN
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (poin)	95	96	97	108.306.430,00	97	108.306.430,00	97	111.555.623,00	97	114.902.292,00	97	118.349.360,00	7.01.0.00.0.00.31.0008 - KELURAHAN KEPUREN
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (poin)	95	96	97	109.810.570,00	97	109.810.570,00	97	113.104.887,00	97	116.498.034,00	97	119.992.975,00	7.01.0.00.0.00.31.0009 - 009KELURAHAN TERITIH
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (poin)	95	96	97	108.624.065,00	97	108.624.065,00	97	111.882.787,00	97	115.239.271,00	97	118.696.449,00	7.01.0.00.0.00.31.0010 - KELURAHAN PABUARAN
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (poin)	95	96	97	104.451.810,00	97	104.451.810,00	97	107.585.364,00	97	110.812.925,00	97	114.137.313,00	7.01.0.00.0.00.31.0011 - KELURAHAN PASULUHAN
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (poin)	95	96	97	109.602.472,00	97	109.602.472,00	97	112.890.546,00	97	116.277.263,00	97	119.765.580,00	7.01.0.00.0.00.31.0012 - KELURAHAN TEGALSARI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (poin)	95	96	97	118.339.970,00	97	118.339.970,00	97	121.890.169,00	97	125.546.874,00	97	129.313.280,00	7.01.0.00.0.00.31.0013 - KELURAHAN PIPITAN
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (poin)	95	96	97	112.051.144,00	97	112.051.144,00	97	115.412.678,00	97	118.875.059,00	97	122.441.310,00	7.01.0.00.0.00.31.0014 - KELURAHAN LEBAKWANGI
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	14.078.918.655,00	100	13.823.101.731,00	100	14.092.468.880,00	100	15.187.383.096,00	100	15.141.825.827,00	7.01.0.00.0.00.26.0000 - KECAMATAN SERANG
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	160.882.000,00	100	164.360.200,00	100	168.186.220,00	100	172.394.842,00	100	177.024.327,00	7.01.0.00.0.00.26.0001 - KELURAHAN SERANG
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	160.882.000,00	100	164.360.200,00	100	168.186.220,00	100	172.394.842,00	100	177.024.327,00	7.01.0.00.0.00.26.0002 - KELURAHAN CIPARE
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	160.882.000,00	100	164.360.200,00	100	168.186.220,00	100	172.394.842,00	100	177.024.327,00	7.01.0.00.0.00.26.0003 - KELURAHAN SUMUR PECUNG
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	160.882.000,00	100	164.360.200,00	100	168.186.220,00	100	172.394.842,00	100	177.024.327,00	7.01.0.00.0.00.26.0004 - KELURAHAN KOTA BARU
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	160.882.000,00	100	164.360.200,00	100	168.186.220,00	100	172.394.842,00	100	177.024.327,00	7.01.0.00.0.00.26.0005 - KELURAHAN LOPANG
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	160.882.000,00	100	164.360.200,00	100	168.186.220,00	100	172.394.842,00	100	177.024.327,00	7.01.0.00.0.00.26.0006 - KELURAHAN CIMUNCANG
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	160.882.000,00	100	164.360.200,00	100	168.186.220,00	100	172.394.842,00	100	177.024.327,00	7.01.0.00.0.00.26.0007 - KELURAHAN UNYUR
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	160.882.000,00	100	164.360.200,00	100	168.186.220,00	100	172.394.842,00	100	177.024.327,00	7.01.0.00.0.00.26.0008 - KELURAHAN SUKAWANA
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	160.882.000,00	100	164.360.200,00	100	168.186.220,00	100	172.394.842,00	100	177.024.327,00	7.01.0.00.0.00.26.0009 - KELURAHAN LONTARBARU
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	160.882.000,00	100	164.360.200,00	100	168.186.220,00	100	172.394.842,00	100	177.024.327,00	7.01.0.00.0.00.26.0010 - KELURAHAN KALIGANDU
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	160.882.000,00	100	164.360.200,00	100	168.186.220,00	100	172.394.842,00	100	177.024.327,00	7.01.0.00.0.00.26.0011 - KELURAHAN TERONDOL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	160.882.000,00	100	164.360.200,00	100	168.186.220,00	100	172.394.842,00	100	177.024.327,00	7.01.0.00.0.00.26.0012 - KELURAHAN KAGUNGAN
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	13.360.245.875,00	100	13.360.245.875,00	100	13.627.450.793,00	100	14.308.823.332,00	100	14.451.911.566,00	7.01.0.00.0.00.29.0000 - KECAMATAN KASEMEN
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	135.801.500,00	100	135.801.500,00	100	138.517.530,00	100	145.443.407,00	100	146.897.841,00	7.01.0.00.0.00.29.0001 - KELURAHAN KASEMEN
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	118.728.544,00	100	118.728.544,00	100	121.103.115,00	100	127.158.271,00	100	128.429.852,00	7.01.0.00.0.00.29.0002 - KELURAHAN MASJID PRIYAYI
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	146.057.700,00	100	146.057.700,00	100	148.978.854,00	100	156.427.797,00	100	157.992.075,00	7.01.0.00.0.00.29.0003 - KELURAHAN TERUMBU
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	131.445.000,00	100	131.445.000,00	100	134.073.900,00	100	140.777.595,00	100	142.185.371,00	7.01.0.00.0.00.29.0004 - KELURAHAN WARUNG JAUD
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	133.887.038,00	100	133.887.038,00	100	136.564.779,00	100	143.393.018,00	100	144.826.948,00	7.01.0.00.0.00.29.0005 - KELURAHAN BENDUNG
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	143.462.843,00	100	143.462.843,00	100	146.332.100,00	100	153.648.705,00	100	155.185.192,00	7.01.0.00.0.00.29.0006 - KELURAHAN BANTEN
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	141.678.900,00	100	141.678.900,00	100	144.512.478,00	100	151.738.102,00	100	153.255.483,00	7.01.0.00.0.00.29.0007 - KELURAHAN SAWAH LUHUR
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	136.423.400,00	100	136.423.400,00	100	139.151.868,00	100	146.109.461,00	100	147.570.556,00	7.01.0.00.0.00.29.0008 - KELURAHAN KILASAH
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	150.632.400,00	100	150.632.400,00	100	153.645.048,00	100	161.327.300,00	100	162.940.573,00	7.01.0.00.0.00.29.0009 - KELURAHAN KASUNYATAN
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	135.799.300,00	100	135.799.300,00	100	138.515.286,00	100	145.441.050,00	100	146.895.461,00	7.01.0.00.0.00.29.0010 - KELURAHAN MARGALUYU
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	12.598.331.058,00	100	12.711.383.608,00	100	12.976.402.818,00	100	13.731.285.378,00	100	13.705.311.348,00	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN CURUG
Meningkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	80	80	90	12.007.478.733,00	90	11.855.555.083,00	90	12.207.957.551,00	90	13.138.256.295,00	90	13.309.363.436,00	7.01.0.00.0.00.27.0000 - KECAMATAN CIPOCOK JAYA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	80	80	90	138.586.280,00	90	143.812.300,00	90	143.812.300,00	90	143.812.300,00	90	143.812.300,00	7.01.0.00.0.00.27.0001 - KELURAHAN CIPOCOK JAYA
Meningkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasaan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	80	80	90	126.490.000,00	90	126.490.000,00	90	126.490.000,00	90	126.490.000,00	90	126.490.000,00	7.01.0.00.0.00.27.0002 - KELURAHAN KARUNDANG
Meningkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasaan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	80	80	90	126.490.000,00	90	126.490.000,00	90	126.490.000,00	90	126.490.000,00	90	126.490.000,00	7.01.0.00.0.00.27.0003 - KELURAHAN PENANCANGAN
Meningkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	80	80	90	138.586.280,00	90	138.490.000,00	90	138.490.000,00	90	138.490.000,00	90	138.490.000,00	7.01.0.00.0.00.27.0004 - KELURAHAN BANJAR AGUNG
Meningkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	80	80	90	138.504.280,00	90	138.490.000,00	90	138.490.000,00	90	138.490.000,00	90	138.490.000,00	7.01.0.00.0.00.27.0005 - KELURAHAN BANJARSARI
Meningkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	80	80	90	138.566.280,00	90	138.490.000,00	90	138.490.000,00	90	138.490.000,00	90	138.490.000,00	7.01.0.00.0.00.27.0006 - KELURAHAN TEMBONG
Meningkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	80	80	90	126.586.280,00	90	126.490.000,00	90	126.490.000,00	90	126.490.000,00	90	126.490.000,00	7.01.0.00.0.00.27.0007 - KELURAHAN DALUNG
Meningkatnya Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	80	80	90	138.586.280,00	90	138.490.000,00	90	138.490.000,00	90	138.490.000,00	90	138.490.000,00	7.01.0.00.0.00.27.0008 - KELURAHAN GELAM
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariata	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	122.221.040,00	100	126.081.000,00	100	137.489.100,00	100	150.038.010,00	100	163.841.811,00	7.01.0.00.0.00.32.0001 - KELURAHAN CURUG
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	15.354.413.891,00	100	14.955.841.926,00	100	15.799.615.060,00	100	17.365.339.202,00	100	18.641.792.952,15	7.01.0.00.0.00.30.0000 - KECAMATAN TAKTAKAN
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	167.631.078,50	100	159.367.484,00	100	86.660.000,00	100	88.160.000,00	100	85.160.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0001 - KELURAHAN TAKTAKAN
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	146.434.080,60	100	153.031.169,00	100	87.611.357,00	100	88.806.492,00	100	90.121.141,20	7.01.0.00.0.00.30.0002 - KELURAHAN SAYAR
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	149.227.895,20	100	156.609.363,00	100	87.893.550,00	100	90.426.905,00	100	87.426.905,00	7.01.0.00.0.00.30.0003 - KELURAHAN PANCUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	162.014.386,10	100	240.957.366,00	100	92.963.010,00	100	96.553.311,00	100	93.003.311,00	7.01.0.00.0.00.30.0004 - KELURAHAN KURANJI
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	156.787.174,40	100	167.996.891,84	100	88.429.316,00	100	91.566.247,00	100	91.566.247,00	7.01.0.00.0.00.30.0005 - KELURAHAN KALANG ANYAR
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	152.022.415,10	100	166.724.656,61	100	86.164.262,00	100	88.524.688,20	100	85.524.688,20	7.01.0.00.0.00.30.0006 - KELURAHAN CILOWONG
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	141.643.790,20	100	149.357.409,22	100	85.602.580,00	100	87.906.838,00	100	84.906.838,00	7.01.0.00.0.00.30.0007 - KELURAHAN PANGGUNG JATI
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	178.092.130,00	100	187.755.273,50	100	96.822.910,00	100	100.249.201,00	100	100.249.201,00	7.01.0.00.0.00.30.0008 - KELURAHAN DRANGONG
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	157.990.758,10	100	165.120.873,91	100	84.008.042,00	100	86.152.846,20	100	86.152.846,00	7.01.0.00.0.00.30.0009 - KELURAHAN UMBUL TENGAH
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	164.968.810,10	100	180.965.691,11	100	95.638.320,00	100	98.946.152,10	100	98.946.152,00	7.01.0.00.0.00.30.0010 - KELURAHAN SEPANG
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	141.138.116,40	100	148.050.168,04	100	79.538.269,00	100	84.945.000,00	100	84.945.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0011 - KELURAHAN LIALANG
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	144.064.449,70	100	158.470.894,67	100	79.922.345,00	100	83.708.580,70	100	83.708.580,70	7.01.0.00.0.00.30.0012 - KELURAHAN TAMAN BARU
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	128.772.179,60	100	131.545.557,00	100	73.065.000,00	100	76.165.500,00	100	76.165.500,00	7.01.0.00.0.00.30.0013 - KELURAHAN CIBENDUNG
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	90	95	100	17.200.781.472,00	100	17.200.781.472,00	100	17.460.511.029,00	100	18.507.165.890,00	100	18.513.399.360,00	7.01.0.00.0.00.31.0000 - KECAMATAN WALANTAKA
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	127.180.750,00	100	132.479.040,00	100	144.526.944,00	100	157.779.638,00	100	172.357.602,00	7.01.0.00.0.00.32.0002 - KELURAHAN TINGGAR
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	128.630.500,00	100	133.073.040,00	100	145.180.344,00	100	158.498.378,00	100	173.148.216,00	7.01.0.00.0.00.32.0003 - KELURAHAN KAMANISAN
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	124.475.400,00	100	117.866.400,00	100	117.976.400,00	100	118.097.400,00	100	118.230.500,00	7.01.0.00.0.00.32.0004 - KELURAHAN CIPETE

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	127.666.400,00	100	121.566.400,00	100	122.226.400,00	100	122.952.400,00	100	123.751.000,00	7.01.0.00.0.00.32.0005 - KELURAHAN CILAKU
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	119.133.200,00	100	122.731.040,00	100	133.824.144,00	100	146.026.558,00	100	159.449.214,00	7.01.0.00.0.00.32.0006 - KELURAHAN PANCALAKSANA
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	125.387.300,00	100	129.683.040,00	100	141.471.344,00	100	154.438.478,00	100	168.702.326,00	7.01.0.00.0.00.32.0007 - KELURAHAN SUKAWANA
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	124.400.600,00	100	128.143.040,00	100	139.777.344,00	100	152.575.078,00	100	166.652.586,00	7.01.0.00.0.00.32.0008 - KELURAHAN SUKALAKSANA
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	129.862.840,00	100	133.319.040,00	100	144.970.944,00	100	157.788.038,00	100	171.886.842,00	7.01.0.00.0.00.32.0009 - KELURAHAN CURUGMANIS
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	100	100	100	126.110.600,00	100	130.574.040,00	100	142.451.444,00	100	155.516.588,00	100	170.088.247,00	7.01.0.00.0.00.32.0010 - KELURAHAN SUKAJAYA
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.399.059.575,00		1.487.824.725,00		1.578.086.810,00		1.620.747.064,00		1.565.458.521,00	
Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai SOP/SP/Ketentuan	Presentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai SOP/SP/Ketentuan (%)	70	70	70	287.000.000,00	70	315.700.000,00	70	347.270.000,00	70	381.997.000,00	70	420.196.700,00	7.01.0.00.0.00.26.0000 - KECAMATAN SERANG
Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai SOP/SP/Ketentuan	Presentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai SOP/SP/Ketentuan (%)	80	80	80	208.929.200,00	80	208.929.200,00	80	213.107.784,00	80	223.763.173,00	80	226.000.805,00	7.01.0.00.0.00.29.0000 - KECAMATAN KASEMEN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan pelimpahan kewenangan	Presentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai SOP/SP/Ketentuan (%)	100	100	100	137.228.000,00	100	140.089.400,00	100	143.093.870,00	100	146.248.564,00	100	149.560.991,00	7.01.0.00.0.00.27.0000 - KECAMATAN CIPOCOK JAYA
presentase pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai SOP/SP/Ketentuan	Presentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai SOP/SP/Ketentuan (%)	80	80	80	298.227.500,00	80	347.931.250,00	80	382.724.375,00	80	348.004.862,00	80	217.850.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0000 - KECAMATAN TAKTAKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
presentase pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai SOP/SP/Ketentuan	Presentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai SOP/SP/Ketentuan (%)	97	97	97	282.196.875,00	97	282.196.875,00	97	290.662.781,00	97	299.382.665,00	97	308.364.145,00	7.01.0.00.0.00.31.0000 - KECAMATAN WALANTAKA
presentase pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai SOP/SP/Ketentuan	Presentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai SOP/SP/Ketentuan (%)	100	100	100	185.478.000,00	100	192.978.000,00	100	201.228.000,00	100	221.350.800,00	100	243.485.880,00	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN CURUG
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					39.640.835.197,00		39.940.597.567,10		41.041.176.583,00		41.423.626.856,80		41.296.455.345,75	
Meningkatnya Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	91,88	91,88	91,88	255.000.000,00	91,88	280.500.000,00	91,88	308.550.000,00	91,88	339.405.000,00	91,88	373.345.500,00	7.01.0.00.0.00.26.0000 - KECAMATAN SERANG
Meningkatnya Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	100	100	100	148.250.000,00	100	148.250.000,00	100	151.215.000,00	100	158.775.750,00	100	160.363.508,00	7.01.0.00.0.00.29.0000 - KECAMATAN KASEMEN
Meningkatnya Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	783.753.600,00	80	783.753.600,00	80	799.428.672,00	80	839.400.106,00	80	847.794.107,00	7.01.0.00.0.00.29.0001 - KELURAHAN KASEMEN
Meningkatnya Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	543.253.600,00	80	543.253.600,00	80	554.118.672,00	80	581.824.605,00	80	587.642.852,00	7.01.0.00.0.00.29.0002 - KELURAHAN MASJID PRIYAYI
Meningkatnya Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	565.778.600,00	80	565.778.600,00	80	577.094.172,00	80	605.948.880,00	80	612.008.369,00	7.01.0.00.0.00.29.0003 - KELURAHAN TERUMBU
Meningkatnya Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	633.053.600,00	80	633.053.600,00	80	645.714.672,00	80	678.000.406,00	80	684.780.410,00	7.01.0.00.0.00.29.0004 - KELURAHAN WARUNG JAUD
Meningkatnya Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	485.753.600,00	80	485.753.600,00	80	495.468.672,00	80	520.242.105,00	80	525.444.527,00	7.01.0.00.0.00.29.0005 - KELURAHAN BENDUNG
Meningkatnya Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	726.603.600,00	80	726.603.600,00	80	741.135.672,00	80	778.192.456,00	80	785.974.380,00	7.01.0.00.0.00.29.0006 - KELURAHAN BANTEN
Meningkatnya Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	633.633.600,00	80	633.633.600,00	80	646.306.272,00	80	678.621.586,00	80	685.407.801,00	7.01.0.00.0.00.29.0007 - KELURAHAN SAWAH LUHUR
Meningkatnya Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	552.827.700,00	80	552.827.700,00	80	563.884.254,00	80	592.078.467,00	80	597.999.251,00	7.01.0.00.0.00.29.0008 - KELURAHAN KILASAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	478.096.100,00	80	478.096.100,00	80	487.658.022,00	80	512.040.923,00	80	517.161.332,00	7.01.0.00.0.00.29.0009 - KELURAHAN KASUNYATAN
Meningkatnya Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	420.103.600,00	80	420.103.600,00	80	428.505.672,00	80	449.930.956,00	80	454.430.265,00	7.01.0.00.0.00.29.0010 - KELURAHAN MARGALUYU
Meningkatnya Kelurahan Dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	91,88	91,88	91,88	1.276.275.865,00	91,88	1.286.193.452,00	91,88	1.297.102.797,00	91,88	1.309.103.076,00	91,88	1.322.303.384,00	7.01.0.00.0.00.26.0001 - KELURAHAN SERANG
Meningkatnya Kelurahan Dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	91,88	91,88	91,88	1.032.075.865,00	91,88	1.041.993.452,00	91,88	1.052.902.797,00	91,88	1.064.903.076,00	91,88	1.078.103.384,00	7.01.0.00.0.00.26.0002 - KELURAHAN CIPARE
Meningkatnya Kelurahan Dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	91,88	91,88	91,88	940.275.865,00	91,88	950.193.452,00	91,88	961.102.797,00	91,88	973.103.076,00	91,88	986.303.384,00	7.01.0.00.0.00.26.0003 - KELURAHAN SUMUR PECUNG
Meningkatnya Kelurahan Dalam Kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	91,88	91,88	91,88	417.075.865,00	91,88	426.993.452,00	91,88	437.902.797,00	91,88	449.903.076,00	91,88	463.103.384,00	7.01.0.00.0.00.26.0004 - KELURAHAN KOTA BARU
Meningkatnya Kelurahan Dalam Kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	91,88	91,88	91,88	756.075.865,00	91,88	765.993.452,00	91,88	776.902.797,00	91,88	788.903.076,00	91,88	802.103.384,00	7.01.0.00.0.00.26.0005 - KELURAHAN LOPANG
Meningkatnya Kelurahan Dalam Kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	91,88	91,88	91,88	1.060.875.865,00	91,88	1.070.793.452,00	91,88	1.081.702.797,00	91,88	1.093.703.076,00	91,88	1.106.903.384,00	7.01.0.00.0.00.26.0006 - KELURAHAN CIMUNCANG
Meningkatnya Kelurahan Dalam Kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	91,88	91,88	91,88	2.033.475.865,00	91,88	2.043.393.452,00	91,88	2.054.302.797,00	91,88	2.066.303.076,00	91,88	2.079.503.384,00	7.01.0.00.0.00.26.0007 - KELURAHAN UNYUR
Meningkatnya Kelurahan Dalam Kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	91,88	91,88	91,88	417.675.865,00	91,88	427.593.452,00	91,88	438.502.797,00	91,88	450.503.076,00	91,88	463.703.384,00	7.01.0.00.0.00.26.0008 - KELURAHAN SUKAWANA
Meningkatnya Kelurahan Dalam Kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	91,88	91,88	91,88	417.075.865,00	91,88	426.993.452,00	91,88	437.902.797,00	91,88	449.903.076,00	91,88	463.103.384,00	7.01.0.00.0.00.26.0009 - KELURAHAN LONTARBARU
Meningkatnya Kelurahan Dalam Kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	91,88	91,88	91,88	779.475.865,00	91,88	789.393.452,00	91,88	800.302.797,00	91,88	812.303.076,00	91,88	825.503.384,00	7.01.0.00.0.00.26.0010 - KELURAHAN KALIGANDU
Meningkatnya Kelurahan Dalam Kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	91,88	91,88	91,88	509.475.865,00	91,88	519.393.452,00	91,88	530.302.797,00	91,88	542.303.076,00	91,88	555.503.384,00	7.01.0.00.0.00.26.0011 - KELURAHAN TERONDOL
Meningkatnya Kelurahan Dalam Kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	91,88	91,88	91,88	703.275.865,00	91,88	713.193.452,00	91,88	724.102.797,00	91,88	736.103.076,00	91,88	749.303.384,00	7.01.0.00.0.00.26.0012 - KELURAHAN KAGUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	100	100	100	72.200.000,00	100	150.680.000,00	100	152.864.000,00	100	155.157.201,00	100	157.565.060,00	7.01.0.00.0.00.27.0000 - KECAMATAN CIPOCOK JAYA
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	100	100	100	697.433.850,00	100	704.775.050,00	100	704.775.050,00	100	704.775.050,00	100	704.775.050,00	7.01.0.00.0.00.27.0001 - KELURAHAN CIPOCOK JAYA
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	100	100	100	507.100.000,00	100	517.225.000,00	100	517.356.250,00	100	517.494.063,00	100	517.638.766,00	7.01.0.00.0.00.27.0002 - KELURAHAN KARUNDANG
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	100	100	100	696.600.000,00	100	696.825.000,00	100	696.956.250,00	100	697.094.063,00	100	697.238.766,00	7.01.0.00.0.00.27.0003 - KELURAHAN PENANCANGAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	100	100	100	764.033.850,00	100	764.876.250,00	100	765.140.063,00	100	765.417.066,00	100	765.707.919,00	7.01.0.00.0.00.27.0004 - KELURAHAN BANJAR AGUNG
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	100	100	100	973.550.050,00	100	984.225.000,00	100	984.356.250,00	100	984.494.063,00	100	984.638.766,00	7.01.0.00.0.00.27.0005 - KELURAHAN BANJARSARI
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	100	100	100	525.583.850,00	100	539.876.250,00	100	540.140.063,00	100	540.417.066,00	100	540.707.919,00	7.01.0.00.0.00.27.0006 - KELURAHAN TEMBONG
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	100	100	100	423.833.850,00	100	424.676.250,00	100	424.940.063,00	100	425.217.066,00	100	425.507.919,00	7.01.0.00.0.00.27.0007 - KELURAHAN DALUNG
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	100	100	100	592.433.850,00	100	593.276.250,00	100	593.540.063,00	100	593.817.066,00	100	594.107.919,00	7.01.0.00.0.00.27.0008 - KELURAHAN GELAM
Persentasi Kelurahan dalam kategori	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	65	70	80	470.257.571,00	80	470.257.571,00	80	484.365.298,00	80	498.896.257,00	80	513.863.145,00	7.01.0.00.0.00.31.0008 - KELURAHAN KEPUREN
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	100	100	100	549.517.630,00	100	539.525.000,00	100	593.477.500,00	100	188.660.250,00	100	189.026.275,00	7.01.0.00.0.00.30.0000 - KECAMATAN TAKTAKAN
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	535.472.110,00	80	535.595.416,00	80	525.000.000,00	80	519.750.000,00	80	527.000.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0001 - KELURAHAN TAKTAKAN
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	621.950.820,00	80	637.500.713,00	80	565.268.000,00	80	573.794.800,00	80	516.142.300,00	7.01.0.00.0.00.30.0002 - KELURAHAN SAYAR
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	416.547.786,00	80	426.221.229,00	80	448.267.000,00	80	455.043.700,00	80	430.428.200,00	7.01.0.00.0.00.30.0003 - KELURAHAN PANCUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	359.174.980,00	80	377.791.478,00	80	556.543.000,00	80	561.742.300,00	80	516.142.300,00	7.01.0.00.0.00.30.0004 - KELURAHAN KURANJI
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	466.435.510,00	80	493.285.718,50	80	460.910.000,00	80	466.491.000,00	80	399.391.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0005 - KELURAHAN KALANG ANYAR
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	536.633.980,00	80	564.837.878,00	80	570.843.000,00	80	576.042.300,00	80	516.142.300,00	7.01.0.00.0.00.30.0006 - KELURAHAN CILOWONG
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	579.777.740,00	80	594.587.053,20	80	654.345.918,00	80	714.483.509,80	80	659.363.509,75	7.01.0.00.0.00.30.0007 - KELURAHAN PANGGUNG JATI
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	819.058.400,00	80	840.632.080,00	80	858.660.000,00	80	864.791.000,00	80	808.541.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0008 - KELURAHAN DRANGONG
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	431.703.548,00	80	435.978.016,00	80	504.493.000,00	80	509.692.300,00	80	441.142.300,00	7.01.0.00.0.00.30.0009 - KELURAHAN UMBUL TENGAH
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	724.843.820,00	80	794.328.202,00	80	788.264.000,00	80	747.978.200,00	80	726.928.200,00	7.01.0.00.0.00.30.0010 - KELURAHAN SEPANG
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	467.749.120,00	80	469.475.720,00	80	550.072.292,00	80	551.572.292,00	80	514.578.375,00	7.01.0.00.0.00.30.0011 - KELURAHAN LIALANG
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	386.821.414,00	80	364.338.430,40	80	589.212.000,00	80	600.133.200,00	80	514.678.200,00	7.01.0.00.0.00.30.0012 - KELURAHAN TAMAN BARU
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	80	80	80	363.719.000,00	80	360.394.500,00	80	393.958.950,00	80	401.854.845,00	80	349.533.653,00	7.01.0.00.0.00.30.0013 - KELURAHAN CIBENDUNG
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	100	100	100	287.730.447,00	100	287.730.447,00	100	296.362.360,00	100	305.253.231,00	100	314.410.828,00	7.01.0.00.0.00.31.0000 - KECAMATAN WALANTAKA
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	65	70	80	299.257.571,00	80	299.257.571,00	80	308.235.298,00	80	317.482.357,00	80	327.006.828,00	7.01.0.00.0.00.31.0001 - KELURAHAN WALANTAKA
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	65	70	80	352.257.571,00	80	352.257.571,00	80	362.825.298,00	80	373.710.057,00	80	384.921.359,00	7.01.0.00.0.00.31.0002 - KELURAHAN CIGOONG
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	65	70	80	355.757.571,00	80	355.757.571,00	80	366.430.298,00	80	377.423.207,00	80	388.745.903,00	7.01.0.00.0.00.31.0003 - KELURAHAN NYAPAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	65	70	80	450.757.571,00	80	450.757.571,00	80	464.280.298,00	80	478.208.707,00	80	492.554.969,00	7.01.0.00.0.00.31.0004 - KELURAHAN PANGAMPELAN
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	65	70	80	500.648.573,00	80	500.648.573,00	80	515.668.030,00	80	531.138.071,00	80	547.072.213,00	7.01.0.00.0.00.31.0005 - KELURAHAN KIARA
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	65	70	80	520.257.571,00	80	520.257.571,00	80	535.865.299,00	80	551.941.257,00	80	568.499.495,00	7.01.0.00.0.00.31.0006 - KELURAHAN PAGER AGUNG
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	65	70	80	410.752.191,00	80	410.752.191,00	80	423.074.757,00	80	435.766.999,00	80	448.840.009,00	7.01.0.00.0.00.31.0007 - KELURAHAN KALODRAN
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	65	70	80	774.757.571,00	80	774.757.571,00	80	798.000.298,00	80	821.940.307,00	80	846.598.516,00	7.01.0.00.0.00.31.0009 - 009KELURAHAN TERITIH
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	65	70	80	305.807.571,00	80	305.807.571,00	80	314.981.798,00	80	324.431.252,00	80	334.164.189,00	7.01.0.00.0.00.31.0010 - KELURAHAN PABUARAN
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	65	70	80	370.632.093,00	80	370.632.093,00	80	381.751.056,00	80	393.203.588,00	80	404.999.695,00	7.01.0.00.0.00.31.0011 - KELURAHAN PASULUHAN
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	65	70	80	305.560.845,00	80	305.560.845,00	80	314.727.671,00	80	324.169.500,00	80	333.894.586,00	7.01.0.00.0.00.31.0012 - KELURAHAN TEGALSARI
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	65	70	80	473.257.571,00	80	473.257.571,00	80	487.455.298,00	80	502.078.957,00	80	517.141.326,00	7.01.0.00.0.00.31.0013 - KELURAHAN PIPITAN
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	65	70	80	349.257.571,00	80	349.257.571,00	80	359.735.298,00	80	370.527.357,00	80	381.643.178,00	7.01.0.00.0.00.31.0014 - KELURAHAN LEBAKWANGI
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	85	85	85	415.000.000,00	85	265.000.000,00	85	265.000.000,00	85	291.500.000,00	85	320.650.000,00	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN CURUG
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	85	85	85	395.431.200,00	85	396.081.200,00	85	396.796.200,00	85	397.582.700,00	85	398.447.850,00	7.01.0.00.0.00.32.0001 - KELURAHAN CURUG
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	85	85	85	364.279.500,00	85	364.929.500,00	85	365.424.500,00	85	366.189.000,00	85	367.029.950,00	7.01.0.00.0.00.32.0002 - KELURAHAN TINGGAR
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	85	85	85	415.867.800,00	85	416.517.800,00	85	417.232.800,00	85	418.019.300,00	85	418.884.450,00	7.01.0.00.0.00.32.0003 - KELURAHAN KAMANISAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	85	85	85	320.048.800,00	85	320.698.800,00	85	321.413.800,00	85	322.200.300,00	85	323.065.450,00	7.01.0.00.0.00.32.0004 - KELURAHAN CIPETE
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	85	85	85	534.868.500,00	85	535.518.500,00	85	536.233.500,00	85	537.020.000,00	85	537.885.150,00	7.01.0.00.0.00.32.0005 - KELURAHAN CILAKU
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	85	85	85	449.446.300,00	85	450.096.300,00	85	450.811.300,00	85	451.597.800,00	85	452.342.951,00	7.01.0.00.0.00.32.0006 - KELURAHAN PANCALAKSANA
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	85	85	85	338.741.000,00	85	339.391.000,00	85	340.106.000,00	85	340.892.500,00	85	341.657.650,00	7.01.0.00.0.00.32.0007 - KELURAHAN SUKAWANA
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	85	85	85	349.548.800,00	85	350.198.800,00	85	350.913.800,00	85	351.700.300,00	85	352.465.450,00	7.01.0.00.0.00.32.0008 - KELURAHAN SUKALAKSANA
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	85	85	85	387.403.300,00	85	388.053.300,00	85	388.768.300,00	85	389.334.800,00	85	390.177.950,00	7.01.0.00.0.00.32.0009 - KELURAHAN CURUGMANIS
Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya	Persentasi Kelurahan dalam kategori Swakarya (%)	85	100	100	361.857.000,00	100	362.507.000,00	100	363.222.000,00	100	364.008.500,00	100	364.773.649,00	7.01.0.00.0.00.32.0010 - KELURAHAN SUKAJAYA
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					651.532.250,00		657.903.500,00		681.979.244,00		746.856.639,00		685.001.595,00	
Meningkatnya gangguan trantibum yang terselesaikan	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	106.910.000,00	100	106.910.000,00	100	109.048.200,00	100	114.500.610,00	100	115.645.616,00	7.01.0.00.0.00.29.0000 - KECAMATAN KASEMEN
Meningkatnya Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan Kecamatan Serang	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	145.000.000,00	100	145.000.000,00	100	145.000.000,00	100	145.000.000,00	100	145.000.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0000 - KECAMATAN SERANG
Meningkatnya Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan Kelurahan Cimuncang	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0006 - KELURAHAN CIMUNCANG
Meningkatnya Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan Kelurahan Cipare	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0002 - KELURAHAN CIPARE
Meningkatnya Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan Kelurahan Kagungan	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0012 - KELURAHAN KAGUNGAN
Meningkatnya Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan Kelurahan Kaligandu	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0010 - KELURAHAN KALIGANDU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan Kelurahan Kota Baru	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0004 - KELURAHAN KOTA BARU
Meningkatnya Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan Kelurahan Lontarbaru	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0009 - KELURAHAN LONTARBARU
Meningkatnya Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan Kelurahan Lopang	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0005 - KELURAHAN LOPANG
Meningkatnya Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan Kelurahan Serang	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0001 - KELURAHAN SERANG
Meningkatnya Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan Kelurahan Sukawana	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0008 - KELURAHAN SUKAWANA
Meningkatnya Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan Kelurahan Sumur Pecung	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0003 - KELURAHAN SUMUR PECUNG
Meningkatnya Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan Kelurahan Terondol	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0011 - KELURAHAN TERONDOL
Meningkatnya Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan Kelurahan Unyur	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	7.01.0.00.0.00.26.0007 - KELURAHAN UNYUR
Meningkatnya penyelesaian Gangguan Trantibum	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	25.000.000,00	100	26.250.000,00	100	27.562.500,00	100	28.940.625,00	100	30.387.656,00	7.01.0.00.0.00.27.0000 - KECAMATAN CIPOCOK JAYA
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	40.425.000,00	100	42.446.250,00	100	46.690.875,00	100	91.912.000,00	100	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0000 - KECAMATAN TAKTAKAN
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	8.250.000,00	100	8.250.000,00	100	8.250.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0002 - KELURAHAN SAYAR
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	8.250.000,00	100	8.946.856,00	100	8.946.856,00	7.01.0.00.0.00.30.0003 - KELURAHAN PANCUR
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	8.250.000,00	100	9.075.000,00	100	9.075.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0004 - KELURAHAN KURANJI
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	8.250.000,00	100	9.075.000,00	100	9.075.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0005 - KELURAHAN KALANG ANYAR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	8.250.000,00	100	9.075.000,00	100	9.075.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0006 - KELURAHAN CILOWONG
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	8.250.000,00	100	9.075.000,00	100	9.075.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0007 - KELURAHAN PANGGUNG JATI
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	8.250.000,00	100	9.075.000,00	100	9.075.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0008 - KELURAHAN DRANGONG
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	8.250.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0010 - KELURAHAN SEPANG
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	7.500.000,00	100	8.250.000,00	100	9.075.000,00	100	9.982.500,00	100	9.982.500,00	7.01.0.00.0.00.30.0011 - KELURAHAN LIALANG
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	7.500.000,00	100	8.250.000,00	100	9.075.000,00	100	9.982.500,00	100	9.982.500,00	7.01.0.00.0.00.30.0012 - KELURAHAN TAMAN BARU
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	7.500.000,00	100	6.600.000,00	100	8.415.000,00	100	7.986.000,00	100	3.500.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0013 - KELURAHAN CIBENDUNG
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0001 - KELURAHAN TAKTAKAN
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	7.500.000,00	100	7.500.000,00	100	8.250.000,00	100	9.075.000,00	100	9.075.000,00	7.01.0.00.0.00.30.0009 - KELURAHAN UMBUL TENGAH
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Curug	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	85	85	85	7.850.000,00	85	7.850.000,00	85	7.850.000,00	85	7.850.000,00	85	7.850.000,00	7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN CURUG
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Curug	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	85	85	85	2.500.000,00	85	2.750.000,00	85	3.025.000,00	85	3.327.500,00	85	3.660.250,00	7.01.0.00.0.00.32.0001 - KELURAHAN CURUG
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Curug	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	85	85	85	2.500.000,00	85	2.750.000,00	85	3.025.000,00	85	3.327.500,00	85	3.660.250,00	7.01.0.00.0.00.32.0002 - KELURAHAN TINGGAR
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Curug	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	85	85	85	2.500.000,00	85	2.750.000,00	85	3.025.000,00	85	3.327.500,00	85	3.660.250,00	7.01.0.00.0.00.32.0003 - KELURAHAN KAMANISAN
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Curug	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	2.500.000,00	100	2.750.000,00	100	3.025.000,00	100	3.327.500,00	100	3.660.250,00	7.01.0.00.0.00.32.0004 - KELURAHAN CIPETE

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Curug	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	85	85	85	2.500.000,00	85	2.750.000,00	85	3.025.000,00	85	3.327.500,00	85	3.660.250,00	7.01.0.00.0.00.32.0005 - KELURAHAN CILAKU
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Curug	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	85	85	85	2.500.000,00	85	2.750.000,00	85	3.025.000,00	85	3.327.500,00	85	3.660.250,00	7.01.0.00.0.00.32.0006 - KELURAHAN PANCALAKSANA
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Curug	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	85	85	85	2.500.000,00	85	2.750.000,00	85	3.025.000,00	85	3.327.503,00	85	3.660.252,00	7.01.0.00.0.00.32.0007 - KELURAHAN SUKAWANA
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Curug	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	85	85	85	2.500.000,00	85	2.750.000,00	85	3.025.000,00	85	3.327.500,00	85	3.660.250,00	7.01.0.00.0.00.32.0008 - KELURAHAN SUKALAKSANA
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Curug	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	85	85	85	2.500.000,00	85	2.750.000,00	85	3.025.000,00	85	3.327.500,00	85	3.660.250,00	7.01.0.00.0.00.32.0010 - KELURAHAN SUKAJAYA
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Curug(Dengan Satuan:%)	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	85	85	85	2.500.000,00	85	2.750.000,00	85	3.025.000,00	85	3.327.500,00	85	3.660.250,00	7.01.0.00.0.00.32.0009 - KELURAHAN CURUGMANIS
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan walantaka	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.01.0.00.0.00.31.0001 - KELURAHAN WALANTAKA
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan walantaka	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.01.0.00.0.00.31.0004 - KELURAHAN PANGAMPELAN
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan walantaka	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	0		0		0		0		0		7.01.0.00.0.00.31.0006 - KELURAHAN PAGER AGUNG
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Walantaka	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	100	100	100	113.847.250,00	100	113.847.250,00	100	117.262.669,00	100	120.780.545,00	100	124.403.965,00	7.01.0.00.0.00.31.0000 - KECAMATAN WALANTAKA
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Walantaka	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	0		0		0		0		0		7.01.0.00.0.00.31.0005 - KELURAHAN KIARA
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Walantaka	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.01.0.00.0.00.31.0007 - KELURAHAN KALODRAN
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Walantaka	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	0		0		0		0		0		7.01.0.00.0.00.31.0008 - KELURAHAN KEPUREN
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Walantaka	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.01.0.00.0.00.31.0010 - KELURAHAN PABUARAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Walantaka	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	0		0		0		0		0		7.01.0.00.0.00.31.001 1 - KELURAHAN PASULUHAN
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Walantaka	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.01.0.00.0.00.31.001 2 - KELURAHAN TEGALSARI
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Walantaka	Presentase Gangguan Trantibum Yang Terselesaikan (%)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.01.0.00.0.00.31.001 3 - KELURAHAN PIPITAN
presentase gangguan trantibum yang terselesaikan kecamatan Walantaka														7.01.0.00.0.00.31.001 4 - KELURAHAN LEBAKWANGI
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2.350.261.725,00		2.406.424.940,00		2.517.797.884,00		2.672.171.426,00		2.647.639.538,00	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan (%)	70	70	70	512.405.000,00	70	512.405.000,00	70	522.653.099,00	70	548.785.754,00	70	554.273.613,00	7.01.0.00.0.00.29.000 0 - KECAMATAN KASEMEN
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan (%)	70	70	100	408.674.800,00	100	449.542.280,00	100	494.496.508,00	100	543.946.159,00	100	598.340.775,00	7.01.0.00.0.00.26.000 0 - KECAMATAN SERANG
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan (%)	100	100	100	386.000.000,00	100	405.299.880,00	100	422.564.874,00	100	446.843.117,00	100	469.185.274,00	7.01.0.00.0.00.27.000 0 - KECAMATAN CIPOCOK JAYA
presentase penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan (%)	70	70	70	312.504.145,00	70	308.500.000,00	70	339.350.000,00	70	339.350.000,00	70	173.210.000,00	7.01.0.00.0.00.30.000 0 - KECAMATAN TAKTAKAN
presentase penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan (%)	96	97	97	268.520.780,00	97	268.520.780,00	97	276.576.403,00	97	284.873.696,00	97	293.419.906,00	7.01.0.00.0.00.31.000 0 - KECAMATAN WALANTAKA
presentase penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan (%)	90	90	90	462.157.000,00	90	462.157.000,00	90	462.157.000,00	90	508.372.700,00	90	559.209.970,00	7.01.0.00.0.00.32.000 0 - KECAMATAN CURUG
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					9.986.437.770,00		9.437.793.993,00		9.626.549.873,00		10.107.877.367,00		10.208.956.140,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.173.937.770,00		5.131.700.770,00		5.138.147.270,00		5.173.937.770,00		5.173.937.770,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelayanan pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Angka)	90,83	91,55	92,30	5.173.937.770,00	93,65	5.131.700.770,00	94,40	5.138.147.270,00	95,35	5.173.937.770,00	96,65	5.173.937.770,00	8.01.0.00.0.00.39.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					2.387.983.500,00		2.287.983.500,00		2.287.983.500,00		2.387.983.500,00		2.437.983.500,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	90,25	91,55	92,35	2.387.983.500,00	93,40	2.287.983.500,00	94,55	2.287.983.500,00	95,65	2.387.983.500,00	96,70	2.437.983.500,00	8.01.0.00.0.00.39.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					313.239.500,00		250.598.500,00		355.222.103,00		434.679.097,00		485.757.870,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	94,45	95	95,55	313.239.500,00	96	250.598.500,00	96,65	355.222.103,00	97	434.679.097,00	98	485.757.870,00	8.01.0.00.0.00.39.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					274.452.000,00		234.266.223,00		274.452.000,00		274.452.000,00		274.452.000,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	92	92,56	93	274.452.000,00	93,62	234.266.223,00	94	274.452.000,00	94,75	274.452.000,00	95	274.452.000,00	8.01.0.00.0.00.39.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					237.800.000,00		200.300.000,00		237.800.000,00		237.800.000,00		237.800.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	91	92	93	237.800.000,00	94	200.300.000,00	95	237.800.000,00	96	237.800.000,00	97	237.800.000,00	8.01.0.00.0.00.39.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.599.025.000,00		1.332.945.000,00		1.332.945.000,00		1.599.025.000,00		1.599.025.000,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	83,75	85,56	86,68	1.599.025.000,00	87,76	1.332.945.000,00	88,86	1.332.945.000,00	89,66	1.599.025.000,00	90,80	1.599.025.000,00	8.01.0.00.0.00.39.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					1531056459251.00		1308686576798.00		1387654958599.00		1455826685654.00		1473553626845.00	

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.2.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terbagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kota Serang tahun 2025-2029.

Tabel IV.2
Indikator Kinerja Utama
Kota Serang Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,34	5,73	6,15	6,58	7,00	7,42	
2.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Angka	72,47	72,84	73,22	73,59	73,96	74,33	
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	76,42	77,26	78,10	78,94	79,78	80,62	
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	77,31	77,73	78,15	78,57	79,41	80,25	
5.	Tingkat Kemiskinan	%	5,60	5,50	5,35	5,14	4,61	4,30	
6.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	5,56	5,57	5,58	5,59	5,60	5,61	
7.	Indeks kesejahteraan Sosial	%	56,27	57,17	58,17	59,27	59,85	60,35	
8.	Penurunan intensitas emisi GRK	%	18,45	19,04	19,58	20,06	20,47	20,86	
9.	Tingkat kedalaman kemiskinan	Angka	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	
10.	Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah	%	76,83	77,21	77,60	77,99	78,38	78,77	
11.	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa	%	70,00	70,10	70,20	70,30	70,40	70,50	
12.	Indeks Risiko Bencana	Angka	126,89	126,25	125,60	124,96	124,31	123,63	
13.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	51,56	51,66	51,81	51,95	52,05	52,20	
14.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,00	6,67	6,63	6,59	6,55	6,51	
15.	Indeks Pelayanan Publik.	Angka	4,04	4,09	4,13	4,18	4,23	4,28	
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	64,53	64,74	64,96	65,17	65,38	65,59	
17.	Nilai SAKIP	Angka	63,79	65,01	66,23	67,44	68,66	69,88	
18.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	65,70	66,00	66,30	66,60	66,90	67,20	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
19.	Indeks Sistem Merit	Angka	267	283	299	315	332	350	
20.	Indeks Integritas Nasional	Angka	65,40	65,94	66,47	67,01	67,55	68,54	
21.	Indeks Pendidikan	Angka	67,24	68,11	68,97	69,83	70,69	71,55	
22.	Indeks Kesehatan	Angka	85,72	86,03	86,35	86,66	86,97	87,28	
23.	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,74	93,90	94,05	94,21	94,36	94,52	
24.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	78,14	79,46	80,78	82,11	83,43	84,75	
25.	Rasio Gini	Angka	0,323	0,321	0,319	0,317	0,314	0,311	
26.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	6,55	6,60	6,65	6,70	6,75	6,80	
27.	Kontribusi PDRB Kota Serang terhadap Provinsi Banten (%)	%	5,11	5,23	5,35	5,47	5,59	5,71	
28.	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	57,30	57,31	57,32	57,33	57,34	57,35	
29.	PDRB per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	61,67	67,50	73,34	79,17	85,00	90,83	

B. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Serang diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IV.3
Indikator Kinerja Daerah
Kota Serang Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	1.076,86	1.087,63	1.098,50	1.109,49	1.120,58	1.131,79	1.143,11	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	2,18	2,10	2,05	2,00	1,98	1,95	1,90	
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,30	2,51	2,40	2,29	2,18	2,07	1,96	
4	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	71,42	73,87	75,10	76,32	77,55	78,77	80,00	
5	Air yang diproduksi	Meter kubik	2.270.592	6.158.592	6.508.512	6.858.432	7.208.352	7.558.272	7.908.192	
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	54,19	64,53	64,74	64,96	65,17	65,38	65,59	
7	Indeks Risiko Bencana	Angka	127,57	126,89	126,25	125,6	124,96	124,31	123,63	
8	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	10,11	27	29,15	31,3	33,45	35,6	37,75	
10	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	%	8,22	7,6	7,11	6,57	6,11	5,51	5,27	
11	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	3,00	6,00	6,75	7,50	8,25	9,00	9,75	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	36,49	39,31	42,11	46,91	51,71	57,51	65,31	
2	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	33,22	35,31	37,51	39,71	41,91	43,11	45,31	
3	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Angka	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	Angka	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,31	75,72	76,22	76,73	77,23	77,74	78,24	
6	Rasio Gini	Angka	0,324	0,322	0,320	0,318	0,316	0,314	0,312	
7	Tingkat Kemiskinan	(%)	5,65	5,55	5,50	5,31	5,03	4,75	4,48	
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	2,20	3,00	3,80	4,60	5,40	6,20	7,00	
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	153	139	131	124	116	108	108	
10	PDRB per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	58,49	61,67	67,50	73,34	79,17	85,00	90,83	
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	92	90	90	90	90	90	90	
12	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	76,9	77,31	77,73	78,15	78,57	79,41	80,25	
13	Indeks Kesehatan	Angka	85,09	85,72	86,03	86,35	86,66	86,97	87,28	
14	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	62,25	63,74	64,54	65,36	66,9	67,03	67,89	
15	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98,49	98,60	98,70	98,80	98,90	99,00	99,10	
16	Indeks pembangunan kualitas keluarga	Angka	65,39	65,70	66,00	66,30	66,60	66,90	67,20	
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	10,64	10,69	10,73	10,92	11,08	11,24	11,40	
18	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	33,22	35,33	37,26	39,18	41,11	43,03	45,96	
19	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,71	5,34	5,73	6,15	6,58	7,00	7,42	
20	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,83	13,42	13,55	13,68	13,81	13,94	14,07	
21	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,93	8,97	9,12	9,27	9,42	9,59	9,74	
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,543	0,52	0,513	0,505	0,498	0,490	0,483	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
23	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	22,90	19,46	18,19	17,01	15,90	14,87	14,54	
24	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,59	93,74	93,90	94,05	94,21	94,36	94,52	
25	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,12	7,00	6,67	6,63	6,59	6,55	6,51	
26	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	(%)	-	62,69	63,55	64,42	65,28	66,15	67,01	
27	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	12,09	15,52	20,96	28,29	38,19	51,56	72,87	
28	Indeks Pendidikan	Angka	65,41	67,24	68,11	68,97	69,83	70,69	71,55	
29	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	4,20	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	36,33	36,60	36,91	37,20	37,50	37,79	38,09	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,10	69,67	70,23	70,80	71,37	71,93	72,50	
3	Angka Ketergantungan	%	45,17	45,16	45,15	45,13	45,12	45,11	45,09	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	53,21	53,74	54,50	55,04	55,59	56,15	56,71	
5	Tingkat Inflasi	(%)	2,33	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	2-1	
6	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	0,545	1,62	1,82	2,02	2,22	2,42	2,62	
7	Return on Asset (ROA) BUMD	%	3,32	5,36	7,11	7,53	8,53	8,75	8,89	
8	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	75,76	76,52	76,59	76,67	76,75	76,82	76,90	
9	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	%	0,47	1,13	1,46	1,80	2,13	2,46	2,79	
10	Kontribusi PDRB Kota Serang terhadap Provinsi Banten	%	4,97	5,11	5,23	5,35	5,47	5,59	5,71	
11	Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah	%	76,50	76,80	77,20	77,60	77,90	78,30	78,70	
12	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Angka	69,04	72,47	72,84	73,22	73,59	73,96	74,33	
13	Rasio PDRB perdagangan dan Jasa	%	69,79	70,00	70,10	70,20	70,30	70,40	70,50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
14	PDRB sektor pertanian	%	5,11	5,13	5,16	5,18	5,21	5,23	5,26	
15	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	6,21	6,29	6,30	6,31	6,32	6,33	6,40	
16	Indeks Masyarakat Digital	Angka	45,33	46,20	46,75	47,29	47,84	48,38	48,93	
17	Indeks Sistem Merit	Angka	251	267	283	299	315	332	350	
18	Indeks Pemerintah Digital	Angka	1,15	1,15	1,20	1,20	1,25	1,25	1,30	
19	Indeks Inovasi Daerah	Angka	57,12	59,52	61,07	62,59	64,10	65,62	67,14	
20	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	6,52	6,55	6,60	6,65	6,70	6,75	6,80	
21	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,10	0,12	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	
22	Indeks Satu Data Indonesia (SDI)	Angka	18,45	55,00	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	
23	Rasio Kewirausahaan	%	0,64	0,68	0,83	0,98	1,12	1,27	1,42	
24	Wisatawan domestik	Orang	8.532.515	8.755.214	9.148.323	9.731.071	10.532.911	11.598.842	12.990.703	
25	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota	%	-	4,95	5,04	5,14	5,24	5,35	5,47	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Angka kriminalitas	per 100.000 penduduk	8,76	6,40	6,18	5,96	5,74	5,52	5,30	
2	Persentase penyelesaian pelanggaran perda atau perkada yang dilakukan melalui penindakan non yustisi dan yustisi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Kota/Sister City (Jumlah)	Angka	2	2	3	4	5	5	5	
4	Nilai SAKIP	Angka	62,57	63,79	65,01	66,23	67,44	68,66	69,88	
5	Nilai Kota Peduli HAM	Angka	85,10	85,95	86,81	87,68	88,56	89,44	90,34	
6	Penerapan Indentitas Kependudukan Digital (IKD)	%	-	7,39	10	15	20	25	30	
7	Indeks Reformasi Hukum	Angka	98,74	98,74	98,74	98,74	98,74	98,74	98,74	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	75,58	76,42	77,26	78,1	78,94	79,78	80,62	
9	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,99	4,04	4,09	4,13	4,18	4,23	4,28	
10	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	76,00	78,50	81,00	83,50	86,00	88,5	91,00	
11	Persentase Luasan Kawasan Permukiman yang Tertata	%	97,03	97,48	97,65	97,82	97,98	98,15	98,32	
12	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	71,82	72,32	72,81	73,28	73,73	74,17	74,59	
13	Indeks Integritas Nasional	Angka	64,86	65,4	65,94	66,47	67,01	67,55	68,54	
14	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	87,78	88,41	88,48	88,56	88,63	88,70	88,77	

Tabel IV.4
Indikator Kinerja Kunci
Kota Serang Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
2.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,67	0,56	0,45	0,34	0,22	0,11	0	
3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	2,07	1,73	1,38	1,04	0,69	0,35	0	
4.	Iklim Inklusivitas SD	Angka	56,22	58,72	61,22	63,72	66,22	68,72	71,22	
5.	Iklim Inklusivitas SMP	Angka	55,85	58,25	60,65	63,05	65,45	67,85	70,25	
6.	Iklim Keamanan SD	Angka	72,74	73,64	74,54	75,44	76,54	77,24	78,14	
7.	Iklim Keamanan SMP	Angka	69,44	70,94	72,44	73,94	75,44	76,94	78,44	
8.	Iklim Kebinekaan SD	Angka	68,95	69,95	70,95	71,95	72,95	73,95	74,95	
9.	Iklim Kebinekaan SMP	Angka	69,52	70,52	71,52	72,52	73,52	74,52	75,52	
10.	Rasio Murid Perkelas Rata Rata Pendidikan Dasar	Rasio	28:1	28:1	28:1	28:1	28:1	28:1	28:1	
11.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Rasio Murid Perkelas Rata rata Pendidikan Menengah Pertama	Rasio	16:1	30:1	30:1	32:1	32:1	32:1	32:1	
13.	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	66,10	70,08	74,07	78,05	82,03	86,02	90	
14.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	68,01	71,99	75,98	79,96	83,94	87,93	91,91	
15.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	74,98	95,23	96,36	97,40	98,30	98,86	98,86	
16.	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	66,94	73,23	76,27	79,31	82,34	85,31	88,28	
17.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	%	98,32	98,60	98,88	99,16	99,44	99,72	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
18.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	60,84	63,88	66,92	69,96	72,99	75,96	78,93	
19.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	97,73	100	100	100	100	100	100	
20.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99,63	100	100	100	100	100	100	
21.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,85	100	100	100	100	100	100	
22.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat	%	88,80	90,65	92,50	94,35	96,20	98,05	100	
23.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	90,92	98,88	99,15	99,39	99,60	99,73	99,73	
24.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
25.	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	87,5	87,5	87,5	87,5	100	100	100	
26.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	72	70	68	64	62	60	60	
27.	Insidensi Tuberkulosis	Kasus	4.093	3.181	2.744	2.377	2.116	1.917	1.765	
28.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	2,30	2,31	2,32	2,33	2,34	2,35	2,36	
29.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
30.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
31.	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100	
32.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	81,2	100	100	100	100	100	100	
33.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	
34.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	128	90	90	90	90	90	90	
35.	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	87	88	89	90	91	92	92	
36.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
37.	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	83,37	100	100	100	100	100	100	
38.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	87,93	100	100	100	100	100	100	
39.	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	90,99	100	100	100	100	100	100	
40.	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Usia 12-23 bulan	%	91,7	95	95,5	96	96,5	97	97,5	
41.	Persentase IRTP yang Memenuhi Syarat	%	85	85,5	86	86,5	87	87,5	88	
42.	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	%	91,51	100	100	100	100	100	100	
43.	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	%	94,64	100	100	100	100	100	100	
44.	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
45.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
46.	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	73,94	100	100	100	100	100	100	
47.	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	87	88	89	90	91	92	92	
48.	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	%	-	25	35	45	65	80	90	
49.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
50.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
51.	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) Pada Balita	%	8,5	8	7,5	7	6,5	5	5	
52.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Rasio	0,72	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88	
53.	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio	0,018	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	
54.	Rasio tenaga Para Medis Per Satuan Penduduk	Rasio	2,77	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	
55.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
56.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	70	70	71	72	73	74	75	
57.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
58.	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	96	97	98	98	99	99	99	
59.	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	64,72	70,6	76,48	82,36	88,24	94,12	100	
60.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
61.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	
62.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	95,07	95,89	96,71	97,54	98,36	99,18	100	
63.	Tingkat Kemantapan Jalan	%	83,77	85	87	89	91	93	95	
64.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	66,28	68,27	70,32	72,43	73,06	74,08	100	
65.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	86,79	89,39	92,08	94,84	97,68	98,68	100	
66.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
67.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	100	100	100	100	100	100	
68.	Persentase RTLH di Kawasan Kumuh dan Luar Kawasan Kumuh	%	11,63	11,60	11,53	11,45	11,38	11,31	11,24	
69.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	71,82	72,32	72,81	73,28	73,73	74,17	74,59	
70.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
71.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
72.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	11,96	11,75	11,54	11,33	11,12	10,91	10,70	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
73.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
74.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
75.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
76.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
77.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	75,86	100	100	100	100	100	100	
78.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	61,54	70,00	71,50	73,00	74,50	76,00	77,50	
79.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
80.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100	
81.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
82.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
83.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	79,94	80	80,5	81	81,5	82	82,5	
84.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3	
85.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	%	9,72	9,72	10,22	10,72	11,22	11,72	12,22	
86.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	-	-	100	100	100	100	100	
87.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
88.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	65,95	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00	68,50	
89.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
90.	Persentase ARG Daerah	%	14,23	15,19	16,15	17,12	18,06	19,04	20,00	
91.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
92.	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	203,73	100	100	100	100	100	100	
93.	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	90,9	91	91,1	91,2	91,3	91,4	91,5	
94.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	2,98	2,97	2,96	2,95	2,94	2,93	2,92	
95.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	114,74	100	100	100	100	100	100	
96.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
97.	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	100	100	100	100	100	100	
98.	Peningkatan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah	%	33,30	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
99.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	-	100	100	100	100	100	100	
100.	Kepuasan Terhadap Pelayanan Pertanahan	Angka	75	77	80	82	85	90	95	
101.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
102.	Indeks Kualitas Lahan	Angka	25,43	50,6	50,67	50,74	50,81	50,88	50,95	
103.	Indeks Kualitas Air	Angka	57,5	61,2	61,4	61,6	61,8	62	62,2	
104.	Indeks Kualitas Udara	Angka	66,67	75,16	75,46	75,76	76,06	76,36	76,66	
105.	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	%	100	100	100	100	100	100	100	
106.	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan/Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pmerintah Daerah Kab/Kota	%	83,33	83,53	83,73	83,93	84,13	84,33	84,53	
107.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	9,62	13	16	19	23	27	30	
108.	Persentase sampah yang tertangani	%	60,59	62	64	65	67	69	70	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
109.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
110.	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,07	99,12	99,17	99,22	99,27	99,32	99,37	
111.	Perekaman KTP elektronik	%	100	100	100	100	100	100	100	
112.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	64,00	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	
113.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	%	100	100	100	100	100	100	100	
114.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
115.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,00	6,84	6,67	6,49	6,30	6,10	5,89	
116.	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	15,20	13,80	12,70	11,80	11,00	10,40	10,80	
117.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	%	69,51	69,75	70,00	70,28	70,86	71,02	71,30	
118.	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	86,30	86,50	86,80	87,00	87,30	87,50	87,70	
119.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	1,86	1,68	1,63	1,59	1,54	1,49	1,44	
120.	Indeks Lansia Berdaya	Angka	54,60	55,00	55,40	55,70	56,10	56,50	57,00	
121.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	64,00	71,50	76,40	79,50	81,50	82,70	83,50	
122.	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Angka	85,70	86,80	87,80	88,70	89,50	90,30	90,50	
123.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	98,50	98,90	99,20	99,40	99,60	99,70	99,80	
124.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
125.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	53,33	53,33	60,00	66,67	66,67	73,33	80,00	
126.	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio	0,385	0,385	0,384	0,383	0,382	0,381	0,380	
127.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
128.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
129.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	36	40	45	50	55	60	65	
130.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
131.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
132.	Persentase usaha mikro potensi naik menjadi usaha kecil	%	10,75	16,13	21,51	26,88	32,26	37,63	43,01	
133.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	22,19	64,10	62,99	69,76	76,92	84,61	92,30	
134.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
135.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	30,03	30,08	30,16	30,24	30,32	30,40	30,48	
136.	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
137.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
138.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	4,69	4,70	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75	
139.	Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	3,56	3,57	3,58	3,59	3,60	3,61	3,62	
140.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	24	25	26	27	28	29	30	
141.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
142.	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
143.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
144.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
145.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	40,46	41	43	45	47	49	50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
146.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
147.	Terlestarikannya cagar budaya	%	100	100	100	100	100	100	100	
148.	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
149.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	62,97	63,00	63,50	64,00	64,50	65,00	65,50	
150.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	52,00	53,00	53,50	54,00	54,50	55,00	55,50	
151.	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
152.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Angka	39,2	51	61	71	75	80	85	
153.	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	74,58	74,64	74,75	74,84	74,89	75,08	75,38	
154.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
155.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.481	1.510	1.540	1.570	1.601	1.633	1.665	
156.	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	43,13	43,50	44	44,50	45	45,50	46	
157.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	5.276	5.381	5.488	5.597	5.708	5.822	5.938	
158.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	6.757	6.891	7.028	7.167	7.309	7.455	7.603	
159.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
160.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	24,20	24,21	24,22	24,23	24,24	24,25	24,26	
161.	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	%	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	
162.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	-51,43	10	16	22	28	34	40	
163.	Tingkat hunian akomodasi	%	21,13	21,14	21,15	21,16	21,17	21,18	21,19	
164.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	8,18	8,19	8,20	8,21	8,22	8,23	8,24	
165.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
166.	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	1	1	1	1	1	1	1	
167.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	58	56	54	52	50	48	46	
168.	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Ton/Ha	5,10	5,25	5,40	5,55	5,70	5,85	6,00	
169.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
170.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	51,74	59,78	60,96	65,11	67,01	70,16	72,13	
171.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	95,36	85,03	87,05	89,01	90,00	91,08	93,02	
172.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	54,85	62,03	69,71	70,20	71,36	78,01	79,00	
173.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
174.	persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIP	%	-	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50	75,00	
175.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	%	2,88	3,67	3,96	4,01	4,05	4,07	4,09	
176.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	
177.	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
178.	Tingkat Kematangan UKPBJ	%	100	100	100	100	100	100	100	
179.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	4	4	
180.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	84,51	87,09	89,67	92,26	94,84	97,42	100	
181.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	66,87	72,39	77,91	83,44	88,96	94,48	100	
182.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	48,79	52,33	55,86	59,40	62,93	66,47	70	
183.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	94,41	95,34	96,27	97,21	98,14	99,07	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
184.	5.01 - PERENCANAAN									
185.	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
186.	5.02 - KEUANGAN									
187.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
188.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,51	0,53	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	
189.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	85,2	87,67	90,13	92,60	95,07	97,53	100	
190.	Rasio PAD	%	19,62	21	22	25	27	28	30	
191.	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	3,64	3,42	3,15	2,97	2,82	2,63	2,42	
192.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100	100	
193.	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja totaldalam APBD	%	9,24	8,73	8,40	7,85	7,20	6,80	6,15	
194.	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	2,89	2,41	1,93	1,45	0,96	0,48	0,2	
195.	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	18,61	18,21	17,85	17,35	16,87	16,45	16,23	
196.	5.03 - KEPEGAWAIAN									
197.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	31,49	39,58	47,66	55,75	63,83	70,92	75,00	
198.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	46,24	51,87	57,49	63,12	68,75	70,37	75,00	
199.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	95,05	95,88	96,70	97,53	98,35	99,18	99,25	
200.	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
201.	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	47,00	51,00	58,00	62,00	65,00	72,00	76,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
202.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	50,00	51,96	52,08	54,67	55,44	55,99	56,41	
203.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
204.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	4	4	
205.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	4	4	
206.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
207.	Indeks Harmoni Indonesia Kota Serang	Angka	60	70	75	80	85	90	95	
208.	Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	%	95	95,6	97,5	98,6	98,8	99,5	99,6	
209.	Tingkat Partisipasi Politik	%	95	96	96,5	97	97,5	98	98,5	

Tabel IV.4
Indikator SPM
Kota Serang Tahun 2025-2030

NO	JENIS SPM	JENIS PELAYANAN DASAR PADA SPM KAB/KOTA	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET					
					Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendidikan	Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	20.605	20.714	21.244	21.572	22.050	22.465
		Pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Orang	111.850	112.550	113.325	113.975	114.365	114.792
		Pendidikan kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	7.315	7.208	7.096	6.956	6.581	6.120
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	12.996	13.646	14.328	15.044	15.796	16.586
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	12.939	13.586	14.265	14.978	15.727	16.513
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	12.399	13.019	13.670	14.354	15.072	15.826
		Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	49.888	52.382	55.001	57.751	60.639	63.670
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	122.971	115.475	116.475	117.475	118.475	119.475
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	522.736	477.698	493.436	493.436	493.436	493.436
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara Usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	59.096	52.161	65.154	68.412	71.833	75.425
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	26.604	26.604	26.604	26.604	26.604	26.604

NO	JENIS SPM	JENIS PELAYANAN DASAR PADA SPM KAB/KOTA	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET					
					Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	8.513	8.513	8.513	8.513	8.513	8.513
		Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	841	988	988	988	988	988
		Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkolosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	15.459	13.337	11.552	10.282	9.318	8.577
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien cy Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	17.942	18.150	18.350	18.600	18.850	19.100
3	Pekerjaan Umum	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari AKSES AMAN	Orang	23.236	23.817	24.412	25.023	25.648	26.289
		Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari AKSES LAYAK	Orang	540.292	553.799	567.644	581.835	596.381	611.291
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik AKSES AMAN	Orang	1.600	1.722	2.214	3.772	1.640	1.765
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik AKSES LAYAK	Orang	578.864	590.441	602.250	614.295	626.581	639.113
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Orang	236	228	228	228	228	228
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Orang	-					
5	Ketenteraman,	Pelayanan ketenteraman dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	Orang	160	170	180	190	200	200

NO	JENIS SPM	JENIS PELAYANAN DASAR PADA SPM KAB/KOTA	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET					
					Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	ketertiban umum	akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota							
		Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	106.583	206.010	259.245	290.397	297.916	305.342
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	300	350	350	350	400	400
		Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	2.441	2.563	2.691	2.825	2.966	3114
		Pelayanan penyelamatan kebakaran dan evakuasi korban	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	116	135	142	149	156	164
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	1.105	1.105	1.115	1.115	1.226	1.326
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	3.302	3.302	3.632	3.632	3.682	3.682
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	805	805	890	890	910	950
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Orang	75	200	220	220	240	250
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Orang	1.000	1.000	1.100	1.100	1.300	1.350

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari milestone pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang periode 2025-2045. RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Serang lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Banten dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kota Serang dengan Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kota Serang serta kerjasama dengan stakeholders pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih periode masa jabatan 2025-2030 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Bappeda.

5.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kota Serang Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar

lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kota Serang maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode berikutnya.
3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Serang serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RKPD Kota Serang dari Tahun 2026 sampai Tahun 2030. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Serang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Wali Kota berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh Perangkat Daerah/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Serang agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029, Bappeda Kota Serang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Renstra PD di lingkungan Pemerintah Kota Serang;
4. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kota Serang yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan Wali Kota yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bappeda Kota Serang dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka RPJMD dapat dirubah terhadap nomenklatur program, urusan dan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Bappeda Kota Serang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD melalui manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di Kota Serang;
8. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Wali Kota terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kota Serang serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota; dan

9. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka tidak perlu dilakukan penetapan perubahan RPJMD.
10. Pelaksanaan RPJMD Kota Serang Tahun 2025–2029 berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengamanatkan pentingnya pengarusutamaan pembangunan. Mengacu pada RPJMN 2025–2029, terdapat lima pengarusutamaan yang menjadi acuan, yaitu: a) gender dan inklusi sosial; b) tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); c) transformasi digital; d) pembangunan rendah karbon; dan e) pembangunan berketahanan iklim. Secara khusus, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi perhatian penting dalam penyusunan RPJMD Kota Serang, agar pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

WALI KOTA SERANG

BUDI RUSTANDI